



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
(L P P D)**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2007**

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2008**

KATA PENGANTAR

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (2) UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), dan Informasi LPPD kepada masyarakat.

LPPD Kabupaten Kotawaringin Barat yang disampaikan dalam kesempatan ini adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2007, yang sekaligus juga sebagai tahun ketiga untuk implementasi Visi Bupati Kotawaringin Barat periode 2005-2010 yakni "KOTAWARINGIN BARAT SEBAGAI DAERAH PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DENGAN MASYARAKATNYA YANG MAJU, AMAN, TERTIB, DAMAI, SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN ". dengan Misi sebagai berikut :

1. Melanjutkan dan menyempurnakan pembangunan daerah dengan mengedepankan stabilitas politik, supremasi hukum, demokratisasi, keadilan dan akuntabilitas.
2. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada mekanisme pasar yang berkeadilan, serta berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, kompetitif, mandiri, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Mengembangkan dan melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara demokratis, transparan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyusun dan melaksanakan program pembangunan berdasarkan skala prioritas secara demokratis, adil dan merata sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
5. Melakukan pelayanan publik secara bertanggung jawab dan benar untuk terselenggaranya proses pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna.

Visi dan Misi tersebut yang merupakan mandat dari seluruh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tentunya harus dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya, oleh karena itu LPPD disusun selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah juga sekaligus untuk memenuhi kewajiban administratif Kepala Daerah sebagaimana telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Pangkalan Bun, Maret 2008
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum pembentukan daerah	1
B. Gambaran Umum Daerah	1
1. Kondisi Geografis Daerah	1
2. Gambaran Umum Demografis	4
3. Kondisi Perekonomian Daerah;	
a. Potensi Unggulan Daerah	7
b. Pertumbuhan Ekonomi	21
BAB II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) ...	22
1. Visi dan Misi	22
2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	23
3. Prioritas Pembangunan Daerah	24
BAB III. URUSAN DESENTRALISASI	30
A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan	
1. Pendidikan	30
2. Kesehatan	48
3. Ketahanan Pangan	74
4. Pekerjaan Umum	80
5. Penataan Ruang	102
6. Perencanaan Pembangunan	105
7. Perhubungan	121
8. Lingkungan Hidup	136
9. Penanaman Modal	151
10. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	166
11. Ketenagakerjaan	183
12. Kependudukan dan Keluarga Berencana	194
13. Sosial	203
14. Kepemudaan dan Olah raga	205
15. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	207
16. Pemberdayaan masyarakat dan desa	209
17. Kebudayaan	221
18. Kepegawaian	234
19. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	250
20. Komunikasi dan Informatika	263

B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan	
1. Kelautan dan Perikanan	270
2. Pertanian dan Peternakan	285
3. Perkebunan	298
4. Kehutanan	310
5. Pariwisata	326
6. Industri Dan Perdagangan	339
7. Ketrasmigrasian	351
8. Energi dan Sumberdaya mineral	360
9. P a s a r	366
 BAB IV.TUGAS PEMBANTUAN	 381
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima dari Pemerintah	381
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan kepada Desa	440
 BAB V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	 450
A. Kerjasama Antar Daerah	450
B. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	450
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah	451
D. Pembinaan Batas Wilayah	465
E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	466
F. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	467
 BAB VI.PENUTUP	 470

LAMPIRAN :

- Lampiran 1 Laporan Realisasi APBD Tahun 2007.
- Lampiran 2 Penjelasan Pos-pos Keuangan APBD Tahun 2007.
- Lampiran 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan APBD Tahun 2007.
- Lampiran 4 Sumber Dana Belanja Menurut Bidang Keuangan, Unit Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun 2007.
- Lampiran 5 Neraca Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007.

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pembentukan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk berdasarkan UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9 tambahan lembaran Negara No. 72 Tahun 1959).

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah.

a. Luas Wilayah dan Letak Geografi

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km² terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Dua kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai.

Adapun Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.1.1. sebagai berikut :

Tabel 1.1.1.
Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase Luas Terhadap Kabupaten
1. Arut Selatan	2.400	22,31
2. Kumai	2.921	27,15
3. Kotawaringin Lama	1.218	11,32
4. Arut Utara	2.685	24,96
5. Pangkalan Lada	229	3,08
6. Pangkalan Banteng	1.306	10,21
KOTAWARINGIN BARAT	10.759	100

Letak Geografis Kabupaten Kotawaringin Barat berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara

b. Topografi

Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari :

-) Sebelah Utara adalah pegunungan dan macam tanah Lotosal tahan terhadap erosi.
-) Bagian Tengah terdiri dari tanah Podsolik Merah Kuning juga tahan terhadap erosi.
-) Sebelah Selatan terdiri dari danau dan rawa-rawa Alluvial / Organosal banyak mengandung air.

c. Geomorfologi

Keadaan geomorfologi/bentuk lahan terhadap ketinggian dari permukaan air laut dan prosentase tingkat kemiringan menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 1.1.2. sebagai berikut :

Tabel 1.1.2.

Tinggi dari permukaan laut dan persentase tingkat kemiringan menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat

Kecamatan	Tinggi dari Permukaan Laut (Meter)	Kemiringan (%)
1. Arut Selatan	0 – 500	0 – 40
2. Kumai	0 – 500	0 – 40
3. Kotawaringin Lama	7 – 100	0 – 2 dan 15 – 40
4. Arut Utara	25 – (>500)	2 – (>40)
5. Pangkalan Lada	0 – 500	0 – 40
6. Pangkalan Banteng	0 – 500	0 – 40

d. Iklim

Faktor pembentuk iklim adalah curah hujan, suhu udara, kecepatan angin dan kelembaban. Iklim daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau / kering dan musim hujan. Musim kemarau pada Bulan Juni sampai dengan September sedangkan musim penghujan bulan Oktober sampai dengan bulan Mei. Suhu maximum berkisar 31,0 °C – 33,8 °C dan suhu minimum antara 21,3 °C – 23,4 °C, kelembaban udara berkisar 85,58 %.

e. Sungai

Di daerah Kalimantan pada umumnya sungai sangat berperan penting di dalam kehidupan masyarakat selain tempat untuk mencari nafkah juga berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi. Demikian pula di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sungai berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat di dalam melakukan aktivitasnya, dimana nama-nama sungai di Kotawaringin Barat terdapat pada tabel 1.1.3. berikut ini :

Tabel. 1.1.3.

Nama-Nama Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang Yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-Rata	
				Kedalaman (M)	Lebar (M)
1.	Sungai Kumai	175,00	100,00	6,00	300,00
2.	Sungai Arut	250,00	190,00	4,00	100,00
3.	Sungai Lamandau	300,00	250,00	6,00	200,00

f. Jenis Lahan, Penggunaan Lahan dan Luas Lahan

Jenis lahan / tanah pada suatu kawasan wilayah sangat berpengaruh terhadap pengalokasian lahan yang dialokasikan penggunaannya oleh Pemerintah Daerah setempat dalam pengembangan pembangunan kawasan tersebut seperti pertanian, perkebunan, kehutanan dan perumahan. Adapun jenis tanah / lahan yang terdapat di wilayah Kecamatan Kumai meliputi : lotosal, kompleks podsolik merah kuning – podsol, laterik, alluvial, regosol podsol, organosal serta danau / rawa-rawa.

Demikian pula dalam penggunaan tanah yang merupakan indikator intensitas pemanfaatan ruang. Penggunaan tanah yang kompleks akan menunjukkan intensitas pemanfaatan ruang yang tinggi. Penggunaan tanah/lahan dapat pula digunakan sebagai bahan untuk melihat tingkat kerusakan lingkungan. Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat penggunaan tanah/lahan masih didominasi oleh corak alamiah yaitu berupa hutan. Penggunaan tanah/lahan didominasi oleh perkebunan rakyat, perkebunan besar, sawah, lading / tegalan, kebun campur, permukiman dan lain-lain.

2. Gambaran Umum Demografis

a. Kependudukan

Secara umum keadaan sosial budaya masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam proses pertumbuhan sejalan dengan dinamika pembangunan. Sampai dengan akhir Desember 2007 penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 221.023 jiwa dengan rincian sebagaimana tabel 1.2.1. berikut :

Tabel 1.2.1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Arut Selatan	44.852	43.861
2.	K u m a i	22.560	20.605
3.	Kotawaringin Lama	8.830	8.221
4.	Arut Utara	7.472	5.920
5.	Pangkalan Lada	13.772	12.654
6.	Pangkalan Banteng	18.367	13.909
	Jumlah	115.853	105.170

Pertambahan dan pertumbuhan penduduk biasanya lebih tinggi pada kawasan / daerah yang prasarana dan sarana dasar serta fasilitas umumnya cukup tersedia, selain daripada hal tersebut diatas pertumbuhan penduduk biasanya terpusat pada sentra-sentra tertentu seperti : tempat usaha / bekerja, pasar, pelabuhan, terminal dan sebagainya. Jumlah penduduk serta kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 1.2.2. dan tabel 1.2.3. :

Tabel 1.2.2.

Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Sex Ratio

Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk			Sex Ratio
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	
1. Arut Selatan	23,460	44.852	43.861	88.713	102,26
2. Kumai	8,907	22.560	20.605	43.165	109,49
3. Kotawaringin Lama	4,628	8.830	8.221	17.051	107,41
4. Arut Utara	3,276	7.472	5.920	13.392	126,22
5. Pangkalan Lada	6,830	13.772	12.654	26.426	108,84
6. Pangkalan Banteng	6,665	18.367	13.909	32.276	132,05
Tahun 2007	53,449	115.853	105.170	221,023	110,16
2006	53,449	106.230	98.676	204,906	107,66

Tabel 1.2.3.

Kepadatan Penduduk Km² dan Rata-rata Penduduk per Rumah Tangga

Kecamatan	Luas (Km ²)	Rata-Rata	
		Kepadatan Penduduk (Km ²)	Penduduk per Rumah Tangga
1. Arut Selatan	2.400	36,96	3,69
2. Kumai	2.921	14,78	4,64
3. Kotawaringin Lama	1.218	14,00	3,68
4. Arut Utara	2.685	4,99	3,71
5. Pangkalan Lada	229	115,40	3,79
6. Pangkalan Banteng	1.306	24,71	3,89
Tahun 2007	10.759	20,54	3.89
2006	10.759	19,05	3,83
2005	10.759	18,78	3,85
2004	10.759	18,44	3,91
2003	10.759	17,52	3,78

b. Ketenagakerjaan

Di Kabupaten Kotawaringin Barat lapangan pekerjaan formal yang tersedia belum mampu menyerap sepenuhnya tenaga kerja yang ada, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia masih didominasi dalam bidang informal seperti nelayan, petani, penambang tradisional dan sebagainya. Jumlah pencari kerja, lowongan dan penempatan tenaga kerja menurut tingkat pendidikan adalah sebagaimana tertera pada tabel 1.2.4. :

Tabel 1.2.4.
Jumlah Pencari Kerja, Lowongan Dan Penempatan Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Di Kab. Kotawaringin Barat

No.	Tingkatan Pendidikan	Pencaker		Lowongan		Penempatan	
		L	P	L	P	L	P
1.	SD	100	1	36	1	36	1
2.	SLTP / Sederajat	75	1	80	2	80	2
3.	SLTA / Sederajat	573	269	332	157	247	117
	D.I/D.II	92	132	5	12	5	12
4.	D III	93	153	10	18	10	18
5.	S1 dan S2	255	315	26	29	26	29
Jumlah		1.188	866	489	219	404	179

Mengenai tenaga kerja serta tingkat pendidikan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 1.2.5. berikut ini :

Tabel 1.2.5.
Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama

No.	Jenis Kegiatan Utama	Jumlah
1.	Bekerja	87.455
2.	Sekolah	42.597
3.	Mengurus Rumah Tangga	37.522
Tahun 2007		167.574
2006		161.610
2005		159.376
2004		156.457

3. Kondisi Perekonomian Daerah

a. Potensi Unggulan Daerah

1. Pertanian

Usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Kotawaringin Barat hanya sebagian kecil yang mungkin berorientasi pasar, karena sebagian besar dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Produksi tanaman pangan secara keseluruhan cenderung menurun seperti padi ladang. Namun Komoditi yang meningkat dalam empat tahun terakhir adalah padi sawah dan sayuran.

Peningkatan komoditi tersebut diduga banyaknya kebutuhan akan konsumsi di daerah seiring dengan sulitnya kebutuhan pangan di dalam negeri. Pengembangan usaha pertanian perlu terus ditingkatkan untuk mencapai Swasembada Pangan.

Pada dasarnya pembangunan sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura diarahkan pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani khususnya peran serta masyarakat pada umumnya melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pertanian. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya melalui perluasan areal pertanian sehingga produksi beras dapat ditingkatkan kualitasnya. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan pengolahan pasca panen dan sistem pemasarannya.

Selain itu diversifikasi kualitas padi dan palawija perlu dilakukan guna diperoleh produksi beras dan palawija yang diharapkan termasuk diversifikasi tanaman pangan yang sedang dikembangkan. Untuk itu perlu juga dilakukan peningkatan sistem irigasi, sehingga pengamanan produksi pertanian melalui pengendalian organisme pengganggu tanaman, antisipasi kekeringan dan banjir dapat dilakukan dengan baik.

Selain faktor fisik di atas, faktor sumber daya manusia juga perlu dikembangkan agar peningkatan peran dan fungsi lembaga penyuluh pertanian tidak hanya berjumlah sedikit tetapi juga perlu peningkatan jumlah dan kualitasnya. Untuk pasar ekspor, sektor ini masih belum dapat memenuhi keinginan nilai ekspor yang dibutuhkan, sehingga ruang lingkup pemasarannya hanya sebatas perdagangan regional saja.

2. Perkebunan

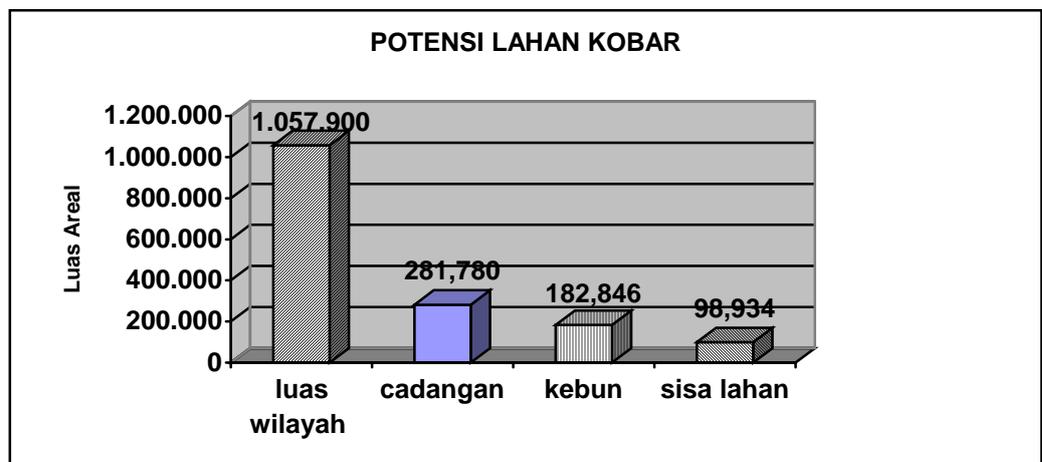
Pertumbuhan agronomis tanaman perkebunan di Pangkalan Bun relatif baik. Kendala yang dihadapi oleh petani adalah terutama berkaitan dengan sumber daya petani yang relatif rendah, masalah sosial ekonomi. Program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) belum menyentuh pada hal-hal yang mendasar berupa teknologi tepat guna, permodalan dan pemasaran.

Hal ini menyebabkan petani mengalami hambatan dalam hal meningkatkan mutu produksi perkebunan dan pemasaran yang meliputi :

- ~ Perbaikan produktifitas dan kualitas komoditi dalam rangka peningkatan pembangunan, perdagangan dan industri hasil perkebunan.
- ~ Pengembangan sistem perkebunan rakyat termasuk kepemilikan lahan dalam rangka menunjang ekspor komoditi non-migas.
- ~ Perluasan areal dengan diversifikasi komoditi.
- ~ Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan perkebunan rakyat untuk meningkatkan pendapatan.

Total potensi lahan perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 1.075.90 Ha, Cadangan Lahan Perkebunan seluas 281.780 Ha, telah dibuka untuk Perkebunan 182.846 Ha dan Sisa lahan Perkebunan seluas 98.934 Ha, dapat dilihat pada Gambar 1. berikut.

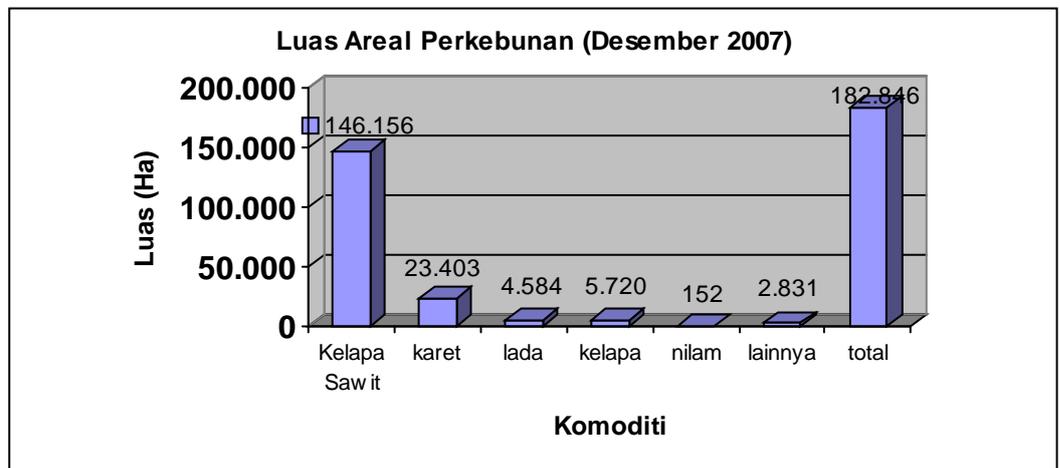
Gambar 1.
Potensi Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat



Ada 5 komoditi utama yang telah dikembangkan dan telah mengarahkan kepada kegiatan usaha Agribisnis oleh petani pekebun maupun oleh Perusahaan Perkebunan seperti: Kelapa Sawit, Karet, Lada dan lainnya. Luas perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Kabupaten Induk seluas 182.846 Ha. Komoditi yang dominan meliputi : (1) Kelapa Sawit seluas 146.156 Ha (79,93 %), (2) Karet seluas 23.403 Ha (12,80 %), (3) Lada seluas 4.584 Ha (2,51 %), (4) Kelapa 5.720 Ha (3,13%), (5) Nilam 152 Ha (0,08 %) dan Komoditi lainnya seluas 2.831 Ha (1,55 %), selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.

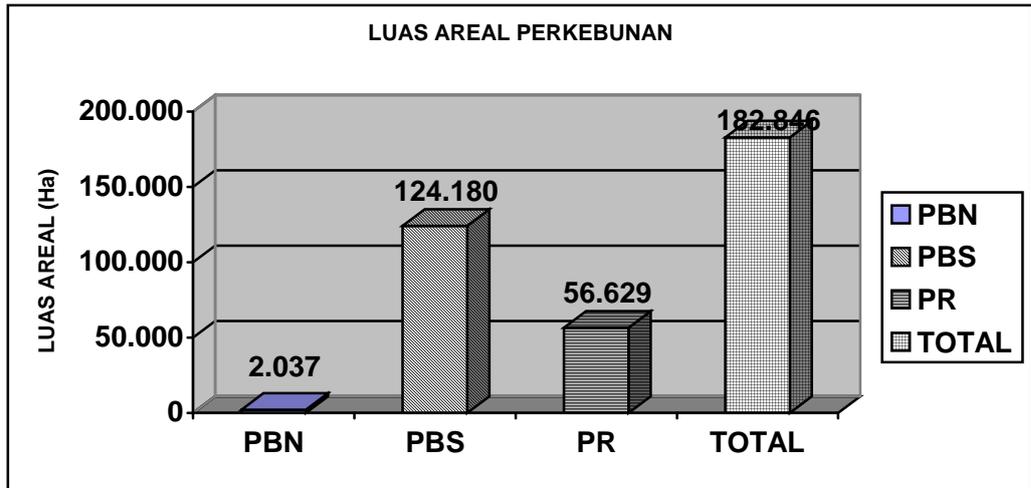
Gambar 2.

Luas Areal Komoditi Perkebunan sampai dengan Desember 2007.



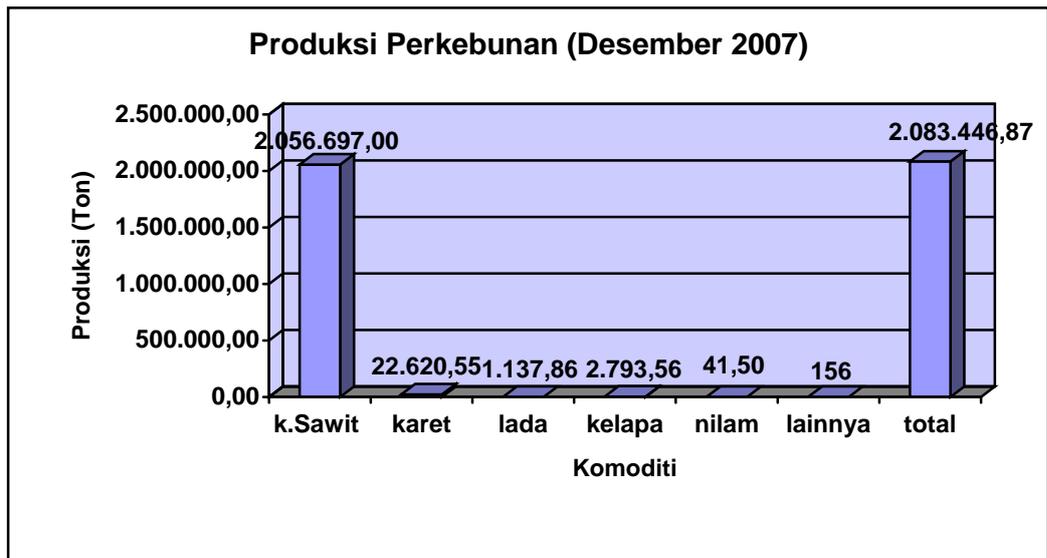
Seiring dengan banyak minat investor perkebunan berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat maka luas areal kebun Perusahaan lebih besar dari luas kebun Rakyat. Luas kebun Perusahaan Besar Negara sebesar 2.037 Ha (1,11 %) dan luas kebun Perusahaan Besar Swasta sebesar 124.180 Ha (67,92 %). Sedangkan Kebun Rakyat seluas 56.477 Ha (30,97 %). selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.

Gambar 3.
Luas Areal Perkebunan di Kab. Kotawaringin Barat s/d Desember 2007



Total produksi komoditi perkebunan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat (sampai Desember 2007) sebesar 2.083.447 ton. Komoditi yang dominan meliputi: (1) Kelapa Sawit (TBS) sebesar 2.056.697 ton (98,72 %), (2) Karet sebesar 22.620,55 ton (1,09 %), (3) Lada sebesar 1.137,86 ton (0,05 %), Kelapa sebesar 2.793,56 ton (0,13 %) Nilam 41,50 ton dan Komoditi lainnya sebesar 156 ton (0,01 %) untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4.
Total Produksi Komoditi Perkebunan



Pengembangan perkebunan dengan menggunakan tanaman tahunan yang berupa pohon, merupakan teknologi yang kompatibel dengan persyaratan ekologis, dapat memberikan fungsi hutan yang berbeda dengan hutan produksi. Pengembangan perkebunan pada dasarnya berupa membangun suasana harmonis antara unsur-unsur ekologi, ekonomi dan sosial budaya, sehingga nantinya bisa menjadi kawasan industri masyarakat perkebunan (Kimbun).

Dalam konteks ini termasuk didalamnya adalah pengembangan kebun sebagai sumber pangan dalam arti luas. Upaya untuk mendorong pengembangan perkebunan di daerah, pemerintah telah memberikan kemudahan bagi para investor untuk menanamkan investasinya di daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2007 tentang Ijin Usaha Perkebunan.

Langkah yang ditempuh pemerintah untuk memacu usaha disektor perkebunan, khususnya kelapa sawit telah dapat meningkatkan produktivitas yang mampu menembus pasar dalam negeri maupun ekspor dalam bentuk *Crude Palm Oil (CPO)*, *RBD Palm Stearin*, *RBD Palm Olein*, *Crude Palm Stearin*, *Palm Fatty Acid Distillate*, *Crude Palm Kernel Oil*, *Palm Nut Shell*, *Mixed Vegetable Oil In Bulk*, *Indonesian Palm Kernel Meal Expelier*, *Hydrogenated RBD Palm Stearn* dengan jumlah nilai ekspor pada tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 1.2.6, Sedangkan untuk jenis komoditas lainnya masih meliputi perdagangan regional.

Tabel 1.2.6.
Jumlah Produksi Sektor Perkebunan

Komoditas	Produk	Volume Ekspor (dalam MT)		Nilai Ekspor (dalam USD)	
		2006	2007	2006	2007
Kelapa Sawit	~Crude Palm Oil (CPO)		63.500,532		48.432.808,20
	~RBD Palm Stearin		32.698,756		19.230.426,71
	~RBD Palm Olein		9.244,128		7.461.014,06
	~Crude Palm Stearin		3.404,034		1.693.387,62
	~Palm Fatty Acid D.		15.623,314		7.911.722,96
	~Crude Palm Kernel Oil		11.009,164		9.094.420,76
	~Palm Nut Shell		1.550,000		29.450,00
	~Mixed Vegetable Oil in Bulk		17.399,475		11.225.496,85
	~Idonesian Palm Kernel Meal Expelier		2.052,913		123.174,78
	~Hydrogenated RBD Palm Stearn		10.500,000		8.977.500,00
		Jumlah	193.276,64	166.982,316	72.369.985,57

3. Kehutanan

Sumber Daya Alam Kabupaten Kotawaringin Barat di Sub Sektor Kehutanan sangat besar, namun demikian kelestarian kawasan hutan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem di alam sangat perlu diperhatikan. Selama enam tahun kebelakang, sub sektor kehutanan menjadi primadona Kabupaten Kotawaringin Barat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sejalan dengan semakin berkurangnya kawasan hutan serta untuk menjaga kelestariannya diiringi dengan semakin gencarnya upaya penerbitan illegal logging, maka sub sektor kehutanan secara perlahan telah digantikan posisinya oleh sub sektor perkebunan.

Sampai dengan tahun 2007 luas kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat menurut fungsinya adalah sebagaimana tabel 1.2.7 berikut .

Tabel 1.2.7
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya

No	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
I	Kawasan Lindung	265.990,74	27,72
	~Hutan Lindung (HL)	8.676,33	0,90
	~Hutan Nasional (TN)	208.506,12	21,73
	~Hutan Wisata (HW)	15.900,40	1,66
	~Suaka Margasatwa (SM)	32.907,89	3,43
II	Kawasan Budidaya	693.462,03	72,28
	~Hutan Produksi Terbatas (HPT)	83.352,48	8,69
	~Hutan Produksi Tetap (HP)	215.554,24	22,47
	~KPP /KPPL	356.639,75	37,17
	~Areal Transmigrasi (TI)	18.330,34	1,07
	~Rencana Areal Transmigrasi	10.310,81	1,07
	~Kawasan Khusus	142,29	0,01
	~Danau dan Sungai	9.142,12	0,92
	T o t a l	959.452,77	100

Untuk jumlah produksi hasil hutan sektor kehutanan terhadap Komoditas jenis kayu di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 1.2.8. :

Tabel 1.2.8.
Jumlah Produksi Hasil Hutan Sektor Kehutanan

Komoditas (Kelompok)	Jumlah Produksi (dalam M ³)	
	2006	2007
Kayu Meranti	71.400,86	98.149,79
Kayu Rimba Campuran	36.741,65	22.240,72
Kayu Indah	781,45	437,42
Jumlah	108.823,96	120.827,93

Untuk jumlah produksi hasil hutan bukan kayu sektor kehutanan terhadap Komoditas jenis kayu di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 1.2.9. :

Tabel 1.2.9.
Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Sektor Kehutanan

Komoditas (Kelompok)	Jumlah Produksi (dalam Ton)	
	2006	2006
Rotan	2.177,63	2.051,86
Jelutung		32,07
Kulit Kayu	68,00	10,60

4. Perikanan

Produksi ikan di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama ini masih bertumpu pada usaha penangkapan ikan, baik pada perairan umum (sungai, danau, rawa). Peningkatan produksi ikan perairan umum tersebut diduga berhubungan dengan permintaan pasar yang meningkat dan sumberdaya perairan umum yang potensial, maka perlu adanya peningkatan dan revitalisasi pembangunan perikanan yang baik selain peningkatan, pengembangan sarana-prasarana produksi perikanan dan kelautan.

Dilain sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih tertinggal perlu dilakukan, terutama di kawasan perairan umum dan pantai. Hal tersebut dilakukan guna adanya peningkatan hasil usaha dan

pengembangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain hal tersebut diatas, maka perlu juga dilakukan perlindungan dan pengembangan reservasi ikan (sungai).

Dalam perdagangan skala besar, sektor ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan nilai ekspor. Padahal dilihat dari potensi yang ada, sektor ini memiliki potensi yang besar dalam menunjang pemasukan devisa negara terutama dari perikanan laut.

Adapun jumlah produksi sektor perikanan di Kabupten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 1.2.10. :

Tabel 1.2.10.
Jumlah Produksi Sektor Perikanan

Komoditas	Produk	Jumlah Produksi (dalam Ton)		Nilai Ekspor (dalam USD)	
		2006	2007	2006	2007
Perairan Laut	-	8.244	8.152,4	-	-
Perairan Umum	-	655,48	750,20	-	-
Budidaya Ikan	-	814,1	856,15	-	-
- Tambak Air Payau					
- Kolam Air Tawar/Sawah					
- Keramba					

5. Peternakan

Dari data yang ada diketahui, bahwa sektor peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat hanya sebagian yang mengalami peningkatan terutama pada produksi daging sapi potong pada tahun 2006 sebesar 399,13 ton yang pada tahun sebelumnya hanya 362,38 ton.

Produksi daging kambing / domba tahun 2007 sebesar 16,00 ton mengalami penurunan dibanding tahun 2006 sebesar 25,82 ton, begitu pula produksi daging babi terjadi penurunan dimana pada tahun 2006 sebesar 48,42 ton sedangkan tahun 2007 sebesar 25,55 ton. Hal yang

sama juga terjadi pada produksi daging unggas dimana tahun 2006 sebesar 985,92 ton terjadi penurunan tahun 2007 menjadi 964,44 ton.

Secara umum produksi daging ternak di Kotawaringin Barat terjadi penurunan, kecuali produksi daging sapi potong. Namun demikian untuk meningkatkan produksi daging yang lebih berkualitas baik, maka perlu diperhatikan pengembangan budidaya peternakan sapi yang terencana dan baik. Selain itu pengembangan budidaya peternakan ternak besar dan kecil perlu dilakukan guna menunjang produksi daging dalam kapasitas yang mencukupi.

Perlu juga diperhatikan peningkatan populasi dan produksi peternakan tersebut agar tidak hanya memenuhi konsumsi lokal saja tetapi juga dapat meluas hingga pasar ekspor maka perlu pengembangan sistem pemasaran dengan mengefektifkan pasar ternak, tempat pemotongan hewan dan pengamanan produksi ternak dengan menekan angka kematian ternak.

Jumlah produksi daging pada Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 1.2.11. sebagai berikut :

Tabel 1.2.11.
Jumlah Produksi Daging (dalam Ton)

Kecamatan	Sapi Potong	Kambing / Domba	Babi	Unggas
1. Kotawaringin Lama	7,75	0,99	1,61	16,63
2. Arut Selatan	369,51	11,46	5,92	269,91
3. Kumai	11,71	2,08	-	239,67
4. Arut Utara	2,24	0,34	10,04	0,39
5. Pangkalan Lada	4,82	0,43	-	232,79
6. Pangkalan Banteng	3,10	0,69	7,98	205,05
Tahun 2007	399,13	16,00	25,55	964,44
Tahun 2006	362,38	25,82	48,42	985,92

Secara umum untuk produksi telur rata-rata terjadi peningkatan dari tahun 2006 ke tahun 2007 terutama ayam ras petelur, sedangkan produksi telur ayam buras dan itik mengalami penurunan. Untuk Kecamatan Pangkalan Lada merupakan peringkat tertinggi dalam produksi

telur ayam buras maupun itik sedangkan kecamatan Arut Selatan tertinggi dalam produksi telur ayam ras petelur.

Jumlah produksi telur pada Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 1.2.12. sebagai berikut :

Tabel 1.2.12.
Jumlah Produksi Telur (dalam Ton)

Kecamatan	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Itik	Jumlah
1. Kotawaringin Lama	1,43	-	0,54	1,97
2. Arut Selatan	3,80	17,71	4,66	26,17
3. Kumai	1,45	-	2,49	3,94
4. Arut Utara	0,32	-	0	0,32
5. Pangkalan Lada	4,86	-	6,72	11,58
6. Pangkalan Banteng	1,32	-	0,97	2,29
Tahun 2007	13,18	17,71	15,39	46,27
Tahun 2006	48,59	2,90	20,68	72,17

Populasi ternak yang terjadi peningkatan hanya ternak sapi potong, sedangkan kambing / domba dan babi terjadi penurunan populasi ternak, dimana jumlah populasi ternak dapat dilihat pada tabel 1.2.13.

Tabel 1.2.13.
Populasi Ternak (dalam ekor)

Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kambing / Domba	Babi
1. Kotawaringin Lama	352	0	91	159
2. Arut Selatan	953	0	400	292
3. Kumai	1.072	0	293	0
4. Arut Utara	52	0	22	443
5. Pangkalan Lada	1.165	0	164	0
6. Pangkalan Banteng	92	0	105	859
Tahun 2007	3.692	0	1.075	1.753
Tahun 2006	2.377	0	3.432	3.200

Populasi unggas untuk Kabupaten Kotawaringin Barat rata-rata mengalami penurunan dari tahun 2006 ke tahun 2007, seperti pada tabel 1.2.14. berikut ini :

Tabel 1.2.14.
Populasi Unggas dan Kelinci (dalam ekor)

Kecamatan	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Itik	Kelinci
1. Kotawaringin Lama	17.569	0	2.233	2.004	0
2. Arut Selatan	46.762	73	19.258	4.125	0
3. Kumai	17.814	0	10.306	4.936	44
4. Arut Utara	3.878	0	0	1.678	0
5. Pangkalan Lada	59.737	0	27.809	7.433	154
6. Pangkalan Banteng	16.210	0	4.023	6.290	74
Tahun 2007	161.970	73	63.630	26.465	272
Tahun 2006	179.769	2.355	66.598	31.859	0

6. Perindustrian

Sektor perindustrian yang perlu dilakukan adalah pengembangan dan revitalisasi industri kecil, rumah tangga, menengah dan besar. Usaha-usaha yang perlu dilakukan tidak hanya sampai disitu saja tetapi juga penyiapan sumber daya manusia, untuk kebutuhan industri termasuk keterampilan pelaku industri tersebut dalam pengelolaan dan aspek teknis industri yang digeluti.

Hasil hutan yang melimpah, perlu diupayakan peningkatan produksinya dalam bentuk barang jadi yang dapat dijual, sehingga industri pengolahan hasil hutan dapat menjadi primadona yang menarik baik bagi usaha wisata maupun perdagangan pada umumnya. Selain industri hasil hutan, industri hasil pertanian, perikanan dan perkebunan juga perlu dikembangkan menjadi produk yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun regional.

Secara umum kondisi industri di Kabupaten Kotawaringin Barat belum berkembang secara optimal. Kecilnya peranan sektor industri ini dimungkinkan oleh sedikitnya jumlah usaha industri di Kabupaten Kotawaringin Barat. Disamping itu, industri yang ada pada umumnya merupakan industri dengan skala kecil. Hanya beberapa industri yang berskala menengah ke atas seperti industri kayu lapis dan kelapa sawit.

Sektor industri nampaknya akan memberikan sumbangan yang berarti terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat dimasa depan, salah satu yang nampak adalah pemasukan yang diterima dari hasil ekspor kayu lapis berupa plywood yang nilainya pada tahun 2006 mencapai 79.996.911,24 USD, terjadi peningkatan ditahun 2007 dengan nilai ekspor sebesar 82.396.331,81 USD dengan jumlah produksi pada tahun 2007 mencapai 179.218,3643 M³ dan volume ekspor sebesar 164.844,8343 M³.

Sedangkan pada produk moulding nilai ekspor tahun 2006 mencapai 12.686.165,16 USD, kemudian terjadi penurunan di tahun 2007 menjadi sebesar 9.940.591,32 USD dengan volume ekspor tahun 2007 sebesar 20.070,1676 M³ serta jumlah produksi 18.647,0206 M³.

Masalah lain yang dihadapi dalam pengembangan industri berskala kecil di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah kurangnya bantuan modal kerja dan peralatan yang dimiliki, disamping kurangnya sarana dan prasarana perhubungan sehingga mempersulit pemasaran produk industri.

Jumlah produk kayu olahan sektor perindustrian yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti tertuang pada tabel 1.2.15. :

Tabel 1.2.15.
Jumlah Produksi Sektor Perindustrian

Komoditas	Produk	Jumlah Produksi (dalam M ³)		Nilai Ekspor (dalam USD)	
		2006	2007	2006	2007
Kayu	Plywood	186.452,0019	179.218,3643	79.996.911,24	82.396.331,81
	Moulding	34.989,6993	18.647,0206	12.686.165,16	9.940.591,32

7. Pertambangan

Dari beberapa potensi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah dimanfaatkan adalah bahan galian B seperti emas terdapat di Kecamatan Arut Utara Desa Sambu, Kecubung di Kecamatan Arut Utara Desa Pangkut dan Gandis. Kaolin di Kecamatan Kumai Desa Keraya dan Kubu. Tambang galian C seperti pasir kwarsa dan tanah liat terdapat diseluruh Kecamatan .

Selain pemanfaatan hasil galian yang ada, perlu juga dilakukan penelitian dan eksplorasi potensi sumber daya tambang untuk mengetahui kandungan mineral dan jenis tambang yang ada di daerah.

Melihat penambangan pasir zircon semakin meningkat, namun demikian sebagian penambang yang ada tidak memiliki izin secara resmi sehingga perlu adanya pembinaan terhadap penambang-penambang yang demikian, agar penambangan yang dilakukan tidak menimbulkan dampak negatif yang terlalu besar terhadap perubahan lingkungan.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah memudahkan investor yang akan menanamkan modalnya disektor pertambangan, birokrasi yang panjang, proses yang rumit dan pungutan yang banyak ditiap pos pelayanan akan menimbulkan keengganan investor untuk berinvestasi.

Selain faktor fisik yang menjadi tekanan dalam telaah ini faktor non fisik juga menjadi perhatian, terutama penyuluh pertambangan yang mampu mengamati dan memberikan arahan penambangan ditiap wilayah penambangan. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas staf yang ada di lapangan perlu ditingkatkan.

Pada perdagangan ekspor, sektor ini telah menyumbangkan komoditas zircon sand (pasir sirkon) dengan nilai ekspor sampai tahun 2007 mencapai Rp. 2.722.950,00 dengan volume ekspor 18.153,00 MT, seperti terlihat pada tabel 1.2.16.

Tabel 1.2.16.

Volume dan Nilai Ekspor Sektor Pertambangan

Komoditas	Produk	Volume Ekspor (MT)		Nilai Ekspor (dalam Rp)	
		2006	2007	2006	2007
Zircon Sand	-	35.082,35	18.153	5.853.844,00	2.722.950,00

8. Pariwisata

Bila diperhatikan dari posisinya Kabupaten Kotawaringin Barat berada di ujung sebelah barat Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki garis pantai dan hutan beragam dari yang mencirikan mangrove sampai ke bagian interiornya yang merupakan hutan tropis basah yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon langka dan tidak terdapat dibelahan dunia lainnya seperti ulin dan kayu nyatu.

Taman Nasional Tanjung Puting yang terkenal dengan flora dan satwa langkanya seperti Bekantan dan Orang Utan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara dan lokal. Tidak hanya itu saja, panorama alam yang begitu indah untuk dinikmati oleh wisatawan melalui sungai yang mengalir di dalam kawasan taman tersebut menjadikan kawasan ini semakin eksotis.

Secara umum potensi kepariwisataan di Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak hanya memiliki potensi alam seperti hutan alami dan pantai, tetapi juga wisata kebudayaan berupa rumah betang, acara ritual dan tarian-tarian daerah lainnya.

Nama-nama objek wisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 1.2.17. :

Tabel 1.2.17.
Nama-Nama Objek Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi
1.	Taman Nasional Tanjung Puting	Kec. Kumai
2.	Pantai Tanjung Keluang	Kec. Kumai
3.	Pantai Bugamraya	Kec. Kumai
4.	Keraton Kotawaringin	Kec. Kotawaringin Lama
5.	Masjid Kyai Gede	Kec. Kotawaringin Lama
6.	Keraton Kuning	Kec. Arut Selatan
7.	Suaka Margasatwa Lamandau	Kec. Arut Selatan

b. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah produk nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi, jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga, lembaga swasta, konsumsi pemerintah, dan perubahan ekspor netto dari satu daerah.

Untuk angka PDRB dapat terlihat seberapa besar kegiatan perekonomian yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (satu tahun) di Kabupaten Kotawaringin Barat dan pertumbuhan dari kegiatan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti terdapat pada tabel 1.2.18.

Tabel 1.2.18.
PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2007
Atas Dasar Harga Berlaku
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	Tahun			
		2006		2007	
		Nilai	Pertumbuhan %	Nilai	Pertumbuhan %
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1.471.355,15	12,17	1.567.581,78	15,25
2.	Pertambangan dan Penggalian	44.447,66	16,23	47.354,54	35,30
3.	Industri Pengolahan	347.758,18	8,31	370.501,56	5,59
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	9.497,22	26,92	10.118,34	23,67
5.	Bangunan	90.870,65	11,38	96.813,59	9,64
6.	Perdagangan, Restoran dan Hotel	488.662,22	10,64	520.620,73	11,48
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	184.807,11	9,85	196.893,49	7,52
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa	71.282,17	25,01	75.944,02	15,66
9.	Jasa – Jasa	221.696,06	16,34	236.194,98	15,99
	Total	2.930.376,41	20,26	3.122.023,04	12,37

Dari Tabel tersebut, kontribusi sektor Listrik, Gas dan Air Minum merupakan sektor yang mempunyai peranan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat

BAB II**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)****A. Visi dan Misi**

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2005-2010, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mencanangkan *VISI* yakni “ KOTAWARINGIN BARAT SEBAGAI DAERAH PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DENGAN MASYARAKATNYA YANG MAJU, AMAN, TERTIB, DAMAI, SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN “, dengan *MISI* sebagai berikut :

1. Melanjutkan dan menyempurnakan pembangunan daerah dengan mengedepankan stabilitas politik, supremasi hukum, demokratisasi, keadilan dan akuntabilitas.
2. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada mekanisme pasar yang berkeadilan, serta berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, kompetitif, mandiri, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Mengembangkan dan melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara demokratis, transparan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyusun dan melaksanakan program pembangunan berdasarkan skala prioritas secara demokratis, adil dan merata sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
5. Melakukan pelayanan publik secara bertanggung jawab dan benar untuk terselenggaranya proses pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna.

Visi – Misi Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini merupakan mandat dari seluruh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2005 – 2010 yang telah dituangkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 11 Tahun 2006.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah. lima tahun kedepan mencakup beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Geografis dan Lingkungan

1.1 Geografis : diarahkan kepada :

- a Mewujudkan suatu tata ruang kabupaten yang dapat dikembangkan dengan daerah wilayah pengembangan dan pusat pertumbuhan wilayah yang mengacu pada kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan industri, kawasan pemukiman.
- b Memelihara keseimbangan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dan kawasan budidaya serta kawasan pemukiman.
- c Ketegasan dan ketepatan serta akurasi tentang tata batas antar kabupaten pemakaran.
- d Mempertahankan kualitas dan kuantitas air, kelestarian fungsi pantai, sungai danau/rawa.

1.2 Lingkungan : diarahkan kepada :

- a Menjamin pelaksanaan pembangunan disegala bidang tetap lestari lingkungan.
- b Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang lingkungan yang lestari.
- c Membatasi pembukaan perkebunan dan pendirian industri yang tidak ramah lingkungan.
- d Melakukan reboisasi dan rehabilitasi hutan.
- e Memperluas kawasan lindung

2. Aspek Perekonomian Daerah

2.1 Perekonomian

- a. Membangun dan mengembangkan sistem perekonomian daerah berbasis ekonomi kerangkayatan.
- b. Menjamin laju pertumbuhan dan pengembangan antar sektor lapangan usaha yang seimbang dengan fokus pembangunan memacu pertumbuhan pada sektor pertanian, perkebunan, industri, perdagangan dan jasa.
- c. Memacu pembangun industri yang sesuai dengan potensi daerah dan berorientasi pada pasar.
- d. Mengarahkan dan memotivasi lembaga keuangan dan perbankan sebagai sarana mobilisasi tabungan dan investasi bagi masyarakat.
- e. Mendorong peningkatkan produktifitas masyarakat dan daerah dalam rangka pengembangan seluruh sektor dengan fokus pada sektor perdagangan sehingga tercipta volume kegiatan ekspor meningkat

2.2 Keuangan Daerah

- a. Peningkatan PAD melalui peningkatan volume kegiatan/ produktifitas masyarakat
- b. Dalam rangka peningkatan keuangan daerah dapat membangun dan mengembangkan berbagai perusahaan daerah yang bergerak bidang perkebunan dan industri.
- c. Mengupayakan peluang sumber pendanaan pembangunan selain APBD dalam rangka peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik.

3. Aspek Kesejahteraan dan Sosial Budaya

3.1 Penduduk dan Ketenagakerjaan

a. Penduduk

- 1) Menjamin keseimbangan distribusi, pertumbuhan dan kepadatan penduduk antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten demi terciptanya kehidupan sejahtera yang berkeadilan sosial.
- 2) Memperkecil angka pengangguran dan membuka pemerataan kesempatan kerja bagi penduduk.
- 3) Mengurangi tingkat kemiskinan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dengan upaya meningkatkan pendapatan perkapita dan status sosial kehidupan penduduk.

b. Ketenagakerjaan

- 1) Membangun jaringan tenaga kerja di luar Kab. Kobar dalam rangka penyaluran/pemberdayaan tenaga kerja di daerah.
- 2) Membuka Lapangan kerja baru di sektor pertanian, perkebunan, industri, perdagangan dan jasa.

3.2 Pendidikan

- a. Menjamin keberlanjutan penyelenggaraan dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat mulai dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi.
- b. Penyediaan prasarana dan sarana serta fasilitas dalam rangka penyelenggaraan pendidikan.
- c. Menjamin peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga guru.
- d. Meningkatkan alokasi dana bidang pendidikan dan pengajaran.

3.3 Pemuda dan Olah Raga

- a. Mendorong kreativitas dan aspirasi para pemuda dan olahragawan sehingga sehingga berprestasi.
- b. Membina dan mengembangkan para olahragawan yang berprestasi untuk menjadi fasilitator olahraga dan seni demi menjamin kualitas dan kuantitas keberlanjutan kegiatan kepemudaan dan olah raga.
- c. Mengalokasikan anggaran kepemudaan dan olah raga sesuai dengan kemampuan APBD demi menjamin kualitas dan kuantitas keberlanjutan kegiatan kepemudaan dan olah raga.

3.4 Kesehatan

- a. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat hingga menjangkau ketinggian pelayanan yang dapat memuaskan semua pihak (para pasien yang dilayani).
- b. Memotivasi, mengembangkan dan mencari sistem pelayanan kesehatan yang baru agar lebih baik dari tahun-tahun yang telah dilewati.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk aneka jenis obat-obatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

3.5 Pemukiman

- a. Menyediakan cadangan lokasi untuk kawasan pemukiman dan perumahan penduduk sampai ke daerah kecamatan dan pedesaan yang seimbang dengan azas pemanfaatan ruang, sehingga terbentuk perkampungan pemukiman penduduk yang indah dan lestari.
- b. Peningkatan kualitas hidup dalam hal pembangunan, pengembangan perumahan serta pemukiman kepada penduduk sampai ke daerah pedesaan.
- c. Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk memiliki perumahan dan penukiman sesuai dengan kemampuan masyarakat masing-masing melalui fasilitas kredit dari lembaga keuangan dan perbankan yang ada di daerah.

3.6 Budaya dan Pariwisata

- a. Menjamin terpeliharanya nilai-nilai luhur budaya lokal sebagai ciri khas pengembangan dan eksistensi budaya bangsa yang menjadi perilaku manusia dan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan.
- b. Peningkatkan dan pengembangan pembangunan pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah.
- c. Peningkatan kualitas: pelayanan, fasilitas, fungsi obyek-obyek wisata yang telah ada di daerah.
- d. Memposisikan fungsi kedamaian atau lembaga adat di daerah.

4. Fisik Prasarana dan Sarana

- a. Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, bahwa penambahan pembangunan fisik prasarana dan sarana (infrastruktur) diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, industri, perdagangan dan jasa.
- b. Pemeliharaan kualitas fisik prasarana dan sarana yang telah ada.
- c. Melanjutkan pembangunan fisik prasarana dan sarana yang telah direncanakan, tetapi tetap mengacu pada prinsip point 4.1.4.a tersebut di atas.

5. Bidang Agama

- a. Menjamin suasana hidup kerukunan umat beragama.
- b. Pemerintah sebagai fasilitator dan motivator dalam rangka menjamin suasana kerukunan inter dan antar umat beragama
- c. Pembinaan dan pengembangan terhadap lembaga keagamaan.
- d. Penyediaan alokasi dana pada APBD dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana ibadah serta fasilitas pendidikan agama.

6. Bidang Politik

- a. Menjamin tumbuh dan berkembangnya suasana kehidupan berdemokrasi sebagai pondasi pembangunan politik di daerah.
- b. Memotivasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat luas guna pengoptimalisasi pemberdayaan SDM daerah dalam pengisian infra dan supra struktur politik di daerah.
- c. Menjalani fungsi pemerintahan yang baik tetap menjaga penegakan netralitas dalam menjamin tumbuh dan berkembangnya kehidupan berdemokrasi.

7. Hukum dan Perundang-Undangan

- a. Menjamin penegakan penyelenggaraan supremasi hukum di daerah.
- b. Memberi kesempatan yang luas dan memotivasi serta mengembangkan aspirasi masyarakat tentang berbagai kendala, kelemahan atas penyelenggaraan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang dianggap tidak adil.
- c. Pendidikan kritis tentang kesadaran hukum bagi masyarakat.

8. Pemerintahan Umum

- a. Menjamin intensitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).
- b. Menempatkan aparatur pemerintah pada fungsi organisasi sesuai dengan bidang dan keahliannya.
- c. Membentuk sistem pelayanan yang efektif dan efisien.
- d. Penyusunan perencanaan berbasis masyarakat
- e. Membangun sikap mental berkeadilan dan peduli sosial bagi aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagai pengampu pelayanan kepada masyarakat.

C. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah meliputi :

1. Peningkatan pembangunan prasarana perhubungan darat dan udara serta perhubungan laut terutama infrastruktur (jalan darat, pelabuhan udara dan dermaga / pelabuhan laut) untuk mempercepat tingkat mobilitas sosial.
2. Peningkatan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, dengan sasaran utama perkebunan rakyat dalam rangka menunjang ekspor komoditi non migas.
3. Peningkatan pembangunan sektor perdagangan dan industri yang mengolah hasil pertanian, kehutanan dan pertambangan.
4. Peningkatan pembangunan disektor keamanan, ketertiban umum, penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang dapat menjamin peningkatan dan disparitas pendapatan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah.

BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

1. Bidang Pendidikan

Keberhasilan daerah melaksanakan kewenangannya dalam bidang pendidikan di daerah sangat tergantung pada kemampuan perencanaan kebijakan dalam bidang pendidikan yang disiapkan oleh daerah itu sendiri, sehingga pada akhirnya daerah mempunyai pedoman dalam mengelola kewenangannya mulai dari pendanaan, perizinan, perencanaan, proses dan evaluasi sesuai dengan standar, norma dan kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing.

Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan berbagai langkah dan tindakan agar penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dapat berjalan secara dinamis dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, berbagai langkah dan tindakan yang akan diambil perlu dituangkan dalam suatu program kerja yang mempunyai integritas yang tinggi.

1.1. Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan.

Dinas Pendidikan dan Pengajaran pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 55 (limapuluh lima) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel : 3.1.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
	Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan;	10 Pendidikan		
	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan	10.02 Pendidikan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah. 2. Penambahan Ruang Kelas Sekolah 3. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir. 4. Pengadaan Mebeluer Sekolah. 5. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah. 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Kelas Sekolah. 7. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah. 8. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah. 9. Membina SMP Terbuka. 10. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP. 11. Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/ MTS. 12. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS 13. Penyelenggaraan Pkt B Setara SMP 14. Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa. 15. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar
		10.03 Pendidikan Menengah	Program Pendidikan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah. 2. Penambahan Ruang Kelas Sekolah. 3. Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa. 4. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa. 5. Pengadaan Mebeluer Sekolah. 6. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah.

				<ol style="list-style-type: none"> 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Kelas Sekolah. 8. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah. 9. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM). 10. Penyelenggaraan Pkt C Setara SMU 11. Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri. 12. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup.
		10.04 Pendidikan Non Formal Dan In Formal	Program Pendidikan Non Formal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal. 2. Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi.
		10.05 Pendidikan Kedinasan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG). 2. Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kualifikasi. 3. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan & Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Pengembangan Sistem Penghargaan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik.
		10.10 Pendidikan Lainnya	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan 4. Perlengkapan Kantor. 5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 6. Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional. 7. Keuangan. 8. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. 9. Penyediaan Barang Cetak dan 10. Penggandaan. 11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan 13. Peraturan Perundang-undangan. 14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 15. Penyediaan Makanan dan Minuman. 16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah.

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor. 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung 2. Kantor.
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 1. Perlengkapannya.
		Program Pendidikan Luar Biasa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 1. Siswa.
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah. 1. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah. 2.
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja 1. Bidang Pendidikan. Pembinaan Dewan Pendidikan 2. Penerapan Sistem dan Informasi 3. Manajemen Pendidikan.

1.2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam Tahun 2007 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Program dan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	- Pelayanan Administrasi di Lingkungan Dikjar	100,00
2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	- Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di lingkungan Dinas Dikjar	100,00
3	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	- Jasa peralatan dan perlengkapan kantor di lingkungan Dinas Dikjar Kobar	100,00
4	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	- Kendaraan dinas/operasional Dinas Dikjar Kobar	100,00
5	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	- Administrasi keuangan di Lingkungan Dikjar	100,00
6	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	- Peralatan kerja di Lingkungan Dikjar	100,00
7	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	- Kantor Dinas Dikjar Kab. & Kecamatan, serta Perpustakaan	100,00
8	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	- Kantor Dinas Dikjar	100,00

	9	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	- Pelayanan Administrasi di Lingkungan Dikjar	100,00
	10	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	- Bahan bacaan dan perundang-undangan yang terbaru	100,00
	11	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	- Semua sekolah negeri se-Kotawaringin Barat	100,00
	12	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	- Pegawai di lingkungan dinas dikjar	100,00
	13	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	1	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	1 Pembangunan Ruang Guru dan WC SMPN-1 Arut Selatan (2 Lantai)	100,00
			2 Rehabilitasi dan Perluasan Kantor Cabang Dikjar Kotawaringin Lama	100,00
			3 Rehabilitasi Kantor SMAN-2 Pangkalan Bun	100,00
	2	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	1 Peningkatan Sarana Prasarana Aula Dikjar	100,00
			2 Perbaikan gedung Eks Kantor Departemen Diknas	100,00
			3 Pengadaan Scanner Pemeriksa Ujian	100,00
			Pengadaan Perlengkapan Kantor	100,00
			4 Pengadaan Mubiler dan Peralatan Sekretariat Pengawas Sekolah	100,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
	1	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	- Seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Kobar	100,00
4	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			
	1	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH	1 Pembangunan RDG SDN-1 Umpang	100,00
			2 Pembangunan RDG SMPN-3 Kumai di Teluk Bogam (2 Pintu)	100,00
			3 Pembangunan RDG SMPN-4 Kumai di Kubu (2 Pintu)	100,00
			4 Pembangunan RDG SMPN-2 Arut Selatan (6 Pintu)	100,00
			5 Pembangunan RDG SMPN-2 Arut Selatan (6 Pintu)	100,00
	2	PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH	1 Pemasangan Jaringan Listrik ke SMPN-4 Kumai dan SDN-2 Kubu	100,00
			2 Pembangunan TRK SDN-1 Sidorejo	100,00
			3 Pembangunan/Pembuatan Pagar SDN-6 Mendawai	100,00
			4 Pembangunan/Pembuatan Halaman Upacara SDN-1 Raja Seberang	100,00
			5 Pembangunan/Pembuatan Pagar SMPN-2 Arut Selatan	100,00
			6 Pembangunan/Pavingisasi SDN-5 Madurejo	100,00
			7 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN-4 Pangkalan Banteng (Dana Penyesuaian)	100,00
			8 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN-3 Karang Mulya Kec. P. Banteng (Dana Penyesuaian)	100,00
			9 Pembangunan Tambah Ruang Kelas (TRK) 2 Lokal SDN-2 Mendawai Kec. Arsel (Dana Penyesuaian)	100,00
			10 Pembangunan Asrama Siswa SMPN-2 Kotawaringin Lama (Dana Penyesuaian)	100,00
			11 Revitalisasi Gedung SDN-4 Sidorejo Kec. Arut Selatan (Dana Penyesuaian)	100,00

		12 Revitalisasi Ruang Belajar SMPN-5 Arut Selatan (Dana Penyesuaian)	100,00
		13 Revitalisasi Ruang Belajar SMPN-1 Kumai (Dana Penyesuaian)	100,00
		14 Revitalisasi Ruang Belajar SMPN-3 Arut Selatan (Dana Penyesuaian)	100,00
		15 Pemagaran SDN-1 Baru (ABT)	100,00
		16 Pemagaran SDN-1 Kumai Hilir (ABT)	100,00
		17 Pemagaran SDN-4 Kumai Hilir (ABT)	100,00
3	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	- Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya (4 paket)	100,00
4	PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH	1 Pengadaan Meubeler SD (23 paket)	100,00
		2 Pengadaan Meubeler SMP (10 paket)	100,00
5	PENGADAAAAN ALAT RUMAH TANGGA SEKOLAH	- Belanja ATK TK, SD dan SMP Negeri se Kobar	
8	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	- Rehabilitasi/Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan (DAK, 59 sekolah)	100,00
9	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH	1 Revitalisasi RDPS SDN-4 Kumpai Batu Bawah	100,00
		2 Rehabilitasi RDG SDN-3 Sidorejo	100,00
		3 Rehab Ringan RDG SDN-6 Mendawai	100,00
10	MEMBINA SMP TERBUKA	- Operasional SMP Terbuka dan guru kunjung di Kobar	
11	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS SERTA PESANTREN SALAFIYAH DAN SATUAN PENDIDIKAN NON-ISLAM SETARA SD DAN SMP	1 Pelaksanaan sekolah Model SD dan SMP	100,00
		2 Penyediaan Bahan Penyelenggaraan Pendidikan/BOP/ Sekolah Gratis	100,00
		3 Penyediaan Biaya Penyelenggaraan UN/US Tahun 2007	100,00
12	PENYEDIAAN BUKU PELAJARAN UNTUK SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS	- Pengadaan Buku Pokok SD/MI/SDLB dan SMP/MTs se Kobar	100,00
13	PENYEDIAAN DANA PENGEMBANGAN SEKOLAH UNTUK SD/MI DAN SMP/MTS	- Belanja Cetak dan Penggandaan TK, SD dan SMP Negeri se Kobar	100,00
14	PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP	- Operasional penyelenggaraan paket B setara SMP se Kobar	100,00
15	PEMBINAAN MINAT, BAKAT, DAN KREATIVITAS SISWA	- Penyelenggaraan kegiatan pengembangan minat, bakat dan kreativitas siswa Dikdas melalui olympiade MIPA SD/SMP	100,00
16	PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI BERBAGAI INFORMASI PENDIDIKAN DASAR	- Sosialisasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Program Sekolah Gratis	100,00

5	Program Pendidikan Menengah		
	1 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH	1 Pembangunan RDKS SMAN-1 Pangkalan Banteng	100,00
		2 Pembangunan RDKS SMAN-1 Arut Utara	100,00
	2 PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH	1 Dana sharing block grant P2M SMK 2007 Pemb. 2 Ruang Kelas SMKN-1 P. Bun	100,00
		2 Dana sharing block grant P2M SMK 2007 Pemb. 3 Ruang Kelas Baru SMAN-3 P. Bun (216 m2)	100,00
		3 Dana sharing block grant P2M SMK 2007 Pemb. 3 Ruang Kelas Baru SMAN-2 Kumai (216 m2)	100,00
	3 PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH (LABORATORIUM BAHASA, KOMPUTER, IPA, IPS DAN LAIN-LAIN)	1 Dana sharing block grant P2M SMA 2007 untuk pembangunan Lab. IPA SMAN-2 P. Bun (120 m2)	100,00
		2 Dana sharing block grant P2M SMA 2007 untuk pembangunan Lab. Komputer SMAN-3 P. Bun (120 m2)	100,00
		3 Dana sharing Imbal Swadaya Rintisan SMK di SMP Tahap III	100,00
	4 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	1 Dana sharing block grant P2M SMA 2007 untuk Pembangunan Perpustakaan SMAN-1 Pangkalan Lada (96 m2)	100,00
		2 Dana sharing block grant P2M SMA 2007 untuk Pembangunan Perpustakaan SMAN-1 Kotawaringin Lama (96 m2)	100,00
	5 PENGADAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	- Pengadaan Buku Pokok SMA/SMK se Kobar	100,00
	6 PENGADAAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	1 Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	100,00
		2 Dana sharing bantuan Revitalisasi Alat SMK pada SMKN-2 Pangkalan Bun	100,00
	7 PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH	- Pengadaan Meubeler SMA/SMK se Kobar (7 paket)	100,00
	8 PENGADAAAAN ALAT RUMAH TANGGA SEKOLAH	- Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan SMA/SMK Negeri se Kobar	100,00
	9 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUANG KELAS SEKOLAH	- Belanja Pemeliharaan Gedung SMP dan SMA/SMK Negeri se Kobar	100,00
	10 REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	- Dana sharing block grant P2M SMA 2007 untuk rehab 5 ruang kelas SMAN-1 Pangkalan Bun (72 m2 x 5 = 360 m2)	100,00
	11 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM)	1 Pelaksanaan Sekolah Model tingkat SMA	100,00
		2 Dana Sharing Penyelenggaraan Sekolah Berstandar Internasional di SMKN-1 Pangkalan Bun	100,00

	12	PENYELENGGRAAN PAKET C SETARA SMU	- Biaya Operasional Penyelenggaraan Paket C di Kobar	100,00
	13	PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA DAN INDUSTRI	1 Penyelenggaraan Prakerin siswa/siswi SMK se Kobar	100,00
			2 Dana sharing penyelenggaraan Beasiswa Poltek Jember	100,00
	6	Program Pendidikan Non Formal		
	1	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP	- Penyelenggaraan berbagai pengembangan pendidikan kecakapan hidup	100,00
	2	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL	1 Pengadaan sarana olah raga sekolah	100,00
			2 Peningkatan sarana prasarana drum band Dikjar Kobar	100,00
			3 Pengadaan duplikat Sang Saka Merah Putih	100,00
	7	Program Pendidikan Luar Biasa		
	1	PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	- Pengadaan alat peraga SDLB Pangkalan Bun	100,00
	8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
	1	PELATIHAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI	- Pelaksanaan berbagai pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi yang sesuai UU	100,00
	2	PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU (KKG)	- Penyelenggaraan kegiatan KKG, KKS, MKKS, MGMP, MKPS dan ME di Kobar	100,00
	3	PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI	- Penyelenggaraan pendidikan lanjutan melalui program penyetaraan kualifikasi guru sesuai UU guru/dosen	100,00
	4	PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	- Penyelenggaraan pengembangan mutu dan kualifikasi dalam pengembangan profesi dan keahlian guru sesuai UU guru/dosen melalui kegiatan PAK Guru, KTSP SD dan SMP, Magang Guru SMP/SMP/SMA, seleksi Guru Berprestasi	100,00
	5	PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI PENDIDIK	- Terlaksananya penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	100,00
	9	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		
	1	PENYEDIAAN BANTUAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH	- Penataan manajemen perpustakaan	100,00
	2	PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	- Pengadaan berbagai jenis buku perpustakaan	100,00

10.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		
	1. PELAKSANAAN EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN	- Penyelenggaraan kegiatan Sinkronisasi & Koordinasi Pendidikan, Pendataan Pendidikan, Profil Pendidikan, Penyusunan Renstra, Monitoring & Evaluasi, Sosialisasi Kebijakan Pendidikan, Penyusunan Laporan dan Program Kerja	100,00
	2. PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN	- Operasional Dewan Pendidikan Kobar	100,00
	3. PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN	- Tertatanya sistem dan informasi manajemen pendidikan, melalui penerapan sistem informasi dan manajemen	100,00

1.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 30 Nopember 2002 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja.

Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai Visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

a. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi :
 -) Kepala Sub Bagian Kepegawaian
 -) Kepala Sub Bagian Keuangan
 -) Kepala Sub Bagian Umum
 -) Kepala Sub Bagian Perpustakaan
3. Kasubdin Diklusepora, membawahi :
 -) Kasi Kepemudaan
 -) Kasi Pendidikan Masyarakat
 -) Kasi Keolahragaan
 -) Kasi Sarana
4. Kasubdin Pendidikan Dasar, membawahi :
 -) Kasi Kurikulum
 -) Kasi Tenaga Teknis
 -) Kasi Sekolah Swasta
 -) Kasi Sarana
5. Kasubdin Pendidikan Menengah, membawahi :
 -) Kasi Kurikulum
 -) Kasi Tenaga Teknis
 -) Kasi Sekolah Swasta
 -) Kasi Sarana
6. Kasubdin Bina Program, membawahi :
 -) Kasi Pendataan dan Pelaporan
 -) Kasi Monitoring dan Evaluasi
 -) Kasi Penyusunan Rencana dan Program
 -) Kasi Litbang
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) :
 -) Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Arut Selatan
 -) Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Kumai
 -) Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Pangkalan Lada
 -) Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Pangkalan Banteng
 -) Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Arut Utara

- J Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Kotawaringin Lama
- J Perpustakaan Daerah Kab. Ktw. Barat
- J Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Ktw. Barat
- J UPTD Sekolah SMP/SMA/SMK

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Pengajaran

1. Menyusun rencana strategis bidang Pendidikan dan Pengajaran.
2. Merumuskan kebijakan yang akan ditetapkan oleh Bupati dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran.
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
4. Memberi arahan, pembinaan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui permasalahan dan upaya penanggulangannya.
6. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai pembinaan dan pengembangan karier.
7. Menetapkan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Pengajaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama di bidang Pendidikan dengan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Memonitor pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas.
10. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan dan pembinaan, pengembangan dan pembangunan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran.
11. Mengusulkan pengangkatan dan mutasi kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran.
12. Mengusulkan rencana kebutuhan pegawai, perlengkapan dan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran.
13. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan.

c. Visi dan Misi Pendidikan**1. VISI**

“TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS “

2. MISI

-) Mewujudkan Iklim Pendidikan yang Kondusif Berwawasan Keilmuan.
-) Memberikan Pelayanan Prima dan Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Terhadap Pendidikan.
-) Mengembangkan Semangat Keunggulan dan Prestasi Akademik Kepada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan.
-) Menumbuhkan Kembangkan Keimanan dan Ketaqwaan, sehingga menjadi Sumber Kearifan.
-) Mengembangkan Semangat Kepeloporan yang Inovatif pada Setiap Jenjang dan Jenis Pendidikan.

d. Kebijakan / Strategi Dinas Pendidikan dan Pengajaran**1. Kebijakan**

-) Meningkatkan angka partisipasi pada semua jenjang pendidikan.
-) Peningkatan kualitas pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan dengan menitik beratkan pada pengembangan kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian / evaluasi hasil belajar, keter-sediaanya sarana belajar yang memadai.
-) Meningkatkan status, profesionalisme guru dan tenaga pendidikan.

2. Strategi

-) Perluasan dan pemerataan pendidikan.
-) Peningkatan mutu dan relevansi.
-) Peningkatan pelayanan manajemen pendidikan.
-) Pembinaan dan pengembangan PLS, Pemuda dan Olahraga.

1.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Pengajaran menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 3.1.4.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.4.1.
Pegawai Menurut Pendidikan

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	S2	1	1	-	-	1
2.	S1	17	17	-	-	17
3.	Sarjana Muda	5	5	-	-	5
4.	SLTA	30	30	-	-	30
5.	SLTP	1	1	-	-	1
6.	SD	-	-	-	-	-
	Jumlah	54	54	-	-	54

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Pengajaran menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada tabel 3.1.4.2 sebagai berikut :

Tabel 3.1.4.2.
Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Golongan I/a	1	1	-	-	1
	Golongan I/b	-	-	-	-	-
	Golongan I/c	-	-	-	-	-
	Golongan I/d	-	-	-	-	-
	Jumlah Gol I	1	1	-	-	1
2.	Pengatur Muda (II/a)	4	4	-	-	4
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	2	2	-	-	2
	Pengatur (II/c)	2	2	-	-	2
	Pengatur Tingkat I (II/d)	7	7	-	-	7
	Jumlah Gol II	15	15	-	-	15
3.	Penata Muda (III/a)	15	15	-	-	15
	Penata Muda Tk.I (III/b)	2	2	-	-	2
	Penata (III/c)	1	1	-	-	1
	Penata Tingkat I (III/d)	14	14	-	-	14
	Jumlah Gol III	32	32	-	-	32
4.	Pembina (IV/a)	3	3	-	-	3
	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	2	-	-	2
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1	-	-	1
	Jumlah Gol IV	6	6	-	-	6

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah Pejabat Struktural Dinas Pendidikan dan Pengajaran menurut Jabatan Struktural dan Fungsional terdapat pada tabel 3.1.4.3 sebagai berikut :

Tabel 3.1.4.3.
Pegawai Menurut jabatan Struktural dan Fungsional

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Menurut Jabatan Struktural					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II b	1	1	-	-	1
	Eselon III a	5	5	-	-	5
	Eselon IV a	14	14	-	-	14
	Fungsional	7	7	-	-	7
	Staf	21	21	-	-	21
	Jumlah	48	48	-	-	48
2.	Menurut Jabatan Fungsional					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II b	-	-	-	-	-
	Eselon III a	-	-	-	-	-
	Eselon IV a	-	-	-	-	-
	Fungsional	-	-	-	-	-
	Staf	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-

1.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

a. Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 Dinas Pendidikan dan Pengajaran memperoleh alokasi anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukkan bagi Gaji Pegawai sebesar Rp. 56.694.311.325 Dan sampai akhir bulan Desember 2007 telah direalisasikan (dibelanjakan) sebesar Rp. 52.638.473.230 dengan sisa (saldo) sebesar Rp. 4.055.838.095.-

b. Belanja Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 94,12 % dengan rincian pada tabel 3.1.5. sebagai berikut :

Tabel 3.1.5.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi				Selisih Anggaran (Rp.)	Capaian Indikator Kinerja (%)
			Fisik (%)	Keuangan				
				(Rp.)	(%)			
1.	Belanja Pegawai	3.307.760.800	7,935	2.169.339.100	5,204	1.138.421.700	100,00	
2.	Belanja Barang Jasa	30.144.889.200	72,312	29.021.592.156	69,618	1.123.297.044	100,00	
3.	Belanja Modal	8.234.400.000	19,753	8.044.225.155	19,297	190.174.845	100,00	
	Jumlah	41.687.050.000	100,000	39.235.216.411	94,118	2.451.833.589	100,00	

1.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Adapun Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran pada tahun 2007 adalah berdasarkan :

-) Musrenbang Desa
-) Musrenbang Kecamatan
-) Musrenbang Kabupaten
-) Usulan dengan Skala Prioritas

1.7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran sampai dengan tahun 2007 sebagaimana pada tabel 3.1.7. berikut :

Tabel 3.1.7.
Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis>Nama Barang	Merk/Tahun Pembuatan	Jumlah		Harga Sat. (Rp.)	Kondisi
			Vol	Sat		
1	2	3	4	5	6	7
I	Tanah & Bangunan					
1.	Tanah Bangunan/Kantor	-	-	-	-	-
2.	Bangunan Kantor Induk	-	-	-	-	-
3.	Bangunan Kantor Dinas Dikjar	-	1	Buah	-	Baik
4.	Bangunan Kantor Dinas Cabang	-	3	Buah	-	Baik
5.	Bangunan Gedung Aula	-	1	Buah	471.930.0000	Baik
6.	Bangunan Tempat Parkir	-	64	M ²	-	Baik
7.	Pagar Keliling	-	-	-	-	-
II	Perlengkapan Gedung Kantor					
1.	Teralis Besi Kantor	-	-	-	-	-
2.	Teralis Besi	-	-	-	-	-
3.	Sumur Pompa	-	-	-	-	-
4.	Horden Kantor	-	8	-	-	Baik
5.	Horden Aula	-	1	-	-	Baik
6.	Meja dan Kursi Kepala	-	1	-	-	Baik
7.	Meja & Kursi Kabid/Sekretaris	-	5	-	-	Baik
8.	Meja & Kursi Kasi dan Staff	-	60	-	-	Baik
9.	Meja Rapat	-	1	Paket	-	Baik
10.	Meja	-	-	-	-	-
11.	Meubelair Ruang Pimpinan	-	1	Paket	-	Baik
12.	Meja, Kursi Ruang Tamu	-	1	-	-	Baik
13.	Kursi Lipat	-	150	-	-	Baik
14.	Filling Kabinet	-	-	-	-	-
15.	Lemari Besi 2 Pintu	-	-	-	-	-
16.	Rak Arsip	-	-	-	-	-
17.	Podium	-	-	-	-	-
18.	Tiang Bendera	-	1	-	-	Baik
19.	Kipas Angin	-	2	-	-	Baik
III	Peralatan Gedung Kantor					
1.	AC diruang Pimpinan	-	1	-	-	Baik
2.	AC diruang	-	6	-	-	Baik
3.	Genset	-	-	-	-	-
4.	Kulkas	-	-	-	-	-
5.	Mesin Pemotong Rumput Gendong	-	-	-	-	-
6.	Mesin Pemotong Rumput Dorong	-	-	-	-	-
7.	Sound Sistem	-	2	-	-	Baik

IV	Peralatan & Perlengkapan Kantor					
1.	Komputer / PC	-	10	-	-	Baik
2.	Note Book	-	-	-	-	-
3.	Printer	-	10	-	-	Baik
4.	LCD Projector	-	2	-	-	Baik
5.	Wireless	-	-	-	-	-
6.	GPS	-	1	-	-	Baik
7.	Telepon	-	2	-	-	Baik
8.	Kamera	-	-	-	-	-
V	Kendaraan Dinas / Operasional					
1.	Kendaraan Roda Empat	-	1	-	-	Baik
2.	Kendaraan Roda Dua	-	18	-	-	R.Ringan
VI	Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor					
1.	Daya Listrik yang digunakan	5.500	1	-	-	Baik
VII	Rumah Jabatan / Dinas					
1.	Luas Bangunan	-	-	-	-	-
2.	Fasilitas yang ada didalamnya	-	-	-	-	-

1.8. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
1.	Masih rendahnya mutu lulusan di setiap jenjang & jenis pendidikan.	Meningkatkan mutu tenaga guru, meningkatkan ketersediaan sarana belajar mengajar di sekolah.
2.	Adanya perubahan sistem kurikulum di setiap jenjang dan jenis pendidikan.	Melakukan sosialisasi yang intensif berkenaan dengan pemberlakuan kurikulum yang berlaku sekarang (KTSP).
3.	Masih rendahnya anggaran pembangunan dibidang pendidikan.	Meningkatkan anggaran pendidikan secara bertahap sesuai keuangan dan kebutuhan prioritas pembangunan.
4.	Rendahnya mutu guru disetiap jenjang dan jenis pendidikan.	Meningkatkan mutu dan kualitas kompetensi guru-guru sesuai ketentuan dan kebutuhan.
5.	Masih rendahnya APK/APM SMP/SMA/SMK.	Meningkatkan pencapaian APK/APM SMP/SMA secara bertahap untuk menuju Wajib Belajar 12 tahun.

1.9 Hal - hal Lain

Sebagai indikator keberhasilan dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Lomba bidang study Tingkat SD
 - Bahasa Indonesia Juara II Tingkat Propinsi
 - Melukis Juara II Tk. Propinsi
 - Sinopsis Bahasa Indonesia Juara III Tingkat Propinsi
 - Teknologi Informasi Komunikasi Juara I Tingkat Propinsi dan Mewakili Kalteng Ke Tingkat Pusat
 - Kerajinan Tangan Harapan II Tingkat. Propinsi
 - Membuat Alat Teknologi Sederhana Harapan III Tingkat. Propinsi
2. Lomba Sains MIPA Tingkat SD
 - Matematika Juara III Tingkat Propinsi
 - IPA Juara II Tingkat Propinsi , Juara III Tingkat Nasional
3. Olimpiade Sains Tingkat SMA
 - Bidang Ekonomi Juara I Tingkat Propinsi
 - Bidang Fisika Juara I Tingkat Propinsi
 - Bidang Ekonomi Juara III Tingkat Propinsi
4. Porseni :
 - Tingkat SD :
 - ~ Olahraga Renang Gaya Bebas Juara I Putra Tingkat Propinsi
 - ~ Olahraga Renang Gaya Bebas Juara III Putra Tingkat Propinsi
 - ~ Olahraga Renang Gaya Dada Juara I Putra Tingkat Propinsi
 - ~ Olahraga Renang Gaya Dada Juara II Putra Tingkat Propinsi
 - ~ Olahraga Pencak Silat Juara I Putra/Putri Tingkat Propinsi
 - ~ Olahraga Karate Juara II Putra Tingkat Propinsi

2. Bidang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan telah menggariskan tujuan diselenggarakan pembangunan kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan visi pembangunan kesehatan secara nasional Indonesia Sehat 2010, visi pembangunan kesehatan di kabupaten Kotawaringin Barat yang telah ditetapkan adalah "Kabupaten Kotawaringin Barat Sehat Tahun 2010". Untuk mencapai visi tersebut telah ditempuh melalui pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam Renstra Dinas Kesehatan 2006-2010 dimuat perencanaan kurun waktu 5 tahun yang bertujuan menguraikan langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan program pembangunan bidang kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Tahun 2000 Nomor Seri D) dan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 30 Nopember 2002 tentang uraian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Urusan Wajib sesuai dengan tupoksi sebagai berikut :

2.1. Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas Kesehatan telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Kesehatan dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dinas Kesehatan melaksanakan 12 (dua belas) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel : 3.2.1 sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	Kesehatan	1.Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
2		2.Pelayanan Kesehatan Masyarakat	2. Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Pelayanan kesehatan penduduk mis kin di Puskesmas dan jaringannya 2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat. 3. Penyediaan Biaya operasional & pemeliharaan.
			3. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Pengembangan media promosi dan informasi hidup sehat 2. Penyuluhan Masyarakat pola hidup sehat
			4. Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Penyusunan Petayanan Masyarakat Kurang Gizi 2. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 3. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY),Kurang Vit-A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.

			5. Program Lingkungan Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian pengembangan Lingkungan Sehat 2. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
			6. Pencehagan dan Pemberantasan Penyakit Menular	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 2. Pengadaan alat-alat fogging dan bahan fogging 3. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 4. Peningkatan imunitas. 5. Peningkatan Surveilance epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 6. Peningkatan Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan penyakit menular
			7. Standarisasi Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pengembangan Standar 2. Pembangunan dan Pemutakhiran Data berdasar Standar Pelayanan Kesehatan. 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan .
			8. Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Pustu jaringannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Puskesmas Keliling 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu 4. Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Perawatan 5. Peningkatan Pustu Menjadi Puskesmas 6. Pemeliharaan Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas 7. Pemeliharaan Berkala Puskesmas Pembantu 8. Rehabilitasi sedang / berat Puskesmas Pembantu
			9. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

			10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	1. Penyuluhan Kesehatan Anak Balita
			11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lnsia	1. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
			12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1. Penyuluhan Kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 2. Perawatan Berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

2.2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam Tahun 2007 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan adalah Sebagai Berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN SPM 2007 (%)	
			Target terukur sesuai dengan sasaran	Tingkat Capaian (%)
1	2		3	5
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1	Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 78 %	93,00 %
		2	Pengadaan obat essensial 94 %	100 %
		3	Pengadaan obat generic 100 %	89,25 %
		4	Penulisan obat generic 84 %	89,29 %
2.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1	Cakupan kunjungan Bumil K4 84 %	76,94 %
		2	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 82%	72,63 %
		3	Cakupan Bumil Risti yang dirujuk 55 %	44,66 %
		4	Cakupan Kunjungan neonates 75 %	76,64 %
		5	Cakupan kunjungan Bayi 75 %	87,65 %
		6	Cakupan pelayanan BBLR 55 %	100 %
		7	Peserta KB aktif 64 %	73,15 %
		8	Cakupan rawat jalan 12 %	32,40 %
		9	Cakupan rawat inap 1,3 %	1,30 %
		10	Pelayanan kesehatan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 8%	0,09 %
		11	Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonates 62 %	Tdk ada data
		12	Ibu hamil resiko tinggi/komplikasi tertangani 56%	40,09 %
		13	Neonatus resiko tinggi/komplikasi 56 %	Tdk ada data

1	2		3	5
3	Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Pustu jaringannya	1	Sarana Kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat 60 %	64,29%
4	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar 50 %	16,43%
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan gakin dan masyarakat rentan 100 %	66,82%
		2	Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal	
6	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Rumah tangga sehat 44 %	30,83%
		2	Bayi yang mendapat ASI eksklusif 56 %	5,81%
		3	Desa dengan garam beryodium 75 %	100 %
		4	Posyandu Purnama dan mandiri 31 %	15,29 %
		5	Upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh petugas Kesehatan 8 %	10,37 %
7	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1	Balita naik berat badanya (N/D) 80 %	72,06 %
		2	Balita bawah garis merah 6,8%	4,24 %
		3	Cakupan Balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun 90 %	84,94 %
		4	Cakupan bumil dapat 90 tablet besi 78 %	74,10 %
		5	Pemberian makanan pendamping ASI pada bayi BGM dari Gakin 94 %	100 %
		6	Balita gizi buruk mendapat perawatan 100 %	100%
		7	Cakupan WUS yang mendapat kapsul yodium 40 %	52,09 %
8	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1	Institusi yang dibina 62 %	71,86 %
		2	Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes 95%	92,24 %
		3	Tempat tempat umum yang memenuhi syarat 65 %	70,02 %
9	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1	Desa/Keluarahn UCI 100 %	62,50 %
		2	a. Desa KLB yang ditangani < 24 jam 82 % b. Kecamatan bebas rawan gizi 56 %	100 % 66,70 %
		3	AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 tahun 2 kasus	2
		4	Angka kesembuhan TB paru BTA positif 85%	83,09 %
		5	Cakupan Balita dengan pneumonia yang ditangani 94 %	100 %
		6	a. Klien mendapat penanganan HIV/AIDS 100 % b. IMS yang diobati 100 %	100 % 100 %
		7	Penderita DBD yang ditangani 100 %	100 %
		8	Penderita Diare yang ditangani 85 %	100 %
		9	Penderita Malaria yang di obati 100 %	100 %
		10	Penderita RFT > 90 %	100 %
		11	Kasus filariasis yang ditangani 66 %	100 %
		12	Jumlah kasus gigitan hewan tersangka rabies	

1	2		3	5
10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	1	Cakupan tumbuh kembang anak balita dan anak pra sekolah 75 %	50,59 %
		2	Cakupan pemeriksaan anak SD 85 %	95,71 %
		3	Cakupan pelayanan kesehatan remaja 35 %	15,31 %
11	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	1	Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut 44%	55,89 %

2.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang disertai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 18 Tahun 2002 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 30 Nopember 2002 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja.

Dinas Kesehatan adalah sebagai unsure teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian, dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun Susunan Organisasi , Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan adalah :

a. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

1. Kepala Dinas Kesehatan;
2. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi empat kepala Sub Bagian meliputi :
 - a. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 - d. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program.
3. Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesehatan membawahi empat Kepala Seksi :
 - a. Kepala Seksi Pembinaan Puskesmas;
 - b. Kepala Seksi Pembinaan Rumah Sakit;
 - c. Kepala Seksi Farmasi;
 - d. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Swasta.
4. Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit membawahi empat Kepala Seksi :
 - a. Kepala Seksi Pengamatan Penyakit;
 - b. Kepala Seksi Imunisasi;
 - c. Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - d. Kepala Seksi Penanggulangan Wabah.
5. Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Lingkungan membawahi empat Kepala Seksi
 - a. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan;
 - b. Kepala Seksi Pengawasan Tempat-tempat Umum (TTU);
 - c. Kepala Seksi Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM);
 - d. Kepala Seksi Penyehatan Air.

6. Kepala Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan membawahi empat Kepala Seksi :
 - a. Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan;
 - b. Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat;
 - c. Kepala Seksi Usaha Kesehatan Sekolah;
 - d. Kepala Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

7. Kepala Sub Dinas Kesehatan Ibu dan Anak membawahi empat Kepala Seksi :
 - a. Kepala Seksi Kesehatan Ibu;
 - b. Kepala Seksi Kesehatan Anak;
 - c. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga;
 - d. Kepala Seksi Gizi.

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Puskesmas : 12 buah;
 - b. Puskesmas Pembantu (Pustu) : 75 buah;
 - c. Gudang Farmasi : 1 (satu) buah;
 - d. Labkesda : 1 (satu) buah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Tugas pokok Dinas Kesehatan Daerah adalah membantu Kepala Daerah menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan meliputi fungsi : Perumusan kebijakan, teknis pelaksanaan dan pengendalian, pembinaan dan perijinan di bidang kesehatan yang dipilah ke dalam kelompok : Pembinaan kesehatan; Pencegahan penyakit; Pembinaan kesehatan lingkungan; Penyuluhan kesehatan; Kesehatan Ibu dan Anak. Pengelolaan tugas umum ketatausahaan bidang kesehatan. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

c. Visi dan Misi Dinas Kesehatan

Dengan mengacu pada visi Kepala Daerah Kotawaringin Barat serta dalam rangka mencapai kondisi Indonesia Sehat 2010, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu MASYARAKAT YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT . Gambaran yang ingin dicapai pada masa itu adalah masyarakat yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada empat misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Empat misi tersebut meliputi :

1. Menggerakkan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Berwawasan Kesehatan.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang merata, terjangkau dan didukung oleh Lapisan Masyarakat.
3. Meningkatkan Kesehatan Individu, Keluarga, Masyarakat dan Lingkungannya.
4. Mendorong Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat.

d. Kebijakan dan Strategi Dinas Kesehatan

Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan menuju tercapainya Kabupaten Kotawaringin Barat Sehat 2010, maka diselenggarakan kebijakan umum pembangunan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat

Perilaku hidup sehat masyarakat sejak usia dini perlu ditingkatkan melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pendidikan kesehatan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Peranan masyarakat dalam pembangunan kesehatan terutama melalui konsep pembangunan kesehatan masyarakat tetap diarahkan dan dikembangkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan masyarakat serta kesinambungan upaya kesehatan.

Kemitraan swasta lebih dikembangkan dengan memberikan kemudahan dalam pembangunan sarana pelayanan kesehatan dengan memperhatikan efisiensi keseluruhan pelayanan kesehatan. Kemitraan swasta juga lebih ditingkatkan dalam bidang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan.

2. Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan pemukiman, tempat kerja dan tempat-tempat umum akan lebih ditingkatkan melalui penyediaan serta pengawasan kualitas air yang memenuhi persyaratan, penyediaan sarana pembuangan limbah serta berbagai sarana sanitasi lingkungan lainnya.

Dengan adanya sarana tersebut diharapkan penduduk dapat hidup sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang ditularkan melalui atau disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Kualitas air ditingkatkan untuk menjamin penduduk hidup sehat dan produktif, sehingga masyarakat terhindar dari keadaan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

Seiring dengan makin kompleksnya masalah kesehatan lingkungan serta memenuhi kebutuhan akan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, maka laboratorium kualitas air yang ada di Dinas Kesehatan akan dikembangkan menjadi laboratorium kualitas lingkungan yang mampu memeriksa sampel air, tanah, udara, air limbah, serta kualitas makanan dan minuman, juga pencemaran oleh pestisida.

Program lain yang terkait dengan paradigma sehat akan dikembangkan kegiatan klinik sanitasi sebagai upaya integrasi dalam upaya pemberantasan penyakit berbasis lingkungan.

3. Perbaikan Gizi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan anak balita, melalui penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY dan penanggulangan kurang vitamin A. Untuk mewujudkan keadaan tersebut diprioritaskan kebijakan program gizi melalui upaya pendidikan gizi, promosi kadarzi, intervensi kelainan gizi, baik yang menyangkut kasus gizi buruk maupun kekurangan gizi mikro utama seperti GAKY, KVA dan anemia gizi serta meningkatkan surveilans ketat gizi.

4. Peningkatan Upaya Kesehatan

Dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, upaya kesehatan diprioritaskan untuk mengatasi dampak krisis, di samping mempertahankan dan meningkatkan pembangunan kesehatan. Perhatian khusus untuk mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko tinggi dan keluarga-keluarga miskin agar kesehatannya tetap terpelihara dan dapat hidup produktif. Prioritas diberikan dalam upaya pencegahan penyakit menular dan wabah yang cenderung makin meningkat.

Peningkatan upaya kesehatan dilakukan dengan menggalang kerjasama/kemitraan sektor swasta, dimana peningkatan sektor pemerintah lebih mengutamakan pada pelayanan yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat. Sedangkan pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan penyakit dapat dilaksanakan oleh pihak sektor swasta.

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan sumber daya tenaga kesehatan harus menunjang upaya pembangunan kesehatan dan diarahkan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang ahli dan trampil sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman kepada Tuhan Yang Mahaesa serta berpegang pada pola pengabdian kepada Bangsa dan Negara serta etika profesi.

Peningkatan tenaga kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan atau daya guna tenaga dan penyediaan jumlah serta mutu tenaga kesehatan yang mampu melaksanakan program pembangunan.

6. Peningkatan Kerjasama Lintas sektor

Peningkatan kerja sama lintas sektor untuk mengoptimalkan hasil pembangunan berwawasan kesehatan, maka kerja sama lintas sektor perlu digalang dan lebih dimantapkan secara seksama.

Sosialisasi masalah-masalah kesehatan kepada lintas sektor terkait perlu dilakukan secara intensif dan terbuka agar berjalan secara berkesinambungan, yang mencakup dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tahap penilaian.

7. Peningkatan manajemen Pembangunan kesehatan

Manajemen pembangunan kesehatan perlu ditingkatkan terutama melalui peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait, antara program kesehatan dan pelaku dalam pembangunan kesehatan.

Manajemen kesehatan yang terdiri dari perencanaan, penggerakkan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian diselenggarakan secara sistematis guna menjamin upaya kesehatan secara terpadu dan menyeluruh.

Manajemen perlu didukung oleh sistem informasi yang baik guna menghasilkan kepastian yang benar dan cara kerja yang efisien. Sistem informasi tersebut akan dikembangkan secara komprehensif di berbagai tingkatan administrasi kesehatan sebagai pengembangan administrasi yang modern.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah perlu peningkatan kemampuan manajemen sehingga dapat dilaksanakan perencanaan dan pembinaan secara bertanggungjawab. Peningkatan kemampuan manajemen dilaksanakan secara bertahap dan dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Strategi

Mengacu kepada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, strategi pembangunan kesehatan yang dirumuskan untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat Sehat 2010 berikut faktor-faktor kritis keberhasilannya (*critical success factors*) adalah sebagai berikut:

1. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat

Dalam era reformasi masyarakat harus dapat berperan aktif dalam pembangunan kesehatan, dimulai sejak penyusunan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mendorong masyarakat agar mampu secara mandiri menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan kesinambungan pelayanan kesehatan.

Dalam pemberdayaan perlu terus dikembangkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), dalam rangka mewujudkan **desa siaga** menuju Desa Sehat. Pengembangan Desa Siaga harus melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) utamanya PKK, organisasi keagamaan dan Sektor swasta.

Keberhasilan Desa Siaga ditandai oleh antara lain berkembangnya perilaku hidup bersih dan sehat, serta dikembangkan dan beroperasinya UKBM yang mampu memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, keluarga berencana, perawatan kehamilan dan pertolongan persalinan, gizi dan penanganan kedaruratan kesehatan.

2. Meningkatkan Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Sesuai dengan paradigma sehat, kita harus mengutamakan pada upaya kesehatan masyarakat yang dipadukan secara serasi dan seimbang dengan upaya kesehatan perorangan. Dinas kesehatan memfasilitasi upaya revitalisasi system kesehatan dasar dan rujukandengan memperluas jaringan yang efektif, efisien, serta peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar yang ditetapkan.

Sejalan dengan upaya peningkatan kualtas pelayanan kesehatan, harus dilakukan pula peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terdistribusi sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan perlu ditunjang dengan administrasi kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang memadai, serta penelitian dan pengembangan kesehatan.

3. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan

Peningkatan surveilans dan monitoring dilaksanakan dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaporan masalah kesehatan diwilayahnya. Dalam keadaan daarurat kesehatan dilakukan pengerahan anggaran dan tenaga pelaksana pada saat investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan respon cepat.

Disamping dikembangkan dan ditingkatkan pula sistim peringatan dini dan penunjang kedaruratan, serta peningkatan system informasi kesehatan pada semua tingkat administrasi pemerintahan baik kabupaten sampai ke desa.

4. Meningkatkan pembiayaan kesehatan

Dalam penggalan dana guna menjamin ketersediaan sumber daya pembiayaan kesehatan secara bertahap pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah dapat dipayakan sebesar 15 % dari APBD Kotawaringin Barat.

Dalam upaya pengelolaan sumber daya pembiayaan yang efektif dan efisien , khususnya dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat dikembangkan system jaminan kesehatan sosial (JPKM) yang dimulai dengan Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin). Fasilitas pelayanan kesehatan didaerah akan selalu meningkatkan kualitas pelayanan yang ditopang dengan pembiayaan operasional dari pemerintah.

2.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- a. Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan menurut pendidikan terdapat dalam Tabel 3.2.4.1.

Tabel 3.2.4.1.
Pegawai Menurut Pendidikan

NO	JABATAN	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH			KET
			Tenaga yg ada /posisi terakhir	Kebutuhan	Kekurangan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dokter	Dokter (S-1)	21	25	4	(S2 2 org)
2	Dokter Gigi	Dokter Gigi (S-1)	8	13	5	(S2 2 org)
3	Kesehatan Masyarakat	FKM (S-1)	12	15	3	(S2 2 org)
4	Fisioteraphi	AKFIS (D-3)	2	3	1	
5	Pengatur rawat Gigi (D-3 AKG)	Pengatur rawat Gigi (D-3)	2	3	1	
6	Pengatur Rawat Gigi (SPRG)	Pengatur Rawat Gigi (SLTA)	12	12	0	
7	Perawat (D-3 Akper)	AKPER (D-3)	36	63	27	
8	Perawat (SPK)	Perawat (SPK)	85	85	0	

1	2	3	4	5	6	7
9	Pembantu Perawat (PCPM)	Pembantu Perawat (PCPM)	1	1	0	
10	Pembantu Perawat (SPKU)	Pembantu Perawat (SPKU)	4	4	0	
11	Bidan (D-3 Akbid)	Akbid (D-3)	18	40	22	
12	Bidan	Bidan (SLTA)	79	79	0	
13	Sanitarian (D3 Sanitasi / APK)	APK / AKL (D-3)	6	10	4	
14	Sanitarian (SPPH)	SPPH (D-1)	9	9	0	
15	Nutrisionis (S-1 Gizi)	S-1 Gizi	1	1	0	
16	Nutrisionis (D-3 AKZI)	AKZI (D-3)	5	8	3	
17	Nutrisionis (SPAG)	GIZI (D-1)	5	5	0	
18	Analisis Kesehatan (D3 Analisis)	Analisis Kesehatan (D3 Analisis)	3	9	6	
19	Analisis Kesehatan (SMAK)	Analisis Kesehatan (SLTA)	7	7	0	
20	Pekarya Kesehatan (SMA)	Pekarya Kesehatan (SMA)	34	40	6	
21	Pekarya Kesehatan (SMP)	Pekarya Kesehatan (SMP)	4	4	0	
22	Apoteker	Apoteker (S-1)	2	6	4	
23	Farmasi (D-3 Farmasi)	Farmasi (D-3 Farmasi)	0	7	7	
24	Farmasi (SAA)	Farmasi / SAA (SLTA)	9	11	2	
25	Penata Rontgen	Akpro (D-3)	0	1	1	
26	Pengadministrasi (S1)	Pengadministrasi (S1)	6	6	0	
27	Pengadministrasi (D-3 computer)	Computer (D-3)	1	3	2	
28	Pengadministrasi (D-3 Keuangan)	Akuntansi (D-3)	1	3	2	
29	Pengadministrasi (SLTA)	SMA, sederajat (SLTA)	19	26	7	
30	Arsiparis (D-3)	Arsiparis (D-3)	0	1	1	
31	Pustakawan (D-3)	Pustakawan (D-3)	0	1	1	
32	Penjaga / Satpam (SLTA)	SMA dan sederajat (SLTA)	0	16	16	
33	Sopir (SLTA)	SMA dan sederajat (SLTA)	0	1	1	
34	Tukang Kebun (SLTP)	SMP dan sederajat (SLTP)	1	14	13	
35	Pembantu (SD)	SD	4	4	0	
JUMLAH			397	536	139	

b. Jumlah Pegawai menurut Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Menurut Pangkat dan Golongan ,
terdapat pada tabel 3.2.4.2.

Tabel 3.2.4.2
Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	Golongan I/a					1
	Golongan I/b					
	Golongan I/c					
	Golongan I/d					
	Jumlah Golongan I					1
2	Golongan II/a					75
	Golongan II/b					7
	Golongan II/c					77
	Golongan II/d					40
	Jumlah Golongan II					199
3	Golongan III/a					57
	Golongan III/b					82
	Golongan III/c					22
	Golongan III/d					14
	Jumlah Golongan III					165
4.	Golongan IV/a					3
	Golongan IV/b					1
	Golongan IV/c					1
	Golongan IV/d					
	Jumlah Golongan IV					5

- c. Jumlah Pejabat Struktural Dinas Kesehatan Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional terdapat dalam table 3.2.4.3.

Tabel 3.2.4.3.
Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	Menurut Jabatan Struktural					
	Eselon I					
	Eselon II b	1	0	1		1
	Eselon III a	6	5	1		6
	Eselon IV a	26	22	2		24
	Fungsional Staf					40
	Jumlah					71
2	Jabatan Fungsional / Pekarya Kesehatan					329
	Jumlah					329

- d. Jumlah Pegawai Tidak Tetap

No	Uraian	Jumlah
1	Dokter Umum	4
2	Dokter Gigi	1
3	Bidan	5
	Jumlah	10

2.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

a. Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 Dinas Kesehatan memperoleh alokasi anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukkan bagi gaji pegawai sebesar Rp. 10.169.931.415,00 dan sampai akhir Bulan Desember 2007 telah direalisasikan (dibelanjakan) sebesar Rp.9.449.713.760 dengan sisa saldo sebesar Rp. 720.217.655,00.

b. Belanja Langsung

Realisasi belanja langsung dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif sebesar 92.09 % dengan rincian pada tabel 3.2.5. sebagai berikut :

Tabel 3.2.5.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Selisih Anggaran (Rp.)	Capaian Indikator Kinerja (%)
			Fisik %	Keuangan (Rp.) %		
1.	Belanja Pegawai	1.477.407.200		1.184.428.750	292.978.450	80,16
2.	Belanja Barang Jasa	5.174.450.775		4.233.210.750	941.246.017	97,34
3.	Belanja Modal	18.145.936.025		17.664.319.047	481.616.978	97,34
	Jumlah	24.797.800.000	94,45	23.036.213.555	1.761.586.445	92,90

Secara terinci capaian realisasi fisik dan keuangan adalah sebagai berikut :

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan	%
Program Administrasi Perkantoran	991.267.750		811.964.933	81,91
1.1. Penyediaan Jasa Surat menyurat	22.672.100	100,00	13.593.750	59,96
1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	182.120.000	100,00	87.517.033	48,05
1.3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	34.140.000	100,00	34.140.000	100,00
1.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	17.982.650	100,00	9.252.800	51,45
1.5. Penyediaan jasa perbaikan peralat kerja	7.500.000	75,00	4.250.000	56,67
1.6. Penyediaan alat tulis kantor	38.691.000	90,00	28.232.600	72,97
1.7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.719.500	90,00	18.215.000	73,69
1.8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	36.712.500	100,00	29.425.250	80,15
1.9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	154.050.000	100,00	152.462.500	98,97
1.10. Penyediaan bhn bacaan & peraturan perundang-undangan	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
1.11. Penyediaan makanan dan minuman pegawai	395.680.000	100,00	369.910.000	93,49
1.12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	75.000.000	100,00	62.966.000	83,95
Program Sarana prasarana Apatur	4.681.497.425		4.576.765.150	97,76
2.1. Pembangunan Rumah Dinas	189.500.000	100,00	188.779.900	99,62
2.2. Pembangunan Gedung Kantor	1.088.240.000	100,00	1.063.858.800	97,76
2.3. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	735.000.000	100,00	692.400.000	94,20
2.4. Pengadaan peralatan gedung kantor	55.197.500	100,00	55.139.500	99,89
2.5. Pengadaan meubelair	1.355.365.525	100,00	1.352.548.500	99,79
2.6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	90.400.000	100,00	90.300.000	99,89
2.7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	5.000.000	100,00	3.975.000	79,50
2.8. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	253.890.000	100,00	253.440.000	99,82
2.9. Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor	908.904.400	100,00	876.323.450	96,42
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	106.600.000		105.970.000	99,41
3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	106.600.000	100,00	105.970.000	99,41
Program fasilitas pindah/ purna tugas PNS	10.000.000	-	-	-
4.1. Pemulangan Pegawai yang Pensiun	10.000.000	0,00	0	0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	216.205.600		134.049.000	62,00
5.1. Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	216.205.600	75,00	134.049.000	62,00
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	4.500.000		4.500.000	100,00
6.1. Penyusunan laporan kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
6.2. Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
6.3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00

1. Program Obat dan perbekalan Kesehatan	3.488.485.000		3.424.492.300	98,17
1.1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	3.478.085.000	100,00	3.414.092.300	98,16
1.2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	10.400.000	100,00	10.400.000	100,00
2. Program upaya kesehatan masyarakat	1.345.870.000		1.173.219.500	87,17
2.1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya	63.502.000	90,00	17.630.000	27,76
2.2. Peningkatan kesehatan masyarakat	166.094.000	90,00	92.386.000	55,62
2.4. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	1.116.274.000	96,00	1.063.203.500	95,25
3. Program Promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat	248.179.400		182.241.400	73,43
3.1. Pengembangan media promosi dan informasi hidup sehat	57.368.000	100,00	56.947.000	99,27
3.2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	190.811.400	90,00	125.294.400	65,66
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	218.867.000		179.178.000	81,87
4.1. Penyusunan peta masyarakat kurang gizi	4.460.000	100,00	4.460.000	100,00
4.2. Pemberian tambahan makanan dan vitamin	192.892.000	100,00	157.338.000	81,57
4.3. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), kurang vit-A dan kekurangan zat mikro lainnya.	21.515.000	100,00	17.380.000	80,78
5. Program Lingkungan Sehat	170.632.250		159.957.250	93,74
5.1. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	134.791.800	97,00	126.816.800	94,08
5.2. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	35.840.450	100,00	33.140.450	92,47
6. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	1.229.866.675		826.288.775	67,19
6.1. Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk	141.310.000	100,00	129.768.500	91,83
6.2. Pengadaan alat-alat fogging dan bahan fogging	236.650.000	100,00	227.889.500	96,30
6.3. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	390.569.175	93,48	271.145.775	69,42
6.4. Peningkatan Imunisasi	77.500.000	95,00	55.430.000	71,52
6.5. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	185.333.000	100,00	121.108.000	65,35
6.6. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit	198.504.500	50,00	20.947.000	10,55
7. Program standarisasi pelayanan kesehatan	361.323.000		152.193.000	42,12
7.1. Evaluasi pengembangan standar pelayanan	98.374.000	80,00	56.635.000	57,57
7.2. Pembangunan dan pemutakhiran data berdasar standar pelayanan kesehatan	35.429.000	100,00	29.183.000	82,37
7.3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan standar pelayanan kesehatan dan program	227.520.000	50,00	66.375.000	29,17

8. Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu jaringannya	11.441.286.000		1.102.242.847	97,04
8.1. Pengadaan Puskesmas Keliling	1.357.800.000	100,00	1.346.950.000	99,20
8.2. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas	1.698.420.000	100,00	1.490.171.500	87,74
8.3. Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu	499.200.000	100,00	497.885.000	99,74
8.4. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan	515.000.000	100,00	502.234.000	97,52
8.5. Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas	370.800.000	100,00	361.749.400	97,56
8.6. Pemeliharaan/berkala sarana & prasarana Puskesmas	51.850.000	100,00	44.939.750	86,67
8.7. Pemeliharaan Berkala Puskesmas Pembantu	110.000.000	100,00	110.000.000	100,00
8.8. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu	6.838.216.000	100,00	6.748.313.197	98,69
9. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	17.653.000		11.662.000	66,06
9.1. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	17.653.000	100,00	11.662.000	66,06
10. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita	77.202.900		64.494.900	83,54
10.1. Penyuluhan Kesehatan anak balita	77.202.900	100,00	64.494.900	83,54
11. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	54.328.000		45.896.000	84,48
11.1 Pelayanan pemeliharaan kesehatan	54.328.000	100,00	45.896.000	84,48
12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	134.036.000		81.098.500	60,51
12.1. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	28.730.000	100,00	19.680.000	68,50
12.2. Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	105.306.000	100,00	61.418.500	58,32
Jumlah	24.797.800.000	94,45	23.036.213.555	92,90

2.6. Proses Perencanaan Perencanaan

Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2007 adalah berdasarkan :

-) Usulan kegiatan yang dilaksanakan melalui forum Musrenbang tingkat kecamatan yang dilanjutkan ke forum SKPD tingkat kabupaten untuk dianalisis dan diputuskan kegiatan yang akan diakomodir dan kegiatan yang masih dipertimbangkan/ditunda.
-) Hasil usulan Puskesmas berdasarkan hasil kesepakatan Rakernis Bidang Kesehatan.
-) Masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan kebutuhan , sesuai hasil reses dalam menyerap aspirasi masyarakat.
-) Perencanaan berdasarkan kebutuhan teknis program kegiatan yang mengacu pada indicator nasional dan berdasarkan prioritas program di daerah.

2.7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas Kesehatan sampai dengan tahun 2007 sebagaimana pada table 3.2.7 berikut :

Tabel 3.2.7
Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis>Nama Barang	Merk/ Tahun Pembuatan	Jumlah		Harga Sat (Rp)	Kondisi
			Vol	Sat		
1	2	3	4	5	6	7
I	Tanah dan Bangunan					
1	Tanah Bangunan Kantor		2	Ha		Baik
2	Bangunan Kantor Induk	2006	1	Unit		Baik
3	Bangunan Gudang Obat	2005-2007	1	Unit		Baik
4	Bangunan Kantor Labkesda	Rehab 2006	2	Unit		Baik
5	Bangunan Gudang vaksin, alat program P2M	2007	1	Unit		Baik
6	Rumah penjaga gudang obat dan penjaga kantor	2007	1	Unit		Baik
7	Bangunan Tempat Parkir	2007	2	Unit		Baik
8	Pagar keliling	2007	600	M		Baik
9	Unit Puskesmas Perawatan		4	Unit		Baik
10	Unit Puskesmas Induk		9	Unit		7 unit Baik, 2 unit rusak
II	Perlengkapan Gedung Kantor					
1	Unit Pust		75	Unit		Baik 90 %
2	Teralis Besi Kantor	2006/2007	1	Set/unit		Baik
3	Sumur pompa	2007	2	Buah		Baik
4	Horden Kantor	2007	1	Paket	49.942000	Baik
5	Meja kursi kepala	2007	1	Set		Baik
6	Meja Kursi Kasubdin, Ka TU		6	Set		Baik
7	Meja dan Kursi Kasi/Staf		73	Set		Sebagian rusak
8	Meubelair ruang pimpinan		1	Set		Baik
9	Meja, Kursi Ruang Tamu	2007	1	Set		Baik
10	Kursi Lipat		100	buah		
11	Kursi kayu tunggu	2007	2	buah		Baik
12	Filling Cabinet	1982/2000	4	buah		Baik
13	Lemari besi 2 pintu		5	buah		1 rusak
14	Rak Arsip besi/kayu		9	buah		
15	Podium		1	buah		baik
16	Tiang Bendera		1	buah		baik
17	Kipas angin		4	buah		baik

1	2	3	4	5	6	7
III	Peralatan Gedung Kantor					
1	AC Pimpinan	2007	1	unit		baik
2	AC diruang Subdin, Gudang	2006/2007	7	unit		baik
3	Kulkas		7	buah		baik
4	Pemotong rumput Gendong	2007	2	buah		baik
5	Sound system		1	Set		Masih berfungsi
IV	Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
1	Komputer PC					
2	Note Book	2006/2007	9	buah		baik
3	Printer	2000/2005	2	buah		baik
4	LCD Projector	2000/2005	3	buah		2 buah baik
5	Telepon		3	buah		baik
6	Kamera		1	buah		baik
V	Kendaraan Dinas /operasional					
1	Kendaraan Roda 4		16	unit		Berfungsi
2	Ambulance		20	unit		9 rusak
3	Kendaraan Roda 2		47	unit		Masih berfungsi
4	Kendaraan Roda 2 di Puskesmas jaringannya		67	unit		
VI	Instalasi listrik /penerangan					
1	Daya listrik yang digunakan	2007	10.500	KWH		Baik
VII	Rumah Jabatan/Dinas					
1	Rujab Kadis		1	buah		Rusak ringan
2	Rumah medis/paramedis		87	buah		

2.8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Masih adanya program yang belum mencapai standar pelayanan minimal dari 56 indikator SPM yang mencapai target 31 indikator SPM sedangkan 25 indikator lainnya belum mencapai target.
2. Penetapan sasaran didasarkan atas proyeksi penduduk sehingga terjadi kesenjangan antara penetapan sasaran dan kenyataan di lapangan.
3. Permasalahan distribusi tenaga terkait dengan jenis pelayanan yang harus diberikan seperti pelayanan ibu hamil, ibu nifas, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak lainnya.
4. Masih ada indicator SPM yang belum bisa terlaksana dengan optimal di daerah terkait dengan sumber daya manusia seperti kesehatan jiwa dan kesehatan kerja.

Hambatan :

Dalam pelaksanaan program-program pelayanan kesehatan kepada masyarakat dirasakan masih adanya hambatan secara ekstern diantaranya sebagai berikut :

- a. Proses pengadaan tenaga yang masih ditentukan oleh pusat sehingga penuhi kuota tenaga kesehatan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Rendahnya pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap program kesehatan juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian target program kesehatan. Tidak tercapainya target cakupan imunisasi (UCI) di wilayah tertentu, cakupan pelayanan KIA dan cakupan perbaikan gizi masyarakat serta terjadinya kematian pada penderita DBD dan diare antara lain disebabkan karena pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap program kesehatan masih kurang.
- c. Kerjasama lintas sector belum maksimal.
- d. Kondisi alam dengan struktur tanah berawa menjadikan hambatan masyarakat untuk mendapatkan sumber air bersih serta mempengaruhi angka cakupan SPAL yang dapat menurunkan kualitas lingkungan pemukiman penduduk.
- e. Terbatasnya alokasi anggaran khususnya pembiayaan program sehingga belum maksimal penyelenggaraan dan pengembangan program-program kesehatan di masyarakat. Terutama dalam penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) diperlukan dana siaga yang setiap saat dapat dipergunakan, mengingat KLB tidak dapat diperkirakan secara tepat.
- f. Penatausahaan keuangan tidak sesuai penyerapannya dengan kebutuhan di lapangan.

Solusi :

- ~ Semua permasalahan dan hambatan baik aspek teknis, manajerial dan administratif dimana menuntut kemampuan profesional dari semua instansi terkait dalam pelaksanaan program di lapangan, sehingga perlu kesepakatan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan kerja keras dari seluruh jajaran kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- ~ Strategi yang akan ditempuh dalam mengatasi permasalahan yang ada adalah melalui konsolidasi seluruh sumber daya yang ada, penetapan sasaran obyek pelayanan yang jelas, pemantapan manajemen dan kapasitas mutu pelayanan kesehatan di mana pengambilan keputusan harus berdasarkan fakta yang ada, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan advokasi dan kemitraan kepada seluruh *stakeholder* dan pemantapan sistem informasi kesehatan.
- ~ Di era desentralisasi berbagai upaya kesehatan berangkat dari masalah dan potensi spesifik daerah, sehingga diharapkan secara bertahap program pembangunan kesehatan menuju arah yang lebih baik secara bermakna, dan pada akhirnya akan terwujudnya visi daerah Masyarakat mandiri untuk hidup Sehat dalam mewujudkan Kotawaringin Barat Sehat 2010.

2.9. Hal – hal lain yang perlu dilaporkan

- ~ Dalam Program Administrasi Perkantoran telah dianggarkan dan dilaksanakan kebutuhan rutin, meskipun dalam penyerapan dananya belum maksimal dan dalam menunjang sarana prasarana perkantoran telah diupayakan fasilitas yang memadai dan menunjang kinerja aktivitas pekerjaan.
- ~ Dalam upaya pembinaan kepegawaian telah dilakukan upaya peningkatan disiplin, kegiatan kerohanian, tunjangan kinerja dan tunjangan profesi dan tempat tugas terpencil. Pelatihan dan pertemuan yang menyangkut teknis kepegawaian, perencanaan, dan pengelolaan keuangan terus dilaksanakan dalam upaya konsolidasi dan meningkatkan kapasitas aparatur untuk menunjang fungsi manajemen dan pelayanan administrasi.

3. Ketahanan Pangan

3.1. Program dan Kegiatan

Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat ditangani oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat dimana pada tahun anggaran 2007 melaksanakan 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel : 3.3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.3.1.
Prioritas pembangunan, Program dan Kegiatan.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura meliputi padi, palawija, sayuran dan buah-buahan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.	Ekonomi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Daerah Rawan Pangan. 2. Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan. 3. Penganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil. 4. Pengembangan Desa Mandiri Pangan. 5. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija 6. Pengembangan perbenihan / Pembibitan 7. Moniroring, Evaluasi dan Pelaporan
		-Peningkatan Ketahanan Pangan		
		-Pengembangan Agribisnis	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Tng Penyuluh Pertanian 2. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian 3. Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian

3.2. TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam tahun 2007 tingkat pencapaian program dan kegiatan adalah sebagaimana tabel 3.3.2. berikut :

Tabel 3.3.2
Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Sasaran kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN		
	1. Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terlaksananya Penanganan Daerah rawan pangan	10
	2. Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	Terlaksannya penyusunan data base Potensi Produk Pangan	97
	3. Penanganan Pasca Panen & Pengolahan Hasil	Terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian.	100
	4. Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Pangan	79
	5. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija	Terlaksananya Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija	99,53
	6. Pengembangan perbenihan / Pembibitan	Terlaksananya Pengembangan perbenihan / Pembibitan	100
	7. Moniroring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Moniroring, Evaluasi dan Pelaporan	97

3.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib adalah Dinas Pertanian dan Peternakan berdasarkan Perda No.18 Tahun 2002 terdiri dari Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, 6 Sub Dinas, 29 Sub.bagian/Seksi dan 1 Unit Pelaksana Teknis Dinas (BIPP). Jumlah Pegawai sampai tahun 2007 : 155 orang terdiri dari 72 orang Pegawai Struktural, 83 orang Pegawai fungsional dan 15 orang pegawai honorer. Klasifikasi pegawai berdasarkan pendidikan, pangkat dan Golongan sebagaimana tabel 3.3.3.

Tabel 3.3.3.
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

No	Klasifikasi	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Pendidikan a. Pasca Sarjana b. Sarjana Pertanian c. Sarjana Peternakan d. Sarjana Kedokteran Hewan e. Sarjana Sain Terapan Bidang Pertanian f. Sarjana Sain Terapan Bidang Peternakan g. D. III Pertanian/Politeknik/Farming h. D.III Peternakan i. D. III APP Pertanian j. D. III APP Peternakan k. D. III APP Perikanan l. D.I Pertanian m.SPMA/SPP/SPPBMA/SFMA/STM Pertanian n. SNAKMA o. SMA IPA/IPS p. STM Bangunan air/ Mesin q. SMEA Tata buku/Niaga/T U g. SMP Sederajat h. S D	2 34 8 2 5 5 7 2 16 10 3 11 32 7 4 2 4 - 1	
	Jumlah	155	
2.	Pangkat / Golongan a. Pembina utama muda, IV/c a. Pembina Tingkat I, IV/b b. Pembina, IV/a c. Penata Tingkat I, III/d d. Penata, III/c e. Penata Muda TK.I, III/b f. Penata Muda, III/a g. Pengatur TK.I, II/d h. Pengatur, II/c f. Penata Muda TK.I, II/b g. Pengatur Muda, II/a	1 3 3 9 9 38 55 18 11 4 5	
	Jumlah	155	
3.	Klasifikasi Tenaga Honorer a. Sarjana Pertanian b. D III Peternakan c. D I Pertanian d. STM Pertanian e. SMT Pertanian f. SPP g. SMA h. SMP i. SD	1 - - - - 3 4 2 5	Sebagai penyuluh Sbg teknis lapangan Sebagai pelaksana dinas Sebagai pelaksana dinas Sebagai pelaksana dinas Sebagai pelaksana dinas 1 org sbg admts BPP Kumai
	Jumlah	15	

3.4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 sebagaimana pada tabel 3.3.4.

Tabel 3.3.4
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi				Capaian Indikator Kinerja (%)
			Fisik (%)	Keuangan		Sesuai Anggaran (Rp)	
				(Rp)	(%)		
I.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	641.834.400	95,21	501.878.575	78,19	139.955.825	95,21
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	28.500.000	0	0		28.500.000	
2	Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	138.720.000	86,16	118.450.000	85,39	20.270.000	
3	Penanganan Pasca Panen & Pengolahan Hasil	18.400.000	100	18.320.000	99,57	80.000	
4	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	29.670.000	74,72	22.120.000	74,55	7.550.000	
5	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija	255.154.400	99,88	204.502.150	80,15	50.652.250	
6	Pengembangan perbenihan/ Pembibitan	159.110.000	98,90	128.686.425	80,88	30.423.575	
7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	12.280.000	83,71	9.800.000	79,80	2.480.000	

3.5. Proses Perencanaan Pembangunan.

Perencanaan pembangunan diawali dari usulan kelompok tani yang diketahui oleh kepala desa yang nantinya akan dibahas di acara Musrenbang tingkat kecamatan. Dari hasil Musrenbang tingkat kecamatan akan dibahas lagi di Musrenbangda tingkat Kabupaten yang dihadiri dari semua kecamatan, semua dinas dan badan tingkat kabupaten dan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang difasilitasi oleh BAPPEDA.

Hasil dari Musrenbangda tingkat kabupaten akan dilanjutkan Musrenbang tingkat propinsi.

3.6. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dibidang pertanian dan peternakan kurang, baik menyangkut operasional perkantoran maupun lapangan. Operasional perkantoran untuk di tingkat kecamatan (BPP / Mantri Tani) belum ada computer. Sarana pengairan dalam rangka menaikkan produksi pertanian belum memadai, sehingga perlu pembenahan antar dinas terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum.

3.7. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Produktivitas padi dan palawija belum optimal sehingga sampai tahun 2007 belum mampu swasembada beras
2. Rendahnya tingkat pendapatan petani akibat biaya produksi yang tinggi, harga jual tidak kompetitif
3. Populasi ternak yang ada khususnya sapi potong belum mampu memenuhi kebutuhan daging sapi untuk daerah.
4. Kebutuhan ternak untuk konsumsi masyarakat masih tergantung dari daerah lain. Tingkat kelahiran / produktivitas ternak masih rendah dengan skala usaha di tingkat masyarakat masih belum memenuhi skala ekonomis

b. Solusi

1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas.

Mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas usahatani melalui peningkatan mutu intensifikasi, penggunaan benih/bibit unggul bermutu, pemanfaatan alsintan, pemyasyarakatan paket teknologi mulai pra produksi, proses produksi, pasca panen dan pengolahan hasil.

2. Pengamanan Produksi.

Antisipasi gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan Pengendalian Hama Terpadu (HPT) dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pengendalian OPT melalui pembentukan regu pengendali hama ditingkat kelompok tani. Antasipasi terhadap perubahan iklim dengan memperkuat antisipasi agar kerusakan tanaman dapat dihindari.

3. Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran.

Peningkatan ketrampilan kelompok tani dalam penanganan pasca panen, pengolahan hasil melalui pelatihan dan demonstrasi. Memfasilitasi terlaksananya kemitraan antara petani selaku produsen dengan mitra usaha/swasta dalam menangani pemasaran.

4. Pembinaan Kelembagaan.

Meningkatkan peranan BIPP, BPP, Penyuluh dan Kelompok Tani secara optimal dalam pembinaan usahatani. Optimalisasi kelembagaan terkait seperti UPJA, P3A maupun penangkar benih dan bibit ternak.

4. Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor Seri 23 seri D) dan Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 30 Nopember 2002 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja melaksanakan Urusan Desentralisasi sesuai dengan tupoksi sebagai berikut :

4.1. Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas/Badan yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan 16 (enam belas) program dan 62 (enam puluh dua) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel : 3.4.1. sebagai berikut :

Tabel 3.4.1.
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Peningkatan pembangunan prasarana perhubungan darat dan perhubungan laut terutama infrastruktur (jalan darat dan dermaga / pelabuhan laut) untuk mempercepat tingkat mobilitas sosial.	1. Fungsi Ekonomi ~Subfungsi Pengairan ~Subfungsi Transportasi 2. Fungsi Lingkungan Hidup ~Subfungsi Perlindungan Lingkungan Hidup lainnya. 3. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum. ~Subfungsi Penyediaan Air Minum ~Subfungsi Perumahan dan Permukiman Lainnya	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat-menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8. Penyediaan ATK 9. Penyediaan barang cetakan & penggandaan 10. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
2	Peningkatan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, dengan sasaran utama perkebunan rakyat dalam rangka menunjang ekspor komoditi non migas			
3	Peningkatan pembangunan sektor perdagangan dan industri yang mengolah hasil pertanian, kehutanan dan pertambangan.			

<p>4</p> <p>5</p> <p>6</p>	<p>Peningkatan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.</p> <p>Peningkatan pembangunan di sektor keamanan, ketertiban umum, penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang dpt menjamin peningkatan dan disparitas pendapatan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah.</p>		<p>2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>3. Peningkatan Disiplin Aparatur</p> <p>4. Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS</p> <p>5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>7. Pembangunan Jalan dan Jembatan</p> <p>8. Pembangunan Sal. Drainase / Gorong-gorong</p> <p>9. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong</p>	<p>11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>12. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</p> <p>13. Penyediaan Makanan dan minuman</p> <p>14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p> <p>15. Pengadaan kendaraan dinas/operasional</p> <p>16. Pengadaan mebeuler</p> <p>17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</p> <p>18. Peleliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional</p> <p>19. Pemeliharaan rutin/berkala mebeuler</p> <p>20. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor</p> <p>21. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</p> <p>22. Pemulangan pegawai pensiun</p> <p>23. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</p> <p>24. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</p> <p>25. Penyusunan laporan keuangan semesteran</p> <p>26. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</p> <p>27. Perenc. pembangunan jln.</p> <p>28. Pembangunan jalan</p> <p>29. Pembangunan jembatan</p> <p>30. Perenc. pembangunan jbtn</p> <p>31. Perenc.pembangunan sal. drainase/gorong-gorong</p> <p>32. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</p> <p>33. Perenc.Turap / Talud / Bronjong</p> <p>34. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong</p>
----------------------------	---	--	---	---

		<p>10. Rehabilitasi / pemeliharaan Jln dan Jembatan</p> <p>11. Pembangunan Sistem Informasi /Data Base Jalan dan Jembatan</p> <p>12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</p> <p>13. Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya</p> <p>14. Penyediaan & Pengolahan Air Baku</p> <p>15. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</p> <p>16. Pengendalian Banjir</p> <p>17. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</p>	<p>35. Perencanaan Rehabilitasi / pemeliharaan jalan</p> <p>36. Perencanaan Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan</p> <p>37. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan</p> <p>38. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan</p> <p>39. Penyusunan sistem informasi/data base jalan</p> <p>40. Pengadaan alat-alat berat</p> <p>41. Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat</p> <p>42. Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan</p> <p>43. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat</p> <p>44. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan</p> <p>45. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi</p> <p>46. Pembangunan pintu air</p> <p>47. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi</p> <p>48. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi sal. sungai</p> <p>49. Pemberdayaan Petani Pemakai Air</p> <p>50. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa</p> <p>51. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah</p> <p>52. Pengembangan distribusi air minum</p> <p>53. Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir</p> <p>54. Pembangunan tanggul pemecah ombak</p> <p>55. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan</p> <p>56. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan</p> <p>57. Rehabilitasi/pemeliharaan jln & jembatan perdesaan</p>
--	--	--	--

		18. Pengelolaan Areal Pemakaman	58. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
		19. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	59. Penataan RTH 60. Pemeliharaan RTH
		20. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	61. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 62. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

4.2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam Tahun 2007 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	1. Penyediaan jasa surat-menyurat	Terlaksananya pengiriman surat menyurat 250 surat	100
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kelancaran kerja dan kenyamanan kerja	100
	3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan	100
	4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengurusan perpanjangan ijin kendaraan	100
	5. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya tertib administrasi keuangan	100
	6. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya lingkungan kerja yang sehat & nyaman	100
	7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja utk memper-tahankan manfaat dan fungsi	100
	8. Penyediaan alat tulis kantor	Terwujudnya tertib administrasi	100
	9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya cetak blanko dan foto copy 69.450 lembar	100

	10. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100
	11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kantor	100
	12. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, majalah & buku perundang-undangan	100
	13. Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	100
	14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan hubungan kerja dan menambah pengetahuan	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas dan kendaraan operasional kebersihan	100
	2. Pengadaan mebeuler	Tersedianya mebeuler kantor	100
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	100
	4. Peleliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	100
	5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeuler	Terlaksananya pemeliharaan meja kerja, kursi kerja dan lemari arsip	100
	6. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya penggantian atap gedung kantor & jaringan listrik kantor	100
III	Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian seragam kerja	100
IV	Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Pemulangan pegawai pensiun	Terlaksananya bantuan kesejahteraan pegawai pensiun	100
V	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya peningkatan / pemahaman peraturan perundang-undangan, kursus-kursus & bimbingan teknis	100
VI	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100

	2. Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksananya laporan keuangan semesteran	100
	3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun	100
VII	Pembangunan Jalan dan Jembatan		
	1. Perencanaan pembangunan jalan	Terlaksananya perencanaan pembangunan jln kabupaten dan jln perdesaan/kelurahan	100
	2. Pembangunan jalan	Terlaksananya pembangun-an jalan kabupaten	99,50
	3. Pembangunan jembatan	Pembangunan jembatan kabupaten dan AMP	100
	4. Perencanaan pembangunan jembatan	Terlaksananya perencanaan pembangunan jembatan	100
VIII	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		
	1. Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terlaksananya perencanaan saluran drainase	100
	2. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Tersedianya saluran air kotor	100
IX	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong		
	1. Perencanaan Turap/Talud/ Bronjong	Terlaksananya perencanaan talud/bronjong	97,87
	2. Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong	Tertanganinya erosi tebing/ bantaran sungai buun, sungai arut dan sungai lamandau serta tebing candi Kumai	99,73
X	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan		
	1. Perencanaan Rehabilitasi / pemeliharaan jalan	Terlaksananya perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan periodik & rutin jln kabupaten dan jln perdesaan/kelurahan	100
	2. Perencanaan Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan	Terlaksananya penyusunan perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan.	100
	3. Rehabilitasi/pemeliharaan jln	Terlaksananya pemeliharaan periodik dan rutin jln kabupaten.	99,81
	4. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Terlaksananya pemeliharaan jbtn	100

XI	Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Terlaksananya inspeksi dan tersusunnya data base jalan dan foto udara	100
XII	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		
	1. Pengadaan alat-alat berat	Terlaksananya pengadaan alat berat	100
	2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	Terlaksananya pengadaan alat bengkel	100
	3. Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Terlaksananya pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium	100
	4. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Terlaksananya pemeliharaan alat berat	100
	5. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Terlaksananya pemeliharaan alat ukur dan bahan laboratorium	100
XIII	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		
	1. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Tersedianya data desain pembangunan irigasi (SID irigasi teknis pertanian terpadu dan SID sudetan sungai Jemuran ke sungai Jergendul anak sungai Kumai) untuk mengairi sawah 13.803 ha tersebar pada 17 lokasi potensial	99,38
	2. Pembangunan pintu air	Tersedianya talang air, pintu air dan bangunan pelengkap irigasi	98,71
	3. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Terlaksananya rehabilitasi dan operasional dan pemeliharaan saluran irigasi primer, kolektor dan sekunder	99,37
	4. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Terlaksananya pembangunan normalisasi sungai	99,36
	5. Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Terlaksananya penyuluhan kepada kelompok tani pemakai air	75
XIV	Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Terlaksananya pembangunan tanggul saluran, jalan dan jembatan kayu ulin	99,08

		untuk layanan pertanian	
XV	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		
	1. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Terlaksananya penanganan prasarana air limbah dan air bersih perdesaan	100
	2. Pengembangan distribusi air minum	Terlaksananya pembangunan jaringan air bersih/air minum Pangkalan Bun dan Kumai	100
XVI	Pengendalian Banjir		
	1. Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir	Terbangunnya pengembangan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir di wilayah bagian timur dan bagian tengah kota Pangkalan Bun	98,58
	2. Pembangunan tanggul pemecah ombak	Mengurangi tingkat erosi dan abrasi air laut di kawasan Kubu, Sungai Bakau, Teluk Bogam dan Keraya serta mengamankan kawasan obyek wisata dan tumbuhnya tanaman bakau	99,30
XVII	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		
	1. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Terlaksananya pembangunan jalan perdesaan/kelurahan	100
	2. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih	100
	3. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jbtn perdesaan/kelurahan	100
XVIII	Pengelolaan Areal Pemakaman Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Terlaksananya pengelolaan Taman Makam Umum (TPU)	100
XIX	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
	1. Penataan RTH	Terbangunnya Taman, Bundaran, Pintu Gerbang/Tugu Masuk, Penataan kawasan bundaran dan taman Istana Kuning, taman PKK, parit, proteksi, jalan paving stone dan bronjong	95,35
	2. Pemeliharaan RTH	Terlaksananya pemeliharaan terhadap planson median jalan, lampu hias, pengecatan kerb jalan, rehab taman, pemeliharaan bunga dan pengadaan tanaman	100

XX	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		
	1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah	100
	2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasana dan sarana persampahan	100

4.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 30 Nopember 2002 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja.

Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

A. Susunan Organisasi Dinas

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
2. Kabag Tata Usaha, membawahi :
 - Kasubag Kepegawaian.
 - Kasubag Keuangan.
 - Kasubag Umum
 - Kasubag Perencanaan dan Program.
3. Kasubdin Pengairan, membawahi :
 - Kasi Perencanaan Teknis Pengairan.
 - Kasi Pembangunan.
 - Kasi Operasi dan Pemeliharaan.
 - Kasi Bina Manfaat.
4. Kasubdin Bina Marga, membawahi :
 - Kasi Perencanaan Teknis Bina Marga.
 - Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan.
 - Kasi Pembangunan dan Penggantian Jembatan.
 - Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
5. Kasubdin Cipta Karya, membawahi :
 - Kasi Perencanaan Teknis Cipta Karya.
 - Kasi Bangunan.
 - Kasi Perumahan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan.
 - Kasi Tata Ruang dan Perijinan
6. Kasubdin Survey dan Pengendalian, membawahi :
 - Kasi Survey, Penelitian dan Pemetaan.
 - Kasi Jasa Konstruksi.
 - Kasi Pengujian.
 - Kasi Alkal.
7. Kasubdin Kebersihan, Pertamanan dan Makam, membawahi :
 - Kasi Perencanaan Teknis
 - Kasi Pertamanan dan Makam
 - Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana
 - Kasi Kebersihan

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

- Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah selain membantu Kepala Daerah dalam pembangunan secara umum juga sebagai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap tugas-tugas pokok secara maksimal dibidang Ke-PU-an.
- Mengadakan evaluasi tata cara pelaksanaan teknis dan mengadakan pemilihan guna mengetahui metode tata kerja yang lebih mantap, berdaya guna dan berhasil guna, disamping mengkoordinir seluruh kegiatan dibidang Ke-PU-an berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

b. Fungsi :

1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pola dasar perencanaan pembangunan.
2. Melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis terhadap perencanaan dan pembangunan.
3. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program pembangunan Ke-PU-an bersama-sama dengan unsur-unsur terkait.

C. Visi dan Misi Dinas

1. Visi

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, maka Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah ***“Membangun Prasarana Kotawaringin Barat Yang Lebih Baik”***.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut, maka telah ditetapkan misi sebagai berikut :

- Meningkatkan profesionalisme staf jajaran Dinas yang berorientasi pada prestasi dengan tidak membedakan SARA dan Golongan.
- Melaksanakan pembangunan fasilitas umum dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
- Selalu melakukan inovasi terbaik bidang prasarana.
- Menyatukan gerak dan langkah kemajuan seluruh jajaran Dinas untuk mencapai tujuan pembangunan prasarana.

D. Kebijakan/Strategi dari Dinas

Untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat yang maju, aman, tertib, damai, sejahtera, demokratis dan berkeadilan, maka penyelenggaraan infrastruktur dilakukan melalui pendekatan penataan ruang dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan yang dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan.

Wujud infrastruktur pekerjaan umum sendiri, yang merupakan bangunan fisik untuk kepentingan umum dan keselamatan umum seperti irigasi, jalan, jembatan, air bersih, sanitasi dan berbagai bangunan pelengkap kegiatan permukiman lainnya, merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dan pemerintah dapat berlangsung dengan baik.

Pembangunan yang merupakan proses perubahan secara terus-menerus dan berkelanjutan dari kondisi tidak ada menjadi ada dan dari kondisi kurang baik menjadi lebih baik, sehingga terjadi keseimbangan lingkungan baru. Dengan demikian pembangunan infrastruktur pekerjaan umum perlu selalu dikaitkan dengan daya dukung lingkungan baru tersebut, agar lingkungan sebagai ruang hidup manusia tidak terdegradasi sebagai akibat daya dukung lingkungan yang terlampaui yang dapat menyebabkan bencana antara lain banjir, longsor, dan penurunan kuantitas dan kualitas air dan udara.

Untuk itu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum disamping mempertimbangkan pilar ekonomi juga pilar sosial budaya dan lingkungan sebagai satu kesatuan agar berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum menuntut pemenuhan berbagai kapabilitas atau keserasian penanganan antara eksekutif, legislatif dan masyarakat secara umum dalam partisipasinya pada penyelenggaraan pembangunan, penggunaan dan pengawasan. Dalam hal ini pendekatan dengan berbasis penataan ruang dan pembangunan berwawasan lingkungan dinilai sanggup memenuhi berbagai tuntutan kapabilitas tersebut.

Kebutuhan artikulasi masyarakat dalam sistem pembangunan infrastruktur yang tepat bagi masing-masing wilayah harus didukung dengan potensi yang dimiliki wilayahnya, sehingga diperlukan pendekatan pembangunan infrastruktur yang komprehensif dibagi menjadi beberapa kategori prioritas yaitu kawasan lahan produktif, kawasan rawan bencana, kawasan perbatasan, daerah terisolir dan kawasan yang sedang berkembang.

Untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, strategi yang lebih utama yang harus diterapkan adalah dengan menciptakan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah propinsi dan pusat, sehingga proses perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berlangsung secara terfokus dan terarah.

Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, bahwa penambahan pembangunan fisik prasarana dan sarana (infrastruktur) diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, industri, perdagangan dan jasa. Selain itu, pemeliharaan kualitas dan kelanjutan pembangunan fisik infrastruktur yang telah direncanakan juga tetap mengacu kepada prinsip untuk mendukung kegiatan tersebut di atas.

4.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 3.4.4.1. sebagai berikut :

Tabel 3.4.4.1.
Pegawai Menurut Pendidikan

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	S2		3			3
2	S1		27			27
3	Sarjana Muda		12			12
4	SLTA		57			57
5	SLTP		3			3
6	SD		5			5
	Jumlah		107			107

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada tabel 3.4.4.2. sebagai berikut :

Tabel 3.4.4.2.
Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No	Uraian	Fomasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Golongan I/a		2			2
	Golongan I/b		-			-
	Golongan I/c		3			3
	Golongan I/d		-			-
	Jumlah Gol I		5			5
2.	Pengatur Muda (II/a)		27			27
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)		4			4
	Pengatur (II/c)		8			8
	Pengatur Tk. I (II/d)		15			15
	Jumlah Gol II		54			54
3.	Penata Muda (III/a)		22			22
	Penata Muda Tk.I (III/b)		5			5
	Penata (III/c)		11			11
	Penata Tk.I (III/d)		5			5
	Jumlah Gol III		43			43
4.	Pembina (IV/a)		4			4
	Pembina Tingkat I (IV/b)		1			1
	Pembina Utama Muda (IV/c)		-			-
	Jumlah Gol IV		5			5

c. Jumlah Pejabat Strutural dan Fungsional

Jumlah Pejabat Strutural dan Fungsional Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Jabatan Struktural dan Fungsional terdapat pada tabel 3.4.4.3. sebagai berikut :

Tabel 3.4.4.3.
Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Uraian	Fomasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Menurut Jabatan Struktural		-			
	Eselon I		1			
	Eselon IIb		6			
	Eselon IIIa		19			
	Eselon IVa		-			
	Fungsional		81			
	Staf					
	Jumlah		107			
2.	Menurut Jabatan Fungsional					
	Jumlah		-			

d. Jumlah Pegawai Tidak Tetap

No.	Uraian	Jumlah
1	Pegawai Tidak Tetap	13
	Total	13

4.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

a. Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh alokasi anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukkan bagi Gaji Pegawai sebesar Rp. 2.580.100.950 dan sampai akhir bulan Desember 2007 telah direalisasikan (dibelanjakan) sebesar Rp. 2.374.495.930 dengan sisa (saldo) sebesar Rp. 205.605.020

b. Belanja Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 97,63% dengan rincian pada tabel 3.4.5. sebagai berikut :

Tabel 3.4.5.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No.	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi			Selisih Anggaran	Capaian Indikator Kinerja
			Fisik	Keuangan			
			(%)	(Rp.)	(%)		
		Rp.	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	Belanja Pegawai	2.363.550.400,00		2.035.099.400,00	86,10	328.451.000,00	86,10
	- Honorarium PNS	290.134.000,00		113.982.000,00	39,29	176.152.000,00	39,29
	- Honorarium Non PNS	2.025.935.300,00		1.883.101.400,00	92,95	142.833.900,00	92,95
	- Uang Lembur	7.481.100,00		666.000,00	8,90	6.815.100,00	8,90
	- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	40.000.000,00		37.350.000,00	93,38	2.650.000,00	93,38
							0,00
2	Belanja Barang/Jasa	39.628.852.100,00		38.850.027.142,00	98,03	778.824.958,00	98,03
	- Belanja Bahan Pakai Habis	204.592.100,00		191.347.800,00	93,53	13.244.300,00	93,53
	- Belanja Bahan/Material	33.269.524.400,00		32.868.041.615,00	98,79	401.482.785,00	98,79
	- Belanja Jasa Telepon	83.360.000,00		70.183.927,00	84,19	13.176.073,00	84,19
	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	831.210.900,00		772.636.900,00	92,95	58.574.000,00	92,95
	- Belanja Cetak dan Penggandaan	58.620.700,00		39.452.900,00	67,30	19.167.800,00	67,30
	- Belanja Sewa Sarana Mobilitas	80.100.000,00		74.146.000,00	92,57	5.954.000,00	92,57
	- Belanja Sewa Alat Berat	97.000.000,00		95.500.000,00	98,45	1.500.000,00	98,45
	- Belanja Makanan dan Minuman	146.968.000,00		104.379.000,00	71,02	42.589.000,00	71,02
	- Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	29.750.000,00		29.750.000,00	100,00	-	100,00
	- Belanja Pakaian Kerja	45.000.000,00		44.820.000,00	99,60	180.000,00	99,60
	- Belanja Perjalanan Dinas	514.000.000,00		360.813.000,00	70,20	153.187.000,00	70,20
	- Belanja Pemulangan Pegawai	10.000.000,00		2.724.000,00	27,24	7.276.000,00	27,24

No.	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi			Selisih Anggaran (Rp.)	Capaian Indikator Kinerja (%)
			Fisik	Keuangan			
			(%)	(Rp.)	(%)		
-	Belanja Pemeliharaan Kantor	750.000,00	-		0,00	750.000,00	0,00
-	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	850.000,00	100,00	700.000,00	82,35	150.000,00	91,18
-	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.000.000,00	100,00	2.980.000,00	99,33	20.000,00	99,67
-	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	300.000,00	-		0,00	300.000,00	0,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio	200.000,00	-		0,00	200.000,00	0,00
-	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi	160.000,00	-		0,00	160.000,00	0,00
-	Belanja Pemeliharaan Konstruksi Jalan	878.416.000,00	100,00	869.142.000,00	98,94	9.274.000,00	99,47
-	Belanja Pemeliharaan Konstruksi Jembatan	474.300.000,00	100,00	464.203.000,00	97,87	10.097.000,00	98,94
-	Belanja Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air	2.630.950.000,00	100,00	2.593.169.000,00	98,56	37.781.000,00	99,28
-	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	169.800.000,00	100,00	166.638.000,00	98,14	3.162.000,00	99,07
-	Belanja Pemeliharaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	100,00	99.400.000,00	99,40	600.000,00	99,70
						-	
3	Belanja Modal	95.566.722.500,00	100,00	93.411.106.604,00	97,74	2.155.615.896,00	98,87
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	3.064.272.000,00	100,00	3.062.100.000,00	99,93	2.172.000,00	99,96
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	505.900.000,00	100,00	501.900.000,00	99,21	4.000.000,00	99,60
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	65.000.000,00	100,00	64.825.000,00	99,73	175.000,00	99,87
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	100,00	49.800.000,00	99,60	200.000,00	99,80
	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	125.000.000,00	100,00	114.100.000,00	91,28	10.900.000,00	95,64
	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	56.000.000,00	100,00	55.868.000,00	99,76	132.000,00	99,88
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	700.000,00	-		0,00	700.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	17.000.000,00	100,00	16.400.000,00	96,47	600.000,00	98,24

No.	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi				Selisih Anggaran (Rp.)	Capaian Indikator Kinerja (%)
			Fisik	Keuangan				
			(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)		
-	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	181.020.000,00	100,00	178.755.000,00	98,75	2.265.000,00	99,37	
-	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	42.913.860.250,00	99,14	42.238.163.680,00	98,43	675.696.570,00	98,78	
-	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	16.277.500.000,00	100,00	15.948.803.269,00	97,98	328.696.731,00	98,99	
-	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	25.954.277.750,00	100,00	25.275.111.900,00	97,38	679.165.850,00	98,69	
-	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	6.276.692.500,00	100,00	5.877.479.755,00	93,64	399.212.745,00	96,82	
-	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	76.000.000,00	100,00	24.300.000,00	31,97	51.700.000,00	65,99	
-	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	3.500.000,00	100,00	3.500.000,00	100,00	-	100,00	

4.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan merupakan bagian perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Adapun proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007 adalah berdasarkan :

-) Musrenbang Desa
-) Musrenbang Kecamatan
-) Musrenbang Kabupaten,
-) Penyusunan RKPD
-) Penyusunan KUA.

4.7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2007 sebagaimana pada table 3.4.7 berikut :

Tabel 3.4.7.
Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis>Nama Barang	Merk/Tahun Pembuatan	Jumlah		Harga Sat (Rp.)	Kondisi
			Vol	Sat		
1	2	3	4	5	6	7
I	Tanah & Bangunan					
1.	Tanah Bangunan Kantor Gedung Kantor Dinas PUD		3.172	M2	9.516.000	
2.	Tanah Bangunan Gedung Work Shop		4000	M2		
3.	Bangunan Gedung Kantor Dinas PUD/Bagian Tata Usaha		208	M2		
4.	Bangunan Gedung Kantor Subdin Pengairan+Bina Marga (Bertingkat)		443	M2		
5.	Bangunan Gedung Kantor Subdin Cipta Karya		160	M2		
6.	Bangunan Gedung Kantor Subdin Kebersihan, Pertamanan dan Makam		228,16	M2		
7.	Bangunan Gedung Aula BAwah		50	M2		
8.	Bangunan Gedung Kantor Work Shop		120	M2		
9.	Bangunan Gedung Laborat		248	M2		
10.	Bangunan Gedung Alkal		89	M2		
11.	Bangunan Bengkel/Work Shop		240	M2		
12.	Rumah Jaga Subdin Surdal		30	M2		
13.	Bangunan Pos Jaga Subdin Surdal		4	M2		
14.	Bangunan Gedung Koperasi		164	M2		
15.	Barak Pasukan Kuning		366	M2		
16.	Bangunan Mushola Dinas PUD		27,5	M2		
17.	Bangunan Mushola Work Shop		16	M2		
18.	Bangunan Rumah Genset		16	M2		
19.	Garasi Truck Kebersihan		348	M2		
20.	Garasi Alat Berat		288	M2		
21.	Tempat Parkir		314	M2		
22.	Pagar Keliling Dinas PUD		270	M'		
23.	Pagar Keliling Work Shop		316	M'		
II	Perlengkapan Gedung Kantor					
1.	Teralis Besi Kantor		19	Buah		
3.	Sumur Pompa		1	Unit		
4.	Horden Kantor		-			
5.	Horden Aula		4	Buah		

7.	Meja & Kursi Kepala		1	Unit		
8.	Meja & Kursi Kabag/Kasubdin		6	Unit		
9.	Meja & Kursi Kasi dan Staff		87	Unit		
11.	Meja Rapat		3	Buah		
13.	Meubelair Ruang Pimpinan		1	Buah		
14.	Meja, Kursi Ruang Tamu		1	Unit		
15.	Kursi Lipat		237	Buah		
16.	Filling Kabinet		7	Buah		
17.	Lemari Besi 2 Pintu		18	Buah		
18.	Rak Arsip		3	Buah		
19.	Tiang Bendera		1	Buah		
20.	Kipas Angin		1	Buah		
III	Peralatan Gedung Kantor					
1.	AC Ruang Pimpinan		2	Unit		
2.	AC diruang Tata Usaha		3	Unit		
3.	AC diruang Tamu		1	Unit		
4.	Kulkas		1	Buah		
5.	Mesin Pemotong Rumput Gendong		12	Buah		
6.	Sound Sistem		3	Unit		
IV	Peralatan & Perlengkapan Kantor					
1.	Komputer / PC		10	Unit		
2.	Note Book		6	Buah		
3.	Printer		10	Buah		
4.	LCD Projektor		1	Unit		
5.	Wireless		2	Unit		
6.	GPS		1	Buah		
7.	Telepon		1	Unit		
8.	Kamera		1	Buah		
V	Kendaraan Dinas / Operasional					
1.	Kendaraan Roda Empat		2	Buah		
2.	Kendaraan Roda Dua		4	Buah		
VI	Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor					
1.	Daya Listrik Yang Digunakan					
VII	Rumah Jabatan / Dinas					
1.	Luas Bangunan					
2.	Fasilitas yang ada didalamnya					

4.8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan.

Hambatan-hambatan dan kendala yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2007 secara keseluruhan baik untuk kegiatan rutin maupun pembangunan dan secara langsung/tidak langsung mempengaruhi kinerja dan capaian indikator kinerja adalah antara lain :

- Masih kurangnya tenaga terampil di bidang keahlian khusus terhadap kinerja masing-masing.
- Masih terbatasnya sarana (alat bantu) kerja dalam mendukung pelaksanaan konstruksi
- Bencana alam, berupa tingginya curah hujan dan terjadinya banjir (naiknya muka air sungai)
- Naiknya harga bahan bangunan akibat *multiplier effect* dari kenaikan/kelangkaan harga bahan bakar minyak (BBM).
- Terbatasnya dana pemerintah sehingga kegiatan pembangunan belum dapat merata.

Solusi.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama tahun anggaran 2007, maka perlu

- Mengirimkan/mengikutsertakan staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat guna mengikuti pendidikan dan pelatihan (kursus).
- Menambah dan mengadakan sarana (alat kerja) pendukung yang masih kurang dan saat ini dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan konstruksi.
- Melakukan penyesuaian harga untuk kegiatan konstruksi.
- Mencari tambahan dana guna menunjang keterbatasan dana alokasi pemerintah dengan melakukan sinergi dengan pemerintah propinsi dan pusat.

5. Penataan Ruang

5.1 Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Badan yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah dimana dalam hal Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007 adalah di arahkan pada Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, yang diarahkan untuk Revisi Tata Ruang Wilayah Kabupaten.dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel : 2.2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
	Konsistensi Fungsi Perencanaan, pengorganisa- sian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengendalian dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah	Pembangunan daerah. Administrasi dan operasi dalam rangka pembangunan daerah, pengembangan wilayah dan pember- dayaan masyarakat.	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

5.2 Tingkat Pencapaian Progran dan Kegiatan

Dalam Tahun 2007 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terlaksananya koordinasi dan data Penataan Ruang Pengembangan Wilayah Kabupaten	98,96

5.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib.

Penataan Ruang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka menunjang pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007.

5.4. Alokasi dan Realisasi Anggaran.

a. Belanja Tidak Langsung.

Belanja tidak langsung pada kegiatan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2007 berada pada Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Belanja Langsung.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Penataan Ruang pada Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 98,96 % dengan rincian pada tabel 3.5.4. sebagai berikut :

Tabel 3.5.4.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Selisih Anggaran (Rp.)	Capaian Indikator Kinerja (%)
			Fisik (%)	Keuangan (Rp.) (%)		
	Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					98,96
	- Belanja Pegawai	22.740.000	100	22.260.000 97,88	480.000	
	- Belanja Modal	216.660.000	100	214.660.000	2.000.000	
	Jumlah	239.400.000		236.920.000	2.480.000	

5.5. Proses Perencanaan Pembangunan

Adapun proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007 untuk Menangani Penataan Ruang adalah berdasarkan :

-) Musrenbang kecamatan,
-) Musrenbang kabupaten,
-) Forum Koordinasi/Teknis Penataan Ruang.
-) Penyusunan RKPD
-) Penyusunan KUA

5.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah antara lain :

1. Kurangnya tenaga terampil bidang keahlian khusus, seperti ahli GIS, ahli peta dan ahli program komputer.
2. Terbatasnya sarana (alat bantu) kerja elektronik, komputer server dan note book.
3. Terbatasnya dana operasional untuk penataan ruang.

b. Solusi

Solusi yang telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2006 dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengirimkan atau mengikutsertakan staf Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat pada pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis.

2. Menambah atau mengadakan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
3. Mencari terobosan penggalan dana baik bersumber dari APBN maupun Bantuan Luar Negeri (block grant) guna menunjang keterbatasan dana alokasi dari pemerintah daerah.

6. Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, melaksanakan Urusan Wajib sesuai dengan tupoksi sebagai berikut :

6.1 Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Badan yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah dalam hal Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat, dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan.

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, yang diarahkan untuk Menunjang Pembangunan Daerah, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel : 3.6.1. sebagai berikut :

Tabel 3.6.1.

Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
	Konsistensi Fungsi Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan Pengendalian dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah.	Pembangunan daerah. Administrasi dan operasi dalam rangka pembangunan daerah, pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.	Pengembangan Data/ Informasi	1. Penyusunan & Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 2. Penyusunan & Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi. 3. Penyusunan Profil Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah			1. Penyusunan Rancangan RKPD. 2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. 3. Penetapan RKPD. 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.	
Perencanaan Pembangunan Ekonomi			Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
Perencanaan Sosial Budaya			Penyusunan Master Plan Pendidikan.	

6.2 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 93,09 % dengan rincian pencapaian program dan kegiatan sebagaimana pada tabel 3.6.2.

Tabel. 3.6.2
Pencapaian Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Bappeda	87,07
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Bappeda	98,54
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Bappeda	86,36
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bappeda	0
5	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Bappeda	82,05
6	Program Pengembangan Data/ Informasi	Tersedianya	99,32
	- Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi	data / informasi	
	- Penyusunan dan Pengumpulan Dokumen Perencanaan	Dokumen	99,73
	- Penyusunan dan analisis Informasi perencanaan	Perencanaan dan	98,17
	- Penyusunan Profil Daerah	Profil Daerah	99,37
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya	87,52
	- Penyusunan Rancangan RKPD.	Penyelenggaraan	99,99
	- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.	Forum dan Mus-	84,03
	- Penetapan RKPD.	renbang RKPD	99,84
	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah		87,93
8	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya buku	98,99
	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	perencanaan pengembangan ekonomi	98,99
9	Program Perencanaan Sosial Budaya	Kab. Ktw. Barat	99,38
	- Penyusunan Master Plan Pendidikan.		99,38

6.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 30 Nopember 2002 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja.

Adapun Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah adalah :

A. Susunan Organisasi Badan.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi :
 - ◆ Sub Bagian Umum;
 - ◆ Sub Bagian Kepegawaian
 - ◆ Sub Bagian Keuangan;
 - ◆ Sub Bagian Perencanaan Kegiatan dan Dokumen.
3. Kepala Bidang Litbang dan Statistik, membawahi :
 - ◆ Sub Bidang Ekonomi ;
 - ◆ Sub Bidang Sosial dan Budaya ;
 - ◆ Sub Bidang Fisik dan Prasarana.
4. Kepala Bidang Program dan Pelaporan, membawahi :
 - ◆ Sub Bidang Program Kerja ;
 - ◆ Sub Bidang Analisa dan Pengendalian Program ;
 - ◆ Sub Bidang Pelaporan ;
 - ◆ Sub Bidang Penyerasi Program.
5. Kepala Bidang Ekonomi, membawahi :
 - ◆ Sub Bidang Pertanian ;
 - ◆ Sub Bidang Industri Tamben ;
 - ◆ Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi ;
 - ◆ Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.

6. Kepala Bidang Sosial dan Budaya, membawahi :
 - ♦ Sub Bidang Kesejahteraan Umum ;
 - ♦ Sub Bidang Agama dan Mental Spiritual ;
 - ♦ Sub Bidang Pendidikan dan Budaya ;
 - ♦ Sub Bidang Kependudukan.
7. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
 - ♦ Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah ;
 - ♦ Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata dan Telkom ;
 - ♦ Sub Bidang Pengairan ;
 - ♦ Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat adalah membantu Kepala Daerah dalam seluruh tahapan proses perencanaan dan pengendalian pembangunan untuk menghasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan terpadu.

2. Fungsi

Fungsi yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

- a. Mengkaji, merumuskan dan menyusun RPJPD, RPJMD, RKPD dan Tata Ruang Daerah.
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun perencanaan dan program pembangunan daerah bersama-sama unsur terkait di daerah.
- c. Berperan dalam penyusunan RAPBD.
- d. Melakukan pembinaan/bimbingan perencanaan pembangunan di daerah dengan pokok kegiatan sinkronisasi perencanaan pembangunan.
- e. Menyelenggarakan kegiatan Litbang dan Statistik Pembangunan.
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.
- g. Melaksanakan tugas umum kesekretariatan bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.

C. Visi dan Misi Badan.

1. VISI

Terwujudnya masyarakat Kotawaringin Barat yang maju, aman, tertib, lancar dan sejahtera melalui perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, demokratis dan berkeadilan.

2. MISI

- a. Menyusun rencana pembangunan daerah berbasis kinerja.
- b. Meningkatkan keserasian rencana dan pengendalian pembangunan lintas wilayah, lintas sektoral dan antar lembaga melalui kerjasama dan partisipasi masyarakat.
- c. Meningkatkan kapasitas institusi pembangunan daerah baik di tingkat masyarakat, kecamatan dan desa dalam rangka mewujudkan institusi perencanaan yang kredibel.
- d. Meningkatkan pengendalian pembangunan daerah berbasis transparansi dan akuntabilitas.

D. Kebijakan/Strategi dari Badan.

Dalam mencapai tujuan, kebijakan yang dilaksanakan adalah :

1. Menjamin adanya konsistensi rencana dan pemilihan program dan kegiatan prioritas Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kebutuhan dan visi misi daerah.
2. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sudah dibahas secara partisipatif di Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis dan berkelanjutan.

6.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.

Jumlah Pegawai Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 3.6.4.1 sebagai berikut :

Tabel. 3.6.4.1.

Pegawai Menurut Pendidikan.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	S2		6	-	-	6
2	S1		12	1	-	13
3	Sarjana Muda		4	-	-	4
4	SLTA		8	1	-	9
5	SLTP		1	-	-	1
6	SD		-	-	-	-
	Jumlah		31	-	-	33

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

Jumlah Pegawai Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada tabel 3.6.4.2 sebagai berikut :

Tabel. 3.6.4.2.

Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Golongan I/a		-	-	-	-
	Golongan I/b		-	-	-	-
	Golongan I/c		-	-	-	-
	Golongan I/d		-	-	-	-
	Jumlah Gol I		-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (II/a)		-	1	-	1
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)		1	-	-	1
	Pengatur (II/c)		6	-	-	6
	Pengatur Tingkat I (II/d)		-	-	-	-
	Jumlah Gol II		7	1	-	8
3.	Penata Muda (III/a)		2	1	-	3
	Penata Muda Tkt. I (III/b)		6	-	-	6
	Penata (III/c)		3	-	-	3
	Penata Tingkat I (III/d)		9	-	-	9
	Jumlah Gol III		20	1	-	21
4.	Pembina (IV/a)		1	-	-	1
	Pembina Tingkat I (IV/b)		2	-	-	2
	Pembina Utama Muda (IV/c)		1	-	-	1
	Jumlah Gol IV		4	-	-	4

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah Pejabat Struktural Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Jabatan Struktural dan Fungsional terdapat pada tabel 3.6.4.3 sebagai berikut :

Tabel. 3.6..4.3.
Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	Menurut Jabatan Struktural					
	Eselon II	1	1	-	-	1
	Eselon III	6	6	-	-	6
	Eselon IV	19	11	1	-	12
	Pelaksana / Staf	25	13	2	1	14
	Jumlah	51	31	3	1	33

d. Jumlah Pegawai Tidak Tetap.

No	Uraian	Jumlah
1	Pegawai Honorer	3
2	Pegawai Kontrak	4
	Total	6

6.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

a. Belanja Tidak Langsung.

Berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh alokasi anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukkan bagi Gaji Pegawai sebesar Rp. 1.120.825.650,00 dan sampai akhir bulan Desember 2007 telah direalisasikan (dibelanjakan) sebesar Rp. 1.061.442.383,00 dengan sisa (saldo) sebesar Rp.59.383.267,00

b. Belanja Langsung.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat

pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 93,09 % dengan rincian pada tabel 3.6.5. sebagai berikut :

Tabel 3.6.5.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Selisih Anggaran (Rp.)	Capaian Indikator Kinerja (%)
			Fisik (%)	Keuangan (Rp.)		
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					87,07
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
	- Belanja Barang Jasa	2.000.000	49,75	995.000	49,75	1.005.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					
	- Belanja Barang Jasa	48.300.000	72,68	35.104.553	72,68	13.195.447
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor					
	- Belanja Pegawai	45.162.600	78,89	35.629.800	78,89	9.532.800
	- Belanja Barang Jasa	1.000.000	-	-	-	1.000.000
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					
	- Belanja Barang Jasa	910.000	-	-	-	910.000
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan.					
	- Belanja Pegawai	24.600.000	100,00	24.600.000	100,00	-
	- Belanja Barang Jasa	5.500.000	72,27	3.975.000	72,27	1.525.000
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja					
	- Belanja Barang Jasa	20.500.000	48,17	9.875.000	48,17	10.625.000
7	Penyediaan alat tulis kantor					
	- Belanja Barang Jasa	33.572.000	100,00	33.572.000	100,00	-
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					
	- Belanja Barang Jasa	29.750.000	94,86	28.220.000	94,86	1.530.000
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					
	- Belanja Barang Jasa	4.866.000	16,67	811.000	16,67	4.055.000
	- Belanja Modal	2.500.000	-	-	-	2.500.000
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					
	- Belanja Modal	63.000.000	98,33	61.950.000	98,33	1.050.000
11	Penyediaan peralatan rumah tangga					
	- Belanja Barang Jasa	6.014.000	50,12	3.014.000	50,12	3.000.000
	- Belanja Modal	2.580.056	98,06	2.530.000	98,06	50.056
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					
	- Belanja Modal	5.000.000	60,00	3.000.000	60,00	2.000.000
13	Penyediaan bahan logistik kantor					
	- Belanja Barang Jasa	2.520.000	25,00	630.000	25,00	1.890.000
14	Penyediaan makanan dan minuman					
	- Belanja Barang Jasa	48.684.000	74,66	36.346.000	74,66	12.338.000
15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					
	- Belanja Barang Jasa	172.986.344	99,47	172.062.000	99,47	924.344

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Selisih Anggaran (Rp.)	Capaian Indikator Kinerja (%)
			Fisik	Keuangan		
			(%)	(Rp.)		
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						98,54
1	Pembangunan Gedung Kantor.					
	- Belanja Pegawai	3.500.000	100	3.500.000	100,00	-
	- Belanja Modal	92.500.000	100	92.500.000	100,00	-
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional					
	- Belanja Modal	15.000.000	99,5	14.925.000	99,50	75.000
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					
	- Belanja Barang Jasa	21.550.000	100	21.550.000	100,00	-
4	Pengadaan peralatan gedung kantor					
	- Belanja Modal	36.000.000	100	36.000.000	100,00	-
5	Pengadaan mebeleur					
	- Belanja Modal	10.000.000	100	10.000.000	100,00	-
6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					
	- Belanja Barang Jasa	41.500.000	98,765	40.987.500	98,77	512.500
7	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					
	- Belanja Barang Jasa	20.800.000	100	20.800.000	100,00	-
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					
	- Belanja Barang Jasa	10.675.000	87,822	9.375.000	87,82	1.300.000
9	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur					
	- Belanja Barang Jasa	2.000.000	100	2.000.000	100,00	-
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur						86,36
	Pengadaan pakaian kerja lapangan					
	- Belanja Barang Jasa	11.000.000	86,364	9.500.000	86,36	1.500.000
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						54,60
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.					
	- Belanja Pegawai	25.000.000	21,84	5.460.000	21,84	19.540.000
	- Belanja Barang Jasa	25.000.000	87,368	21.842.000	87,37	3.158.000
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan						100,00
1	Penyusunan laporan keuangan semesteran					
	- Belanja Barang Jasa	1.000.000	100	1.000.000	100,00	-
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun					
	- Belanja Barang Jasa	3.500.000	100	3.500.000	100,00	-
VI. Program Pengembangan Data/Informasi						99,32
1	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.					
	- Belanja Pegawai	11.300.000	100	11.300.000	100,00	-
	- Belanja Barang Jasa	18.950.000	97,604	18.496.000	97,60	454.000
	- Belanja Modal	144.130.800	100	144.130.800	100,00	-
2	Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan					
	- Belanja Pegawai	11.580.000	100	11.580.000	100,00	-
	- Belanja Barang Jasa	2.828.000	67,185	1.900.000	67,19	928.000
	- Belanja Modal	78.772.000	99,02	78.000.000	99,02	772.000
3	Penyusunan profil daerah					
	- Belanja Pegawai	69.000.000	7,8261	5.400.000	7,83	63.600.000
	- Belanja Barang Jasa	1.700.000	100	1.700.000	100,00	-
	- Belanja Modal	775.600.000	99,558	772.171.000	99,56	3.429.000

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Selisih Anggaran (Rp.)	Capaian Indikator Kinerja (%)
			Fisik (%)	Keuangan		
				(Rp.)		
VII.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah					82,05
1	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana					
	- Belanja Pegawai	55.000.000	68,182	37.500.000	68,18	17.500.000
	- Belanja Barang Jasa	55.000.000	95,936	52.765.000	95,94	2.235.000
VIII.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					87,52
1	Penyusunan rancangan RKPD					
	- Belanja Pegawai	7.700.000	99,987	7.699.000	99,99	1.000
	- Belanja Barang Jasa	15.100.000	100	15.100.000	100,00	-
2	Penyelenggaraan musrenbang RKPD					
	- Belanja Pegawai	18.260.000	100	18.260.000	100,00	-
	- Belanja Barang Jasa	257.496.200	82,906	213.479.000	82,91	44.017.200
3	Penetapan RKPD					
	- Belanja Pegawai	11.100.000	99,333	11.026.000	99,33	74.000
	- Belanja Barang Jasa	37.709.000	100	37.709.000	100,00	-
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan					
	- Belanja Pegawai	28.100.000	100	28.100.000	100,00	-
	- Belanja Barang Jasa	135.154.000	98,435	133.039.000	98,44	2.115.000
IX.	Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi					98,99
1	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat					
	- Belanja Pegawai	13.380.000	100	13.380.000	100,00	-
	- Belanja Barang Jasa	7.520.000	93,351	7.020.000	93,35	500.000
	- Belanja Modal	78.500.000	99,363	78.000.000	99,36	500.000
X.	Program Perencanaan Sosial Budaya					99,38
1	Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan					
	- Belanja Pegawai	7.700.000	100	7.700.000	100,00	-
	- Belanja Barang Jasa	6.479.500	98,148	6.359.500	98,15	120.000
	- Belanja Modal	100.220.500	99,416	99.635.000	99,42	585.500

6.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan pada tahun 2006 yang dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Adapun proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007 adalah penyelenggaraan :

-) Musrenbang Kecamatan.
-) Forum SKPD.
-) Musrenbang Kabupaten
-) Penyusunan RKPD
-) Penyusunan KUA.

6.7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) oleh Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2006 sebagaimana terlihat pada tabel 3.6.7. berikut.

Tabel 3.6.7.
Kondisi Sarana dan Prasarana

No Urut	Nama / Jenis Barang	Merk / Type / Tahun Pembuatan	Volume	Satuan	Harga (Rp.)	Keadaan Barang B/RR/RB
01	04	05	10	11	14	12
I	Tanah dan Bangunan					
01	Tanah Bangunan Kantor	2000	10.000	M2	1.000.000.000	B
02	Bangunan Gedung Utama	2000	558	M2	558.000.000	B
03	Bangunan Gedung Unit II	2000	180	M2	180.000.000	B
04	Bangunan Gedung Aula	2000	448	M2	448.000.000	B
05	Bangunan Musholla	2001	40	M2	36.000.000	B
06	Bangunan Tempat Ginset/KM & WC	2001	52	M2	25.600.000	B
07	Bangunan Rumah Penjaga Kantor	2001	72	M2	72.000.000	B
08	Bangunan Tempat Parkir	2001	2	Unit	39.600.000	B
09	Pagar Keliling	2001	400	Meter	160.000.000	B
10	Sumur Pompa	2001	2	Buah	5.500.000	B

01	02	03	04	05	06	07
II	Perlengkapan Gedung Kantor					
01	Teralis	2001	-	-	20.000.000	B
02	Horde Kantor	2001	-	-	5.000.000	B
03	Horde Aula	2002	-	-	6.500.000	B
04	Meja Rapat	2001	38	Buah	34.200.000	B
05	Meja dan Kursi Kepala	2001	1	Set	2.500.000	B
06	Meja dan Kursi Kabid. dan Sekret	2001	6	Set	8.850.000	B
07	Meja & Kursi Kasubid / Kasubag + Staf	2001	80	Set	48.000.000	B
08	Filing Kabinet	2001	12	Buah	12.000.000	RR
09	Lemari Dua Pintu	2001	12	Buah	12.000.000	B
10	Rak Arsip	2001	12	Buah	30.000.000	B
11	Kursi Tamu	2001	2	Set	8.000.000	RB
12	Kursi Lipat	2001	300	Buah	45.000.000	B
13	Meja Panjang	2001	5	Buah	3.750.000	B
14	Meja Komputer	2001	10	Buah	15.000.000	B
15	Podium	2001	1	Buah	2.500.000	B
16	Tiang dan Bendera Kobar	2001	1	Set	1.750.000	B
17	Papan Nama Muspida	2001	15	Buah	3.750.000	B
18	Papan Pengumuman	2002	1	Buah	1.500.000	B
19	Wastapel	-	1	Buah	250.000	B
20	Tower Penampung Air	2001	1	Buah	900.000	B
21	Pompa Air	Nasional / 125 W / 2001	1	Buah	375.000	RB
22	Meja dan Kursi tamu	2005	1	Set	4.705.000	RB
23	Lemari Perpustakaan	2005	1	Unit	5.646.000	B
24	Sofa	2007	2	Set	10.000.000	RB
25	Jam Dinding	Maspion / 2002	10	Buah	500.000	B
III	Peralatan Gedung Kantor					
01	AC di Ruang Kepala	Nasional / 2001	2	Unit	16.000.000	B
02	AC di Ruang Sekretariat	Nasional / 2000	1	Unit	8.000.000	RB
03	AC di Aula	Toshiba / 2002	4	Unit	32.000.000	B
04	Kipas Angin Gantung	2001	6	Unit	1.800.000	B
05	Meja Sound System	2001	1	Unit	2.000.000	B
06	Sound System Lengkap	2001	1	Set	19.850.000	B
07	Mesin Pemotong Rumput Dorong	2001	1	Buah	9.000.000	RB
08	Mesin Pemotong Rumput Gendong	2001	1	Buah	3.500.000	RB
09	Mesin Ginsel	Yanmar / 75 KVA / 2001	1	Unit	25.000.000	RB
10	AC Split 2 PK	Ichida (Maspion) MP16CE/MP16EE / 2005	2	Unit	9.410.000	B
11	Kipas Angin Berdiri	Miyako/Kas-1627KB/2005	3	Buah	2.117.250	B
12	Kipas Angin Gantung / Baling-Baling	Extend / 2005	2	Buah	1.411.500	B
13	Mesin Pemotong Rumput Dorong	Yard Machines / 0284 EI 2005	1	Buah	5.646.000	RB
14	Mesin Pemotong Rumput Gendong	Katana / Sum 328 / 2005	1	Buah	2.823.000	B
15	Mixer Sound System	Yamaha/EMX-68 S/2005	1	Buah		B
16	Speaker Sound System	Wharfedale/VS-15X/2005	4	Buah	25.925.000	B
17	Stand Sound System	Wharfedale / 2005	4	Buah		B
18	Mickrophone Sound System	Yamaha / YM-998 / 2005	1	Buah		B
19	PABX	Panasonic / KX-T7730X/ KX-T616 / 2005	1	Unit	23.525.000	B
20	TV 21 Inch	Panasonic / TC-2188 SF 2005	1	Buah	2.823.000	B
21	Digital Receiver	Goldsat / GRS 8100/2005	1	Buah		B
22	Parabola	Paramount / Focus 6 Feet 2005	1	Buah		B
23	AC. 2 PK	Changhong / 2007	6	Unit	36.000.000	B

01	02	03	04	05	06	07
III	Peralatan & Perlengkapan Gedung Kantor					
01	Lemari Es Mini	2001	1	Buah	500.000	B
02	Racun Api	1999	1	Buah	75.000	RB
03	Mesin Stensil	2001	1	Buah	5.000.000	RB
04	Note Book Komputer	Compak Prasario / 2001	1	Unit	28.475.000	RB
05	Multi Media Proyektor	3M MP.7630 AV / 2001	1	Unit	51.525.000	RB
06	Over Head Proyektor Manual	3M 2660 / 2002	1	Buah	4.000.000	RB
07	Layar OHP	-	1	Buah	-	B
08	Pemotong Kertas	1999	1	Buah	150.000	RB
09	Faximile	Panasonic KX-F580/2000	1	Buah	5.000.000	B
10	Kamera Digital	1999	1	Buah	5.000.000	RB
11	Kamera Biasa	Nicon FN10 / 2000	1	Buah	3.750.000	B
12	G P S	Karmin / 1999	1	Buah	5.000.000	B
13	Mesin Tik Rol Panjang	Olifetti / 1999	3	Buah	2.750.000	B
14	Mesin Tik Kecil	Olympia / 2001	2	Buah	750.000	B
15	Brankas	1998	1	Buah	1.000.000	B
16	Komputer GIS	Acer Aspire 66605e/2001	1	Unit	17.900.000	RB
17	Printer	Canon BJC 6500 / 2001	1	Unit	6.000.000	RB
18	Are View GIS	Software 3.2 / 2001	1	Unit	21.705.000	RB
19	Sceanner Umax	2001	1	Unit	2.385.000	RB
20	Hard Disk 4.3	2001	1	Unit	1.915.000	RB
21	GPS Garmin III Plus	2001	1	Unit	25.000.000	RB
22	Komputer	GIC / 2000	1	Unit	12.500.000	RB
23	Komputer	Acer View 33D SVGA/2000	1	Unit	12.500.000	RB
24	Komputer (Lengkap)	LG 52X MAX / 2001	3	Unit	121.000.000	RB
25	Komputer	Galaxy / 2000	1	Unit	5.000.000	RB
26	Komputer	LG 45 V / 2001	1	Unit	17.000.000	RB
27	Printer	Epson LQ 2170 / 2000	2	Unit	9.000.000	RB
28	Layar Monitor	Galaxy / 1999	1	Unit	1.500.000	RB
29	Printer	Canon BJC 6500 / 1999	1	Unit	4.000.000	RB
30	Printer Canon	Canon / 2001	1	Unit	5.000.000	RB
31	CPU	Scan / 2000	1	Unit	7.000.000	RB
32	Komputer Note Book	Compac Preseario 1200 2001	1	Unit	28.475.000	RB
33	Layar Monitor	Casper / 1999	1	Unit	1.500.000	RB
34	Layar Monitor	Acer View 33D SVGA/1999	1	Unit	1.500.000	RB
35	Layar Monitor	Compac / 1999	1	Unit	1.500.000	RB
36	CPU	Zyrex / 1999	1	Unit	7.000.000	RB
37	Printer	Epson LQ 1170 / 1999	1	Unit	4.000.000	RB
38	Warles	Toa Comporation / 1999	1	Unit	700.000	RB
39	Kamera	Yasica / 2000	1	Unit	700.000	RB
40	UPS	Polink / Pro 1200 / 2005	1	Buah	2.352.500	B
41	CPU Komputer Pentium IV	Simbadda / Tower / 2005	1	Buah		B
42	Monitor Komputer	Samsung/Sync Master 793S 2005	1	Buah	16.396.925	B
43	Printer Komputer	HP Laserjet 1020 / 2005	1	Buah		B
44	Portable Multimedia LDP Projector	Toshiba/TDP-T91A/2005	1	Buah	30.000.000	B
45	Layar Projector	New Mark / 2005	1	Buah	10.000.000	B
46	Laptop	Travel Met 4020 / 2005	1	Buah	15.560.000	B
47	Laptop	Travel Met / 2005	1	Buah	15.000.000	B
48	Komputer	Philips / 2007	2	Unit	28.000.000	B
49	Laptop	Tosiba / 2007	2	Unit	33.975.000	B

01	02	03	04	05	06	07
IV	Kendaraan Dinas / Operasional					
01	Sepeda Motor	Honda Astrea /1989	1	Unit	2.700.000	B
02	Sepeda Motor	Win / Jantan	3	Unit	30.000.000	B
03	Sepeda Motor	Honda Supra / 2001	2	Unit	30.000.000	B
04	Sepeda Motor	Honda Supra / 2002	1	Unit	15.000.000	B
05	Kijang Innova	Toyota / 2005	1	Unit		B
06	Sepeda Motor	Yamaha / 2005	1	Unit		B
07	Sepeda Motor	Honda / 2007	1	Buah	14.925.000	B
V	Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor.					
01	Daya Listrik yang digunakan		10.000	Watt		B

6.8. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah antara lain :

1. Kurangnya tenaga terampil bidang keahlian khusus, seperti ahli menghitung PDRB, ahli peta dan ahli program komputer.
2. Terbatasnya sarana (alat bantu) kerja elektronik, komputer server dan note book.
3. Terbatasnya dana operasional perencanaan dan pengendalian pembangunan.
4. Adanya paradigma sistem perencanaan yang baru sehingga banyak tawaran pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis dan fungsional perencanaan yang harus diikuti oleh aparatur Bappeda.
5. Lemahnya koordinasi horizontal dan pembiasaan mekanisme perencanaan akibat kegiatan mendadak dan terjadinya koordinasi vertikal yang mengabaikan koordinasi horizontal.

b. Solusi

Solusi yang telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2006 dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengirimkan atau mengikutsertakan staf Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat pada pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis.
2. Menambah atau mengadakan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
3. Mencari terobosan penggalan dana baik bersumber dari APBN maupun Bantuan Luar Negeri (block grant) guna menunjang keterbatasan dana alokasi dari pemerintah daerah.
4. Penataan koordinasi horizontal dalam perencanaan pembangunan daerah.

7. Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23 Seri D) dan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 27 Tahun 2002 tanggal 30 November 2002 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Urusan Wajib sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

7.1. Program dan Kegiatan.

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah disepakati dan berdasarkan prioritas pembangunan daerah pada Dinas Perhubungan, dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun anggaran 2007 melaksanakan 5 (lima) program dan 7 (tujuh) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel 3.7.1 sebagai berikut.

Tabel 3.7.1
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
	Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan -Sub Dinas Perhubungan Darat/LLAJ dan Sub Dinas ASDP	1. Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan	1. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
2. Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			2. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	
3. Peningkatan Pelayanan Angkutan			3. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 4. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	
			4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	5. Pembangunan gedung/terminal 6. Pembangunan Halte
			5. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	7. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

7.2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam tahun anggaran 2007 tingkat pencapaian program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai mana pada tabel 3.7.2. :

Tabel 3.7.2
Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		
	1. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.	a. Honorarium panitia pelaksana Kegiatan b. ATK/Cetak/Penggandaan c. Studi Transportasi (Master Plan Terminal Type B) 1 paket	100 100 99,80
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		
	2. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	a. Honorarium panitia pelaksana Kegiatan 2 orang b. ATK/Cetak/Penggandaan c. Perencanaan & pengawasan	100 100 99,39
		d. Perbaikan dan Pengecatan gedung kantor Dinas Perhubungan 1 kegiatan	100
		e. Perbaikan dan Pengecatan gedung kantor LLASDP Indrasari 1 kegiatan	100
		f. Perbaikan dan Pengecatan gedung kantor terminal Natai Suka 1 kegiatan	100
		g. Rehabilitasi gedung kantor Dermaga LLASDP Indrasari 1 kegiatan	99,38
		h. Rehabilitasi kantor Terminal Natai Suka 1 kegiatan	69,67
3	Peningkatan Pelayanan Angkutan		
	1. Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	a. Penertiban LLAJ dan ASDP 2 kegiatan	99,30
	2. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	a. Honorarium panitia pelaksana b. Kegiatan ATK/Cetak/Penggandaan c. Perencanaan & pengawasan d. Perpanjangan landasan pacu Bandar Udara Iskandar 100 M 1 paket e. Peningkatan fasilitas VIP Room Bandara Iskandar 1 pkt	100,00 100,00 84,59 99,75 99,27

4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		
	1. Pembangunan gedung terminal	a. Honorarium panitia pelaksana	100,00
		b. Kegiatan ATK/Cetak/Penggandaan	100,00
		c. Perencanaan & pengawasan	99,29
		d. Pembangunan dermaga Sebukat 1 pkt	99,38
		e. Pemb. dermaga Karang Sari 1 pkt	99,48
		f. Pemb. dermaga Nanga Mua 1 paket	94,80
		g. Pembangunan dermaga Pandau 1 pkt	99,43
		h. Pemb. dermaga Kumai Hilir 1 paket	99,27
		i. Pembangunan ruang tunggu dermaga ASDP Ktw. Lama	98,96
		j. Pembangunan garasi speed board Indrasari	98,45
		k. Pembangunan garasi kendaraan dinas/operasional Roda 4	99,29
		l. Pembangunan halte 3 buah	98,88
5	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		
	1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	a. Pengadaan rambu-rambu LLASDP 75 buah 1 paket	00,00
		b. Pengadaan rambu-rambu LLAJ 160 buah 1 paket	71,44
		c. Pengadaan Traffic Light 1 pkt	99,58
		d. Pengadaan Warning Light 1 paket	98,33
	2. Pengadaan marka jalan	a. Pembuatan marka jalan 1 pkt	100,00

Tingkat pencapaian program dan kegiatan rata-rata tahun anggaran 2007 tersebut di atas sebesar 94.35%.

7.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 27 Tahun 2002 tanggal 30 November 2002 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

a. Susunan Organisasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai susunan organisasi sebagai berikut.

- 1). Kepala Dinas;
- 2). Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 - Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - Kepala Sub Bagian Perlengkapan;
 - Kepala Sub Bagian Program & Pelaporan
- 3). Kepala Sub Dinas Rencana dan Penelitian, membawahi:
 - Kepala Seksi Evaluasi dan Pemantauan;
 - Kepala Seksi Penyiapan Rencana & Program;
 - Kepala Seksi Pengkajian;

- 4). Kepala Sub Dinas Perhubungan Darat/LLAJ, membawahi:
 - Kepala Seksi Angkutan;
 - Kepala Seksi Lalu Lintas;
 - Kepala Seksi Keselamatan TSP

- 5). Kepala Sub Dinas LLASDP, membawahi:
 - Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan;
 - Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;

- 6). Unit Pelaksana Teknis Daerah Dermaga LLASDP Indrasari;

- 7). Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Natai Suka

b. Tugas Pokok dan Fungsi.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut.

1). Tugas Pokok.

Tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah membantu Kepala Daerah (Bupati) menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah di bidang perhubungan.

2). Fungsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- b. Perencanaan, pembangunan, pengawasan, pengendalian serta pemeliharaan sarana/prasarana dan fasilitas perhubungan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengamanan angkutan;
- d. Fasilitasi, pengawasan dan pengendalian perijinan angkutan;
- e. Pengelolaan ketatausahaan;
- f. Pengelolaan Cabang Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pemaduan antarmoda transportasi serta peningkatan kenyamanan dan keselamatan transportasi.

c. Visi dan Misi.

1). Visi.

Sebagai dasar pandangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan visi sebagai berikut: **“Terciptanya Layanan Transportasi Secara Prima, Profesional dan Terjangkau oleh Seluruh Lapisan Masyarakat”**

2). Misi.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan misi sebagai berikut:

- a). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- b). Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan;
- c). Memberikan pelayanan jasa transportasi yang prima;
- d). Menumbuhkembangkan peranserta masyarakat menciptakan ketertiban, keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan.

d. Strategi dan Kebijakan.

Dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan **strategi** sebagai berikut:

- 1). Menciptakan sumber daya aparatur yang berkualitas;
- 2). Menciptakan hubungan kerjasama antar lembaga secara hirarki dan fungsional;
- 3). Mewujudkan sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas dan kompetitif;
- 4). Menciptakan system transportasi yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan **kebijakan** yang diambil untuk mendukung strategi tersebut adalah:

- 1). Menciptakan aparatur yang berkualitas melalui pendidikan dan atau pelatihan sehingga mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mengidentifikasi sekaligus menganalisa permasalahan yang timbul dalam masyarakat.
- 2). Meningkatkan koordinasi dengan dinas / instansi terkait guna mendukung kegiatan pelayanan masyarakat
- 3). Melengkapi sarana dan prasarana perhubungan;
- 4). Meningkatkan PAD melalui peranserta masyarakat;

7.4. Jumlah Pegawai, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

a. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.

Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat menurut pendidikan adalah sebagaimana tabel 3.7.4.1 sebagai berikut.

Tabel 3.7.4.1
Keadaan Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	S2	1	1	-	-	1
2	S1	11	10	-	1	10
3	Sarjana Muda	3	3	-	-	3
4	SLTA	47	28	-	19	28
5	SLTP	-	1	-	-	1
6	SD	-	2	-	-	2
Jumlah		65	45	-	20	45

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat menurut pangkat dan golongan adalah sebagaimana tabel 3.7.4.2 berikut.

Tabel 3.7.4.2
Keadaan Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	Golongan I/a	-	-	-		-
	Golongan I/b	-	-	-		-
	Golongan I/c	2	2	-		2
	Golongan I/d	-	-	-		-
Jumlah Golongan I		-	2	-		2
2	Pengatur Muda (II/a)	26	6	-	20	6
	Pgtr Muda Tk I(II/b)	1	1	-	-	1
	Pengatur (II/c)	4	4	-	-	4
	Pgtr Tingkat I (II/d)	3	3	-	-	3
Jumlah Golongan II		36	14	-	20	14
3	Penata Muda (III/a)	10	10	-	-	10
	Pnt Muda Tk I(III/b)	4	4	-	-	4
	Penata (III/c)	6	5	-	-	6
	Penata Tk I (III/d)	4	4	-	-	4
Jumlah Golongan III		24	23			24
4	Pembina (IV/a)	2	2	-	-	2
	Pembina Tk I (IV/b)	3	3	-	-	3
	P.Utama Muda(IV/c)	-	-	-	-	-
Jumlah Golongan IV		5	5	-		5
Total		65	44	-	20	45

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah pejabat struktural dan fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagaimana tabel 3.7.4.3 berikut.

Tabel 3.7.4.3
Keadaan Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	Manurut Jabatan Struktural					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II-b	1	1	-	-	1
	Eselon III-a	4	4	-	-	4
	Eselon IV-a	13	11	-	3	10
	Fungsional	-	-	-	-	-
	Staf	47	30	-	17	30
Jumlah		65	46		20	45
2	Manurut Jabatan Fungsional					
	Jumlah					

d. Jumlah Pegawai Tidak Tetap.

No	Uraian	Jumlah
1	Tukang kebun terminal Natai Suka	1

7.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

a. Belanja Tidak langsung.

Berdasarkan penetapan APBD tahun anggaran 2007 Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh alokasi anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukan bagi gaji pegawai sebesar Rp 1.229.279.450,- dan sampai akhir bulan Desember 2007 telah direalisasikan (dibelanjakan) sebesar Rp 1.215.498.080,- dengan sisa (saldo) sebesar Rp 13.781.370,-.

b. Belanja langsung.

Realisasi anggaran belanja langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 86,61% dengan rincian sebagaimana tabel 3.7.5 berikut.

Tabel 3.7.5
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih Anggaran (Rp)	Capaian Indikator Kinerja (%)
			Fisik	Keuangan		
			(%)	(Rp) (%)		
1	Belanja Pegawai	183.232.700	2,21	133.581.400 72,90	49.651.300	72,90
2	Belanja Barang dan Jasa	419.967.300	6,40	385.967.120 91,90	34.000.180	91,90
3	Belanja Modal	5.802.096.00	91,39	5.514.108.544 95,04	287.987.456	95,04
Jumlah		6.405.296.000	100,00	6.033.657.064 86,61	371.638.936	86,61

7.6. Proses Perencanaan Pembangunan.

Proses perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2007 yang dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Adapun proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun anggaran 2007 adalah berdasarkan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Forum RKPD
- c. Musrenbang Kabupaten

7.7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2007 adalah sebagaimana tabel 3.7.7 berikut.

Tabel 3.7.7
Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis>Nama Barang	Merk/Thn Pembuatan	Jumlah		Harga Satuan (Rp)	Kondisi
			Vol	Sat		
1	2	3	4	5	6	7
I. Tanah dan Bangunan						
1	Tanah bangunan Dermaga LLASDP Pasar Saik	1986	1.200	M ²	6.000.000	Baik
2	Tanah bangunan Dermaga LLASDP Pasar Indrasari	1991	600	M ²	6.000.000	Baik
3	Tanah bangunan kantor Terminal Natai Suka	1992	20.000	M ²	700.000.000	Baik
4	Bangunan Dermaga LLASDP Pasar Saik	1992	288	M ²	90.105.000	Baik
5	Bangunan Pos LLASDP Pasar Saik	-	286	M ²	143.000.000	Baik
6	Tanah bangunan kantor induk jln. HM. Rafi'i	1995	6.800	M ²	370.900.000	Baik
7	Tanah bangunan Dermaga LLASDP Ktw. Lama	1996	604	M ²	38.000.000	Baik

1	2	3	4	5	6	7
8	Tanah bangunan Dermaga LLASDP Kumai	1997	1.500	M ²	38.000.000	Baik
9	Bangunan Pos LLASDP Ktw. Lama	1997	135	M ²	69.750.000	Baik
10	Bangunan Dermaga LLASDP Kolam.	1997	160	M ²	165.716.797	Baik
11	Bangunan ponton dermaga Ktw. Lama	1997	60	M ²	85.735.411	RB
12	Bangunan ponton dermaga Indrasari	1997	24	M ²		Baik
13	Bangunan Dermaga LLASDP Kumai	1997	124	M ²	132.537.000	Baik
14	Tanah bangunan kantor Terminal Abd. Azis Kumai	-	9.469	M ²	289.500.000	Baik
15	Bangunan Terminal Abdul Azis Kumai	-	64	M ²	64.000.000	RR
16	Tanah bangunan di jalan HM. Rafi'i Pasir Panjang	1998	2.473	M ²	45.000.000	Baik
17	Tanah parkir Pasar Indra Kencana	1999	2.000	M ²	200.000.000	Baik
18	Bangunan Dermaga LLASDP Indrasari	1999	378	M ²	100.000.000	Baik
19	Bangunan ponton dermaga Pasar Saik	1999	24	M ²		Baik
20	Bangunan Pos LLASDP Sungai Buun	2001	36	M ²	36.000.000	Baik
21	Papan nama jalan	2001	47	Bh	11.750.000	Baik
22	Tanah bangunan Terminal Amin jaya P. Banteng	2002	10.000	M ²	125.000.000	Baik
23	Tanah bangunan di jalan A.Yani Pangkalan Lima	2002	5.000	M ²	100.000.000	Baik
24	Tanah Dermaga Desa Rungun	2002	460	M ²	12.800.000	Baik
25	Bangunan Kantor Dinas Perhubungan	-	455	M ²	45.500.000	Baik
26	Bangunan ruang tunggu Terminal Natai Suka	2002	168	M ²	100.800.000	Baik
27	Bangunan Pos Terminal Amin Jaya	2002	12	M ²	12.000.000	Baik
28	Bangunan Pos Jaga	2002	12	M ²	14.000.000	Baik
29	Bangunan garasi kendaraan	2002	96	M ²	40.750.000	Baik
30	Pagar keliling			M ²		Baik
31	Bangunan ponton dermaga Indrasari	2002	60	M ²	58.579.176	Baik
32	Bangunan Pos Monyet	2002	12	M ²	14.000.000	Baik
33	Traffic Light		3	Buah	100.872.000	Baik
34	Rambu-rambu LLASDP		75	Buah		Baik
35	Traffic Corne		17	Buah		Baik
36	Rambu-rambu LLAJ		227	Buah		Baik
37	Rambu-rambu LLAJ	2002	158	Buah	63.500.000	Baik
38	Rambu-rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ)		6	Buah		Baik
39	Rambu-rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ)	2002	4	Buah	20.000.000	Baik
40	Halte		7	Buah		Baik
41	Halte	2002	24	M ²	18.000.000	Baik
42	Tanah bangunan di bundaran besar	2005	25.000	M ²	75.000.000	Baik
43	Rambu-rambu RPPJ	2006	70/30	Buah	920.400	Baik
44	Bangunan terminal Ktw. Lama	2006	1	Buah	174.750.000	Baik
45	Halte	2006	4	Buah	80.000.000	Baik
46	Bangunan kantor LLASDP Indrasari	2007		M ²	239.750.000	Baik
47	Bangunan dermaga Sebukat	2007	1	Buah	95.900.000	Baik

1	2	3	4	5	6	7
48	Bangunan dermaga Karang Sari	2007	1	Buah	96.500.000	Baik
49	Bangunan dermaga Nanga Mua	2007	1	Buah	91.485.000	Baik
50	Bangunan dermaga Pandau	2007	1	Buah	95.950.000	Baik
51	Bangunan dermaga Kumai Hilir	2007	1	Buah	95.800.000	Baik
52	Bangunan Ruang Tunggu dermaga Ktw. Lama	2007	1	Buah	47.750.000	Baik
53	Garasi speedboard pasar Indrasari	2007	1	Buah	23.750.000	Baik
54	Halte	2007	3	Buah	74.160.000	Baik
55	Rambu-rambu LLAJ	2007	160	Buah	71.444.444	Baik
56	Traffic Light	2007	1	Buah	239.000.000	Baik
57	Warning Light	2007	2	Buah	59.000.000	Baik
58	Garasi mobil	2007	1	Buah	69.500.000	Baik
59	Fasilitas VIP Room Bandara Iskandar	2007	1	Prkt	307.039.100	Baik
60	Perpanjangan lada pacu Bandara Iskandar	2007	100	Meter	3.130.000.000	Baik
II. Perlengkapan Gedung Kantor						
1	Teralis besi kantor					
2	Sumur pompa					
3	Gorden kantor					
4	Meja kayu		56	Buah		Baik
5	Pemadam kebakaran	1994	1	Buah		
6	Kursi tunggu	1995	80	Buah	8.000.000	Baik
7	Brankas	1997	1	Buah	2.000.000	Baik
8	Tangga besi lipat	2001	1	Buah		Baik
9	Penangkal Petir	2001	1	unit	8.000.000	Baik
10	Meja kerja kayu	2002	2	Buah	1.200.000	Baik
11	Meja rapat		7	Buah		Baik
12	Kursi kerja		85	Buah		Baik
13	Kursi tamu		5	Set		Baik
14	Lemari arsip kayu		12	Buah		Baik
15	Lemari arsip kayu	2002	2	Buah	3.100.000	Baik
16	Rak arsip kayu		1	Buah		Baik
17	Filling cabinet		12	Buah		Baik
18	Pompa air		5	Buah		Baik
19	Jam dinding		2	Buah		Baik
20	Kipas angin gantung		5	Buah		Baik
21	Meja kayu	2005	6	Buah	3.000.000	Baik
22	Meja kerja kayu	2006	5	Buah	2.500.000	Baik
23	Kursi lipat	2006	8	Buah	1.800.000	Baik
24	Lemari besi	2006	1	Buah	2.000.000	Baik
25	Timbangan gantung		1	Buah	75.000	Baik
26	Peralatan Timbang Chletron	2006	2	Unit	316.000.000	Baik
27	Mesin Marka Jalan	2006	2	Unit	62.000.000	Baik
28	Gordyn	2007	15	Lbr	2.250.000	Baik
29	Kipas Angin	2007	10	Buah	3.500.000	Baik
30	Meja ½ Biro	2007	4	Buah	2.400.000	Baik
31	Kursi lipat (besi)	2007	38	Buah	7.600.000	Baik
32	Kursi kerja putar	2007	10	Buah	2.250.000	Baik
33	Lemari arsip	2007	2	Buah	3.000.000	Baik
34	Rak Televisi	2007	1	Buah	750.000	Baik

III. Peralatan Gedung Kantor						
1	Pesawat televisi		2	Buah	1.900.000	Baik
2	Telephone PTE-991	1996	1	Buah	175.000	RR
3	AC Split	1998	2	Buah	8.975.000	Baik
4	Megaphone	1999	1	Buah	75.000	RR
6	Telephone Unitel OM104	2002	1	Unit	350.000	Baik
7	Telephone Panasonic	2002	1	Unit	250.000	Baik
8	Telephone Panasonic	2002	3	Buah	250.000	Baik
9	Mesin Faximile	2005	1	Buah	2.000.000	Baik
10	Mesin potong rumput gendong	2006	1	Buah	4.500.000	Baik
11	Digital Parabola 9 Ft 2 LNB	2006	1	Unit	1.565.286	Baik
12	Mesin potong rumput	2007	1	Unit	2.150.000	Baik
IV. Peralatan & Perlengkapan Kantor						
1	Mesin ketik		10	Buah		Baik
2	Sound System TCA	1993	1	Buah	1.800.000	Baik
3	Computer PC P-I 75	1997	1	Unit	2.000.000	RR
5	Baju Rompi dinas (parasut)	2001	30	Lbr	2.750.000	Baik
4	Radio Cassete Recorder	2002	1	Buah	650.000	Baik
5	Computer PC P-II 200	2002	1	Unit	3.000.000	RR
6	Computer PC P-4 1.7	2003	1	Unit	8.000.000	Baik
7	Computer PC P-4 1.8	2004	1	Unit	6.675.000	Baik
8	Handy Talky		4	Buah	7.232.500	Baik
9	Handy Talky	2005	2	Buah	2.000.000	Baik
10	Lampu senter kedip		2	Buah		Baik
11	Senter Lantas	2005	2	Buah	700.000	Baik
12	Computer PC P-4	2005	1	Unit	15.000.000	Baik
13	Handy Talky Alinco	2006	2	Unit	3.500.000	Baik
14	Computer PC P-4	2006	1	Unit	15.000.000	Baik
15	Computer Laptop P-4	2006	1	Buah	15.000.000	Baik
16	Computer PC P-4	2007	1	Buah	15.000.000	Baik
17	Kalkulator	2007	4	Buah	1.400.000	Baik
18	Wireless Amflipire	2007	1	Buah	4.000.000	Baik
19	Rak piring	2007	1	Buah	800.000	Baik
20	Piring makan	2007	4	Lusin	300.000	Baik
21	Sendok makan	2007	4	Lusin	100.000	Baik
22	Gelas	2007	4	Lusin	100.000	Baik
V. Kendaraan Dinas/Operasional						
1	Sepeda motor roda 2	1996	1	Buah	6.500.000	Baik
2	Sepeda motor roda 2	2001	1	Buah	12.500.000	Baik
3	Speed Board Yamaha	2002	1	Unit		Baik
4	Kendaraan Roda 4 L200	2006	1	Unit	347.500.000	Baik
5	Kendaraan Roda 4 Inova	2006	1	Unit	140.000.000	Baik
6	Kendaraan Roda 4 Pic-Up L-200	2007	1	Unit	153.000.000	Baik
7	Kendaraan Roda 2 Shogun	2007	4	Unit	59.200.000	Baik

7.8. Permasalahan dan Solusi.

a. Permasalahan.

Permasalahan prioritas yang masih belum dapat diatasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain adalah:

- 1). Masih terbatasnya jumlah pegawai/staf pelaksana, personil yang memiliki kualifikasi keahlian tertentu seperti tenaga Penguji Kendaraan Bermotor (PKB), Pengelola Terminal Angkutan Jalan (PTAJ), Perencana Jaringan Trayek, Analisis dampak lingkungan lalu lintas serta manajemen parkir, yang kesemuanya merupakan kendala tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2). Belum tersedianya Rencana Induk Pengembangan Perhubungan (RIPP) dan Rencana Detail Pengembangan Perhubungan (RDPP) yang merupakan dasar acuan pembangunan dan pengembangan bidang perhubungan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
- 3). Pengujian kendaraan bermotor masih belum dapat dilaksanakan secara optimal karena masih belum memiliki Gedung/Balai Pengujian Kendaraan Bermotor beserta peralatan pengujiannya, dan untuk sementara ini masih menggunakan alat uji manual.
- 4). Masih belum tersedianya terminal Type B yang melayani angkutan umum antar kota dalam provinsi.

b. Solusi.

Untuk mengatasi permasalahan prioritas tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah konkrit yang antara lain

- 1). Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk:
 - Menambah pegawai pemegang jabatan eselon IV yang masih kosong;
 - Menambah pegawai pelaksana;

- 2). Meningkatkan kualitas/kualifikasi pegawai yang menangani pengujian kendaraan bermotor, Pengelola Terminal Angkutan Jalan (PTAJ), Perencana Jaringan Trayek, dan Analisis dampak lingkungan serta manajemen parkir.
- 3). Mengusulkan pembuatan/penyusunan Rencana Induk Pengembangan Perhubungan (RIPP) dan Rencana Detail Pengembangan Perhubungan (RDPP) yang merupakan dasar acuan pembangunan dan pengembangan bidang perhubungan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
- 4). Mengusulkan pembangunan Gedung/Balai Pengujian Kendaraan Bermotor serta pengadaan peralatan pengujiannya, sehingga pengujian kendaraan bermotor dapat dilaksanakan secara optimal.
- 5). Mengusulkan pembangunan terminal Type B beserta perlengkapannya.

8. Lingkungan Hidup

Gerakan lingkungan hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat telah dimulai sejak dibentuknya Lembaga atau Badan yang disebut dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dengan singkatan BAPEDALDA yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 7 Tahun 1999 tanggal 20 Pebruari 1999 tentang Organisasi Bapedalda Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAPEDALDA mengalami penyempurnaan untuk pertamakali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 29 Tahun 2000 Tata Kerja Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya melaksanakan tugas pokok sebagai lembaga yang melaksanakan kewenangan sebagai urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dengan fungsi pengendalian dampak lingkungan , pengawasan terhadap dampak lingkungan yang disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam, penerapan dan penyuluhan lingkungan.

8.1. Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas /Badan yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 melaksanakan 11 (sebelas.) program dan 30 (tiga puluh) kegiatan dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel : 3.8.1. sebagai berikut :

Tabel 3.8.1.

Prioritas Pembangunan, Progra dan Kegiatan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub. Fungsi	Program	Kegiatan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Peningkatan Kelembagaan dan akses Informasi/ Inventarisasi data Lingkungan Hidup	Administrasi, pengawasan, pemeriksaan, operasi atau dukungan untuk pengelolaan limbah, Polusi dan kegiatan yg lain ;	Prog. Adm Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Penyed. Jasa surat menyurat - Jasa komunikasi, SD.Air dan listrik - Penyd.jasa peralatan & Pelengkap-an Kantor - Jasa penyed. Pemel.& izin kendr Dinas/Operasional. - Js Adm Keuangan - Js Kebersihan Ktr. - Penyediaan ATK - Penyed.brg cetakan & penggandaan. - Komponen listrik kantor - Penyd.peralatan & Pelengkapan ktr - Penyd. Peralatan RT. - Penyed bhn bacaan - Penyed.makan & minum Peg.Ktr. - Rapat2 koordnasi & konsultasi ke luar daerah.
2	Peningkatan Analisis Pencegahan dampak Lingkungan Hidup	-Hibah pinjaman atau subsidi utk mendukung ope-rasi, konstruksi, pemeliharaan ataupun peningkatan sistem pengelolaan limbah & sistem konservasi sumber daya alam.		
3.	Peningkatan Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup			
4.	Peningkatan pelestarian dan pemulihan lingkungan hidup.	-Untuk menganalisis tentang pencemaran lingkungan hidup, baik pencemaran limbah padat dan limbah cair. Untuk mengetahui besaran kadar/dampak yang ditimbulkan.	<p>Program Peningkatan sarana dan prasaranan Aparatur</p> <p>Prog. Peningkatan disiplin Aparatur</p> <p>Prg.peningkt Kapasitas SD.Aparatur</p> <p>Peningkatan pengemb system pelaporan capaian kinerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan gedung Kantor. - Pengadaan kendr Dinas/Operasional - Pengad perlengkap gedung kantor. - Pemel meubel ktr. - Pemel Gdg ktr. - Pengd.pakaian dinas - Diklat Pegawai. - Penys.laporan capaian kinerja - Penys. Lap.Keu.

			<p>Pengendalian Pencemaraan & perusakan L.H</p> <p>Prg.Perlindgn & Konservasi kerusakan Sumber2 Air.</p> <p>Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA & L.H.</p> <p>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</p> <p>Prog.pengedl ruang terbuka hijau (RTH)</p> <p>Prg.Pengendl pencemaran & perusakan L.H.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penys.kebijakan pengendl penc & perusakan L.H. - Koordinasi Penys. Amdal - Peningkt peranserta masyarakat dalam pengedl L.H. - Monitoring & Pelaporan - Perlindungan SD.Air dan Pengendl.Kerusakan sumber2 Air - Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan. - Peningkt edukas dan komunikasi masya dibdg Lingkungan Hidup. - Pengembangan data & informasi Lingk.hidup. - Penguatan jejaring informasi lingkungan Pusat dan Daerah. - Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri - Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair. - Penyuluhan & pengendl polusi dan pencemaran - Penys.kebijakan.norma, standar, prosedur & manual pengelolaan RTH. - Sosialisasi kebijakan,norma, standar,prosedur manual RTH. - Pnyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH. - Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura. - Koordinasi Penilaian Langit Biru. - Pemantauan kualitas lingkungan. - Pengawasan elak kebijakan bidang L.H. - Koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tapa izin (Peti) - Pengelola B3 dan Limbah B3. - Pengkajian dampak lingkungan. - Peningkt. Pengelolaan lingkg pertambangan. - Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih.
--	--	--	--	--

8.2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam Tahun 2007 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1.	Pelayanan Adm Perkantoran		
	- Penyediaan jasa surat menyurat	-Terkirimnya surat	30,00
	- Penyed.jasa komunikasi,SDA/listrik	-Penerangan ktr dll	100,00
	- Penyed jasa Peral & perlgkapan Ktr	-terpeliharanya komputer ktr	72,88
	- Penyed jasa pemel kendr dinas	-Terpeliharaanya kendr. Dinas	49,88
	- Penyed jasa adm keuangan.	-Hr.Pelaksana kegiatan	96,75
	- Penyed jasa kebersihan ktr	-Kebersihan kantor	76,58
	- Penyedian alat tulis kantor.	-Kegiatan Adm Kantor	68,22
	- Penyed bg cetakan & penggandaan.	-Blanko pajak & petugas	61,91
	- Penyed komponen listrik ktr.	-Penggantian instalasi yg rusak	0,00
	- Penyed peralt & perlkpan kantor	-Sarana perlengkapan pegawai	99,99
	- Penyed peralatan rumah tg, kantor	-Kelengkapan dapar Bapedalda	49,99
	- Penyed. Bhn bacaan & per-UU	-Pedoman peg dlm melak tugas	25,06
	- Penyed.makanan/minuman ktr.	-Pegawai Bapedalda & rapat2	7607
	- Rapat2 koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-Kepala Bapdl,Kabid,Sek dan staf Bapedal	80,71
2.	Peningkatan sarana prasarana Aparatur		
	- Pembangunan gedung Kantor	-Terpenuhi ruang kerja pegawai	86,14
	- Pengadaan Kendaraan dinas	-Terpenuhinya sarana pelayanan	99,33
	- Pengadaan Perlkp gdg ktr.	- Penerangan kantor Bapedalda	0,00
	- Pemel.gedung ktr.	- Sekretariat Bapdalda	68,72
- Pemel rutin meibel ktr.	- Meja dan kursi kantor.	0,00	
3.	Peningkatan disiplin apatur		
- Pengadaan pakaian dinas Peg.	- Pegawai Bapedalda	100	
4.	Pengikatan kapasitas SD.Aparatur		
- Pendidikan dan pelatihan formal	- Pegawai lingkup Bapedalda	44,98	
5.	Peningkatan sistem pelaporan kinerja		
	- Penyus.lap capaian kinerja SKPD	-Lembur Peg Bapadalda	0,00
- Penyus.Lap.Keu smesteran	-Lembur Peg.Bapedalda	0,00	

6.	<p>Pengendalian pencemaran & perusakan L.H.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura -Koordinasi Penilaian langit biru -Pemantauan kualitas lingkungan -Pengawas pelak kebijakan bdg.L.H. -Koordinasi penertiban kegiatan Peti -Pengelolaan B3 dan limbah B3 -Pengkajian dampak lingkungan -Peningkatan lingkungan pertambangan -Koordinasi pengelolaan prokasi -Penyus.kebijakan pengendl pencemaran & perusakan L.H. -Koordinasi Penyusunan Amdal -Peningkatan peranserta masya dlm pengedl L.H. -Monitoring, evaluasi & pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas terkait dan Masya Kobar - Penyuluh terhdp Masya kobar - Kegiatan industri2 - Pengusaha dan masyarakat - Dinas terkait &Masya Peti - Perusahaan2 industri - Pencemaran & kerusakan lingk -Masya penambang emas -Din terkait & masya tepi sungai -Perusahaan dan masya yang memilik usaha -Pengusaha perkebunan dll -Masya pengelola lingkungan. -Pengusaha dan Peg.Bapedalda 	<p>25,31</p> <p>31,00</p> <p>25,37</p> <p>19,71</p> <p>0,00</p> <p>42,07</p> <p>93,19</p> <p>74,93</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>100,00</p> <p>63,99</p> <p>46,24</p>
7.	<p>Perlindungan & Konservasi SDA.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Konservasi SD.Air & pengedl Kerusakan sumber - sumber air. -Koordinasi Pengd.Kebakaran hutan 	<ul style="list-style-type: none"> -Daerah rawan kekeringan -Semua kegiatan yg menimbulkan dampak lingkg 	<p>65,17</p> <p>68,77</p>
8.	<p>Peningkt kualitas & akses informasi SD Alam & L.H.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengikt edukasi & komunikasi masyarakat bidang Lingkungan - Pengembangan data & informasi Lingkungan - Penguatan jejaring pusat dan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> -Masya dan para pengusaha se- Kobar -Pengumpulan data-data lingkungan -Sumber informasi Kementrian lingkungan dan daerah 	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
9	<p>Peningkatan Pengendalian Polusi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri -Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair -Penyuluhan dan pengendl polusi & pencemaran 	<ul style="list-style-type: none"> -Pangkalan Bun & sekitarnya -Terhdp industri besar/kecil di Kab.Kobar - Masya & masya usaha industri 	<p>47,02</p> <p>27,07</p> <p>97,11</p>
10.	<p>Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Penyus.kebijakan pengelolaan RTH. -Sosialiasi kebijakan Pengel RTH. -Penyus dan analisis data/informasi pengelolaan RTH. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masya dan instansi terkait - Masya dan instansi terkait - Daerah lahan kritis dll 	<p>48,72</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

8.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor :32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 18 Tahun 2002 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Tata kerja Perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 30 Nopember 2002 tentang susunan Organisasi, Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai Visi, Misi. Tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun Susunan Organisasi, Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

a. Susunan Organisasi :

Struktur Organisasi Badan Pengendalian dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi :
 - *. Kasubag. Kepegawaian.
 - *. Kasubag Keuangan
 - *. Kasubag Umum.
 - *. Kasubag Program dan Pelaporan.
3. Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahi :
 - *. Kepala Sub.Bidang Analisis dan Evaluasi.
 - *. Kepala Sub Bidang Pengkajian Teknik Amdal.
 - *. Kepala Sub Bidang Penerapan UKL/UL.
 - *. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas.

4. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi :
 - *. Kepala Sub.Bidang Peningkatan dan Pengolahan.
 - *. Ka Sub Bidang Pencegahan & Penanggulangan Pencemaran Air
 - *. Ka Sub Bidang Pencegahan & Penanggulangan Pencemaran Tanah dan Udara.
 - *. Kepala Sub. Bidang Perizinan.
5. Kepala Bidang Pelestarian dan Pemulihan,membawahi :
 - *. Kepala Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan.
 - *. Kepala Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
 - * Kepala Sub Bidang Penyuluhan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pegendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

Tugas Pokok

Bapedalda Kab.Ktw.barat adalah melaksanakan kewenangan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.

Fungsi Babedalda :

1. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
2. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan Amdal.
3. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan Kualitas lingkungan.
4. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan UKI/UPL serta pengendalian teknis pelaksanaan Amdal.
5. Penerapan dan pengembangan fungsi ainformasi lingkungan.
6. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat.
7. Melakukan urusan Kesekretariatan.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Ktw. Barat.

c. **Visi dan Misi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat :**

Visi :

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kotawaringin Barat periode 2005 – 2010 yaitu “ *Kotawaringin Barat sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan Dengan masyarakatnya yang maju, Aman, Tertib, Damai, Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan*” dengan Misi mengenai lingkungan hidup adalah Pemberdayaan Masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada mekanisme pasar yang berkeadilan, serta berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, kompetitif, mandiri, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” maka VISI Bapedalda adalah : **“*Terwujudnya Pelestarian lingkungan hidup dan berkesinambungan pemanfaatan sumber daya alam untuk menuju masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang sejahtera, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.*”**

Misi :

Untuk melaksanakan Visi tersebut, maka Misi Bapedalda adalah :

1. Meningkatkan Pengetahuan, kesadaran dan memberdayakan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk kepentingan generasi kini dan generasi yang akan datang.
3. Memperkuat kapasitas sumberdaya aparat, sarana dan prasarana, lembaga pengelola lingkungan hidup.
4. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinergi antara lembaga dalam upaya pengendalian pencemaran dampak lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan;
5. Menyediakan data dan sistem informasi lingkungan.

d. Kebijakan/Strategis Badan Pengendalian dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam menangani masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan.
2. Meningkatkan pengawasan, pembinaan dan penyuluhan baik terhadap para pengusaha maupun terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.
3. Meningkatkan sumber daya Aparatur melalui Diklat teknis maupun non teknis dalam rangka meningkatkan kinerja secara profesional.
4. Meningkatkan Pangkalan Bun sebagai kota sehat, nyaman dan bebas sampah
5. Mempertahankan Adipura.

8.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

a. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan

Jumlah Pegawai Bapedalda Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 3.8.4.1. sebagai berikut :

Tabel. 3.8.4.1.
Pegawai Menurut Pendidikan

No.	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Terakhir
1.	S2	-	2	1	-	3
2.	S1	-	15	-	2	13
3.	Sarjana Muda	-	-	1	-	1
4.	SLTA	-	7	2	-	9
5.	SLTP	-	-	-	-	-
6.	SD	-	-	-	-	-
	JUmlah	-	25	4	2	26

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

Jumlah Pegawai Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada tabel 3.8.4.2. sebagai berikut :

Tabel 3.8.4.2
Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No.	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Gol. I/a/	--	--	--	--	--
	Gol.II/b/	--	--	--	--	--
	Gol.II/c/	--	--	--	--	--
	Gol.II/d	--	--	--	--	--
	Jumlah Gol.I	--	--	--	--	--
2.	Pengt.Muda (II/a)	--	--	--	--	2
	Pengt.Md.TK.I(II/b)	--	--	--	--	-
	Pengatur (II/c)	--	--	--	--	3
	Pengt.TK.I.(II/d)	--	--	--	--	-
	Jumlah Gol.II.					5.
3.	Penata Muda (III/a)	--	-	--	--	4
	Penata Muda TK.I.(III/b)	--	--	--	--	-
	Penata (III/c)	--	--	--	--	5
	Penat.TK.I.(III/c)	--	--	--	--	8
	Jumlah Gol.III.					17
4.	Pembinaan (Gol.IV/a)	--	--	--	--	3
	Pemina TK.I. (IV/b)	--	--	--	--	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	--	--	--	--	-
	Jumlah					4

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah Pejabat Struktural Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut jabatan Struktural dan fungsional terdapat pada table 3.8.4.3. sebagai berikut

Tabel 3.8.4.3.
Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Menurut jabatan Struktural					
	Eselon I	--	--	--	--	--
	Eselon II.b.	--	1	--	--	1
	Eselon III.a.	1	3	1	1	3
	Eselon IV.a.	--	12	-	1	12
	Fungsional	--	--	-	--	-
	Staf	1	8	1	--	10
	Jumlah	2	24	2	1	26
2	Menurut Jabatan Fungsional					
	Eselon I	--	--	--	--	--
	Eselon II	--	--	--	--	--
	Eselon III	--	--	--	--	--
	Eselon IV	--	--	--	--	--

d. Jumlah Pegawai Tidak Tetap

No.	Uraian	Jumlah
1.	Petugas Jaga Malam	2 Orang
2.	Petugas Kebersihan ktr (Cleaning Service)	2 Orang.
	Jumlah	4 Orang

8.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

a. Belanja Tidak Langsung.

Berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 Bapedalda, memperoleh alokasi anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukan bagi Gaji Pegawai sebesar Rp.879.978.078,- dan sampai akhir bulan Desember 2007 telah direalisasikan (dibelanjakan) sebesar Rp. 801.682.724,00 dengan sisa (saldo) sebesar Rp. 78.295.354,-

b. Belanja Langsung.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Bapedalda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat target (tingkat Kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 77.60 % dengan rincian pada tabel 3.8.5. sebagai berikut :

Tabel 3.8.5.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No.	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Selisih Anggaran	Capaian indicator Kinerja	
			Fisik	Keuangan			
		(Rp).	(%)	(Rp).	(%)	(Rp.	(%)
1	Belanja Brg Jasa Prog,Pelay.Adm Perkantoran <u>Kegiatan :</u>						
	-Jasa srt menyurat						
	-Jasa komunikasi, SDA & Listrik	3.000.000	--	900.000	30,00	2.100.000	30,00
	-Js Peral & Perikpan Kantor	18.900.000	--	13.460.210	71,21	5.439.790	71,21
	-Belj. Jasa Sevice Kendr bermotor	2.600.000	--	1.895.000	72,88	705.000	72,88
	-Service AC	1.900.000	--	1.895.000	99,73	5.000	99,73
	-Perawatan Kedr, (bahan bakar)	700.000	--	--	0	700.000	--
	-Biaya STNK	5.100.000	--	2,550.000	50,00	2.550.000	50,00
	-Pemy.Honor Pelaksana Kegiatan	750.000	--	--	0	750.000	--
	-Hr.Petugas kebersihan ktr	24.000.000		23.220.000		780.000	96,75
	-Hr.Peg.tdk tetap	31.342.080		25.039.482		6.302.598	79,83
	-Pemy.upahkerja	24.421.600		16.712.800		3.708.800	81,83
	-Bahan pembersih ktr	9.048.000		6.454.242		2.593.758	71,33
	-Pembl ATK	1.872.480		1.872.440		40	99,99
	-Cetak & penggandaan	16.465.100		11.232.550		5.232.550	68,22
	-Pembl buku2 pustaka	20.491.650.		12.745.800		7.745.850	62,19
	- Belj.minuman Peg.	5.625.000		2.072.500		3.552.500	36,84
	- Belj.rapat ktr	25.272.000		22.392.000		2.880.000	88,60
	- Rapat2 koordinasi keluar daerah	4.164.000		--		4.164.000	--
	- Penyed komponen listrik	105.664.000		85.282.000		20.382.000	80,71
	- Belanja Srt kabar	5.000.000		--		5.000.000	--
	- Hr.PanitiaPelak Kegt.	4.200.000		390.000		3.810.000	9,28
	- Pemas.listrik gdg lap	9.450.000		7.050.000		2.400.000	74,60
	- Pemel.gdg ktr	5.000.000		--		5.000.000	--
	- Pengd.pakaian dinas	4.394.500		3.023.020		1.371.480	69
	- Pemel meibel ktr	7.000.000	100	7.000.000		--	100
	- Diklat formal	1.518.800		--		1.518.800	--
	- Penys.Lap.capaian Kinerja	110.822.000		49.848.500		60.973.500	44,98
	- Penys.Lap.Keu	3.025.500		--		3.025.500	--
	- Uang lembur	556.300		--		556.300	--
	- Pemb.ATK	780.000		--		780.000	--
	- Koordinasi penilaian kota sehat / Adipura	2.245.500		--		2.245.500	--
	- Penilaian langit biru	26.510.000		11.624.000		14.886.000	44

	- Pemantauan kualitas lingkungan	10.000.000		3.100.000		6.900.000	31
	- Pengawasan Pelak.Kebijak L.H.	59.005.000		14.970.000		44.035.000	25,37
	- Koordinasi penertiban peti.	38.821.320		7.655.000		31.166.320	19,71
	- Pengel.B3 & Limb.B3	19.660.000		--		19.660.000	--
	- Peningk pengelolaan lingk pertambangan	36.755.000		15.465.000		1.290.000	42,08
	- Koordnasi prokasih	28.640.000		21.460.000		180.000	74.93
	- Penyus.kebijakan Pengdl penc dan perusahaan L.H.	19.516.000		--		19.516.000	--
	- Peningkatan Peran serta masya rakat dlm pengedl.L.H.	25.000.000		--		25.000.000	--
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	69.426.500		44.425.500		25.000.000	63,99
		5.525.000		2.500.000		3.025.000	45,24
2	Belanja Modal						
	Prog.Peningkatan sarana & prasarana.						
	- Perluasan aula ktr	111.874.775	100	96.375.000		15.499.775	100
	- Pengadaan kendr.Dinas	60.000.000	100	59.600.000		400.000	100
	- Pembl. Kursi rapat.	3.000.000	-	--		3.000.000	--
	- Pembl meja ktr	1.800.000	-	--		1.800.000	--
	- Pembl kursi kerja	600.000	-	--		600.000	--
	- Pengadaan alat2 Laboraturium	1.198.200.000	100	1.116.657.190,40		81.542.809,59	97,15
	- Pengadaan computer	30.000.000	100	19.750.000		10.250.000	100
	- Pengd.peralatan RT	1.824.575	100	912.285		912.290	49,99
	- Pembelian gorden	1.361.250		--		1.361.250	--

8.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan pada Tahun 2007 yang dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di mana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana kerja (Rena) SKPD.

Adapun proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bapedalda Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007 adalah berdasarkan :

- *. Renja SKPD.
- *. Forum SKPD.
- *. Musrenbang Kabupaten.

8.7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Bapedalda Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2007 sebagaimana pada tabel 3.8.7. berikut.

Tabel 3.8.7.
Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis / Nama Barang	Merk / Th Pembuatan	Jumlah		Harga Sat Rp.	Kondisi
			Vol	Sat		
I	Tanah dan Bangunan					
1.	Tanah Bangunan/Kantor	2002	4.400	M2	(Hibah)	Baik
2.	Bangunan Kantor Induk	2002	331,88	M2	199.840.000	Baik
3.	Bangunan Gedung Aula	2006	131,10	M2	214.300.000	Baik
4.	Bangunan Kantor	--	--	--	--	--
5.	Bangunan gdg Aula (tambahan)	2007	56	M2	89.325.000	Baik
6.	Bangunan Gdg Laboraturium	2007	200	M2	391.500.000	Baik
7.	Bangunan tempat parker	2003	100	M2	10.592.000	Baik
8.	Pagar keliling	2005	239	M1	123.409.861	Baik
II.	Perlengkapan Gedung Kantor					
1.	Terali Besi Kantor	--	--	--	--	--
2.	Sumur Pompa	--				
3.	Horden Kantor	2003	40	M	600.000	Baik
4.	Horden Aula	--	--	--	--	--
5.	Meja kursi Kepala	2005	1	Bh	1.250.000	Baik
6.	Meja kursi Kabid/Sek	-	4	Set	-	Baik
7.	Meja kursi Kasubid	2004	24	Set	-	Baik
8.	Meja Rapat	--	10	Buah	-	Baik
9.	Meja Komputer	-	6	Buah	2.000.000	Baik
10.	Meubelair Ruang pimp.	-	2	Set	-	Baik
11.	Meja kursi ruang tama	-	2	Set	-	Baik
12.	Kursi lipat.	-	58	Buah	11.150.000	Baik
13.	Kursi kayu	-	12	Buah	3.600.000	Baik
14.	Filling kabinet	-	9	Buah	9.475.000	Baik
15.	Lemari besi 2 pintu	-	3	Buah	4.500.000	Baik
16.	Lemari kayu (arsip)	-	1	Buah	2.750.000	Baik
17.	Podium	-	-	-	-	--
18.	Tiang bendera.	2005	1	Buah	1.850.000	Baik
19.	Kipas angin gantung.	2006	4	Buah	2.780.000	Baik
III	Peralatan gedung Ktr					
1.	AC ruang pimpinan	2005	1	Buah	3.450.00	Baik
2.	Ac di ruang lain	-	-	-	-	-
3.	Genset	-	-	-	-	-
4.	Kulkas	2006	1	Buah	1.995.000	Baik
5.	Mesin pemotong rumput	2001	1	Buah	1.500.000	Rusak
6.	Sund system	--	--	-	-	--
IV	Peraalatan dan Perlengkapan Kantor					
1.	Komputer/PC	2006/2007	3	Buah	25.270.000	Baik
2.	Nota Book	2006/2007	3	Buah	34.730	-
3.	Printer		3	Buah	-	2.baik, 1.rsk
4.	LCD Proyektor	--	--	--	--	--
5.	Wirless	2002	1	Buah	5.000.000	Baik

6	Telepon	2000 & 2007	2	Buah	500.000	1.baik, 1 rusak
7	Kamera	2007	1	Buah	Bantuan PPLH Regional	Baik
V. 1	Kendsaraan Dinas/Operasional Kedaraan roda empat	L200 minibus	1	Buah	372.500.000	Baik
2	Kendaraan roda dua	Honda Win 1990	2	.buah	-	Baik
3	Kendaraan roda dua	Yamaha 2007	4.	buah	59.600.000	Baik
VI 1.	Instalasi listrik bgn Ktr Daya listrik digunakan	--	2.200	-	--	--
VII 1.	Rumah Jabatan/Dinas Luas bangunan	--	--	--	--	--

8.8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Bapedalda Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan Tupoksi dan kebijakan pada Tahun 2007 adalah :

~Sumber daya Aparatur, Jabatan yang kosong dan kekurangan staf.

Solusinya :

- Perlu meningkatkan SDA, melalui Diklat baik teknis maupun non teknis
- Perlu penambahan staf, untuk kasubid dan Kabag yang tidak memiliki staf dalam membantu tugas dinas sehari-hari.
- Perlu mengisi kekosongan Jabatan Eselon III.a. 1(satu) orang dan eselon IV.a. 1(satu) orang

8.9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan :

Kabupaten Kotawaringin Barat menerima Piagam dan Penghargaan Adipura klasifikasi kota kecil Tingkat Nasional pada tanggal 6 Juni 2007, berkat kerja keras semua pihak, masyarakat Kotawaringin Barat dalam memperoleh penghargaan Adipura tersebut.

9. Penanaman Modal

Berpijak pada undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 pasal 11 ayat (2) bahwa Kewenangan bidang Penanaman Modal merupakan salah satu kewenangan wajib dengan bentuk pelayanan yang dapat mendorong dan memfasilitasikan agar para penanam modal baik yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN maupun non fasilitas dapat lebih dikembangkan.

Menyadari bahwa kewenangan bidang penanaman modal sebagai salah satu kewenangan wajib, maka penanganan dibidang Penanaman Modal adalah merupakan salah satu tugas yang operasionalnya lebih dominan dibandingkan dengan administrasi, sehingga untuk kewenangan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah membentuk perangkat daerah yang menangani penanaman Modal yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaga Daerah Tahun 2000 Nomor 23 seri D) dan Uraian Tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Urusan Wajib sesuai dengan tupoksi sebagai berikut :

9.1. Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan 7 (Tujuh) program dan 28 (Dua Puluh Delapan) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel : 3.9.1. sebagai berikut :

Tabel 3.9.1.
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	04.Program 04.90. Ekonomi Lainnya (Penanaman Modal daerah)	1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran.	16. Penyediaan Surat Menyurat
2.	Pengembangan PMA/PMDN			17. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.	Pengawasan PMA/ PMDN			18. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
				19. Penyediaan jasa administrasi keuangan
				20. Penyediaan jasa kebersihan Kantor
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
				21. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
				22. Penyediaan alat tulis kantor
				23. Penyediaan barang cetakan & pengganda-an
				24. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
				25. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
				26. Penyediaan peralatan rumah tangga
				27. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
				28. Penyediaan makanan dan minuman
				29. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1	2	3	4	5
			2. Program Peningkatan sarana dan prasarana kantor.	15. Pengadaan kendaraan Operasional 16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 18. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 19. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
			3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
			4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	21. Pemulangan Pegawai yang pensiun
			5. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	22. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
			6. Program Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	23. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 24. Penyusunan laporan keuangan semester-an. 25. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
			7. Program peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi	26. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMA/PMDN 27. Koordinasi Perencanaan dan pengembangan penanaman modal. 28. Penyelenggaraan pameran investasi

9.2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam Tahun 2007 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan Kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan peralatan rumah tangga 12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13. Penyediaan makanan dan minuman 14. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1. Tertib Administrasi Surat menyurat	96,58
		2. Terpenuhinya jasa Komunikasi dan Penerangan	34,73
		3. Terpenuhinya kelengkapan Surat ijin mobil dan kendaraan roda 2	100
		4. Tersedianya Honorarium PHL	88,04
		5. Tersedianya petugas dan peralatan bahan kebersihan kantor	87,68
		6. Terpenuhinya bahan bakar mesin potong rumput	82,31
		7. Terpenuhinya alat tulis kantor	100
		8. Terpenuhinya kebutuhan cetak, fotocopy dan penjilidan	72,6
		9. Terpenuhinya peralatan dan kelengkapan kantor	100
		10. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	98,97
		11. Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor	100
		12. Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100
		13. Tersedianya Snack dan minuman Pegawai	73,28
		14. Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi	90,73
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana kantor 1. Pengadaan kendaraan Operasional 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 5. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	15. Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas	97,33
		16. Terpeliharanya pagar halaman kantor	100
		17. Terpenuhinya bahan bakar dan perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	75,44
		18. Terawatnya meubelair	100
		19. Terabilitasnya gedung Kantor	89,25
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	20. Terpenuhinya Pakaian Dinas Harian Pegawai	88,25

1	2	3	4
4	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 1. Pemulangan Pegawai yang pensiun	21.Tersedianya biaya pemulangan pensiun PNS 2 orang	54,51
5	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	22.Tersedianya Pegawai yang mempunyai pengetahuan	69,61
6	Program Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran. 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	23.Tersudunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 24.Tercapainya penyusunan laporan keuangan semester 25.Terealisasinya laporan akhir tahun	100 100 100
7	Program peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi 1. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMA/PMDN 2. Koordinasi Perencanaan & pengembangan penanaman modal. 3. Penyelenggaraan pameran investasi	26.Tumbuh dan berkembangnya PMDN/PMA di Kabupaten Kotawaringin Barat 27.Terkoordinasinya kegiatan perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal. 28.Diketahuinya potensi dan peluang investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	59,77 88,45 89,22

9.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan urusan Wajib.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 30 November 2002 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah adalah:

a. Susunan Organisasi BKPM

Struktur Organisasi BKPM Kab. Kotawaringin Barat terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi :
 - ♦ Subbag Kepegawaian
 - ♦ Subbag Keuangan
 - ♦ Subbag Umum
 - ♦ Subbag Program dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Perencanaan, membawahi
 - ♦ Subbid Perencanaan
 - ♦ Subbid Sarana dan Prasarana
 - ♦ Subbid Pengkajian
4. Kepala Bidang Promosi, membawahi :
 - ♦ Subbid Promosi
 - ♦ Subbid Data dan Informasi Pasar
 - ♦ Subbid Negosiasi dan hubungan usaha
5. Kepala Bidang Fasilitas dan perijinan, membawahi :
 - ♦ Subbid Perizinan
 - ♦ Subbid Daya tarik
6. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan, membawahi :
 - ♦ Subbid Pembinaan Usaha
 - ♦ Subbid Hubungan Pembinaan Masyarakat
 - ♦ Subbid Evaluasi dan Pengawasan

b. Tugas Pokok dan Fungsi BKPM

Berdasarkan peraturan daerah nomor 25 tahun 2000, **Tugas Pokok** Badan Koordinasi penanaman Modal Daerah (BKPM) Kabupaten Kotawaringin Barat adalah membantu Kepala Daerah dalam membuat dan mengembangkan kebijakan daerah di bidang penanaman modal guna memacu dan memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan daerah.

Sedangkan **Fungsi** Badan Koordinasi penanaman Modal Daerah (BKPM) Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Melakukan Pengkajian dan Menyusun rencana Penanaman modal di daerah yang dalam garis besarnya berisi tujuan, sasaran, prioritas dan strategi pelaksanaannya.
2. Melakukan Dukungan promosi, negosiasi dan Informasi peluang Investasi.
3. Melakukan Dukungan Fasilitas dan pelayanan perijinan Penanaman Modal.
4. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan kegiatan penanaman Modal di daerah.
5. Melakukan tugas kesekretarisan penanaman modal di daerah.

c. Visi dan Misi BKPM

1. VISI

Sebagai penjabaran Visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2005 dan 2010 yaitu “ Kotawaringin barat sebagai daerah pengembangan pembangunan dengan masyarakatnya yang maju, aman, tertib, damai, sejahtera dan Demokratis “ , maka Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan Visi “ **Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai daerah Tujuan Investasi Tahun 2010** “

2. M I S I

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka misi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “

1. Merencanakan dan Mengembangkan Investasi secara terpadu
2. Menciptakan Iklim investasi yang kondusif
3. Penyebaran/pemantapan dan pelayanan informasi investasi
4. Mengendalikan kegiatan investasi
5. mengembangkan Organisasi dan sumber daya manusia.

d. Kebijakan/Strategi dari BKPMMD

Untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan Kebijakan dan Strategi Sebagai berikut :

1. Memberikan peluang investasi seluas-luasnya dng tetap memperhatikan azas manfaat dan kelestarian lingkungan.
2. Pemberian Pelayanan fasilitas Investasi dengan prosedur yang jelas , cepat dan murah.
3. Penyusunan dan pengembangan potensi dan peluang investasi.
4. Pemberian informasi potensi dan peluang investasi
5. Memberikan perlindungan kepada penanam modal, baik PMA maupun PMDN.
6. Peningkatan Organisasi dan kualitas Sumber daya manusia

9.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Jumlah Pegawai BKPMMD Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 3.9.4.1 sebagai berikut :

Tabel 3.9.4.1
Pegawai Menurut Pendidikan

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	S2		-	-	-	-
2	S1		8	1	-	9
3	Sarjana Muda		3	-	1	2
4	SLTA		8	-	-	8
5	SLTP		0	1	-	1
6	SD		1	-	-	1
	Jumlah		20	2	1	21

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai BKPMK Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada tabel 3.9.4.2 sebagai berikut :

Tabel 3.9.4.2.
Pegawai Menurut Pendidikan

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	Golongan I/a	-	-	-	-	-
	Golongan I/b	-	-	-	-	-
	Golongan I/c	-	-	1	-	1
	Golongan I/d	-	-	-	-	-
	Jumlah Gol. I	-	-	1	-	1
2	Pengatur Muda (II/a)	-	1	-	-	1
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	2	-	-	2
	Pengatur II/c	-	-	-	-	-
	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	-	-	-
	Jumlah Gol. II	-	3	-	-	3
3	Penata Muda (III/a)	-	1	-	-	1
	Penata Muda Tk. I (III/b)	-	2	-	-	2
	Penata (III/c)	-	6	-	1	5
	Penata Tingkat I (III/d)	-	3	1	1	3
	Jumlah Gol. III	-	12	1	2	11
4	Pembina (IV/a)	-	2	-	1	1
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	2	2	-	4
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	1	-	-	1
	Jumlah Gol. IV	-	5	2	1	6

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pejabat Struktural BKPMD menurut Jabatan Struktural dan Fungsional terdapat pada tabel 3.9.4.3 sebagai berikut :

Tabel 3.9.4.3.
Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	Menurut Jabatan Struktural					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II b	-	1	-	-	1
	Eselon III a	-	4	1	-	5
	Eselon IV a	-	8	1	-	9
	Fungsional	-	-	-	-	-
	Staf	-	5	1	-	6
	Jumlah		18	3	-	21
2	Menurut Jabatan Fungsional					
	Eselon I					
	Eselon II b					
	Eselon III a					
	Eselon IV a					
	Fungsional					
	Staf					
	Jumlah					

d. Jumlah Pegawai Tidak Tetap

No	Uraian	Jumlah
1	PHL Petugas Jaga Malam	1
	Jumlah	1

9.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

a. Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 BKPMMD Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh alokasi anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukkan bagi Gaji Pegawai sebesar Rp 749.488.950,- dan sampai akhir bulan Desember 2007 telah direalisasikan (dibelanjakan) sebesar Rp 690.073.833,- dengan sisa (saldo) sebesar Rp 59.415.117,-

b. Belanja Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan BKPMMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 94,48.% dengan rincian pada tabel 3.9.5. sebagai berikut :

Tabel 3.9.5
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Selisih Anggaran (Rp.)	Capaian Indikator Kinerja (%)
			Fisik (%)	Keuangan (Rp.)		
1.	Belanja Pegawai	108.615.100	87,98	95.555.500	13.059.600	87,98
2.	Belanja Barang dan Jasa	632.398.900	100	503.261.823	129.137.077	100
3.	Belanja Modal	294.981.000	100	256.668.000	38.313.000	100
	J U M L A H	1.035.995.000		855.485.323	180.509.077	

9.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Adapun proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BKPMD pada tahun 2007 adalah berdasarkan

-) RENSTRA
-) RPJM
-) Forum RKPD
-) Musrenbang Kabupaten.

9.7. Kondisi sarana dan Prasarana Yang digunakan ;

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2007 sebagaimana pada tabel 3.9.7. berikut :

Tabel 3.9.7
Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis>Nama Barang	Merk/Tahun Pembuatan	Jumlah		Harga Sat (Rp.)	Kondisi
			Vol.	Sat		
1	2	3	4	5	6	7
I	<u>Tanah dan Bangunan</u>					
1.	Tanah bangunan/Kantor		5000	M2		Baik
2.	Bangunan Kantor Induk		3000	M2		Baik
II	<u>Perlengkapan Gedung Kantor</u>					
1	Teralis besi Kantor	2002	33	M	3.300.000	Baik
2	Sumur Pompa/Gali		1	Buah	-	Baik
3	Horden Aula	2007	7	M	1.750.000	Baik
4	Horden Ruang Kerja Kantor	2007	34	M	3.400.000	Baik

1	2	3	4	5	6	7
6	Meja dan Kursi Kepala	-	1	Buah	-	Baik
7	Meja/Kursi Kabid/Sekretaris	-	5	Buah	-	Baik
8	Meja/Kursi Kasi dan Staf	-	23	Buah	-	Baik
9	Meja rapat	2005	5	Buah	6.000.000	Baik
10	Meubelair Ruang Pimpinan	2004/2005	2	Set	4.000.000	Baik
11	Meja,Kursi Ruang Tamu	-	1	Set	-	Baik
12	Kursi Lipat Chitos	2001	14	Buah	1.125.000	Baik
13	Kursi Lipat Untuk Rapat	2005	28	Buah	4.550.000	Baik
14	Filling Kabinet	2002	5	Buah	7.500.000	Baik
15	Lemari Besi 2 Pintu	2001	2	Buah	-	Baik
16	Rak Arsip	2002	1	Buah	1.000.000	Baik
17	Tiang Bendera	-	1	Buah	-	Baik
18	Kipas Angin	2003	2	Buah	700.000	Baik
III	<u>Peralatan Gedung Kantor</u>					
1.	AC diruang Pimpinan	2005	1	Buah	5.000.000	Baik
2	AC Ruang Komputer	2003	1	Buah	-	Baik
3	Kulkas	2005	1	Buah	2.000.000	Baik
4	Mesin Pemotong Rumput	2005	1	Buah	4.000.000	Baik
5.	Sound Sistem	2005	1	Set	15.000.000	Baik
IV	<u>Peralatan dan Perlengkapan Kantor</u>					
1.	Komputer/PC	2001/2007	8	Buah	-	Baik
2.	Note Book	2005	1	Buah	15.000.000.	Baik
3.	Printer	2001/2007	8	Buah	-	Baik
4.	LCD Proyektor	2006	1	Unit	30.000.000	Baik
5.	Wireless	2002	1	Buah	2.000.000	Baik
6.	Jaringan Telpon	-	1	Buah	-	Baik
7.	Faxsimile/Telpon	2001/2007	2	Buah		1 Baik
						1 Rusak
8.	Kamera Digital	2002/2007	2	Buah	5.000.000.	1 Baik
						1 Rusak

9.8. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Data Investasi PMDN/PMA yang melaksanakan kegiatannya di Kabupaten Kotawaringin Barat ;

No.	Nama Perusahaan	Lokasi Usaha		Kegiatan Usaha
		Kecamatan	Desa / Kelurahan	
1.	PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA. (PMDN).	1. Arut Selatan 2. Ktw. Lama	Sulung, Rangda Kondang, Rungun	Perkebunan Sawit
2.	PT. G.S. IBU PERTIWI (PMDN)	Pangkalan Lada	Pandu Sanjaya	Perkebunan Sawit
3.	PT. AGRO MENARA RAHMAT (PMDN)	Pangkalan Lada	Pandu Sanjaya	Perkebunan Sawit
4.	PT. META EPSI AGRO (PMDN)	1. Pangkalan Lada 2. Arut Selatan	Pangkalan Tiga Pangkalan Dewa Pandu Sanjaya Kadepe Atas Makarti Jaya Bumi Harjo Medang Sari.	Perkebunan Sawit.
5.	PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI. (PMDN)	Arut Utara	Kel. Pangkut	Perkebunan Sawit.
6.	PT. G.S. DUA INDAH (PMDN)	P. Banteng.	Sidomulyo	Perkebunan Sawit.
7.	PT. G.S. YOLI MAKMUR (PMDN)	Arut Utara	Kel. Pangkut	Perkebunan Sawit.
8.	PT. PERSADA BINA NUSANTARA ABADI. (PMDN)	Arut Utara	Kel. Pangkut	Perkebunan Sawit.
9.	PT. SURYA INDAH NUSANTARA PAGI. (PMDN)	Arut Utara	Kel. Pangkut	Perkebunan Sawit
10.	PT. G.S. PUTI PESONA. (PMDN)	P. Banteng	Arga Mulya	Perkebunan Sawit.
11.	PT. WANA SAWIT SUBUR LESTARI. (PMDN) - Lintas Kabupaten	P. Banteng	Karang Mulya	Perkebunan Sawit.
12.	PT. INDO TRUBA TENGAH (PMDN) - Lintas Kabupaten.	P. Banteng	Amin Jaya	Perkebunan Sawit.
13.	PT. SUNGAI RANGIT (PMDN) - Lintas Kabupaten	1. Sukamara 2. Kec. Kolam	Kinjil, Tempayung dan Sakabulin.	Perkebunan Sawit.

No.	Nama Perusahaan	Lokasi Usaha		Kegiatan Usaha
		Kecamatan	Desa / Kelurahan	
14.	PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR. (PMA) - Lintas Kabupaten	1. Balai Riam 2. Ktw. Lama	- Riam Durian	Perkebunan Sawit.
15.	PT. SABUT MAS ABADI (PMDN)	Arut Selatan	Medang Sari	Industri pengolahan kelapa sawit.
16.	PT. BINTANG ARUT (PMDN)	Arut Selatan	Kumpai Batu	Industri moulding.
17.	PT. BUMI PERDANA PRIMA INTERNATIONAL. (PMDN)	Kumai	Sei Bedaun.	Industri pengolahan CPO menjadi inti.
18.	PT. KORINDO ARIA BIMA SARI. (PMA)	Arut Selatan	Kel. Mendawai	Sowmil, Industri Formal Dehyde, Fly Wood dan Film Faced Fly Wood & Bleck Board.
19.	PT. WEELUK INDONESIA (PMA)	Kumai	Pangkalan Lima	Industri moulding, furniture.
20.	PT. SINAR ALAM PERMAI (PMA)	Kumai	Bumi Harjo	Industri pengolahan CPO (minyak kasar).
21.	PT. UJUNG TIMUR (PMDN)	Arut Selatan	Kumai Hilir	Perikanan Udang.
22.	PT. KORINTIGAHUTANI (PMA)	Pangkalan Lada	-	Perkayuan.
23.	PT. SURYA SAWIT SEJATI (PMA)	Arut Selatan	Ds. Sai Rangit Jaya, Ds Mandala Jaya, Runtu, Umpang dan Sulung Kenambui	Perkebunan Sawit.

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang kelembagaan, Struktur Organisasi, tugas pokok dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23 seri D), melaksanakan Urusan wajib sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

10.1. Program dan Kegiatan.

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas/Badan yang telah disepakati dan berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah , dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dinas Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 melaksanakan 6 (enam) Program dan 46 (Empat Puluh Enam) kegiatan dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel 3.10.1 sebagai berikut :

Tabel 3.10.1
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub. Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan kualitas kelembagaan dan akses informasi.	Administrasi atas hubungan dan pelayanan, koperasi dan UKM, penyusunan dan penerapan kebijakan.	Program Pelayanan administrasi perkantoran	- Penyediaan jasa surat menyurat.
2.	Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	~ Peraturan tentang koperasi dan UKM. ~ Operasi dan dukungan atas lembaga yang berhubungan dengan paten, hak cipta dll.		- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3.	Penciptaan Iklim UKM yang kondusif	~ Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mengembangkan kebijakan dan program koperasi dan UKM		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.
4.	Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM			- Penyediaan Jasa administrasi keuangan . - Penyediaan jasa kebersihan kantor. - Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja. - Penyediaan Alat tulis kantor. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

5.	Pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM.			<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. - Penyediaan peralatan rumah tangga. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. - Penyediaan makanan dan minuman. - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
6.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		<p>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur</p> <p>Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur</p> <p>Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan</p> <p>Program penciptaan iklim UKM yang kondusif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan gedung kantor - Pengadaan kendaraan dinas / operasional. - Pengadaan perlengkapan gedung kantor. - Pengadaan Meubeleir. - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. - Penyusunan laporan keuangan semesteran. - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. - Penyusunan kebijakan tentang UKM. - Sosialisasi kebijakan tentang UKM. - Perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

			<p>Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi. - Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
			<p>Program Pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan. - Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM - Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM. - Peningkatan Jaringan kerjasama antar lembaga. - Monitoring , evaluasi dan pelaporan.
			<p>Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi. - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian. - Sosialisasi prinsip- prinsip pemahaman perkoperasian. - Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi. - Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi. - Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi. - Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

10.2.Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam Tahun 2007 tingkat pencapaian Program dan kegiatan terlihat pada tabel 3.10.2 dibawah ini.

Tabel 3.10.2
Tingkat Capaian Program dan Kinerja

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1.	Program Pelayanan administrasi perkantoran		
	- Penyediaan jasa surat menyurat.	- Terlaksananya jasa surat menyurat.	80
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	- Terpenuhinya keb. Telp. Air dan listrik.	100
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.	- Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	90
	- Penyediaan Jasa administrasi keuangan .	- Terlaksananya Jasa administrasi keuangan .	100
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor.	- Terlaksananya jasa kebersihan kantor.	50
	- Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja.	- Terlaksananya jasa perbaikan dan peralatan kerja.	60
	- Penyediaan Alat tulis kantor.	- Tercapainya Alat tulis kantor.	100
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	- Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan.	100
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.	- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	33
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	- Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	60
	- Penyediaan peralatan rumah tangga.	- Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga.	60
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	- Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	30
	- Penyediaan makanan dan minuman.	- Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman.	33
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	- Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	100	
2.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.		
	- Pembangunan gedung kantor	- Terlaksananya Pembangunan gdg kantor	80
	- Pengadaan kendaraan dinas/ operasional.	- Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas/ operasional.	25
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	- Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	75
	- Pengadaaan Meubeleir.	- Terlaksananya Pengadaaan Meubeleir.	60
	- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.	- Terpelihara rutin/berkala mobil jabatan.	100
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	- Terpelihara rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional.	100
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	- Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	90	

3.	Program peningkatan disiplin aparatur - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	- Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	33
4.	Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	- Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	33
5.	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. - Penyusunan laporan keuangan semesteran. - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	33
		- Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran.	33
		- Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan	33
6.	Program penciptaan iklim UKM yang kondusif. - Penyusunan kebijakan tentang UKM. - Sosialisasi kebijakan tentang UKM. - Perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	- Terlaksananya penyusunan kebijakan tentang UKM.	20
		- Terlaksananya Sosialisasi kebijakan tentang UKM.	100
		- Terlaksananya Perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM.	40
		- Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100
7.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM - Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi. - Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	- Terlaksananya pengembangan sarana promosi hasil produksi.	100
		- Terlaksananya Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.	100
		- Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100
8.	Program Pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM. - Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan. - Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM - Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM. - Peningkatan Jaringan kerjasama antar lembaga. - Monitoring , evaluasi dan pelaporan.	- Terlaksananya Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan.	35
		- Terlaksananya Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	30
		- Terlaksananya Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM.	30
		- Terlaksananya Peningkatan Jaringan kerjasama antar lembaga.	100
		- Terlaksananya Monitoring , evaluasi dan pelaporan.	100

9.	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi		
	- Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi.	- Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi.	28
	- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian.	- Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian.	100
	- Sosialisasi prinsip- prinsip pemahaman perkoperasian.	- Terlaksananya Sosialisasi prinsip- prinsip pemahaman perkoperasian.	55
	- Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.	- Terlaksananya Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.	38
	- Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi.	- Terlaksananya Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi.	70
	- Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi.	- Terlaksananya Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi.	49
	- Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi.	- Terlaksananya Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi.	31
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	- Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	100	

10.3.Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu Daerah otonom dalam kerangka wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku.

Berdasarkan Perda No. 25 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Pembinaan, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat, terakhir disempurnakan dengan Perda No. 29 tahun 2000 dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja.

Dinas Koperasi dan PPKM Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

a. Susunan Organisasi :

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - * Sub Bagian Umum,
 - * Sub Bagian Keuangan,
 - * Sub Bagian Kepegawaian,
 - * Sub Bagian Program dan Pelaporan.
3. Kepala Sub Dinas Bina Koperasi, membawahi :
 - * Kepala Seksi Pertanian,
 - * Kepala Seksi Perkebunan dan Kehutanan,
 - * Kepala Seksi Peternakan dan Perikanan,
 - * Kepala Seksi Aneka Jasa.
4. Kepala Sub Dinas Pembinaan PKM, membawahi :
 - * Kepala Seksi Perdagangan,
 - * Kepala Seksi Industri Pertanian,
 - * Kepala Seksi Listrik dan Pertambangan,
 - * Kepala Seksi Aneka Usaha.

5. Kepala Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahi :
 - * Kepala Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan Koperasi,
 - * Kepala Seksi Permodalan dan Jasa keuangan Pengusaha Kecil,
 - * Kepala Seksi Penilaian Simpan Pinjam,
 - * Kepala Seksi Pengawasan Simpan Pinjam.

6. Kepala Sub Dinas Kelembagaan dan Penyuluhan, membawahi :
 - * Kepala Seksi Penyuluhan,
 - * Kepala Seksi Organisasi dan Tata Laksana,
 - * Kepala Seksi Pelatihan,
 - * kepala Seksi Hukum dan Perijinan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin barat.

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Daerah menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah.

Fungsi Dinas Koperasi dan PPKM

Merumuskan suatu kebijakan teknis dan program Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya, permodalan, daya saing dan sarana/fasilitas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Instansi yang berwenang berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan.

c. **Visi dan Misi Dinas Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat :**

- VISI :

Sebagai Penjabaran dari Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 – 2010 Yaitu *“KOTAWARINGIN BARAT SEBAGAI DAERAH PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DENGAN MASYARAKATNYA YANG MAJU, AMAN, TERTIB, DAMAI, SEJAHTERA DAN DEMOKRATIS”*, maka Dinas Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan visinya sebagai berikut: ***“PEMBERDAYAAN KOPERASI, PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH MELALUI PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”***.

- MISI

Sebagai perwujudan dari visi yang telah ditetapkan, tentu dibutuhkan suatu misi yang jelas yang mampu dilaksanakan oleh segenap elemen yang berhubungan langsung dengan visi tersebut. Misi yang diemban oleh Dinas Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menunjang pelaksanaan visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran Dinas Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pemberdayaan Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah.
2. Mewujudkan kemandirian dan memantapkan Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan akses kepada sumber daya produktif.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas melalui pengembangan kewirausahaan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pemberdayaan Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah.

d. Arah Kebijakan

Kebijakan yang menjadi skala prioritas dalam pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang dapat menjamin dan disparitas pendapatan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah.

Sebagai Panduan untuk melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat menyusun suatu rumusan kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan periode 2006–2010 Rumusan kebijakan tersebut mencakup :

1. Membina Usaha Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah melalui pendekatan integral komprehensif (permodalan, teknologi, manajemen dan pemasaran).
2. Memberi fasilitasi dan bimbingan teknis bagi para pelaku usaha Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah untuk dapat tumbuh dan berkembang serta mampu bersaing di era pasar bebas.
3. Mengarahkan tugas pelayanan melalui kelembagaan dan instansi pemerintah yang mengarah kepada prinsip – prinsip efisiensi dan efektifitas serta bebas KKN.
4. Membentuk jaringan usaha Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah dengan pengusaha besar secara adil dan transparan sehingga terbentuk pola kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan.

10.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

a. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut pendidikan, terdapat pada tabel 3.10.4.1 sebagai berikut :

Tabel 3.10.4.1
Pegawai Menurut Pendidikan

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	S1	19	11	-	8	19
2.	Sarjana Muda	15	3	-	12	15
3.	SLTA	10	8	-	2	10
4.	SLTP	2	1	-	1	2
5.	SD					
Jumlah		46	23	-	23	23

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pangkat dan Golongan , terdapat pada tabel 3.10.4.2 sebagai berikut :

Tabel 3.10.4.2
Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Golongan I/c			-	-	1
Jumlah Golongan I		-	-	-	-	1
2.	Golongan II/a	-	-	-	-	-
	Golongan II/b	-	-	-	-	-
	Golongan II/c	1	-	-	-	1
	Golongan II/d	-	-	-	-	-
Jumlah Golongan II		1	-	-	-	1
3.	Golongan III/a	-	-	-	-	2
	Golongan III/b	-	-	-	-	2
	Golongan III/c	-	-	-	-	2
	Golongan III/d	-	-	-	-	9
Jumlah Golongan III		-	-	-	-	15
3.	Golongan IV/a	-	-	-	-	4
	Golongan IV/b	-	-	-	-	1
	Golongan IV/c	-	-	-	-	1
	Golongan IV/d	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	6

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Jabatan Struktural dan Fungsional , terdapat pada tabel 3.10.4.3 sebagai berikut :

Tabel 3.10.4.3
Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
I	Menurut Jabatan Struktural	-	-	-	-	-
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II b	-	-	-	-	1
	Eselon III a	-	-	-	-	5
	Eselon IV a	-	-	-	-	12
	Jumlah Jabatan Struktural	-	-	-	-	18
II	Menurut Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II b	-	-	-	-	-
	Eselon III a	-	-	-	-	-
	Eselon IV a	-	-	-	-	-
	Jumlah Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-

d. Jumlah Pegawai Tidak tetap :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Petugas jaga Malam	1 Orang
2.	Sopir	1 Orang
	Jumlah	2 Orang

10.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

a. Belanja Tidak langsung

Berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 Dinas Koperasi dan PPKM memperoleh alokasi anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukan bagi gaji pegawai sebesar Rp. 867.279.661,50 dan sampai akhir bulan Desember 2007 telah direalisasi (dibelanjakan) sebesar Rp. 798.297.475,- dengan sisa (saldo) sebesar Rp. 68.982.186,50.

b. Belanja langsung.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat target (Tingkat Kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 74,93 % dengan rincian pada tabel 3.10.5. sebagai berikut

:

Tabel 3.10.5.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih Anggaran (Rp)	Capaian Indikator Kinerja (%)	
			Fisik (%)	Keuangan (Rp) (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BELANJA PEGAWAI	179.742.300	72,82	130.899.460	72,82	48.842.840	72,82
	Honorarium PNS	95.050.000	91,50	87.002.160	91,50	8.047.840	91,50
	Honorarium Non PNS	62.358.400	51,30	31.991.800	51,30	30.366.600	51,30
	Uang Lembur	3.233.900	96,02	3.105.500	96,02	128.400	96,02
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BinteK PNS	19.100.000	46,07	8.800.000	46,07	10.300.000	46,07
2	BELANJA BARANG DAN JASA	732.961.575	69,05	506.178.600	69,05	226.782.975	69,05
	Belanja Bahan Pakai Habis	55.030.000	87,61	48.212.000	87,61	6.818.000	87,61
	Belanja Jasa Kantor	29.876.575	76,22	22.773.600	76,22	7.102.975	76,22
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.020.000	83,17	15.820.000	83,17	3.200.000	83,17
	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.275.000	82,20	61.059.000	82,20	13.216.000	82,20
	Belanja Sewa rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31.500.000	64,55	20.334.000	64,55	11.166.000	64,55
	Belanja Sarana Mobilitas	110.110.000	80,24	88.353.000	80,24	21.757.000	80,24

1	2	3	4	5	6	7	8
	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.800.000	60,16	7.100.000	60,16	4.700.000	60,16
	Belanja Makanan dan Minuman	60.114.000	85,81	51.584.000	85,81	8.530.000	85,81
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.000.000	100	6.000.000	100	-	100
	Belanja Perjalanan Dinas	329.636.000	54,40	179.343.000	54,40	150.293.000	54,40
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	800.000	100	800.000	100	-	100
	Belanja Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	1.300.000	100	1.300.000	100	-	100
	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.500.000	100	2.500.000	100	-	100
	Belanja Pemeliharaan alat alat Komunikasi	1.000.000	100	1.000.000	100	-	100
3	BELANJA MODAL	675.296.125	100	551.847.000	81,71	123.449.125	81,71
	Belanja modal alat angkutan darat bermotor	30.000.000	100	29.800.000	99,30	200.000	99,30
	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	6.287.570	100	5.660.000	90,01	627.570	90,01
	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	14.164.500	100	13.735.000	96,96	429.500	96,96
	Belanja modal pengadaan Komputer	71.477.430	100	70.999.000	99,33	478.430	99,33
	Belanja modal pengadaan mebeulair	19.765.425	100	19.300.000	97,64	465.425	97,64
	Belanja modal pengadaan peralatan dapur	3.593.200	100	3.950.000	99,91	3.200	99,91
	Belanja modal pengadaan kontruksi jaringan air	47.100.000	100	46.178.000	98,04	922.000	98,04
	Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian bangunan	479.108.000	100	658.785.000	74,88	120.323.000	74,88
	Belanja modal pengadaan buku/perpustakaan	1.200.000	100	1.200.000	100	-	100
	Belanja modal pengadaan barang bercorak kebudayaan	2.600.000	100	2.600.000	100	-	100
	J U M L A H	1.588.000.000		1.188.925.060		399.074.940	74,93

10.6. Proses Perencanaan Pembangunan.

Proses perencanaan pembangunan pada tahun 2007 yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) , Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Adapun proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007 adalah berdasarkan :

- Renca DKPD
- Forum SKPD
- Musrenbang Kabupaten.

10.6.Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2007 sebagaimana tabel 3.10.6. berikut :

Tabel 3.10.6.
Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis>Nama Barang	Merk/Tahun Pembuatan	Jumlah		Harga Sat (Rp)	Kondisi
			Vol	Sat		
1	2	3	4	5	6	7
I	Tanah & Bangunan					
1	Tanah Bangunan / Kantor	1981	2.200	M2	440.000.000	Baik
2	Bangunan Gedung Kantor	2006	315,3	M2	416.386.394,26	Baik
3	Bangunan Gedung Aula	2006	76	M2	139.240.537,74	Baik
4	Bangunan Rumah Dinas	2006	76,5	M2	53.832.068	Baik
5	Bang.Tempat Parkir Garasi Roda Dua	2007	1	Unit	14.487.881,25	Baik
6	Bang.Tempat Parkir Garasi Roda Empat	2007	1	Unit	14.665.656,77	Baik
7	Pagar depan/siring pagar & penimbunan	2006	1	unit	135.597.750,58	Baik
II	Perlengkapan Gedung					
1	Teralis Besi Gedung Kantor,Aula dan Rumah Dinas	2006	100	M2	14.000.000	Baik
2	Tower dan Perlengkapannya	2006	1	Unit	6.450.000	Baik
3	Horden Kantor, Aula,R.Dinas	2006	172	M2	12.728.000	Baik
4	Rel Horden	2006	100	M	1.300.000	Baik
5	Jaringan Air Bersih / Minum	2006	1	Unit	5.450.000	Baik
6	Tangga Almunium	2007	1	Buah	850.000	Baik
7	Meja Kepala Dinas	2007	1	Buah	2.950.000	Baik
8	Kursi Kepala Dinas	2006	1	Buah	1.375.000	Baik
9	Meja Kasubdin	2007	4	Buah	11.800.000	Baik
10	Kursi Kasubdin	2006	4	Buah	5.000.000	Baik
11	Meja Rapat	2006	10	Buah	10.000.000	Baik
12	Meja Rapat	2007	10	Buah	5.850.000	Baik
13	Meja Kerja	2006	33	Buah	6.435.000	Baik
14	Meja Kerja	2007	20	Buah	5.000.000	Baik
15	Meja Komputer	2006	28	Buah	3.505.000	Baik
16	Meja Telepon	2001,2003	9	Buah	2.700.000	Baik

1	2	3	4	5	6	7
17	Kursi Lipat/Rapat	1997,2003	4	Buah	6.950.000	Baik 2, Rusak 2
18	Kursi Lipat/Rapat	2004/2005	5	Buah	7.250.000	Baik
19	Kursi Lipat	2007	5	Buah	5.885.000	Baik
20	Kursi Putar	2007	5	Buah	5.000.000	Baik
21	Kursi Tamu	2004	2	Buah	1.380.000	Baik
22	Almari Kabinet Dua Pintu	2007	10	Buah	5.750.000	Baik
23	Felling Kabinet	2004	5	Buah	2.400.000	Baik
24	Felling Kabinet	2007	1	Buah	5.605.378,26	Baik
25	Lemari Arsip	2007	6	Buah	1.030.000	Baik
26	Lemari Arsip	1996,1999	2	Buah	250.000	Baik
27	Rak Buku	2003	2	Buah	1.450.000	Baik
III	Peralatan Gedung Kantor					
1	Ac di Ruang Pimpinan	2006	1	Buah	4.000.000	Baik
2	Ac di ruang Subdin	2007	4	Buah	19.400.000	Baik
3	Ac Di ruang Aula	2006	1	Buah	4.000.000	Baik
4	Dispenser	2005,2007	2	Buah	2.250.000	Baik
5	Pemadam Api	2004	1	Buah	1.500.000	Baik
6	Mesin Pemotong Kertas	2007	1	Buah	250.000	Baik
7	Sound Sistem	2004,2006	2	Set	5.975.000	Baik
8	Brankas	1999	1	Buah	2.800.000	Baik
IV	Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
1	Komputer / PC	1991,1993	2	Unit	-	RB
2	Komputer	2005	4	Unit	20.000.000	Baik
3	Komputer / PC	2007	1	Unit	14.950.000	Baik
4	Note Book	2006	1	Unit	14.950.000	Baik
5	Note Book dan LCD Proyektor	2007	1	Unit	29.950.000	Baik
6	Printer Canon IP 3300 dan 1880	2007	2	Unit	1.790.000	Baik
7	Warlees	2004,2006	2	Unit	5.975.000	Baik
8	Faximile	2006,2007	2	Unit	5.950.000	Baik
9	Telepone	1996	1	Buah	488.000	Baik
10	scanner	2007	1	Buah	2.950.000	Baik
11	CPU	2007	2	Unit	780.000	Baik
12	Monitor	2007	5	Unit	5.900.000	Baik
13	UPS	2007	5	Unit	10.250.000	Baik
14	Kalkulator	2007	6	Buah	510.000	Baik
15	Kalkulator	2001s/d06	16	Buah	1.166.900	Rusak 4, Baik 12
16	Hard Disk	2006,2007	7	Unit	2530.000	Baik
17	Mouse	2006	7	Buah	259.000	Baik
18	Keyboard	2006	4	Buah	600.000	Baik
19	Speaker	2007	3	Unit	900.000	Baik
20	Screen Filter	2007	5	Unit	140.000	Baik
21	Gambar Presiden dan Wakil	2007	4	Buah	600.000	Baik
22	Lambang Garuda	2007	2	Buah	300.000	Baik
23	Rak Piring	2007	1	Buah	1.780.000	Baik
24	Mangkok	2007	2	Lusin	170.000	Baik
25	cangkir	2007	2	Lusin	140.000	Baik
26	Piring,Baki,Ceret,sendok	2006	1	Set	955.000	Baik

1	2	3	4	5	6	7
V	Kendaraan Dinas / Operasional					
1	Kendaraan Roda 4 / Kijang	2006	1	Unit	6.285.500	
2	Kendaraan Roda 2	1992,1993	5	Unit	29.800.000	Rsk Rgn 1 Rsk Brt 4
3	Kendaraan Roda 2	2007	2	Unit		Baik
VI	Instalasi Listrik dan bangunan Kantor					
1	Daya Listrik yang digunakan	2007	3300	Volt	3.200.000	Baik
VII	Rumah Jabatan / Dinas					
	Luas Bangunan	2006	76,5	M2	53.832.068	Baik

10.7. Permasalahan dan Solusi.

a. Permasalahan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan Tupoksi dan kebijakan adalah :

~ Sumber daya aparatur, jabatan yang kosong dan kekurangan staf.

b. Solusi Mengatasi Permasalahan.

~ Perlu meningkatkan SDA yang ada melalui Diklat baik teknis maupun non teknis.

~ Perlu penambahan Staf untuk Kasi dan Kabag yang tidak memiliki staf, dalam membantu tugas dinas sehari-hari.

~ Perlu mengisi kekosongan jabatan Eselon IV.a 8 (Delapan) Orang.

11. Ketenagakerjaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23 seri D). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Urusan Wajib sesuai Tupoksi sebagai berikut :

11.1. Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan program dan kegiatan dengan penjelasan rincian terdapat pada table 2.2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan bidang Ketenagakerjaan	Ekonomi Tenaga Kerja	<p>Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.</p> <p>Peningkatan Kesempatan Kerja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja. - Pembangunan BLK. - Pengadaan prasarana latihan kerja. - Pengumpulan data base Tenaga Kerja. - Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja. - Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja. - Penyiapan Tenaga Kerja siap pakai. - Pengembangan Kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.

1	2	3	4	5
			Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial. - Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan social ketenaga-kerjaan. - Sosialisasi peraturan pelaksana-an tentang UU Ketenagakerjaan. - Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan keselamatan & kesehatan kerja.

11.2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam Tahun 2007 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1.	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Pelatihan keterampilan bagi penganggur / pencari kerja 9 Paket 24 orang	100
		- Pengadaan peralatan pelatihan	100
		- Pembangunan workshop BLK 1 unit 96 m2	100
		- Pemasangan paving BLK 740,4 m2	100
2.	Peningkatan Kesempatan Kerja	- Penyusunan data dan informasi pencari kerja 250 orang.	100
		- Padat karya produktif di Desa Sei Tendang melalui pembuatan jalan desa 4 Km melibatkan 110 orang tenaga kerja.	100
		- Penerapan Teknologi Tepat Guna 1 Paket 20 orang.	100
3.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	- Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial 10 kasus 29 orang (PHK) dan 3 kasus 208 PHI)	100
		- Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hokum dan jamsostek 26.125 orang	100
		- Sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerja-an untuk pembentukan LKS Bipartit 32 Unit.	100
		- Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 27 perusahaan.	100

11.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 30 Nopember 2002 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program – program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

a. Susunan Organisasi Dinas

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - Kasubag Kepegawaian
 - Kasubag Keuangan
 - Kasubag Umum
 - Kasubag Program dan Pelaporan
3. Kasubdin Permukiman , Penempatan dan PP
 - Kasi Penyiapan Areal Permukiman dan PP
 - Kasi Penataan Lingkungan
 - Kasi Permasalahan Tahan, Lahan dan Prasarana
 - Kasi Penempatan dan Penataan Penduduk

4. Kasubdin Pembinaan
 - Kasi Produksi dan Pengolahan Hasil Produksi
 - Kasi Kelembagaan Ekonomi Pemasaran dan Kerjasama Swasta
 - Kasi Kesehatan dan Keluarga Berencana
 - Kasi Penyerahan Pemerintahan Desa dan Penyerahan UPT
5. Kasubdin Penempatan Tenaga Kerja
 - Kasi Penempatan Tenaga Kerja
 - Kasi Perluasan Kerja
6. Kasubdin Pelatihan dan Produktivitas Tenaga kerja
 - Kasi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Kasi Perijinan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan
7. Kasubdin Hubin Syaker dan Pengawasan
 - Kasi Hubungan Industrial
 - Kasi Persyaratan dan Norma Kerja
 - Kasi Keselamatan Kesehatan Kerja

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas pokok Pemerintah Daerah dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

- Fungsi

Pembinaan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaras dengan kebutuhan yang sesuai dengan peluang potensi serta kebutuhan daerah yang sinergis dengan rencana pembangunan daerah.

c. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat**- Visi**

Terwujudnya tenagakerja dan masyarakat transmigrasi yang produktif, kompetitif dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

- Misi

1. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja
2. Mendorong perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan penempatan tenaga kerja.
3. Meningkatkan kualitas hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta adanya ketenangan berusaha bagi pengusaha dan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja.
4. Mewujudkan jaminan kepastian hukum.
5. Mengembangkan potensi sumber daya kawasan dan memfasilitasi perpindahan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pengembangan desa potensial yang berwawasan lingkungan.

d. Kebijakan / Strategi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat**- Kebijakan**

1. Pembinaan dan Pelatihan tenaga kerja terampil untuk mengembangkan kegiatan usaha industri kecil dan menengah.
2. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
3. Meningkatkan pelayanan umum dibidang ketenagakerjaan.
4. Mengembangkan agrobisnis.

- Strategi

Merumuskan standar dan prosedur untuk mengembangkan sumber daya manusia di Kabupaten Kotawaringin Barat.

11.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Goongan

a. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 3.11.4.1 sebagai berikut :

Tabel 3.11.4.1.
Pegawai Menurut Pendidikan

No.	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	S 2	-	-	-	-	-
2.	S 1	1	20	-	-	21
3.	Sarjana	-	3	-	-	3
4.	Muda	2	30	-	-	32
5.	SLTA	1	2	-	-	3
6.	SLTP	1	3	-	-	4
	Jumlah	5	58	-	-	63

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Tranmisigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat menurut pangkat dan golongan, terdapat pada tabel 3.11.4.2 sebagai berikut :

Tabel . 3.11.4.2.
Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No.	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Golongan I/a	1	-	-	-	1
	Golongan I/b	1	-	-	-	1
	Golongan I/c	-	-	-	-	-
	Golongan I/d	-	-	-	-	-
	Jumlah Gol I	2	-	-	-	2
2.	Golongan II/a	2	5	-	-	7
	Golongan II/b	-	-	-	-	-
	Golongan II/c	-	2	-	-	2
	Golongan II/d	-	2	-	-	2
	Jumlah Gol II	2	9	-	-	11

3.	Golongan III/a	1	11	-	-	12
	Golongan III/b	-	16	-	-	16
	Golongan III/c	-	10	-	-	10
	Golongan III/d	-	6	-	-	6
	Jumlah Gol III	1	43	-	-	44
4.	Golongan IV/a	-	2	-	-	2
	Golongan IV/b	-	3	-	-	3
	Golongan IV/c	-	1	-	-	1
	Golongan IV/d	-	-	-	-	-
	Jumlah Gol IV	-	6	-	-	6

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah Pejabat Struktural Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Jabatan Struktural dan Fungsional terdapat pada tabel 3.11.4.3 sebagai berikut

Tabel. 3.11.4.3.
Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Menurut Jabatan Struktural					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II b	-	1	-	-	1
	Eselon III a	-	6	-	-	6
	Eselon IV a	-	19	-	-	19
	Fungsional	-	-	-	-	-
	Staf	-	32	-	-	32
	Jumlah	-	58	-	-	58
2.	Menurut Jabatan Fungsional					
	Jumlah	-	-	-	-	-

d. Jumlah Pegawai Tidak Tetap

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tukang Kebun	2
2.	Sopir	1
3.	Jaga Malam	1
	Jumlah	4

11.5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran

a. Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh alokasi anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukkan bagi Gaji Pegawai sebesar Rp. 1.824.864.300,- dan sampai akhir bulan Desember 2007 telah direalisasikan (dibelanjakan) sebesar Rp. 1.768.962.421,- dengan sisa (saldo) sebesar Rp. 55.901.879,-

b. Belanja Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 92 % dengan rincian pada tabel 3.11.5. sebagai berikut :

Tabel 3.11.5
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No.	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Selisih Anggaran	Capaian Indikator Kinerja	
			Fisik	Keuangan			
		(%)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Belanja Langsung	2.022.000.000	100	1.854.772.850	92	167.227.150	100
	Belanja Pegawai	735.260.000	100	663.143.100	90	72.116.900	100
	- Honorarium PNS	107.220.000	100	93.070.000	87	14.150.000	100
	- Honorarium PNS	9.100.000	100	7.300.000	80	1.800.000	100
	- Honorarium Non PNS	290.300.000	100	288.213.100	99	2.086.900	100
	- Honorarium Non PNS	240.000.000	100	238.600.000	99	1.400.000	100
	- Uang Lembur	4.640.000	100	2.900.000	63	1.740.000	100
	- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	84.000.000	100	33.060.000	39	50.940.000	100
2.	Belanja Barang dan Jasa	846.361.050	100	803.684.000	95	42.677.050	100
	- Belanja Bahan Pakai Habis	149.736.550	100	146.465.050	98	3.271.500	100
	- Belanja Bahan Pakai Habis	470.500	100	470.500	100	0	100
	- Belanja Bahan / Material	34.500.000	100	34.175.750	99	324.250	100

- Belanja Jasa Kantor	49.985.000	100	31.087.100	62	18.897.900	100
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.810.000	100	10.699.000	91	1.111.000	100
- Belanja Cetak dan Penggandaan	87.747.000	100	85.605.900	98	2.141.100	100
- Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000	100	850.000	100	0	100
- Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir.	15.000.000	100	14.065.000	94	935.000	100
- Belanja Makanan dan Minuman	182.827.000	100	172.740.200	94	10.086.800	100
- Belanja Makanan dan Minuman	300.000	100	300.000	100	0	100
- Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.500.000	100	15.438.000	100	62.000	100
- Belanja Pakaian Kerja	50.525.000	100	49.127.500	97	1.397.500	100
- Belanja Perjalanan Dinas	234.400.000	100	229.980.000	98	4.420.000	100
- Belanja Perjalanan Dinas	6.910.000	100	6.910.000	100	0	100
- Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	800.000	100	795.000	99	5.000	100
- Belanja Pemeliharaan Komputer	5.000.000	100	4.975.000	100	25.000	100
3. Belanja Modal	440.378.950	100	387.945.750	88	52.433.200	100
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9.000.000	100	8.900.000	99	100.000	100
- Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	119.629.500	100	73.863.750	62	45.765.750	100
- Belanja Modal Pengadaan Komputer	79.675.000	100	76.400.000	96	3.275.000	100
- Belanja Modal Pengadaan Meubelair	5.598.450	100	5.535.000	99	63.450	100
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.008.400	100	2.925.000	97	83.400	100
- Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga.	1.050.000	100	985.000	94	65.000	100
- Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	31.408.000	100	30.575.000	97	833.000	100
- Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi	1.289.600	100	1.285.000	100	4.600	100
- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian Bangunan.	187.500.000	100	185.467.000	99	2.033.000	100
- Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan.	2.220.000	100	2.010.000	91	210.000	100

11.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Adapun proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007 adalah berdasarkan :

- Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) yang terdiri dari jumlah tenaga kerja, angkatan kerja, penganggur, setengah penganggur, pencari kerja dan lowongan kerja, data penempatan tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja, jumlah perusahaan dan tenaga kerja/buruh.
- Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- Hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten/ Propinsi.
- Kebijakan khusus pusat.

11.7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2007 sebagaimana pada tabel 3.11.7. berikut :

Tabel 3.11.7.
Kondisi Sarana dan Prasarana

No.	Jenis / Nama Barang	Merk / Tahun Pembuatan	Jumlah		Harga Sat (Rp.)	Kondisi
			Vol	Sat		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Tanah & Bangunan					
1.	Bangunan Gedung Work Shop		96	m2	1.418.229	Baik
2.	Bangunan Gedung / Paving Stone		740.400	m2	67	Baik
II.	Perlengkapan Gedung Kantor					
1.	Teralis Besi Kantor		140	m2	146.500	Baik
2.	Horden Kantor		140	m2	97.500	Baik
3.	Dispenser		3	Buah	865.000	
4.	Meja & Kursi Kasubdin		3	Set	1.845.000	Baik
5.	Jam Dinding Pagol		1	Buah	145.000	
6.	Jam Dinding Maspion		6	Buah	140.000	
7.	Lemari Besi 2 Pintu		2	Buah	1.350.000	Baik
8.	Lemari Arsip Kayu		7	Buah	710.000	Baik
9.	Mesin Tik		4	Buah	2.225.000	
III.	Peralatan Gedung Kantor					
1.	Mesin Pemetong Rumput Gendong		1	Buah	3.750.000	Baik

IV.	Peralatan & Perlengkapan Kantor					
1.	Komputer / PC		3	Unit	14.500.000	Baik Baik
2.	Note Book		2	Unit	14.150.000	
3.	Printer		3	Unit	1.475.000	
4.	LCD Projector		1	Unit	14.775.000	
5.	Kamera Digital		2	Unit	3.250.000	
6.	Faximile		1	Buah	1.285.000	
7.	Handycam		1	Buah	5.000.000	
V.	Kendaraan Dinas / Operasional					
1.	Kendaraan Roda Empat		2	Unit		
2.	Kendaraan Roda Dua		19	Unit		
VI.	Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.					
1.	Daya Listrik yang digunakan		17.400	Watt		
VII.	Rumah Jabatan / Dinas					
1.	Luas Bangunan		128	m2		

11.8 Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

- Belum tersedianya tenaga Instruktur PNS sehingga standar pelatihan yang berbasis kompetensi belum bisa dilaksanakan
- Kurangnya prasarana latihan kerja.
- Kurangnya ketrampilan/ keahlian calon tenaga kerja.
- Kesadaran pihak pengguna tenaga kerja untuk menginformasikan lowongan kerja masih kurang.

b. Solusi

- Mengadakan kerjasama dengan lembaga Latihan Swasta untuk melaksanakan pelatihan berbasis masyarakat.
- Meningkatkan program latihan ketrampilan tenaga kerja.
- Mengusulkan pengadaan sarana latihan kerja melalui dana APBD dan Tugas Pembantuan.
- Mensosialisasikan peraturan tentang wajib lapor lowongan kerja dan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan lowongan kerja.

12. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23 seri D) dan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 16 Desember 2002 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Urusan Wajib sesuai dengan tupoksi sebagai berikut :

12.1. Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas Kependudukan dan KB yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan.

Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan 3 (tiga) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel : 3.12.1 sebagai berikut :

Tabel 3.12.1
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	PENINGKATAN Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Fasilitas		Penataan Administrasi Kependudukan dan Capil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kependudukan 2. Bimbingan Tekhnis SIAK 3. Buku Peraturan / Pedoman SIAK 4. Pelatihan Petugas Registrasi Pendaftaran Penduduk 5. Seminar Indikator kategori penduduk miskin 6. Pendataan Pendaftaran Penduduk dan Capil 7. Formulir Pendaftaran Penduduk 8. Pencatatan, Evaluasi, pelaporan dan analisis data penduduk 9. Pemutakhiran data penduduk 10. Laporan Hasil Pendataan Penduduk

			11. Belanja Penggandaan Blangko Administrasi Kependudukan 12. Pelatihan Petugas Operator SIAK 13. Diklat Operator SIAK Tkt. Kec. 14. Belanja Modal Aparatur 15. Fasilitas Sarana dan Prasarana Kantor
2.	Peningkatan Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Pembangunan KB dan Pemberdayaan Keluarga	16. Pelayanan dan Pembinaan KB
3.	Pemberdayaan Ketahanan dan Ekonomi Keluarga	Peningkatan dan Pemberdayaan Kualitas keluarga	17. Perlindungan dan Pelayanan Sosial anak-anak dan keluarga

12.2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam Tahun 2007 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian
1	Penataan Administrasi Kependudukan		
	- Pembangunan , Pengoperasian Siak secara terpadu.	Tercapainya Pelayanan Siak yang prima.	74,45 %
	- Pelatihan Tenaga pengelola Siak	Operasional Pengelola dan Operator Siak	0 %
	- Implementasi Sistim Adm Kependudukan (membangun UP dating dan Pemeliharaan)	Terwujudnya Kelancaran Pengoperasian Siak yang bermutu	60,29 %
	- Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Kependudukan	0 %
	- Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Terlaksananya Pelayanan KK, KTP, Akta Catpil untuk 4 Kecamatan	0 %
	- Pengembangan Data Base Kependudukan	Terwujudnya Pengembangan Data Kependudukan	43,93 %
- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Tercapainya Kesadaran Penduduk untuk melaksanakan tertib Administrasi Kependudukan	100 %	

12.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa yang disertai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 30 Nopember 2002 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja.

Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai unsure teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program – program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas Kependudukan dan KB adalah :

- a. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :
 1. Kepala Dinas
 2. Kabag Tata Usaha, membawahi :
 - ❖ Kasubag Kepegawaian
 - ❖ Kasubag Keuangan
 - ❖ Kasubag Umum
 - ❖ Kasubag Program dan Pelaporan
 3. Kasubdin Keluarga Berencana, membawahi :
 - ❖ Kasi Pembinaan Motivasi
 - ❖ Kasi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
 - ❖ Kasi Pelayanan Kontrasepsi
 - ❖ Kasi Bimbingan Perkawinan

4. Kasubdin Perencanaan dan Evaluasi, membawahi :
 - ❖ Kasi Perencanaan
 - ❖ Kasi Inventaris dan Pendataan
 - ❖ Kasi Evaluasi dan Pengendalian
5. Kasubdin Pelayanan Pencatatan Penduduk
 - ❖ Kasi Kelahiran dan Kematian
 - ❖ Kasi Perkawinan dan Perceraian
 - ❖ Kasi Mutasi Pencatatan
6. Kasubdin Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - ❖ Kasi Kartu Tanda Penduduk
 - ❖ Kasi Mutasi Pendaftaran
 - ❖ Kasi Nomor Induk Kartu Keluarga
7. Kasubdin Pemberdayaan Keluarga
 - ❖ Kasi Ketahanan Fisik Keluarga
 - ❖ Kasi Ketahanan Non Fisik Keluarga
 - ❖ Kasi Pembinaan Keluarga Mandiri

12.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional

a. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan.

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada tabel 3.12.4.1 sebagai berikut :

Table 3.12.4.1.
Pegawai Menurut Pendidikan

No.	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	S2					1
2.	S1					25
3.	SARJANA MUDA					6
4.	SLTA					17
5.	STLP					1
6.	SD					-
	Jumlah					50

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada tabel 3.12.4.2 sebagai berikut :

Tabel 3.12.4.2.
Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No.	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Golongan I/a	-	-	-	-	-
	Golongan I/b	-	-	-	-	-
	Golongan I/c	-	-	-	-	-
	Golongan I/d	-	-	-	-	-
	Jumlah Gol I					
2.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	2
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-	-	-
	Pengatur (II/c)	-	-	-	-	5
	Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	-	-	2
	Jumlah Gol II					9
3.	Penata Muda(III/a)	-	-	-	-	7
	Penata Muda Tk. I (III/b)	-	-	-	-	10
	Penata (III/c)	-	-	-	-	12
	Penata Tk. I (III/d)	-	-	-	-	7
	Jumlah Gol III					36
4.	Pembina (IV/a)	-	-			2
	Pembina Tk. I (IV/b)	-	-			3
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-			-
	Jumlah Gol IV					5

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pejabat Struktural Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Jabatan Struktural dan Fungsional terdapat pada tabel 3.12.4.3 sebagai berikut :

Tabel 3.12.4.3.
Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Menurut Jabatan Struktural					
	Eselon I					
	Eselon II b					1
	Eselon III a					5
	Eselon IV a					16
	Fungsional					19
	Staf					9
	Jumlah					50
2.	Menurut Jabatan Fungsional					
	Eselon I					-
	Eselon II b					-
	Eselon III a					-
	Eselon IV a					-
	Fungsional					-
	Staf					-
	Jumlah					

d. Jumlah Pegawai Tidak Tetap

No.	Uraian	Jumlah
1.	Staf Pendaftaran Penduduk	1
	TOTAL	1

12.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

a. Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh alokasi anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukkan bagi Gaji Pegawai sebesar Rp.1.517.548.032,- dan sampai akhir bulan Desember 2007 telah direalisasikan (dibelanjakan) sebesar Rp. 1.396.745.400,- dengan sisa (saldo) sebesar Rp 120.802.632,-

b. Belanja Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 90,82.% dengan rincian pada tabel 3.12.5 sebagai berikut :

Tabel. 3.12.5.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No.	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Selisih Anggaran	Capaian Indikator Kinerja	
			Fisik	Keuangan			
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1.	Belanja Pegawai	1.517.548.032	92,04	1.396.745.400	92,04	120.802.632	
2.	Belanja Barang & Jasa	1.690.006.500	87,36	1.476.297.832	87,36	213.708.668	
3	Belanja Modal	209.093.100	100	202.700.000	96,94	6.393.100	
	Jumlah	3.416.647.632	90,21	3.075.743.232	90,02	340.904.400	

12.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka (RPJP). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Adapun proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana pada tahun 2007 adalah berdasarkan :

1. Renstra Dinas Kependudukan dan KB Tahun 2006 - 2010
2. DPA – SKPD Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007

12.7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana sampai dengan tahun 2007 sebagaimana pada tabel 3.12.7 berikut .

Tabel 3.12.7
Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis/ Barang	Merk/Tahun Pembuatan	Jumlah		Harga Satuan Rp	Kondisi
			Vol	Sat		
1	2	3	4	5	6	7
I	Tanah dan bangunan	2003	1	-	177.065.000	Baik
1	Tanah Bangunan /Kantor	1986	1	-	60.193.000	
2	Bangunan Kantor Induk	-	-	-	-	
3	Bangunan Tempat Parkir	-	-	-	-	
4	Pagar Keliling	1986	200	m	-	
5	Bangunan Gedung Aula	1998	1	-	80.000.000	
II	Perlengkapan Gedung Kantor					
1	Teralis Besi Kantor	2007	61	-	35.000	
2	Sumur Pompa	1987	1	-	75.000	
3	Horden Kantor	-	-	-	-	
4	Meja dan kursi Kepala	2007	1	-	600.000	
5	Meja & kursi Kabid/Sek	2007	5	-	400.000	
6	Meja&kursi Kasi & Staf	2006/2007	25	-	200.000	

7	Meja Rapat	2007	10	-	600.000	
8	Meja Setengah Biro	2007	4	-	400.000	
9	Mebeler Ruang Pimpinan	-	-	-	-	
10	Meja,kursi ruang tamu	2003	1	-	350.000	
11	Kursi lipat	2007	20	-	200.000	
12	Kursi Rapat	2007	72	-		
13	Filling cabinet	2007	3	-	1.750.000	
14	Lemari besi 2 pintu	-	-	-		
15	Rak Arsip Besi	2007	5	-	125.000	
16	Podium	-	-	-		
17	Tiang bendera	1986	1	-		
18	Kipas Angin	-	-	-		
III	Peralatan Gedung Kantor					
1	AC di Ruang Pimpinan	2007	1	-	4.000.000	
2	AC di Ruang Perencanaan	2006/2007	7	-	4.000.000	
3	AC di Ruang Entry Data	2007	1	-		
4	AC di Ruang Pelayanan	2007	3	-		
5	Genset	2007	2	-		
6	Kulkas	-	-	-		
7	Mesin Potong rumput Gendong	2007	1	-	3.500.000	
8	Sound System	2007	1	-	9.300.000	
IV	Peralatan & Perlengkapan Kantor					
1	Komputer PC	2007	5	-	9.950.000	
2	Note Book	-				
3	Printer	-				
4	LCD Proyektor	2007	2	-	1.250.000	
5	Wireless	-				
6	Telepon	2007	1	-	65.000	
7	Kamera	2007	4	-	2.500.000	
V	Kend Dinas Operasnal					
1	Kendaraan Roda 4	2007	1	-	197.200.000	
2	Kendaraan Roda 2	2007	2	-	14.950.000	
VI	Instalasi Listrik Bangunan					
1	Daya Listrik yang digunakan		4400	2	1400	
VII	Rumah Jabatan/Dinas					
1	Luas Bangunan	-	-	-	-	-
2	Fasilitas yang ada didlmnya	-	-	-	-	-

13. Sosial

13.1. Program dan Kegiatan.

Bidang Sosial pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan 5 (lima) program dan 5 (lima) kegiatan dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel : 3.13.1. sebagai berikut :

Tabel 3.13.1
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang lebih adil	Pelayanan dan Perlindungan Sosial	- Pemberdayaan FM, KAT dan PMKS - Pembinaan Penyandang Cacat. - Pembinaan Eks Penyakit Sosial. - Pemberdayaan Kelembagaan Kesej. Sosial. - Pelestarian dan Pengembangan K4S	- Pelatihan berusaha bagi keluarga miskin - Rehabilitasi sosial penyandang cacat. - Sosialisasi penyakit HIV/AIDS. - Bantuan sosial korban bencana. - Pemeliharaan dan Pembangunan sarana TMP

13.2. Tingkat pencapaian program dan kegiatan.

Dalam tahun 2007 tingkat pencapaian program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Sasaran kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1.	Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS. ~ Bantuan modal usaha terhadap fakir miskin ~ Bantuan modal usaha terhadap KAT ~ Bantuan modal usaha terhadap PMKS.	60 Kelompok 80 Orang 120 Orang	80 85 87
2.	Pembinaan Penyandang Cacat dan trauma. ~ Rehabilitasi Sosial ~ Rehabilitasi Penyandang Cacat.	6 Kelompok 1 Kelompok	79 85
3.	Pembinaan Ex Penyakit Sosial. ~ Sosialisasi penyakit HIV / AIDS.	300 Orang	78
4.	Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial. ~ Bantuan sosial bencana alam dan sosial.	420 Orang	85
5.	Pelesatarian dan pengembangan nilai K4S. ~ Pemeliharaan sarana dan prasarana TMP. ~ Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman.	1 Paket 8 Paket	85 78

13.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu Daerah Otonom dalam kerangka Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan per-Undang – Undang yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 18 tahun 2002 tentang kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 27 tahun 2002 tanggal 30 Nopember 2002 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja.

Bagian Kesra, Sosial dan PP adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai Visi , Misi, Tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program – program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bagian Kesra, Sosial dan PP Setda Kab. Ktw. Barat adalah :

a. Susunan Organisasi Bagian.

Struktur Organisasi Bagian Kesra, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

-) Kepala Bagian Kesra, Sosial dan PP Setda Ktw. Barat.
-) Kasubag Rehsos
-) Bimbansos
-) Kesum
-) Pemberdayaan Perempuan

14. Kepemudaan dan Olah Raga

14.1. Program dan Kegiatan

Bidang Sosial pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel : 3.14.1. sebagai berikut :

Tabel 3.14.1
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	Pembinaan dan Pemuda Olahraga		Ekstensi Pemuda dan Olahraga.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan organisasi pemuda dan pramuka. - Sosialisai/penyuluhan Narkoba. - Pendidikan dan latihan keterampilan kepemudaan. - Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Olah Raga.

14.2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam tahun 2007 tingkat pencapaian program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Sasaran kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1.	Exstensi pemuda dan kegiatan Olah Raga.		
	~ Pembinaan organisasi pemuda & pramuka.	6 Kec.	85
	~ Sosialisai / penyuluhan NARKOBA.	1000 Org	85
	~ Pendidikan dan latihan keterampilan kepemudaan	20 Org	87
	~ Pemeliharaan Rutin Sarana & Prasarana Olah Raga	3 Pkt	87

14.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kepemudaan dan olahraga.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu Daerah Otonom dalam kerangka Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan per-Undang – Undang yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 18 tahun 2002 tentang kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 27 tahun 2002 tanggal 30 Nopember 2002 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja.

Bagian Kesra, Sosial dan PP adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai Visi , Misi, Tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program – program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bagian Kesra, Sosial dan PP Setda Kab. Ktw. Barat adalah :

a. Susunan Organisasi Bagian.

Struktur Organisasi Bagian Kesra, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

-) Kepala Bagian Kesra, Sosial dan PP Setda Ktw. Barat.
-) Kasubag Rehsos
-) Bimbansos
-) Kesum
-) Pemberdayaan Perempuan

15. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

15.1 Program dan Kegiatan

Bidang Sosial pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel 3.15.1. sebagai berikut :

Tabel 3.15.1
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	Peningkatan Peran Masyarakat dan Perempuan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender.		Peningkatan peran masyarakat dan perempuan kelembagaan penyetaraan gender.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan pelatihan wanita dan organisasi wanita - Pendataan dan analisis gender.

15.2 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam tahun 2007 tingkat pencapaian program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Sasaran kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1.	Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan. ~ Pendidikan dan pelatihan wanita dan organisasi wanita ~ Pendataan dan analisis gender.	300 Orang 1 Paket	79 85

15.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kepemudaan dan olahraga.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu Daerah Otonom dalam kerangka Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan per-Undang – Undang yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 18 tahun 2002 tentang kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 27 tahun 2002 tanggal 30 Nopember 2002 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja.

Bagian Kesra, Sosial dan PP adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai Visi , Misi, Tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program – program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bagian Kesra, Sosial dan PP Setda Kab. Ktw. Barat adalah :

a. Susunan Organisasi Bagian.

Struktur Organisasi Bagian Kesra, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

-) Kepala Bagian Kesra, Sosial dan PP Setda Ktw. Barat
-) Kasubag Rehsos
-) Bimbansos
-) Kesum
-) Pemberdayaan Perempuan

16. Pemberdayaan masyarakat dan desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23 seri D) dan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tanggal 28 Desember 2000 tentang Uraian Tugas Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Urusan Wajib sesuai dengan tupoksi sebagai berikut :

16.1. Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan 4 (Empat) program dan 9 (Sembilan) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel : 3.16.1. sebagai berikut :

Tabel 3.16.1.
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Penguatan Kelembagaan & Organisasi Masyarakat.	1. Pegembangan dan pelaporan.	1. Peningkatan keberdayaan Masyarakat Desa.	1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan. 2. penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan-an Tenaga teknis dan masyarakat. 3. Penyelenggaraan Desiminasasi informasi bagi masyarakat desa.
2.	Pengembangan inspirasi & Partisipatif masyarakat.	2. Pembinaan ketahanan masyarakat desa / kelurahan.		
3.	Pengembangan usaha ekonomi masyarakat.	3. usaha ekonomi desa.		
4.	Penerapan teknologi tepat guna pedesaan.	4. Pemukiman & pemanfaatan sumber daya alam		
5.	Pemberdayaan masyarakat pedesaan & perkotaan.	5. Pendayagunaan teknologi tepat guna.		
6.	Pendekatan lintas sektor dan program.			

1	2	3	4	5
			2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1. Fasilitas Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pdesaan 2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
			3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1. Pembinaan Kelompok masy. Pembangunan Desa 2. Pelaksanaan Musyawarah dalam Pembangunan Desa 3. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
			4. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	1. Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

16.2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam Tahun 2007 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
1	<p>Pelayanan Administrasi Kantor</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Penyediaan jasa surat menyurat. -Penyediaan jasa komonikasi, sumberdaya air dan listrik. -Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. -Penyediaan jasa andministrasi keuangan -Penyediaan jasa kebersihan kantor. -Penyediaan alat tulis kantor. -Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. -Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor. -Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. -Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. -Penyediaan makanan dan minuman. -Rapat- rapat koordinasi keluar daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> -Tersampainya prosentase jasa surat menyurat untuk kepentingan tugas. -Tercapainya kebutuhan dinas. -Tercapainya kelancaran perijinan kendaraan dinas. -Tertib andministrasi -Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih. -Terpenuhinya kebutuhan ATK. -Terpenuhinya bahan cetakan untuk kebutuhan kantor -Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik -Terpenuhi kebutuhan perlengkapan kantor. -Meningkatnya pengetahuan sebagai acuan dalam tugas. -Tercapainya kebutuhan makan minum PNS. -Terlaksananya kegiatan rapat dan koordina-si perjalanan luar daerah. 	<p>40,50</p> <p>45,71</p> <p>73,88</p> <p>90,50</p> <p>96,89</p> <p>100</p> <p>79,43</p> <p>85,34</p> <p>100</p> <p>46,67</p> <p>78,07</p> <p>91,33</p>

1	2	3	4
2	<p>Peningkatan sarana dan prasarana.</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pembangunan gedung kantor -Pengadaan perlengkapan gedung kantor -Pengadaan meubelair. -Pemeliharaan rutin gedung kantor. -Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional. -Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 	<ul style="list-style-type: none"> -Terpenuhinya pembuatan plang kantor. -Tercapainya perlengkapan gedung kantor. -Tercapainya membelair pegawai. -Tercapainya pemeliharaan gedung kantor. -Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional -Terpeliharanya peralatan kantor. 	<p>100</p> <p>100</p> <p>76,19</p> <p>100</p> <p>88</p> <p>64</p>
3	<p>Peningkatan Disiplin aparatur</p> <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 	<ul style="list-style-type: none"> -Tersedianya pakaian sipil harian dinas 	<p>94,12</p>
4	<p>Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pendidikan dan latihan 	<ul style="list-style-type: none"> -Peningkatan potensi pegawai. 	<p>78,04</p>
5	<p>Peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja.</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD. - Penyusunan laporan keuangan semesteran - Penyusunan laporan keuangan akhir tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> -Tercapainya laporan kinerja dinas . -Terlaksananya laporan semesteran. -Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun. 	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>
6	<p>Peningkatan keberdayaan Masyarakat Ds.</p> <p>Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat Pedesaan. -Penyelenggaraan Desiminasi informasi bagi Masyarakat Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan gotong royong, bhakti sosial di masing-masing Desa/ Kelurahan adalah musyawarah perencanaan pembangunan pedesaan yang sedang dilaksanakan pada tahun berjalan yang pada prinsipnya kegiatan tersebut adalah oleh, dari dan utk masyarakat - Pengenalan produk batu kecubung pada gelar TTG IX tahun 2007 Manado Sulawesi Utara. 	<p>97,23</p> <p>98,57</p>
7	<p>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> -Masyarakat/pelaku PNPB-PPK masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan arsel 11 Desa/Kel, Kumai 13 Desa, Kolam 10 desa/kel dan Aruta 7 Desa. 	<p>98,96</p>

1	2	3	4
8	<p>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dalam membangun Desa sehingga terpilih Juara I,II,III lomba Desa/ Kelurahan tingkat propinsi Kalteng. ~ Juara tingkat Desa : juara I Desa Kubu, Juara II Desa Kumpai Batu Atas, juara III Desa Natai Kerbau. ~ Juara tingkat Kelurahan : juara I kelurahan sidorejo, juara II Kelurahan Pangkut, juara III kelurahan Kumai Hilir, ~ Juara lomba Desa/Kelurahan tingkat propinsi kelurahan sidorejo juara II. 	97,82
	<ul style="list-style-type: none"> -Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Murid SD/MI/ponpes, dimana yang menerima dana kudapan : 14.550 orang, jumlah pemberian kudapan dalam 1 tahun : 40 kali dan indek pemberian 1 kali kudapan : Rp.1000/murid - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya yang ikut program pinjaman modal bergulir kecamatan Kumai 11 Desa/ kelurahan. Kecamatan P. Lada 11 Desa/ kelurahan dan kecamatan P. Banteng 11 Desa. 	97,43
	<ul style="list-style-type: none"> -Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya capaian pelaporan Dinas 	98,95
9	<p>Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan perempuan dipedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif : lomba pildacil, mewarnai gambar, toga, 10 program PKK, posyandu, memasak dan pelatihan Dasa wisma, posyandu, SDM TP-PKK Kabupaten, pelatihan P2W 	88,13

16.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 30 Nopember 2002 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah :

a. Susunan Organisasi Dinas/Badan.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

1. Kepala Dinas PMD.
2. Kepala Bagian Tata Usaha
 - Kasubag Umum
 - Kasubag Kepegawaian
 - Kasubag Keuangan
 - Kasubag Program dan Pelaporan
3. Subdin Pengembangan dan Program
 - Kasi Pengembangan Program
 - Kasi Pengembangan Tata Desa / Kelurahan
 - Kasi Pendataan Informasi dan Evaluasi
 - Kasi UDKP dan Lomba Desa
4. Subdin Pembinaan Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan
 - Seksi Peningkatan Keterampilan Bimbingan Motivasi Masyarakat
 - Kasi Bimbingan Lembaga Desa / Kelurahan
 - Kasi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
 - Kasi Pengembangan Lembaga Sosial Budaya

5. Subdin Usaha Ekonomi Desa
 - Seksi Perkreditan dan Produksi
 - Seksi Bantuan Pembangunan Desa / Kelurahan
 - Seksi Ekonomi Keluarga / Masyarakat Desa / Kelurahan
 - Seksi Tenaga Kerja Informal

6. Seksi Pemukiman dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
 - Seksi Perumahan dan Lingkungan
 - Seksi Sarana dan Prasarana Desa / Kelurahan
 - Seksi Penataan Pemukiman Desa / Kelurahan
 - Seksi Sumber Daya Daratan Pesisir dan Pantai

7. Subdin Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
 - Seksi Pemanfaat Teknologi Tepat Guna
 - Seksi Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna
 - Seksi Kerjasama TTG
 - Seksi Pelatihan Peningkatan Keterampilan dan Bimbingan TTG

8. Kelompok Jabatan Fungsional

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas/Badan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi tugas dan fungsi antara lain :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai **tugas pokok** membantu melakukan sebagian tugas Kepala Daerah menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi Pengembangan Program Desa / Kelurahan, Pembinaan Usaha Perekonomian Desa, Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pemukiman Desa, Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Pedesaan dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat Desa.

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi :
 -) Pengembangan Desa / Kelurahan.
 -) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa.
 -) Pengembangan Kawasan Pemukiman Pedesaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa.
 -) Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

c. Kebijakan/Strategi dari Dinas/Badan.

1. Membangkitkan potensi intelektual dan kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada setiap tahapan proses pembangunan.
2. Selalu memperhitungkan aspek – aspek, sosial budaya, ekonomi dan fisik lingkungan sebagai jaminan terciptanya peran serta masyarakat.

16.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 3.16.4.1 sebagai berikut :

Tabel. 3.16.4.1.
Pegawai Menurut Pendidikan.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	S2	-	-	-	-	-
2	S1	-	13	-	-	13 Orang
3	Sarjana Muda	-	-	-	-	1 Orang
4	SLTA	-	-	-	-	15 Orang
5	SLTP	-	-	-	-	1 Orang
6	SD	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	30 orang

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada tabel 3.16.4.2 sebagai berikut :

Tabel. 3.16.4.2.
Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Golongan I/a	-	-	-	-	-
	Golongan I/b	-	-	-	-	-
	Golongan I/c	-	-	-	-	-
	Golongan I/d	-	-	-	-	-
	Jumlah Gol I	-	-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	3 orang
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-	-	1 Orang
	Pengatur (II/c)	-	-	-	-	-
	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	-	-	-
	Jumlah Gol II	-	-	-	-	4 orang
3.	Penata Muda (III/a)	-	-	-	-	2 orang
	Penata Muda Tkt. I (III/b)	-	-	-	-	1 Orang
	Penata (III/c)	-	-	-	-	5 orang
	Penata Tingkat I (III/d)	-	-	-	-	11 Orang
	Jumlah Gol III	-	-	-	-	19 orang
4.	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	3 Orang
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	-	-	-	4 Orang
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-
	Jumlah Gol IV	-	-	-	-	7 Orang

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menurut Jabatan Struktural dan Fungsional terdapat pada tabel 3.16.4.3 sebagai berikut :

Tabel. 3.16.4.3.

Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	Menurut Jabatan Struktural					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II b	-	-	-	-	-
	Eselon III a	-	-	-	-	-
	Eselon IV a	7	-	-	7	17
	Fungsional	-	-	-	-	-
	Staf	-	-	-	-	7
	Jumlah	-	-	-	-	24
2	Menurut Jabatan Fungsional					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II b	-	-	-	-	-
	Eselon III a	-	-	-	-	-
	Eselon IV a	-	-	-	7	17
	Fungsional	-	-	-	-	-
	Staf	-	-	-	-	7
	Jumlah	-	-	-	-	24

d. Jumlah Pegawai Tidak Tetap.

No	Uraian	Jumlah
1.	Penjaga Malam	1 Orang
	Total	1 Orang

16.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.

a. Belanja Tidak Langsung.

Berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memperoleh alokasi anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukkan bagi Gaji Pegawai sebesar Rp. 1.138.677.897,- dan sampai akhir bulan Desember 2007 telah direalisasikan (dibelanjakan) sebesar Rp.1.035.092.061,- dengan sisa (saldo) sebesar Rp. 103.585.836,-

b. Belanja Langsung.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 96 % dengan rincian pada tabel 3.16.5. sebagai berikut :

Tabel 3.16.5.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Selisih Anggaran (Rp.)	Capaian Indikator Kinerja (%)	
			Fisik (%)	Keuangan (Rp.)			
				(%)			
1.	Belanja Pegawai	3.817.000.000	90,90	3.674.359.147	90,90	142.640.853	96,26
	- Belanja Pegawai	248.740.800	90,90	224.600.000	90,90	24.140.800	90,26
2.	Belanja Barang Jasa	3.534.586.200	96,68	3.417.586.147	96,68	117.000.053	96,68
	- Belanja barang Jasa	3.534.586.200	96,68	3.417.586.147	96,68	117.000.053	96,68
3.	Belanja Modal	33.673.000	95,54	32.173.000	95,54	1.500.000	95,54
	- Belanja Modal	33.673.000	95,54	32.173.000	95,54	1.500.000	95,54
	Jumlah	4.955.677.897	95,03	4.709.451.208	95,03	246.226.689	95,03

16.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Adapun proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) pada tahun 2007 adalah berdasarkan :

-) Proses penyusunan Renstra Lima Tahun
-) Penyusunan Renja Satu Tahun
-) Penyusunan RKPD Satu Tahun

16.7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sampai dengan tahun 2007 sebagaimana pada tabel 3.16.7. berikut.

Tabel 3.16.7.
Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis>Nama Barang	Merk/Tahun Pembuatan	Jumlah		Harga Sat (Rp.)	Kondisi
			Vol	Sat		
1	2	3	4	5	6	7
I	Tanah & Bangunan					
1.	Tanah Bangunan/Kantor	-	1.774	M2	354.800.000	Baik
2.	Bangunan Kantor Induk	-	240,52	M2	581.056.000	Baik
3.	Bangunan Gedung Aula	2002	120	M2	144.000.000	Baik
4.	Bangunan Tempat Parkir	2004	24	M2	10.800.000	Baik
5.	Pagar Keliling					
II	Perlengkapan Gedung Kantor					
1.	Teralis Besi Kantor	2004	151	M2	12.080.000	Baik
2.	Horden Kantor	2006	1	Paket	4.160.000	Baik
3.	Horden Aula	2007	1	Paket	2.000.000	Baik
4.	Meja dan Kursi Kepala	-	1,1	Buah	-	Baik
5.	Meja & Kursi Kabid/Sekretaris	-	6	Buah	-	Baik
6.	Meja & Kursi Kasi dan Staff	-	24	Buah	9.920.000	Baik
7.	Meja Rapat	2001,2004	8,8	Buah	8.100.000	Baik
8.	Meubelair Ruang Pimpinan	2007	2	Set	3.000.000	Baik
9.	Kursi Kantor	2001	55	Buah	8.745.000	Baik
10.	Filling Kabinet	2002	2	Buah	4.200.000	Baik
11.	Rak Arsip	2000	4	Buah	2.000.000	Baik
12.	Tiang Bendera		1	Buah	-	Baik
III	Peralatan Gedung Kantor					
1.	AC diruang Pimpinan	2003	1	Buah	4.000.000	Baik
2.	AC Mobil	2006	1	Buah	6.950.000	Baik
3.	Kulkas	2004	1	Buah	1.000.000	Baik
4.	Mesin Pemotong Rumput Gendong	2004	1	Buah	3.500.000	Baik

1	2	3	4	5	6	6
IV	Peralatan & Perlengkapan Kantor					
1.	Komputer / PC	-	8	Set	19.950.000	RR
2.	Note Book	2006	1	Buah	44.300.000	Baik
3.	LCD Projector	2006	1	Buah	1.200.000	Baik
4.	Wireless	1996	1	Buah	200.000	Baik
5.	Telepon	2007	1	Buah	7.300.000	Baik
6.	Kamera Handycam	2006	1	Buah		Baik
V	Kendaraan Dinas / Operasional					
1.	Kendaraan Roda Empat	1991	1	Buah	-	Baik
2.	Kendaraan Roda Dua	1991-2002	11	Buah	-	R R
VI	Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.					
1.	Daya Listrik yang digunakan	2007	3.300	Watt	-	Baik

16.8. Permasalahan dan Solusi.

a. Permasalahan.

- Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah.
- Kelembagaan masyarakat yang ada di desa belum mampu menjalankan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan
- Minimnya permodalan usaha yang dimiliki.

b. Solusi.

- Melakukan Pembinaan Kelembagaan Perangkat Desa agar dapat menjalankan pembangunan sesuai yang diharapkan.
- Perlu terus diupayakan memotivasi, meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan usaha bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
- Meningkatkan pembinaan kesejahteraan keluarga sebagai satuan masyarakat terkecil yang selama ini telah digelarkan melalui ibu-ibu tim Penggerak PKK seperti Posyandu, melalui pemberian gizi agar jangan sampai ada masyarakat yang mendapat gizi buruk.
- Mengikutsertakan pengrajin pada gelar/pameran TTG tingkat Nasional.
- Menyalurkan Dana PNPM kemasyarakat secara bergulir.

17. Kebudayaan

17.1. Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2007.

Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan untuk urusan wajib yaitu bidang kebudayaan mempunyai 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel 3.17.1 dibawah ini :

Tabel 3.17.1.
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Urusan Wajib

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1.			Pengelolaan Keragaman Budaya	a. Pengembangan Kesenian & Kebudayaan daerah b. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival budaya Daerah

17.2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan Urusan Wajib

Dalam Tahun 2007 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)	
1.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	- Bantuan kesenian dalam bentuk alat kepada sanggar – sanggar di 6 Kecamatan	100
			- Pengadaan pakaian kesultanan Kutaringin dan adat lainnya di Pangkalan Bun	100
			- Perjalanan dinas dalam rangka penyerahan bantuan kesenian dalam bentuk alat ke 6 Kec.	100
	Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah		- Mengikuti Festival Budaya Isen Mulang di Palangka Raya	100
			- Melaksanakan Festival Budaya Marunting Batu Aji 2007 di P. Bun	100
		- Mengikuti Festival Keraton se Nusantara II di Pontianak Kalimantan Barat	100	
		- Ujicoba Kesenian (Tarian) di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah Palangka Raya	100	

17.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 30 Nopember 2002 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja.

Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat adalah mempunyai dua unsur satuan kerja teknis dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

a. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat.

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Kabag Tata Usaha, membawahi :
 - ♦ Kasubag Kepegawaian.
 - ♦ Kasubag Keuangan.
 - ♦ Kasubag Umum
 - ♦ Kasubag Program dan Pelaporan.
3. Kasubdin Obyek dan Daya Tarik Wisata, membawahi :
 - ♦ Kasi Obyek Wisata
 - ♦ Kasi Atraksi Wisata
 - ♦ Kasi Rekreasi dan Hiburan Umum

4. Kasubdin Sarana Wisata, membawahi :
 - ♦ Kasi Akomodasi
 - ♦ Kasi Jasa Transportasi
 5. Kasubdin Pemasaran dan Penyuluhan Wisata, membawahi :
 - ♦ Kasi Promosi dan Informasi
 - ♦ Kasi Bimbingan Wisata
 6. Kasubdin Pembinaan Mitra Usaha, membawahi :
 - ♦ Kasi Perijinan
 - ♦ Kasi Bina Produksi
 - ♦ Kasi Pengawasan dan Ketertiban
 7. Kasubdin Pembinaan Seni dan Budaya, membawahi :
 - ♦ Kasi Pembinaan Seni dan Budaya Daerah
 - ♦ Kasi Pelestarian Cagar Budaya dan Obyek Bersejarah
- b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat**

Tugas Pokok Dinas Pariwisata Seni dan Budaya adalah bertugas membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pariwisata Seni dan Budaya, sedangkan fungsinya yaitu merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan perijinan kegiatan dibidang pariwisata seni dan budaya. Mengelola tugas umum ketatausahaan di bidang pariwisata, seni dan budaya.

- c. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat.**

1). V i s i.

Visi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai adalah **“Terwujudnya Kotawaringin Barat Sebagai Pintu Gerbang Pariwisata Kalimantan Tengah Yang Berwawasan Lingkungan“**

2). M i s i.

Sebagai tindak lanjut dari visi maka disusun misi yang merupakan pernyataan penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara terukur, obyektif dan spesifik harus dipedomani sebagai landasan kerja.

Guna mencapai visi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kotawaringin Barat tersebut maka ditetapkan misi yang meliputi :

- a. Meletakkan dasar – dasar hukum kepariwisataan daerah.
- b. Meningkatkan penelitian dalam rangka pembangunan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata daerah.
- c. Meningkatkan perlindungan terhadap kesenian dan budaya daerah sebagai upaya pelestarian warisan budaya daerah.
- d. Meningkatkan pembinaan seni, budaya dan pariwisata daerah secara terpadu dalam bingkai NKRI.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait untuk mewujudkan Taman Nasional Tanjung Puting sebagai pariwisata alam yang berwawasan lingkungan.
- f. Menjadikan kesenian dan kebudayaan daerah sebagai wahana pendukung pembangunan “pariwisata alam” daerah, dengan primadona Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).
- g. Menjadikan seni budaya daerah sebagai sarana pendidikan, persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah dan diluar sekolah.
- j. Pengembangan kualitas dan kuantitas produk pariwisata (obyek wisata alam dan atraksi) yang berwawasan lingkungan, bertumpu pada pesona alam serta seni dan budaya daerah yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi.
- k. Menjadikan seni budaya dan obyek wisata sebagai wahana pemberdayaan ekonomi rakyat untuk menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, khususnya bagi industri kecil dan menengah.
- l. Mengembangkan kualitas profesionalisme para pelaku pariwisata agar mampu bersaing dengan daerah lainnya khususnya di Kalimantan Tengah.
- m. Mewujudkan kegiatan seni budaya dan pariwisata sebagai salah satu andalan untuk mendukung pendapatan daerah.

d. Kebijakan/Strategi dari Dinas Parnsribud.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka telah diambil langkah-langkah kebijakan untuk berbagai rencana, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan.

Selama tahun 2007 seluruh aktivitas dan kegiatan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum dilaksanakan melalui 5 (lima) kebijakan yang terdiri dari :

1. Menyediakan fasilitas umum yang memadai dalam upaya untuk meningkatkan minat pengunjung / wisatawan ke obyek wisata.
2. Meningkatkan aktifitas sanggar seni budaya dan perkumpulan olah raga tradisional.
3. Kegiatan penelitian, survey, monitoring dan pengumpulan data obyek dan daya tarik wisata.
4. Peningkatan dan pengembangan pemasaran pariwisata, seni dan budaya daerah.
5. Kegiatan kemitraan dengan pelaku industri pariwisata.

17.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.

Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 3.17.4.1. sebagai berikut :

Tabel. 3.17.4.1.
Pegawai Menurut Pendidikan.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	S2	-	-	-	-	-
2	S1	6	-	-	-	6
3	Sarjana Muda	2	-	-	-	2
4	SLTA	15	-	-	-	15
5	SLTP	1	-	-	-	1
6	SD	1	-	-	-	1
Jumlah		25	-	-	-	25

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada tabel 3.17.4.2 sebagai berikut :

Tabel. 3.17.4.2.
Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Golongan I/a	1	-	-	-	1
	Golongan I/b	1	-	-	-	1
	Golongan I/c	-	-	-	-	-
	Golongan I/d	-	-	-	-	-
	Jumlah Gol I	2	-	-	-	2
2.	Pengatur Muda (II/a)	2	-	-	-	2
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-	-	-
	Pengatur (II/c)	2	-	-	-	2
	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	-	-	-	1
	Jumlah Gol II	5	-	-	-	5
3.	Penata Muda (III/a)	1	-	-	-	1
	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	-	-	-	1
	Penata (III/c)	4	-	-	-	4
	Penata Tingkat I (III/d)	6	-	-	-	6
	Jumlah Gol III	12	-	-	-	12
4.	Pembina (IV/a)	4	-	-	-	4
	Pembina Tingkat I (IV/b)	3	-	-	-	3
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-
	Jumlah Gol IV	7	-	-	-	7

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah Pejabat Struktural Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Jabatan Struktural dan Fungsional terdapat pada tabel 3.17.4.3 sebagai berikut :

Tabel. 3.17.4.3.
Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	Menurut Jabatan Struktural					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II b	1	-	-	-	1
	Eselon III a	6	-	-	-	6
	Eselon IV a	11	-	-	-	11
	Staf	9	-	-	-	9
	Jumlah	27	-	-	-	27
2	Menurut Jabatan Fungsional					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II b	-	-	-	-	-
	Eselon III a	-	-	-	-	-
	Eselon IV a	-	-	-	-	-
	Staf	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-

d. Jumlah Pegawai Tidak Tetap.

No	Uraian	Jumlah
1.	Pegawai Kontrak SK Kepala Dinas	14
	Total	14

17.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.

a. Belanja Tidak Langsung.

Berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh alokasi anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukkan bagi Gaji Pegawai sebesar Rp. 935.140.259,- dan sampai akhir bulan Desember 2007 telah direalisasikan (dibelanjakan) sebesar Rp. 792.704.750,- dengan saldo sebesar Rp. 142.435.509,- .

b. Belanja Langsung.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 90,36 % dengan rincian pada tabel 3.17.5. sebagai berikut :

Tabel 3.17.5.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Selisih Anggaran (Rp.)	Capaian Indikator Kinerja (%)
			Fisik (%)	Keuangan (Rp.)		
				(%)		
1.	Belanja Pegawai					
	Honorarium tidak tetap	30.228.775	100	21.655.300	71,64	80
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.485.000	100	37.660.000	4,60	90
	Belanja Kursus-kursus singkat/ pelatihan	28.500.000	100	27.000.000	94,74	99
	Upah kerja	81.500.000	100	63.600.000	78,10	81
	Honor tenaga ahli/ infrastruktur/ nara sumber	34.970.000	100	33.995.000	97,21	99
2.	Belanja Barang Jasa					
	Belanja bahan pakai habis	178.044.000	100	153.195.660	86,04	90
	Belanja perjalanan dinas	99.400.000	100	98.626.000	99,22	100
	Belanja pemeliharaan konstruksi/ pembelian gedung kantor	7.800.000	100	7.800.000	100	0
	Belanja pakaian kerja lapangan	8.500.000	100	6.750.000	79,41	85
	Pendidikan dan pelatihan formal	48.000.000	100	47.226.000	98,78	96
	Belanja cetak dan penggandaan	106.800.000	100	106.400.000	99,62	100
	Belanja pemeliharaan	56.000.000	100	35.610.000	63,58	67
3.	Belanja Modal					
	Belanja modal pengadaan patung	1.800.000	100	1.800.000	100	0
	Belanja modal pengadaan maket/ miniatur/ diorama	33.000.000	100	32.900.000	99,69	100
	Belanja pemeliharaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air	30.000.000	100	29.700.000	99,01	100
	Belanja pemeliharaan konstruksi tugu peringatan	30.000.000	100	29.375.000	97,91	100
	Belanja modal pengadaan almari	19.722.000	100	19.350.000	98,14	99
	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan orang	17.500.000	100	17.200.000	98,28	100

	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	150.000.000	100	142.354.000	94,90	7.646.000	99
	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersi/ minum	7.500.000	100	7.500.000	100	0	100
	Belanja modal pengadaan lampu hias taman	32.000.000	100	30.650.000	95,78	1.350.000	97
	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	25.000.000	100	24.000.000	96	1.000.000	100
	Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung gudang	402.600.000	100	395.250.000	98,17	7.350.000	100
	Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian bangunan bersejarah	140.000.000	100	137.640.000	98,31	2.350.000	99
	Belanja modal pengadaan patung	65.000.000	100	62.800.000	96,61	2.200.000	99
	Jumlah	1.684.349.775		1.570.036.960		114.312.815	

17.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Adapun proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007 adalah berdasarkan :

-) Musrembang
-) KUA
-) PPAS
-) RKA SKPD

17.7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2007 sebagaimana pada tabel 3.17.7. berikut.

Tabel 3.17.7.
Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis>Nama Barang	Merk/Tahun Pembuatan	Jumlah		Harga Sat (Rp.)	Kondisi
			Vol	Sat		
1	2	3	4	5	6	7
I	Tanah & Bangunan					
1.	Tanah Bangunan/Kantor	2001	4,448	M2	50.000.000	Baik
2.	Bangunan Kantor Induk	2001	300	M2	100.000.000	Baik
3.	Bangunan Tempat Parkir	2004	60	M2	15.742.000	Baik
4.	Pagar Keliling	2001	300	M'	-	Baik
II	Perlengkapan Gedung Kantor					
1.	Teralis Besi Kantor	2001	-	M2	-	Baik
2.	Horden Kantor	2003	16	Lbr	8.240.000	Baik
3.	Meja Kepala Dinas	2001	1	Bh	700.000	Baik
4.	Kursi Kepala Dinas	2005	1	Bh	1.300.000	Baik
5.	Meja Kasubdin/ KTU	2001	6	Bh	4.200.000	Baik
6.	Kursi Kasubdin/ KTU	2001	6	Bh	2.700.000	Baik
7.	Meja Kasi dan Staff	2001	19	Bh	11.800.000	Baik
8.	Kursi Kasi dan Staff	2001	7	Bh	3.150.000	Baik
9.	Meja Rapat	2002	10	Bh	6.950.000	Baik
10.	Meja Biro	2002	2	Bh	3.000.000	Baik
11.	Kursi Putar	2005	2	Bh	3.000.000	Baik
12.	Meubelair Ruang Pimpinan	2001	2	Set	3.800.000	Baik
13.	Kursi Lipat	2001/2002	48	Bh	7.200.000	Baik
14.	Kursi Plastik	2001	2	Bh	70.000	Baik
15.	Filling Kabinet	2002	4	Bh	5.200.000	Baik
16.	Lemari Kaca/ Pajangan	2005	1	Bh	3.000.000	Baik
17.	Lemari Besi 2 pintu	2001/2002	5	Bh	7.700.000	Baik
18.	Lemari Rak Buku	2002	1	Bh	2.825.000	Baik
19.	Lemari Pajangan	2006	2	Bh	600.000	Baik
20.	Rak Arsip	2001	4	Bh	14.000.000	Baik
21.	Bufet TV	2005	1	Bh	1.500.000	Baik
22.	Tiang Bendera	2001	1	Bh	300.000	Baik
23.	Kipas Angin	2001-2005	7	Bh	2.225.000	Baik
24.	Jam Dinding	2001	1	Bh	55.000	Baik

III	Peralatan Gedung Kantor					
1.	AC diruang Pimpinan	2004	1	Bh	3.750.000	Baik
2.	AC diruang Aula dan Komputer	2005	2	Bh	12.000.000	Baik
3.	Mesin Pemotong Rumput Gendong	2002/2004	4	Bh	11.000.000	Baik
IV	Peralatan & Perlengkapan Kantor					
1.	Komputer / PC	2001-2005	5	Unit	82.500.000	Baik
2.	Note Book/ Laptop	2004	1	Bh	15.000.000	Baik
3.	Printer LQ 2180	2005	1	Bh	6.500.000	Baik
4.	Mesin Tik	2001-2005	6	Bh	12.900.000	Baik
5.	Wireless	2004	1	Bh	1.250.000	Baik
6.	Brankas	2004	1	Bh	7.000.000	Baik
7.	Faximile	2002	1	Bh	2.900.000	Baik
8.	Telepon	2001/2004	2	Bh	300.000	Baik
9.	Kamera	2002	1	Bh	1.500.000	Baik
10.	Handycam	2004	1	Bh	10.000.000	Baik
11.	Televisi	2004-2005	2	Bh	6.750.000	Baik
12.	VCD Player	2004	1	Bh	1.000.000	Baik
13.	Antena Parabola	2005	1	Bh	1.950.000	Baik
V	Kendaraan Dinas / Operasional					
1.	Kendaraan Roda Dua	2001	5	Bh	-	Baik
VI	Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.					
1.	Daya Listrik yang digunakan	2001	6600	Watt	-	Baik

17.8. Permasalahan dan Solusi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan program dan kegiatan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan dan ketrampilan personil belum merata, hampir 90 % tidak memiliki latar belakang pengetahuan tentang kepariwisataan pada umumnya dan perencanaan/ pelaporan pada khususnya.

- b. Pelaksana kegiatan pada umumnya belum memenuhi standar waktu sebagaimana diisyaratkan.
- c. Terbatasnya sumber dana/ anggaran pembangunan, sehingga berbagai rencana pembangunan yang sudah diprogramkan belum terlaksana dengan maksimal.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur baik mobilitas/ kendaraan operasional, ruangan yang kurang representatif lagi, peralatan dan perlengkapan kantor yang masih kurang.
- e. Koordinasi eksternal maupun internal yang kurang maksimal.
- f. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah, terutama dari pusat yang berubah – ubah dengan cepat.

Solusi yang diharapkan dapat untuk mengurangi dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan sumber daya apatur dengan tetap memprogramkan berbagai peningkatan pendidikan baik secara formal/ non formal, diklat/ kursus teknis kepariwisataa/ Perencanaan/ Pelaporan, penjejangan struktural, upaya ini diharapkan dapat menghasilkan personil yang handal dan profesional.
- b. Mengikutsertakan personil untuk mengikuti kursus manajemen pengelolaan kegiatan/ pengadaan barang dan jasa baik yang diadakan di daerah maupun luar daerah/ pusat.
- c. Perlunya penambahan anggaran yang proporsional guna mendukung program dan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik lainnya.
- d. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur.
- e. Memantapkan koordinasi dan konsultasi baik sesama unit kerja perangkat daerah maupun dengan propinsi dan pusat.
- f. Mengupayakan revisi/ perbaikan dan pembuatan perda baru terhadap perangkat peraturan yang melandasi bidang kepariwisataan maupun peraturan bidang umum lainnya yang berkaitan dengan kewenangan dinas.

18. Kepegawaian.

18.1. Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas / Badan yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan 7 (tujuh) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel : 3.18.1. sebagai berikut :

Tabel 3.18.1.
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Administrasi Umum Pemerintahan	Pelayanan Umum	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan peralatan rumah tangga 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12. Penyediaan makanan dan minuman 13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3. Pengadaan mebeleur 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 6. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1	2	3	4	5
			3. Program peningkatan disiplin aparat	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
			4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan
			5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
			6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 2. Seleksi penerimaan calon PNS 3. Penempatan PNS 4. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 5. Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 6. Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 7. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 8. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
		Pendidikan Kedinasan	7. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparat	1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 2. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 3. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah 4. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

18.2.Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam Tahun 2007 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Pelayanan administrasi surat menyurat	85,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Perkantoran	100,00
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemegang hak pakai kendaraan dinas / operasional	100,00
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelaksanaan kegiatan dilingkungan BKD	100,00
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana peralatan kerja	100,00
	Penyediaan alat tulis kantor	Sekretariat, dan Bidang dilingkungan BKD	100,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja dan Pegawai BKD	100,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	PNS dilingkungan BKD	100,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Badan / Dinas / Unit Satuan kerja dan PNS dilingkungan BKD	100,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	PNS dilingkungan BKD	100,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pegawai dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Ktw. Barat	50,00
	Penyediaan makanan dan minuman	Pegawai dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Ktw. Barat	100,00
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BKN, BKD Provinsi, Bandiklat, MENPAN dan Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja terkait	60,00
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pegawai struktural yang belum terpenuhi kebutuhan prasarana kendaraan roda 2	100,00
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Ruang aula dan ruang arsip yang belum terpenuhi sarana dan prasarana berupa gordin, almari dan white board	100,00
	Pengadaan mebeleur	Staf dilingkungan BKD	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin gedung kantor	100,00
	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Arsip kepegawaian yang belum terpenuhi sarana dan prasarana mebeleurnya	100,00
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Untuk Penyelenggaraan Diklat, Rapat / Pertemuan Rutin	100,00

1	2	3	4
3.	Program peningkatan disiplin aparatur		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	PNS di Lingkungan BKD	100,00
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pegawai dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Ktw. Barat	75,00
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan kegiatan program kerja dalam 1 tahun anggaran	100,00
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kegiatan dilingkungan BKD	100,00
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	laporan kegiatan pelaporan keuangan akhir tahun dalam 1 tahun anggaran	100,00
6.	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah		100
	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	PNS yang potensial dilingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	98,00
	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah	Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	100,00
	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	PNS sturktural / fungsional yang berada di 6 kecamatan	100,00
7.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		
	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	66,00
	Seleksi penerimaan calon PNS	Terpenuhinya formasi PNS pada Satuan Unit Kerja	100,00
	Penempatan PNS	Terwujudnya susunan dan jumlah PNS yang diperlukan satuan unit kerja	80,00
	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Pelayanan terhadap penyelesaian Administrasi Kepegawaian	98,00
	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Badan / Dinas / Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Sekretariat / Bidang dilingkungan BKD	100,00
	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	PNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	50,00
	Pemberian bantuan tugas belajar & ikatan dinas		36,48
	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	PNS dan Pelajar lulusan SLTA sederajat	0,00

18.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 30 Nopember 2002 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

a. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi :
 - ❖ Sub Bagian Umum;
 - ❖ Sub Bagian Keuangan; dan
 - ❖ Sub Bagian Program dan Pelaporan.

3. Kepala Bidang Diklat, membawahi :
 - ❖ Sub Bidang Diklat Penjenjangan;
 - ❖ Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional; dan
 - ❖ Sub Bidang Analisa Kebutuhan Diklat.
4. Kepala Bidang Pengolahan Data, membawahi :
 - ❖ Sub Bidang Dokumentasi;
 - ❖ Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
 - ❖ Sub Bidang Informasi.
5. Kepala Bidang Pengembangan Karier, membawahi :
 - ❖ Sub Bidang Formasi Kebutuhan;
 - ❖ Sub Bidang Jabatan Struktural; dan
 - ❖ Sub Bidang Jabatan Fungsional.
6. Kepala Bidang Mutasi, membawahi :
 - ❖ Sub Bidang Mutasi I;
 - ❖ Sub Bidang Mutasi II; dan
 - ❖ Sub Bidang Mutasi III.
7. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, membawahi :
 - ❖ Sub Bidang Pembinaan Integritas dan Etika;
 - ❖ Sub Bidang Pembinaan Fasilitas dan Kesejahteraan; dan
 - ❖ Sub Bidang Pembinaan Hak Pegawai.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu :

1. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kotawaringin Barat adalah lembaga daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat.
2. Membantu Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam seluruh tahapan proses manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban pegawai, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Fungsi Badan Kepegawaian Daerah :

1. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang Kepegawaian.
2. Perencanaan dan pengembangan Kepegawaian daerah.
3. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian daerah.
4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.
5. Pelayanan administrasi Kepegawaian dalam pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional.
6. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
8. Penyelenggaraan Administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
9. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.
10. Penyampaian Informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

c. Visi dan Misi

1. Visi

Visi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kotawaringin Barat adalah: “ **Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Berwibawa melalui Pembinaan Disiplin, Pengetahuan dan Kemampuan Aparatur Pemerintah dalam Pelaksanaan Tugasnya** “.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Kotawaringin Barat menetapkan misi, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyelenggaraan Diklat Penjurusan baik Struktural maupun fungsional/teknis.
- b. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
- c. Meningkatkan disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan Kepegawaian yang berlaku.

d. Kebijakan / Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran demi terwujudnya pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban pegawai, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian PNSD, maka ditetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan pembinaan administrasi Kepegawaian dan pembinaan kepegawaian;
- c. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah melalui Diklat Penjurangan dan Diklat Fungsional;

18.4. Jumlah Pegawai, Kulifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pegawai Struktural Dan Fungsional

a. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 3.18.4.1 sebagai berikut :

Tabel. 3.18.4.1.
Pegawai Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	Sarjana (S-2)		2	1	1	2
2	Sarjana (S-1)		14	1	1	14
3	Sarjana Muda		4	--	--	4
4	SLTA		15	--	--	15
5	SLTP		1	--	--	1
6	SD		--	--	--	--
Jumlah			37	2	2	36

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada tabel 3.18.4.2. sebagai berikut :

Tabel. 3.18.4.2.

Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Golongan I/a		--	--	--	--
	Golongan I/b		--	--	--	--
	Golongan I/c		1	--	--	1
	Golongan I/d		--	--	--	--
	Jumlah Gol I		1			1
2.	Pengatur Muda (II/a)		3	1	--	4
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)		--	--	--	--
	Pengatur (II/c)		4	--	--	4
	Pengatur Tingkat I (II/d)		1	--	--	1
	Jumlah Gol II		9	--	--	9
3.	Penata Muda (III/a)		5	--	--	5
	Penata Muda Tkt. I (III/b)		1	--	--	1
	Penata (III/c)		9	2	2	9
	Penata Tingkat I (III/d)		6	--	--	6
	Jumlah Gol III		21	2	2	20
4.	Pembina (IV/a)		3	--	--	3
	Pembina Tingkat I (IV/b)		4	--	2	2
	Pembina Utama Muda (IV/c)		1	--	--	1
	Jumlah Gol IV		6	2	1	6

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pejabat Struktural Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Jabatan Struktural dan Fungsional terdapat pada tabel 3.18.4.3. sebagai berikut :

Tabel. 3.18.4.3.
Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	Menurut Jabatan Struktural					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II b	1	1	-	-	1
	Eselon III a	6	6	-	-	6
	Eselon IV a	18	15	-	1	14
	Staf	-	-	-	-	-
	Jumlah	25	22	-	1	21
2	Menurut Jabatan Fungsional					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II b	-	-	-	-	-
	Eselon III a	-	-	-	-	-
	Eselon IV a	-	-	-	-	-
	Staf	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-

d. Jumlah Pegawai tidak tetap

No	Uraian	Jumlah
1	Penjaga Malam	1
	Total	1

18.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

a. Belanja Tidak Langsung.

Berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh alokasi anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukkan bagi Gaji Pegawai sebesar Rp. 1.140.639.675,- dan sampai akhir bulan Desember 2007 telah direalisasikan (dibelanjakan) sebesar Rp. 1.093.910.468,- dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 46.729.207,-

b. Belanja Langsung.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 98.00 % dengan rincian pada tabel 3.18.5. sebagai berikut :

Tabel 3.18.5.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Selisih Anggaran (Rp.)	Capaian Indikator Kinerja (%)	
			Fisik	Keuangan			
			(%)	(Rp.) (%)			
1.	Belanja Pegawai	1.472.266.000	100,00	1.269.621.000	95,90	202.645.000	100,00
2.	Belanja Barang Jasa	2.029.004.500	100,00	1.486.212.050	72,36	542.792.450	90,00
3.	Belanja Modal	334.812.500	100,00	289.158.380	86,38	45.614.120	100,00
	Jumlah	3.836.083.000	100,00	3.044.991.430	80,00	791.051.570	98,00

18.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Adapun proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007 adalah berdasarkan :

-) Hasil pembahasan tingkat SKPD
-) Hasil Pembahasan Panitia Anggaran Eksekutif
-) Forum SKPD
-) Rakorbang
-) Pembahasan DPRD

18.7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2007 sebagaimana pada tabel 2.2.7. berikut :

Tabel 2.2.7.
Kondisi Sarana dan Prasarana

No.	Jenis / Nama Barang	Merk / Tahun Pembuatan	Vol/Sat		Harga (Rp)	Kondisi		
						6	7	8
1	2	3	4		5	6	7	8
	<u>TANAH dan GEDUNG :</u>							
01	Tanah Perkantoran 1		2435 M2		1.132.200.000			
02	Tanah Perkantoran 2		3226 M2					
03	Gedung Kantor BKD		452 M2		539.500.000	B	--	--
04	Gedung Kantor AULA BKD		312 M2		223.900.000	B	--	--
05	Bangunan Musholla		21 M2		34.171.000	B	--	--
06	Bangunan Parkir Lahan Roda Dua		92,5 M2		10.000.000	B	--	--
07	Bangunan Lahan Parkir Roda Empat		2005	42,75 M2	15.000.000	B	--	--
08	Bangunan Kamar Mandi/WC+Tempat Wudhu+Tower Air		2005	17,8 M2	19.245.000	B	--	--
09	Bangunan Gudang dan Ruang Arsip		2006	138,6 M2	198.400.000	B	--	--
	<u>ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT :</u>							
01	Kendaraan Roda Empat	TOYOTA / KIJANG	2002	1		B	--	--
02	Kendaraan Roda 2 (dua)	HONDA / MAX	1991	1		--	KB	RB
03	Kendaraan Roda 2 (dua)	HONDA / ASTREA	1992	1		--	KB	--
04	Kendaraan Roda 2 (dua)	HONDA / WIN	1993	1		--	KB	--
05	Kendaraan Roda 2 (dua)	HONDA / WIN	1994	1		--	KB	--
06	Kendaraan Roda 2 (dua)	HONDA / ASTREA	1995	1		--	KB	--
07	Kendaraan Roda 2 (dua)	HONDA / WIN	1995	1		--	KB	--
08	Kendaraan Roda 2 (dua)	HONDA / WIN	1995	1		--	KB	--
09	Kendaraan Roda 2 (dua)	HONDA / WIN	1995	1		--	KB	--
10	Kendaraan Roda 2 (dua)	SUZUKI / A 100	1996	1		--	KB	--
11	Kendaraan Roda 2 (dua)	HONDA / ASTREA	1999	1		--	KB	--

12	Kendaraan Roda 2 (dua)	YAMAHA / JUPITER-Z	2007	1	14.900.000	B	--	--
13	Kendaraan Roda 2 (dua)	YAMAHA / JUPITER-Z	2007	1	14.900.000	B	--	--
14	Kendaraan Roda 2 (dua)	YAMAHA / JUPITER-Z	2007	1	14.900.000	B	--	--
PERALATAN KOMPUTER & JARINGAN SIMPEG :								
01	Printer	Epson	2003	5	35.000.000	B	--	--
02	Komputer	Pentium IV	2003	4	69.860.000	1	2	1
03	Komputer	Processor	2004	1	15.000.000	1	--	--
04	Notebook/Laptop	Toshiba	2004	1	17.485.000	-	1	-
05	Proyektor Infokus + Tripod	Sanyo	2004	1	25.000.000	-	1	-
06	Printer	HP Deskjet 3845	2005	1	850.000	B	--	--
07	Komputer	Pentium IV	2005	1	17.500.000	1	--	--
08	Printer	Epson	2005	1	9.000.000	--	--	1
09	Pengadaan Alat Pengolahan data dan Jaringan SIMPEG		2006	1	84.427.000	1	--	--
10	Pembuatan Jaringan Aplikasi SIMPEGDA		2006	1	96.335.000	1	--	--
11	Printer	Canon Pixma	2006	2	1.450.000	2	--	--
12	Printer	Canon	2006	1	3.500.000	1	--	--
13	Komputer Lengkap	Intel Core2 Duo	2007	2	25.000.000	2	--	--
14	Printer	Canon Pixma	2007	2	1.500.000	2	--	--
15	Pembuatan Jaringan Aplikasi Baperjakat		2007	1	44.045.880	1	--	--
16	Printer	Canon Pixma	2007	4	2.750.000	4	--	--
17	Monitor Komputer	LG	2007	1	1.237.500	1	--	--
18	Notebook/Laptop	Toshiba	2007	1	15.000.000	1	--	--
19	Scanner	Canon	2007	2	1.650.000	2	--	--
20	Monitor Komputer		2007	1	1.237.500	1	--	--
21	DVDRW		2007	1	975.000	1	--	--
22	Note Book /Laptop	Toshiba	2007	2	29.800.000	2	--	--
23	Komputer Lengkap	Intel Core2 Duo	2007	2	25.000.000	2	--	--
24	Printer	Canon Pixma	2007	1	750.000	1	--	--
25	LCD Proyektor + Tripod		2007	1	13.750.000	1	-	-
26	Finger Frint	User	2007	1	6.650.000	1	--	--
PERALATAN KANTOR :								
01	Jam Dinding	Sonata	2003	1	--	1	--	--
02	Kipas Angin Gantung	Maspion	2005	5	3.250.000	5	--	--
03	Kipas Angin Stand	Maspion	2005	5	1.750.000	5	--	--
04	Air Coditioner (AC)	Panasonic	2005	4	22.000.000	4	-	-
05	Mesin Tik	Olympia	2006	1	1.500.000	1	--	--
06	Kalkulator	Casio	2006	2	375.000	2	--	--

07	Air Coditioner (AC)	Panasonic	2006	1	5.400.000	1	--	--	
08	Jam Dinding	Mirado White	2007	3	525.000	3	--	--	
09	Mesin Tik	Olympia	2007	1	2.300.000	1	--	--	
10	Jam Dinding Sakana	Sakana	2007	2	400.000	2	--	--	
PERLENGKAPAN KANTOR :									
01	Lemari Filling	Royal	2001	1	--	--	RB	--	
02	Meja Panjang	-	2001	5	-	5	-	-	
03	Meja Panjang	-	2001	14	-	-	14	-	
04	Kursi Lipat	--	2002	100	--	35	10	55	
05	Filling Kabinet	--	2002	7	--	--	1	6	
06	Almari Filling	--	2002	2	--	--	--	2	
07	Almari Rak Terbuka	Buatan Lokal	2002	2	--	2	--	--	
08	Rak Besi	--	2002	2	--	--	--	2	
09	Meja 1/2 Biro	Buatan Lokal	2002	8	--	--	6	2	
10	Meja 1/2 Biro	Olympic	2003	1	--	--	1	--	
11	Kursi Putar Besar	--	2003	6	--	3	3	--	
12	Lemari Arsip Ordner (Geser Kiri/Kanan)	Buatan Lokal	2003	13	36.335.000	13	--	--	
13	Meja 1/2 Biro	Buatan Lokal	2003	2	--	--	1	1	
14	Kursi Putar Kecil	--	2003	1	--	--	1	--	
15	Kursi Kayu	Buatan Lokal	2003	1	--	--	1	--	
16	Meja 1/2 Biro	Olympic	2003	6	--	--	3	3	
17	Filling Kabinet	Brother	2003	2	--	--	2	--	
18	Meja 1/2 Biro	Olympic	2003	4	--	2	2	--	
19	Kursi Kayu	Buatan Lokal	2003	1	--	--	1	--	
20	Filling Kabinet	Hitachi	2003	1	--	--	1	--	
21	Almari Bupet Besar		2003	1	3.000.000	1	--	--	
22	Meja Biro Besar	Buatan Lokal	2003	2	1.750.000	1	--	1	
23	Lemari Buffet	Buatan Lokal	2003	2	3.000.000	2	--	--	
24	Brangkas		2003	1	3.500.000	1	--	--	
25	Tiang Bendera	-	2003	2	-	2	-	-	
26	Podium/Mimbar	--	2003	1	2.200.000	1	-	-	
27	Kursi	Chitose	2003	90	13.500.000	90	-	-	
28	Kursi Tamu		2003	1	3.500.000	--	--	1	
29	Sofa		2003	1	--	--	1	--	
30	Meja Biro	Olympic	2004	1	--	--	1	--	
31	Almari Filling	Royal	2004	6	11.400.000	--	4	2	
32	Meja Biro	Olympic	2004	7	--	2	5	--	
33	Filling Kabinet	Brother	2004	6	--	--	6	--	
34	Lambang Garuda		2004	2	300.000	2	--	--	
35	Gambar Presiden dan Wapres		2004	4	300.000	4	--	--	
36	Bendera Lambang Daerah		2004	1	750.000	1	-	-	
37	Papan Pengumuman		2004	1	1.500.000	1	--	--	
38	Almari Kaca 4 Pintu	Buatan Lokal	2005	4	6.000.000	4	--	--	
39	Sofa	--	2005	1	3.500.000	--	--	1	
40	Papan Tulis		2005	1	-	1	-	-	
41	Meja Biro	Olympic	2006	2	1.800.000	--	1	1	
42	Meja 1/2 Biro	Olympic	2006	4	2.900.000	4	--	--	
43	Kursi Putar Sedang	Isabel	2006	4	1.600.000	--	2	2	
44	Bendera Hias List Plang	20 lembar	2006	20	3.120.000	20	--	--	

45	Meja Biro	Buatan Lokal	2007	4	3.000.000	4	--	--	
46	Kursi Putar Sedang	Isabel	2007	8	4.000.000	5	1	2	
47	Almari Filling	Brother	2007	10	17.225.000	10	--	--	
48	Meja Rapat	---	2007	1	9.250.000	1	--	--	
49	Kursi Tamu Sofa		2007	1	3.000.000	1	--	--	
<u>PERALATAN DAPUR :</u>									
01	Kulkas	Panasonic	2003	1	2.000.000	1	--	--	
02	Dispenser		2004	1	1.500.000	1	--	--	
03	Dispenser	Sanken	2007	1	1.500.000	1	--	--	
04	Tatakan Gelas		2007	4 lsn	160.000	4	--	--	
05	Piring		2007	2 lsn	110.000	2	--	--	
06	Gelas tangkai		2007	3 lsn	195.000	3	--	--	
07	Mangkuk		2007	1 lsn	60.000	1	--	--	
08	Gelas Tamu		2007	1 lsn	200.000	1	--	--	
09	Piring Snack Kecil		2007	4 lsn	120.000	4	--	--	
<u>ALAT - ALAT STUDIO :</u>									
01	Overheat		2003	1	900.000	1		-	
02	Radi/Tape UHV	Tens	2003	1	1.200.000	-	1	-	
03	Amplifier	--	2003	1	6.500.000	1	-	-	
04	Televisi	Panasonic 14 "	2004	1	1.500.000	1	--	--	
05	Televisi	Panasonic 21 "	2004	1	3.500.000	1	--	--	
06	Parabola	Goldsat	2004	1	4.000.000	--	1	--	
08	Wireless Amplifier	Guarda	2006	1	1.700.000	1	-	-	
09	Megaphone		2006	1	750.000	1	-	-	
10	Kamera Digital	Sony	2007	1	4.500.000	1	--	--	
11	Handycam Digital	Sony	2007	1	9.000.000	1	--	--	
12	Amplifier piker Aktif	Bayer	2007	4	16.250.000	4	-	-	
13	Mixer	Behringer	2007	2	6.500.000	2	-	-	
14	Microphone	Shure	2007	2	5.000.000	2	-	-	
15	Microphone Stand/Meja	Wireless	2007	2	5.500.000	2	-	-	
16	Batteray Recharger	Konnoc	2007	8	640.000	8	-	-	
17	Charger Batteray		2007	2	180.000	2	-	-	
18	Kabel Conector Mic		2007	30 mtr	750.000	30	-	-	
19	Kabel Listrik Rol		2007	50 mtr	1.000.000	50	-	-	
20	Conector/Jack Mic		2007	8 bh	160.000	8	-	-	
<u>ALAT - ALAT KOMUNIKASI :</u>									
01	Telepon	Panasonic	2007	2	500.000	2	--	--	
02	Faximile	Panasonic	2007	1	1.500.000	1	--	--	

Keterangan :

Baik = (B)

Kurang Baik = KB)

Rusak Berat = RB)

18.8. Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan tingkat capaian kinerja yang ada secara riil masih terdapat kendala – kendala dalam pelaksanaan program kegiatan antara lain meliputi :

-) Keterbatasan personil untuk operator pengelola data kepegawaian
-) Adanya ketentuan peraturan yang sering berubah dan mendadak pemberlakuannya
-) Penjadwalan kegiatan yang terikat dengan petunjuk / ketentuan pusat
-) Adanya peraturan yang sering kali dirasakan bertentangan satu sama lain dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian (kediklatan dan pengembangan karier, UKP dan pengembangan karier)
-) Turunnya motivasi pegawai sebagai akibat adanya ketentuan yang dianggap tidak menguntungkan bagi pegawai sesuai pada point (4)
-) Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan bagi pegawai disemua tingkat dalam setiap SKPD yang mengacu pada surat edaran Bupati tentang pelimpahan wewenang penjatuhan sanksi disiplin bagi PNS

18.9. Hal lain yang perlu dilaporkan

1. Adanya pagu anggaran yang dialokasikan kepada SKPD bersifat tetap dan mengikat setiap tahun, hal tersebut sangat membatasi pengembangan penyusunan program kerja SKPD termasuk tidak bisa mengakomodir program yang ditetapkan mengacu pada Renstra dan RPJM.
2. Perlu adanya telaahan dan kajian yang mendalam terhadap usulan kebutuhan anggaran dengan mengacu pada Renstra dan RPJM maupun tupoksi SKPD (konsistensi)
3. Dengan diangkatnya tenaga honor menjadi CPNS belum bisa mengatasi masalah dalam penanganan tenaga honor mengingat masih diusulkan dan diangkatnya tenaga kontrak disetiap SKPD hal ini sangat menyulitkan bagi pengelolaan kepegawaian (Surat Edaran Gubernur melarang pengangkatan tentang tenaga kontrak) hal ini perlu mencari solusi untuk penanganan bidang – bidang yang terkait dengan pekerjaan yang memerlukan tenaga teknis spesifik (sopir, jaga malam, kebersihan kantor)

19. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri.

Pelaksana Kegiatan pada Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Kotawaringin Barat ditangani oleh Dinas Kesatuan Dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

19.1. Program Dan Kegiatan.

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas / Badan yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas/Badan Dinas Kesatuan Dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat, dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan.

Dinas Kesatuan Dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan Program - program dan Kegiatan - kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel : 3.19.1. sebagai berikut :

Tabel 3.19.1.
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FUNGSI, SUB FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Peningkatan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Fungsi : Meningkatkan SDM Anggota Hansip / Linmas. Sub Fungsi : Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelatihan anggota Hansip / Linmas di Kabupaten Kotawaringin Barat
2	Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Fungsi : Meningkatkan kerja sama dengan aparat keamanan dalam pencegahan tindak kriminal Sub Fungsi : Kerja sama dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan di wilayah Kobar	Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan pengamanan dan ketertiban dalam penanganan tindak kriminal

3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai - nilai luhur	Fungsi : Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan hidup berbangsa dan bernegara dalam wadah	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya Bangsa
		Sub Fungsi : Terpeliharanya ketertiban dan ketentraman masyarakat		
4	Fasilitas pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan Wawasan Kebangsaan	Fungsi : Untuk mengembangkan kebersamaan dan kerukunan hidup antara warga masyarakat yang memiliki kebhinekaan agama dan kepercayaan Sub Fungsi : Usaha untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan umat beragama.	Kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan	Sosialisasi antar umat beragama dan pembentukan dewan pengurus forum - forum kerukunan umat beragama
5	Peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Fungsi : Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Penyuluhan pencegahan peredaran / pengguna miras dan narkoba
		Sub Fungsi :		
		1. Penyuluhan pencegahan peredaran / pengguna miras dan narkoba		Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
		2. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi		
6	Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	Fungsi : Kesatuan bangsa dan wilayah	Peningkatan pendidikan politik masyarakat	Pendataan Organisasi LSM, Ormas, dan parpol yang akurat
		Sub Fungsi : Penunjang pembangunan politik masyarakat		
		Fungsi : Meneliti administrasi keuangan parpol	Peningkatan pendidikan politik masyarakat	Meneliti / memeriksa administrasi bantuan keuangan parpol
		Sub Fungsi : Administrasi parpol dengan baik dan tertib		
7	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap bencana	Fungsi : Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap bencana	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	Memberikan informasi dan pemantauan pencegahan / penanggulangan bencana alam
		Sub Fungsi : Penyuluhan kewaspadaan terhadap gangguan datangnya bencana		

19.2.Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam Tahun 2007 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN %
1	Program peningkatan & kenyamanan lingkungan ~ Pelatihan Anggota Hansip / Linmas	Meningkatkan SDM Anggota Hansip/Linmas	97,86
2	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal ~ Kerja sama dengan aparat keamanan dalam menangani tindak kriminal	Kerja sama dengan aparat keamanan dalam menangani tindak kriminal	97,52
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan ~ Pelatihan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya Bangsa	- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai - nilai luhur budaya bangsa - Sosialisasi forum umat beragama (Pembentukan Dewan Forum -forum Umat Beragama)	97,98 48,00
4	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) ~ Penyuluhan pencegahan peredaran pengguna miras dan narkoba ~ Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostituis	- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengguna miras dan narkoba - Peningkatan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	88,87 65,00
5	Program pendidikan politik masyarakat. ~ Monitoring, evaluasi dan pelaporan. ~ Meneliti administrasi keuangan Parpol	- Pendataan Ormas, LSM, yang akurat	91,85 100,00
6	Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam ~ Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	- Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan bencana alam	90,92

19.3.Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 30 Nopember 2002 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja.

Dinas Kesatuan Dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas/Badan Dinas Kesatuan Dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

a. Susunan Organisasi Dinas.

Struktur Organisasi Dinas Dinas Kesatuan Dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Kabag Tata Usaha, membawahi :
 - ◆ Kasubag Kepegawaian.
 - ◆ Kasubag Keuangan.
 - ◆ Kasubag Umum
 - ◆ Kasubag Perencanaan dan Program.
3. Kasubdin PUPM dan PKB , membawahi :
 - ◆ Kasi Pembinaan Ideologi dan Kesatuan Bangsa
 - ◆ Kasi Pemeliharaan Umum dan Hubungan Antar Bangsa

4. Kasubdin PHH dan PAM , membawahi :
 - ◆ Kasi Pangab dan Eksosbud
 - ◆ Kasi Pembinaan Orsospol dan Masyarakat
5. Kasubdin Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
 - ◆ Kasi Potensi dan Latihan
 - ◆ Kasi Pengerahan dan Pembinaan
 - ◆ Kasi Kesiagaan
6. Kasubdin Ketertiban Umum
 - ◆ Kasi Bimbingan dan Penyuluhan
 - ◆ Kasi Ketertiban Lingkungan
7. Kasubdin Penanggulangan Bencana (PB)
 - ◆ Kasi Pemantauan dan Investigasi
 - ◆ Kasi Rehabilitasi
 - ◆ Kasi Relokasi dan Rekonstruksi

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas/Badan.

1. Tugas

Dinas Kesatuan Dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan Bupati Kotawaringin Barat.

2. Fungsi

- a. Pembinaan Pengkoordinasian, pelaksanaan kesiagaan dan penyelamatan terhadap ancaman / bencana ;
- b. Perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan rehabilitasi relokasi dan rekonstruksi akibat bencana ;

- c. Perumusan kebijakan fasilitasi, pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik ;
- d. Perumusan dan penyiapan kebijakan, pengkajian masalah strategis daerah ;
- e. Perumusan kebijakan teknis pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah ;
- f. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan fasilitasi di bidang linmas, kesatuan bangsa dan polisi pamong praaja ;
- g. Pelaksanaan pengamanan, ketertiban, pengawasan dan penanganan bencana dan pengungsi ;
- h. Evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan fasilitasi linmas, kesatuan bangsa dan politik ;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan dinas kesatuan dan ketentraman kabupaten kotawaringin barat.

c. Visi dan Misi Dinas/Badan.

1. Pernyataan Visi

Mengantisipasi tentang suatu kondisi daerah Kotawaringin Barat di masa datang adalah yang harus di pertimbangkan dari sekarang untuk itu perlu adanya penetapan suatu visi dalam melaksanakan tugas Dinas Kesatuan dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tuntutan masyarakat mendorong Dinas Kesatuan dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerja dengan senantiasa mengutamakan perubahan kearah perbaikan yang disusun dalam tahapan terencana, konsesten dan berkelanjutan sehingga meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Adapun Visi Dinas Kesatuan dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat :

“ Terwujudnya Kesatuan dan Ketentraman Masyarakat melalui pemerintahan yang baik untuk menunjang keberhasilan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat “

2. Pernyataan Misi

Adanya yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dimana Misi Dinas Kesatuan dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

“Meningkatkan peran serta aktif Dinas Kesatuan dan Ketentraman Masyarakat dalam upaya menciptakan kondisi Daerah yang Kondusif, aman, nyaman, tertib, lancar dan maju di Kabupaten Kotawaringin Barat “

d. Kebijakan/Strategi dari Dinas/Badan.

Berdasarkan arah kebijakan umum kesatuan dan ketentraman masyarakat, maka kebijakan yang diambil pada hakekatnya adalah menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan kesatuan dan ketentraman masyarakat sehingga terjadi percepatan peningkatan kesatuan dan ketentraman seluruh lapisan masyarakat dan tercapainya kondisi lingkungan tertib dan aman.

19.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.

Jumlah Pegawai Dinas/Badan Dinas Kesatuan dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 3.19.4.1 sebagai berikut :

Tabel. 3.19.4.1.
Pegawai Menurut Pendidikan.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	S2	-	-	-	-	-
2	S1	-	11	-	-	11
3	Sarjana Muda	-	-	-	-	-
4	SLTA	-	18	-	-	18
5	SLTP	-	2	-	-	2
6	SD	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	31	-	-	31

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

Jumlah Pegawai Dinas Kesatuan dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada tabel 3.19.4.2 sebagai berikut :

Tabel. 3.91.4.2.
Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Golongan I/a	-	-	-	-	-
	Golongan I/b	-	-	-	-	-
	Golongan I/c	-	-	-	-	-
	Golongan I/d	-	-	-	-	-
	Jumlah Gol I					
2.	Pengatur Muda (II/a)	-	4	-	-	4
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	2	-	-	2
	Pengatur (II/c)	-	2	-	-	2
	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	3	-	-	3
	Jumlah Gol II	-	11	-	-	11
3.	Penata Muda (III/a)	-	4	-	-	4
	Penata Muda Tkt. I (III/b)	-	6	-	-	6
	Penata (III/c)	-	4	-	-	4
	Penata Tingkat I (III/d)	-	3	-	-	3
	Jumlah Gol III	-	17	-	-	17
4.	Pembina (IV/a)	-	3	-	-	3
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	3	-	-	3
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-
	Jumlah Gol IV	-	6	-	-	6

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah Pejabat Struktural Dinas Kesatuan dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Jabatan Struktural dan Fungsional terdapat pada tabel 3.19.4.3 sebagai berikut

Tabel. 3.19.4.3.

Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	Menurut Jabatan Struktural					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II b	-	1	-	-	-
	Eselon III a	-	6	-	-	-
	Eselon IV a	-	10	-	-	-
	Fungsional	-	-	-	-	-
	Staf	-	16	-	-	-
	Jumlah	-	33	-	-	-

19.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.

a. Belanja Tidak Langsung.

Berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 Dinas Kesatuan Dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh alokasi anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukkan bagi Gaji Pegawai sebesar Rp. 1.372.989.000,- dan sampai akhir bulan Desember 2007 telah direalisasikan (dibelanjakan) sebesar Rp. 1.077.525.210,- dengan sisa (saldo) sebesar Rp. 295.463.790,-

b. Belanja Langsung.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas/Badan Dinas Kesatuan Dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 78.48 % dengan rincian pada tabel 3.19.5. sebagai berikut :

Tabel 3.19.5.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Selisih Anggaran	Capaian Indikator Kinerja	
			Fisik	Keuangan			
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1.	Belanja Pegawai	244.316.600	96	256.157.200	87	38.159.400	96
2.	Belanja Barang Jasa	1.104.346.400	98	1.045.701.900	94	58.644.500	93
3.	Belanja Modal	186.337.000	100	182.523.000	98	3.814.000	100
	Jumlah						

19.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Adapun proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas KKM Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007 adalah berdasarkan :

-) KEP MEN NO 13 Tahun 2000
-) Program Kerja / RENSTRA
-) RKA / RENJA
-) DPA

19.7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Dinas/Badan Dinas Kesatuan dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2007 sebagaimana pada tabel 3.19.7. berikut.

Tabel 3.19.7.
Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis>Nama Barang	Merk/Tahun Pembuatan	Jumlah		Harga Sat (Rp.)	Kondisi
			Vol	Sat		
1	2	3	4	5	6	7
I	Tanah & Bangunan	1991	2006	M ²	12.950.000	Baik
1.	Tanah Bangunan/Kantor		334	M ²	400.000.000	sda
2.	Bangunan Kantor Induk	1991	72	M ²	60.000.000	sda
3.	Bangunan Kantor	1991	38	M ²	50.000.000	sda
4.	Bangunan Kantor Tambahan	2003	42	M ²	150.000	sda
5.	Bangunan Gedung Aula	1991	-	-	-	
6.	Bangunan Gedung	-	-	-	-	
7.	Bangunan Gedung	-	-	-	-	
8.	Bangunan Tempat Parkir	2007	-	-	-	
9.	Pagar Keliling	1991	-	-	14.000.000	
II	Perlengkapan Gedung Kantor					
1.	Teralis Besi Kantor	2004	-	-	-	-
2.	Horden Kantor	2007	-	-	-	-
3.	Horden Aula	2005	-	-	3.500.000	-
4.	Meja dan Kursi Kepala	2005	-	-	-	-
5.	Meja & Kursi Kabid/Sekretaris	-	-	-	-	-
6.	Meja & Kursi Kasi dan Staff	2007	-	-	-	-
7.	Meja Rapat	-	-	-	-	-
8.	Meja Kerja	2005	-	-	-	-
9.	Meubelair Ruang Pimpinan	2005	-	-	-	-
10.	Meja, Kursi Ruang Tamu	2005	-	-	4.500.000	-
11.	Lemari Besi 2 pintu	2005	-	-	1.650.000	-
12.	Tiang Bendera	2005,2007	-	-	475.000	-
13.	Kipas Angin	-	-	-	350.000	-
III	Peralatan Gedung Kantor					
1.	AC diruang Pimpinan	-	-	-	-	-
2.	Genset	2007	-	-	1.500.000	-
3.	Kulkas	-	-	-	-	-
4.	Mesin Pemotong Rumput Gendong	2006	-	-	3.500.000	-
5.	Mesin Pemotong Rumput Dorong	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
IV	Peralatan & Perlengkapan Kantor					
1.	Komputer / PC	-	-	-	-	-
2.	Note Book	-	-	-	-	-
3.	Printer	-	-	-	-	-
4.	LCD Projector	-	-	-	-	-
5.	Wireless	-	-	-	-	-
6.	GPS	-	-	-	-	-
7.	Telepon	2007	-	-	350.000	Baik
8.	Kamera	2006	-	-	1.000.000	sda
9.	Dan lain-lain		-	-	-	-
V	Kendaraan Dinas / Operasional		-	-	-	-
1.	Kendaraan Roda Empat	2003	-	-	-	sda
2.	Kendaraan Roda Dua		-	-	-	-
	© Sanex	2001	-	-	-	Sda
	© Honda Win	1995	-	-	15.000.000	sda
	© Honda Win	2001	-	-	400.000	sda
	© Suzuki TRS	1991	-	-	-	sda
	© Honda Win	1995	-	-	-	sda
	© Honda Win	1990	-	-	-	sda
	© Honda Win	2002	-	-	15.000.000	sda
	© Supra Fit	2007	-	-	15.000.000	sda
	© Supra Fit	2007	-	-	-	sda
VI	Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.		-	-	-	-
1.	Daya Listrik yang digunakan	-	-	-	-	-
VII	Rumah Jabatan/Dinas	-	-	-	-	-
1.	Luas Bangunan	-	-	-	-	-
2.	Fasilitas yang ada didalamnya.	-	-	-	-	-

19.8. Permasalahan dan Solusi.**Permasalahan :**

1. Adanya jabatan yang belum terisi sehingga mempengaruhi kelancaran tugas pokok dan fungsi
2. Kurang tenaga/sumber daya apratur yang proporsional
3. Kurangnya dana untuk menunjang peningkatan pengetahuan operator
4. Kurangnya pelatihan/pembinaan terhadap masyarakat umum untuk penanggulangan bencana
5. Kurangnya pelatihan anggota Hansip/Linmas

Solusi :

1. Pendanaan perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Perlu adanya penambahan untuk jabatan fungsional yang belum terisi sehingga tidak ada kerja rangkapan untuk memperlancar pelaksanaan tugas
3. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas
4. Perlu adanya peningkatan SDM Masyarakat melalui diklat-diklat dan pelatihan

20. Komunikasi dan Informatika.

20.1. Program Dan Kegiatan.

Bagian Telkom dan PDE Setda Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel : 3.20.1. sebagai berikut :

Tabel 3.20.1.
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
	Terlaksananya tugas penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pelayanan berita secara timbal balik	Pelayanan tarima berita secara timbal balik	Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi informasi

20.2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam Tahun 2007 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
	Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Belanja pegawai, honorarium PNS, belanja barang dan jasa, bahan pakai habis dan pemeliharaan alat alat komunikasi	Tercapainya pengelolaan keuangan daerah dengan baik (94,94)

20.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 30 Nopember 2002 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja.

Bagian Telkom dan PDE Setda Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bagian Telkom dan PDE Setda Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

a. Susunan Organisasi.

Struktur Organisasi Bagian Telkom dan PDE Setda Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

Kabag Telekomunikasi dan PDE, membawahi

- ♦ Kasubag Data Masukan
- ♦ Kasubag Pelayanan Data
- ♦ Kasubag Telekomunikasi dan Perawatan
- ♦ Kasubag Sandi

b. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Telkom dan PDE Setda Kabupaten Kotawaringin Barat

Tugas Pokok

Bagian Telekomunikasi dan PDE mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun data, pelayanan data, pengamanan telekomunikasi dan perawatan serta tata usaha sandi di lingkungan pemerintah daerah.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Bagian Telekomunikasi dan PDE Setda Kab. Kotawaringin Barat mempunyai fungsi :

1. Mencari, mengumpulkan / menghimpun, mengolah data dan informasi dari Badan, Dinas / Instansi yang ada di daerah Kotawaringin Barat
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang telekomunikasi , sandi dan PDE
3. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang telekomunikasi, sandi dan PDE serta petunjuk pemecahan masalah.
4. Menyiapkan bahan penyusunan pemecahan dan perluasan jaringan telekomunikasi Pemerintah Daerah.
5. Melakukan pencatatan segala kegiatan telekomunikasi dan persandian serta PDE.
6. Menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan telekomunikasi dan sandi Pemerintah Daerah.
7. Membantu usaha usaha pembinaan dan peningkatan kemampuan personil telekomunikasi, sandi dan PDE.
8. Melakukan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materiil telekomunikasi, sandi dan PDE.
9. Memelihara, menyimpan, mengamankan dokumen dan alat-alat telekomunikasi dan sandi serta PDE.
10. Mengamankan operasi dan keamanan seluruh jaringan telekomunikasi Pemerintah Daerah.
11. Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek dan mesin sandi serta faximile.
12. Mengatur jadwal kerja dan mengawasi kelancaran para petugas operator radio telekomunikasi sandi selama 24 jam.
13. Melakukan pencatatan/ agenda berita-berita/ radiogram, baik yang diterima maupun yang dikirim oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
14. Membantu pencatatan berita, radiogram yang bersifat rahasia yang akan dikirim memlalui hubungan persandian untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas sandi untuk disampaikan kepada pimpinan.

20.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.

Jumlah Pegawai Bagian Telkom dan PDE Setda Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 3.20.4.1 sebagai berikut :

Tabel. 3.20.4.1.
Pegawai Menurut Pendidikan.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	S2					
2	S1	3	1	1		2
3	Sarjana Muda	4	1			1
4	SLTA	10	8			8
5	SLTP					
6	SD					
	Jumlah	17	10	1		11

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

Jumlah Pegawai Bagian Telkom dan PDE Setda Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada tabel 3.20.4.2 sebagai berikut :

Tabel. 3.20.4.2.
Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Golongan I/a Golongan I/b Golongan I/c Golongan I/d					
	Jumlah Gol I					
2.	Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda Tk.I (II/b) Pengatur (II/c) Pengatur Tingkat I (II/d)		2 1 2			2 1 2
	Jumlah Gol II		5			5

3.	Penata Muda (III/a)		2			2
	Penata Muda Tkt. I (III/b)					
	Penata (III/c)		1			1
	Penata Tingkat I (III/d)		2			2
	Jumlah Gol III		5			5
4.	Pembina (IV/a)			1		1
	Pembina Tingkat I (IV/b)					
	Pembina Utama Muda (IV/c)					
	Jumlah Gol IV			1		1

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah Pejabat Struktural Bagian Telkom dan PDE Setda Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Jabatan Struktural dan Fungsional terdapat pada tabel 3.20.4.3 sebagai berikut :

Tabel. 3.20.4.3.
Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	Menurut Jabatan Struktural					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II	-	-	-	-	-
	Eselon III	-	-	-	-	-
	Eselon IV	-	-	-	-	-
	Staf	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-

20.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.

a. Belanja Tidak Langsung.

Alokasi anggaran belanja tidak langsung (gaji pegawai) Bagian Telkom dan PDE Setda Kabupaten Kotawaringin Barat berada di anggaran belanja tidak langsung Setda Kab. Kotawaringin Barat.

b. Belanja Langsung.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Telkom dan PDE Setda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 97,64 % dengan rincian pada tabel 3.20.5. sebagai berikut :

Tabel 3.20.5.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Selisih Anggaran (Rp.)	Capaian Indikator Kinerja (%)
			Fisik (%)	Keuangan (Rp.)		
1.	Belanja Pegawai					
	- Honorarium PNS	39.970.000	100	39.970.000	0	
2.	Belanja Barang Jasa					
	- Belanja bhn Pakai Habis	35.030.000	94,94	33.260.000	1.770.000	
3.	Belanja Modal					
	Jumlah	75.000.000		73.230.000	1.770.000	97,64

20.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) & Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Adapun proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bagian Telkom dan PDE Setda Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007 adalah berdasarkan :

-) SKPD Bagian Telkom dan PDE Setda Kabupaten Kotawaringin Barat
-) Forum SKPD
-) Musrenbang Kabupaten

5.8. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Dinas/Badan Bagian Telkom dan PDE Setda Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2007 sebagaimana pada tabel 3.20.7. berikut.

Tabel 3.20.7.
Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis>Nama Barang	Merk/Tahun Pembuatan	Jumlah		Harga Sat (Rp.)	Kondisi
			Vol	Sat		
1	2	3	4	5	6	7
I	Perengkapan Gedung Kantor					
1.	Meja & Kursi Kabid/Sekretaris		1			rusak
2.	Meja & Kursi Kasi dan Staff		15			
3.	Meja, Kursi Ruang Tamu	2001	1			
4.	Lemari Besi 2 pintu	2001	2			
5.	Rak Arsip	2006	2			
6.	Kipas Angin	2005	3			
II	Peralatan Gedung Kantor					
1.	AC diruang Pimpinan	Panasonic				1 rsk
2.	AC diruang Sandi	2005	1			
III	Peralatan & Perlengkapan Kantor					Baik Baik
1.	Komputer / PC	Intel/ 2003	4			
2.	Printer	Epson/03	2			
3.	Telepon	P.sonic/05	2			
4.	Radio SSB	Yaesu/2005	1			
IV	Kendaraan Dinas / Operasional					
1.	Kendaraan Roda Empat		1			
2.	Kendaraan Roda Dua		1			
V	Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.					
1.	Daya Listrik yang digunakan		2200			

B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. Perikanan dan Kelautan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23 seri D) dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : SB.3/TU.690/2006.K Tanggal 7 Oktober 2006 tentang Uraian Tugas Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Urusan Pilihan sesuai dengan tupoksi sebagai berikut :

1.1. Program Dan Kegiatan

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas/Badan yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Perikanan dan Kelautan, dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2007.

Dinas Perikanan dan Kelautan pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan 12 (*dua belas*) program dan 34 (*tiga puluh lima*) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel : 3.b.1.1. sebagai berikut :

Tabel 3.b.1.1
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsí	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Pembangunan Sector Peratanian Dalam Arti Luas	Fungsí : Ekonomi Sub fungsís : Kelautan dan Perikanan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat ▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik ▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional ▪ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ▪ Penyediaan Alat Tulis Kantor ▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ▪ Penyediaan Makanan dan Minuman ▪ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional ▪ Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ▪ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ▪ Pengadaan Mebeleur ▪ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ▪ Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ▪ Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor ▪ Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
			Peningkatan Disiplin Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
			Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan dan Pelatihan Formal

1	2	3	4	5
2.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Fungsi : Ekonomi Sub Fungsi : Perikanan dan Kelautan	<p>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>Pengembangan Budidaya Perikanan</p> <p>Pengembangan Perikanan Tangkap</p> <p>Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</p> <p>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan</p> <p>Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ▪ Penyusunan laporan keuangan semesteran ▪ Penyusunan laporan keuangan akhir tahun ▪ Pendampingan pada kelompok tani pem-budidaya ikan ▪ Pembinaan dan pengembangan perikanan ▪ Pembangunan tempat pelelangan ikan ▪ Rehabiltasi sedang/berat tempat pelelangan ikan ▪ Peningkatan perikanan tangkap ▪ Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan ▪ Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir ▪ Pembentukan kelompok masyarakat pengamanan sumberdaya kelautan ▪ Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

1.2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam Tahun 2007 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat ▪ Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan Listrik ▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perzinan Kendaraan Dinas/ Operasional ▪ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ▪ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ▪ Penyediaan Alat Tulis Kantor ▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terkirimnya surat beserta lampirannya 	95,83
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbayarnya rekening listrik, air, dan telepon untuk keperluan dinas 	100
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbayarnya KIR mobil dan pajak mobil dinas kantor 	0
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbayarnya pajak kendaraan roda 4 (mobil) 	50
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbayarnya pajak kendaraan roda 2 (motor) 	14
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya tenaga administrasi keuangan 	100
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya jasa transaksi keuangan 	100
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya peralatan kebersihan kantor 	100
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya alat tulis untuk kegiatan kantor 	100
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 	100
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya komponen listrik dan elektronik untuk kantor 	100		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya mesin tik untuk keperluan kantor 	100		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya komputer untuk keperluan kantor 	100		

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
2.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Makanan dan Minuman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai 	100
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya makanan dan minuman rapat 	25
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 	100
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peingkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya kendaraan operasional dinas 	100
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya UPS (Penyimpan Arus) 	100
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya Filling Kabinet 	100
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya Sound System 	100
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Mebeleur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya mebeleur untuk perlengkapan kantor 	100
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpeliharanya gedung kantor, BBI, BBU dan PPI 	100
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpeliharanya motor, mobil, speed boad dan kelotok 	91
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpenuhiya keperluan akan BBM dan pelumas untuk mobil, motor, speed boad dan kelotok 	91
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpeliharanya peralatan gedung kantor 	88
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpeliharaan mebeleur kantor 	100	

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 	86
4.	Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemulangan Pegawai Yang Pensiun 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpenuhinya kesejahteraan pegawai yang pensiun 	100
5.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan dan Pelatihan Format 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlatihnya pegawai pada Dinas Perikanan dan Kelautan 	80
6.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Inerja dan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ▪ Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran ▪ Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD ▪ Tersusunnya laporan keuangan semesteran ▪ Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 	100 100 100
7.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbuatnya laporan program PEMP dalam bentuk VCD ▪ Terlaksananya sosialisasi program PEMP ▪ Terlaksananya Sosialisasi DAI Pesisir ▪ Tersedianya alat tangkap jaring kepiting/rajungan ▪ Tersedianya alat tangkap jaring kantong benang ▪ Tersedianya alat tangkap jala ▪ Tersedianya alat tangkap jaring udang 3 lapis ▪ Terlaksananya Munas Jempi 	100 100 100 100 100 100 100

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
8.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan Kelompok Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 	▪ Terlaksananya pengawasan SDI dan Kelautan	113
		▪ Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan sumberdaya ikan	25
		▪ Tersedianya alternatif yang dapat dikembangkan	100
		▪ Tersedianya alat tangkap jaring kantong udang	100
9.	Pengembangan Budidaya Perikanan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan ▪ Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 	▪ Terlaksananya pembenihan ikan mas, nila dan gurami	87
		▪ Terlaksananya pembenihan udang windu	33
		▪ Tersedianya peralatan pembenihan BBI dan BBU	100
		▪ Tersedianya saluran tersier tambak rakyat di Desa Sungai Bakau	100
		▪ Tersedianya saluran tersier tambak rakyat di Desa Tanjung Putri	100
		▪ Terbangunnya rumah kepala BBU	100
10.	Pengembangan Perikanan Tangkap <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan ▪ Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan ▪ Peningkatan Perikanan Tangkap 	▪ Terbangunnya dermaga tambat kapal ikan tahap I	100
		▪ Tersedianya pabrik es lengkap	100
		▪ Tersedianya alat tangkap jaring hijau	100
		▪ Tersedianya alat tangkap jaring insang	100
		▪ Tersedianya kelotok	100
		▪ Tersedianya bahan kimia untuk pengujian mutu	100
11.	Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 	▪ Tersedianya buku peluang investasi	100
		▪ Tersedianya brosur	100
		▪ Tersedianya alat tangkap jaring kepiting	100

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
12.	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya alat laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan 	100

1.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perikanan dan Kelautan adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan adalah :

a. Susunan Organisasi Dinas.

Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Kabag Tata Usaha, membawahi :
 - ♦ Kasubag Umum.
 - ♦ Kasubag Keuangan.
 - ♦ Kasubag Kepegawaian.
 - ♦ Kasubag Perencanaan.

3. Kasubdin Bina Produksi dan Prasarana, membawahi :
 - ♦ Kasi Sarana Produksi.
 - ♦ Kasi Budidaya Ikan.
 - ♦ Kasi Prasarana Budidaya Ikan dan Penangkapan Ikan.
 - ♦ Kasi Pembinaan Penangkapan Ikan.
4. Kasubdin Bina Usaha Tani/Nelayan, membawahi :
 - ♦ Kasi Pembinaan Usaha dan Perijinan.
 - ♦ Kasi Pengolahan dan Pembinaan Mutu.
 - ♦ Kasi Promosi dan Pemasaran.
 - ♦ Kasi Pemberdayaan Lembaga, Tenaga dan Sarana.
5. Kasubdin Bina Pengawasan dan Perlindungan SDI, membawahi :
 - ♦ Kasi Pembinaan SDI dan Kelautan.
 - ♦ Kasi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.
 - ♦ Kasi Konservasi dan Pengawasan Perairan.
 - ♦ Kasi Penelitian dan Pemetaan Wilayah Air.
6. Kasubdin Sumberdaya Kelautan, membawahi :
 - ♦ Kasi Pembinaan dan pengembangan Wilayah Pesisir.
 - ♦ Kasi Pembinaan Kaji Terap Teknologi Perikanan.
 - ♦ Kasi Standarisasi Alat/Kapal Penangkap Ikan.
 - ♦ Kasi Pembinaan Pemukiman Nelayan dan Penanaman Modal.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) :
 - ♦ Balai Benih Ikan (BBI) di Pinang Merah
 - ♦ Balai Benih Udang (BBU) di Sungai Bakau
 - ♦ Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kumai

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan.

Tugas pokok Dinas Perikanan dan Kelautan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis serta menyelenggarakan administrasi umum dan teknis dibidang perikanan dan kelautan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :

1. Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perikanan dan kelautan.
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perikanan dan kelautan.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
5. Pelaksanaan pengkajian teknologi anjuran ditingkat usaha tani.
6. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas.
7. Pelaksanaan administrasi umum dari teknis.

c. Visi dan Misi Dinas Perikanan dan Kelautan.

Visi :

"Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Yang Lestari dan Berkelanjutan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat "

Misi :

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Masyarakat Pesisir Lainnya.
2. Peningkatan peranan sumberdaya perikanan dan kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
3. Pemeliharaan dan peningkatan daya dukung serta kualitas lingkungan perairan tawar, pesisir dan perairan laut.
4. Peningkatan kecerdasan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan.
5. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

d. Kebijakan dan Strategi dari Dinas Perikanan dan Kelautan.

Kebijakan Internal :

1. Memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
2. Mengembangkan penelitian dan IPTEK kelautan dan perikanan.
3. Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perikanan.
4. Mengembangkan sistem informasi perikanan dan kelautan.

Kebijakan Eksternal :

1. Menggalakkan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
2. memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap secara efisien, lestari dan berbasis kerakyaran.
3. Mengembangkan dan memperkuat industri penanganan dan pengolahan serta pemasaran hasil.
4. mengembangkan alternatif usaha masyarakat nelayan dan masyarakat pengguna sumberdaya perikanan dan kelautan.
5. Memelihara keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan serta ekosistem pesisir, lautan dan perairan tawar.

Strategi :

- Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan secara bertanggung jawab.
- Peningkatan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berorientasi pasar.
- Peningkatan kapasitas produksi.
- Peningkatan kemampuan masyarakat nelayan dan pembudidayaan ikan dan kapasitas pendukung produksi.
- Peningkatan sumberdaya manusia dan alternatif usaha yang berteknologi.
- Peningkatan kemampuan usaha kecil.
- Peningkatan mutu dan nilai tambah.
- Peningkatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sistem MCS.
- Pengembangan partisipasi masyarakat dalam menunjang pengawasan.
- Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana perikanan budidaya, penangkapan ikan, pengolahan ikan dan pengawasan.

1.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 3.b.1.4.1 sebagai berikut :

Tabel. 3.b.1.4.1
Pegawai Menurut Pendidikan.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	S-2	-	2	-	-	2
2.	S-1	-	20	-	-	20
3.	Sarjana Muda	-	2	-	-	2
4.	SLTA	-	7	-	-	7
5.	SLTP	-	-	-	-	-
6.	SD	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	31	-	-	31

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada tabel 3.b.1.4.2 sebagai berikut

Tabel. 3.b.1.4.2
Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Golongan I	-	-	-	-	-
	Jumlah Golongan I	-	-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (II/a)	-	5	-	-	5
	Pengatur Muda Tk. I (II.b)	-	-	-	-	-
	Pengatur (II/c)	-	-	-	-	-
	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	2	-	-	2
	Jumlah Golongan II	-	7	-	-	7
3.	Penata Muda (III/a)	-	8	-	-	8
	Penata Muda Tk. I (III/b)	-	-	-	-	-
	Penata (III/c)	-	5	-	-	5
	Penata Tingkat I (III/d)	-	5	-	-	5
	Jumlah Golongan III	-	18	-	-	18
4.	Pembina (IV/a)	-	3	-	-	3
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	2	-	-	2
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	1	-	-	1
	Jumlah Golongan IV	-	6	-	-	6

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perikanan dan Kelautan menurut Jabatan Struktural dan Fungsional terdapat pada tabel 3.b.1.4.3 sebagai berikut :

Tabel. 3.b.1.4.3
Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	<u>Menurut Jabatan Struktural</u>					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II b	-	1	-	-	1
	Eselon III a	-	5	-	-	5
	Eselon IV a	-	10	-	-	10
	Staf	-	15	-	-	15
	Jumlah	-	31	-	-	31
2.	<u>Menurut Jabatan Fungsional</u>					
	Jumlah	-	-	-	-	-

d. Jumlah Pegawai Tidak Tetap.

No	Uraian	Jumlah
1.	Tenaga Kontrak	16
Total		16

1.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.

1. Belanja Tidak Langsung.

Berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 Dinas Perikanan dan Kelautan, memperoleh alokasi anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukkan bagi Gaji Pegawai sebesar Rp. 1.460.433.450,- dan sampai akhir bulan Desember 2007 telah direalisasikan (dibelanjakan) sebesar Rp. 787.050.467,- dengan sisa (saldo) sebesar Rp. 673.382.983,-

2. Belanja Langsung.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 96,91 % dengan rincian pada tabel 3.b.1.5. sebagai berikut :

Tabel 3.b.1.5.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No.	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Selisih Anggaran (Rp)	Capaian Indikator Kinerja (%)
			Fisik (%)	Keuangan			
			(Rp)	(%)			
1.	Belanja Pegawai	555.734.400	100	477.699.300	85,96	78.035.100	100
2.	Belanja Barang dan Jasa	955.965.600	90	896.075.116	93,74	59.890.484	90
3.	Belanja Modal	3.774.300.000	100	3.748.845.000	99,33	25.455.000	100
JUMLAH		5.286.000.000	96,67	5.286.000.000	96,91	163.380.584	97

1.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2007 yang dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Adapun proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan pada tahun 2007 adalah berdasarkan

-) Rencana Strategis (Renstra).
-) Rencana Kerja (Renja).
-) Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
-) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
-) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

1.7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan sampai dengan tahun 2007 sebagaimana pada tabel 3.b.1.7. berikut.

Tabel 3.b.1.7.
Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis>Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah		Harga Sat (Rp.)	Kondisi
			Vol	Sat		
I	Tanah dan Bangunan					
1	Tanah Bangunan/Kantor	1989	5	buah	-	Baik
2	Bangunan Kantor Induk	1994/1995	1	buah	-	Baik
3	Bangunan Kantor BBI	1995 - 1999	90	M ²	-	Baik
4	Bangunan Kantor BBU	2005/2006	60	M ²	-	Baik
5	Bangunan Kantor PPI	2005/2006	1	Buah	-	Baik
6	Bangunan Gedung Aula	1995 - 1999	1	Buah	-	Baik
7	Bangunan Gedung BBU	2005/2006	183,3	M ²	-	Baik
8	Bangunan Gedung BBI	1994/1995	729,5	M ²	-	Baik
9	Bangunan Tempat Parkir	2006	1	Buah	-	Baik
10	Pagar Keliling Kantor Dinas	1994/1995	115	M'	-	Baik
11	Pagar PPI	2006	1	Buah	-	Baik
12	Pagar BBI (Kawat Harmonika)	1997	800	M'	-	Baik
II	Perlengkapan Gedung Kantor					
1	Teralis Besi Kantor	2006	35	M'	175.000	Baik
2	Hordeu Kantor	2006	35	M'	100.000	Baik
3	Meja dan Kursi Kepala	2005	1	Pasang	-	Baik
4	Meja dan Kursi Kasubdin	2000	5	Pasang	-	Baik
5	Meja dan Kursi Kasi dan Staf	1995	23	Pasang	-	Baik
6	Meja Rapat	2006	1	Buah	-	Baik
7	Mebeleur Ruangan Pimpinan	2005	1	Set	-	Baik
8	Meja, Kursi Ruang Tamu	2000	2	Set	-	Baik
9	Kursi Lipat	2005/2006	59	Buah	-	Baik
10	Filling Kabinet	2000	9	Buah	-	Baik
11	Rak Arsip/Lemari Kayu	2000	9	Buah	-	Baik
12	Tiang Bendera	1994/1995	1	Buah	-	Baik
13	Kipas Angin	1995 - 2006	11	buah	-	Baik
III	Peralatan Gedung Kantor					
1	AC Diruang Pimpinan	2005	1	Buah	-	Baik
2	AC Diruang Sub Dinas	2006	5	Buah	-	Baik
3	Genset	2006	2	Buah	-	Baik
4	Kulkas	2005	1	Buah	-	Baik
5	Mesin Potong Rumput Gendong	2005	2	Buah	-	Baik
6	Sound Sistem	2007	1	Set	-	Baik
IV	Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
1	Komputer / PC	2004 - 2006	13	Unit	-	Baik
2	Note Book	2007	1	Unit	-	Baik
3	Printer	2004 - 2006	9	Buah	-	Baik
4	Telepon	2000	1	Buah	-	Baik
5	Faximile	2000	1	Buah	-	Baik
V	Kendaraan Dinas/Operasional					
1	Kendaraan Roda Empat		2	Buah	-	Baik
2	Kendaraan Roda Dua		7	Buah	-	Baik
IV	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
1	Daya listrik yg digunakan untuk Kantor Dinas, BBI dan BBU		20.500	volt	-	Baik

2. Pertanian dan Peternakan

2.1. Program Dan Kegiatan

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun misi dinas yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat, dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan Tahun 2007.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun anggaran 2007 melaksanakan 5 (lima) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel : 3.b.2.1 sebagai berikut :

Tabel 3.b.2.1
Prioritas pembangunan, Program dan Kegiatan.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura meliputi padi, palawija, sayuran dan buah-buahan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.	Ekonomi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Progran peningkatan sarana prasarana Aparatur	1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pengadaan Meubelair 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional 5. Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2	Peningkatan populasi dan produksi peternakan meliputi peternak besar, ternak kecil dan unggas melalui penyediaan bibit ternak, pengendalian reproduksi dan peningkatan kelahiran.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pertanian/ Penyuluhan	2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	7. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 8. Penyuluh, Pedamping Petani Dan Pelaku Agribisnis
3	Peningkatan kemandirian petani melalui kelembagaan penyuluhan, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pelaku usaha pertanian dan peternakan		3. Program Peningkatan Produksi Pertanian	9. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian 10. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian
4	Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendorong perkembangan agribisnis di pedesaan.		4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	11. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 12. Pengawasan Perdagangan Ternak 13. Pendistribusian Bibit Ternak pada Masyarakat 14. Pengembangan Agribisnis Peternakan 15. Pelaksanaan Dana Penyesuaian

2.2. Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan

Dalam tahun 2007 tingkat pencapaian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Sasaran kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR		
	1. Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya gedung kantor	85
	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan Kantor	100
	3. Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair	100
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	100
	5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100
	6. Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung/kantor	100
2	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI		
	1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis	100
	2. Penyuluh, Pedamping Petani Dan Pelaku Agribisnis	Tersedianya penyuluh, Pendamping petani dan Pelaku Agribisnis	100
3	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN		
	1. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian	100
	2. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	Terlaksananya Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	100
4	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK		
	1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	100
	2. Pengawasan Perdagangan Ternak	Terlaksananya Pengawasan Perdagangan Ternak	100
5	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN		
	1. Pendistribusian Bibit Ternak pada Masyarakat	Terlaksananya Pendistribusian Bibit Ternak pada Masyarakat	97
	2. Pengembangan Agribisnis Peternakan	Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Peternakan	90
		Jumlah	94

2.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundangan –undangan yang berlaku.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program – program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun Susunan Organisasi, tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

a. Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan kabupaten Kotawaringin Barat.

Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi :
 -) Kasubag Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana.
 -) Kasubag Keuangan.
 -) Kasubag Umum
 -) Kasubag Perlengkapan.
3. Kepala Sub Dinas Produksi, membawahi :
 -) Kasi Pengembangan Lahan, Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 -) Kasi Benih dan Bibit.
 -) Kasi Pengkajian Teknologi dan Iklim.
 -) Kasi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.
 -) Kasi Sarana dan Prasarana.

4. Kepala Sub Dinas Usaha Tani, membawahi :
 -) Kasi Pemasaran Hasil.
 -) Kasi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
 -) Kasi Pelayanan dan Bimbingan usaha.
 -) Kasi Permodalan dan Perkreditan.
 -) Kasi Sumber Daya Manusia.
5. Kepala Sub Dinas Perlindungan Tanaman, membawahi :
 -) Kasi Monitoring Hama Penyakit Tanaman
 -) Kasi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman.
 -) Kasi Pestisida.
 -) Kasi Karantina
6. Kepala Sub Dinas Kesehatan Hewan, membawahi :
 -) Kasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
 -) Kasi Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 -) Kasi Obat dan Kesehatan Hewan.
 -) Kasi Pengamatan dan Penyidikan Hewan.
7. Kepala Sub Dinas Bina Program, membawahi :
 -) Kasi Perencanaan.
 -) Kasi Data dan Statistik.
 -) Kasi Perumusan dan Pengendalian.
 -) Kasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan..
8. Kepala Sub Dinas Ketahanan Pangan, membawahi :
 -) Kasi Bimas Intensifikasi.
 -) Kasi Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan
 -) Kasi Penganekaragaman Pangan dan Gizi.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.

1. Tugas Pokok

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No.18 tahun 2002, Tugas Pokok Dinas Pertanian dan Peternakan adalah melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kotawaringin Barat, menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki fungsi :

- Z Melaksanakan pembinaan teknis dibidang pertanian dan peternakan.
- Z Menyiapkan bahan perijinan dan pembinaan usaha pertanian dan peternakan.
- Z Penyelenggaraan penyuluhan.
- Z Pembinaan pengamanan teknis.
- Z Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi.

c. Visi dan Misi Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Visi

Terwujudnya petani mandiri untuk pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

2. Misi.

- *.Mewujudkan birokrasi pertanian yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi.
- * Mewujudkan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan serta penganekaragaman konsumsi pangan.
- * Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan petani.
- * Memfasilitasi pelaku usaha pertanian dan peternakan melalui pengembangan teknologi, pembangunan sarana /prasarana, pembiayaan, pemasaran dan kebijakan pendukung.
- * Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong tumbuh dan kembangnya kelembagaan petani.
- * Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendorong perkembangan agribisnis di pedesaan.

c. Kebijakan/Strategi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Penguatan kelembagaan penyuluhan melalui peningkatan peran dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), PPL, peningkatan kemampuan kelompok tani dan kelompok usaha lainnya.
2. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura meliputi padi, palawija, sayuran dan buah-buahan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
3. Peningkatan populasi dan produksi ternak meliputi ternak besar, ternak kecil dan unggas melalui penyediaan bibit ternak, pengendalian reproduksi dan peningkatan kelahiran.
4. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan peternakan melalui penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan sistem pemasaran.
5. Pengamanan produksi melalui pengendalian organisme pengganggu tanaman, antisipasi kekeringan dan banjir, menekan angka kematian ternak dan pemberantasan penyakit ternak/hewan menular.
6. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendorong perkembangan agribisnis di pedesaan.

2.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.**a. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan**

Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pendidikan pada tabel 3.b.2.4.1 sebagai berikut :

Tabel 3.b.2.4.1

Pegawai Menurut Pendidikan

No	Uraian	Formasi	Posisi awal	Tambahan	Kurang	Posisi akhir
.						
1.	Pasca Sarjana (S-2)	-	3	-	1	2
2.	Sarjana (S-1)	29	51	-	2	49
3.	D. IV	-	16	-	-	16
4.	D. III	-	39	-	-	39
5.	D-I / SLTA	-	52	-	-	52
6.	SLTP	-	-	-	-	-
7.	SD	-	1	-	-	1
	Jumlah	29	161	-	3	159

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada table 3.b.2.4.2 sebagai berikut :

Tabel 3.b.2.4.2.

Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No	Uraian	Formasi	Posisi awal	Tambahan	Kurang	Posisi akhir
1	Golongan I/a	-	-	-	-	-
	Golongan I/b	-	-	-	-	-
	Golongan I/c	-	-	-	-	-
	Golongan I/d	-	-	-	-	-
	Jumlah Gol I	-	-	-	-	-
2	Golongan II/a	-	13	-	-	13
	Golongan II/b	-	4	-	-	4
	Golongan II/c	-	10	-	-	10
	Golongan II/d	-	15	-	-	15
	Jumlah Gol II	-	42	-	-	42
3	Golongan III/a	29	49	-	-	49
	Golongan III/b	-	25	-	-	25
	Golongan III/c	-	25	-	-	25
	Golongan III/d	-	11	-	-	11
	Jumlah Gol III	-	110	-	-	110
4	Golongan IV/a	-	3	-	-	3
	Golongan IV/b	-	3	-	-	3
	Golongan IV/c	-	1	-	-	1
	Jumlah Gol IV	29	7	-	-	7

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pejabat Struktural Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Jabatan Struktural dan Fungsional , terdapat pada tabel 3.b.2.4.3 sebagai berikut :

Tabel 3.b.2.4.3.
Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Uraian	Formasi	Posisi awal	Tambah	Kurang	Posisi akhir
1	Menurut Jabatan Struktural					
	Eselon I					
	Eselon II b	1	1	-	-	1
	Eselon III a	7	7	-	-	7
	Eselon IV a	30	27	-	3	27
	Staf	12	40	-	12	40
	Jumlah	50	75	-	15	75
2	Menurut Jabatan Fungsional					
	Fungsional	34	84	-	34	84
	Jumlah	34	84	-	34	84

c. Jumlah Pegawai Tidak Tetap.

No	Uraian	Jumlah
1.	Pegawai Harian Lepas (Kontrak)	8
	Total	8

2.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.

a. Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 Dinas pertanian dan Peternakan memperoleh alokasi anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukan bagi Gaji pegawai sebesar Rp. 4.423.542.858,- dan sampai akhir bulan desember 2007 telah direalisasikan (dibelanjakan) sebesar Rp4.171.669.671,- dengan sisa (saldo) sebesar Rp. 251.873.187,-

b. Belanja Langsung.

Realisasi Anggaran belanja langsung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas pertanian dan Peternakan kabupaten kotawaringin Barat tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat Kinerja0 secara akumulatif dicapai sebesar 92 % dengan rincian pada table 3.b.2.5. sebagai berikut

Tabel 3.b.2.5
Realiasasi Anggaran Belanja Langsung

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Selisih anggaran	Capaian Indikator Kinerja	
			Fisi k	Keuangan			
1	2	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Belanja Pegawai	512.800.900	89	444.305.500	87	68.495.400	89
	- Honorarium PNS	215.895.000	100	215.725.000	100	170.000	100
	- Honorarium Non PNS	233.905.900	100	177.491.000	89	25.617.400	100
	- Uang Lembur	3.000.000	30	0	-	3.000.000	65
	- Belanja Kurssus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pns	60.000.000	60	20.292.000	34	39.708.000	90
2.	Belanja Barang dan Jasa	3.590.662.100	99	3.169.927.863	88	420.734.237	99
	- Belanja bahan habis pakai	200.453.000	100	195.155.400	97	5.2976.600	100
	- Belanja bahan /Material	1.704.574.000	100	1.566.060.500	92	138.513.500	100
	- Belanja jasa kantor	124.084.500	90	81.856.588	66	42.227.912	90
	- Belanja Perawatan kendaraan bermotor	19.250.000	100	19.100.000	99	150.000	100
	- Belanja Cetak dan Perdagangan	51.567.600	100	50.784.400	98	783.200	100
	- Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/ Parkir	41.750.000	100	35.750.000	86	6.000.000	100
	- Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.620.000	100	3.620.000	100	0	100
	- Belanja Makanan dan Minuman	314.242.000	100	288.230.000	92	26.012.000	100
	- Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	45.500.000	100	45.156.000	99	344.000	100
	- Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	13.000.000	100	12.400.000	95	600.000	100
	- Belanja Perjalanan Dinas	707.450.000	95	564.841.000	80	142.609.000	95
	- Belanja Pemulangan Pegawai	41.000.000	100	16.000.000	39	25.000.000	100
	- Belanja Jasa Pihak Ketiga	116.310.000	100	114.060.000	98	2.250.000	100
	- Bilanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.000.000	100	1.000.000	100	100.000	100
	- Belanja Pemeliharaan Komputer	7.500.000	100	7.500.000	100	500.000	100
	- Belanja Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air	7.500.000	100	7.500.000	100	0	100
	- Belanja pemeliharaan jar. listrik & tlp	1.500.000	100	1.500.000	100	0	100
	- Belanja pemeliharaan kontruksi/ pembelian bangunan.	33.750.000	100	33.750.000	100	0	100
3.	Belanja Modal	716.537.000	93	626.765.653	87	89.771.347	93
	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.500.000	100	7.500.000	100	0	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	- Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.250.000	100	5.250.000	100	0	100
	- Belanja Modal Pengadaan Komputer	45.000.000	100	44.800.000	100	200.000	100
	- Belanja Modal Pengadaan mebeulair	11.400.000	40	0	0	11.400.000	40
	- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	30.000.000	100	29.880.000	100	120.000	100
	- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	15.200.000	95	12.000.000	79	3.200.000	95
	- Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	2000.000.000	100	198.850.000	99	11.150.000	100
	Jumlah	4.261.202.000	91	3.786.849.388	90	474.352.612	88

2.6. Proses Perencanaan Pembangunan.

Proses Perencanaan pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Adapun proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007 adalah berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kab. Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000.
2. Peraturan Daerah Kab. Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000
3. Peraturan Daerah Kab. Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2002
4. Visi Misi Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kotawaringin Barat.
5. Kebijakan dan Program Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kotawaringin Barat.

2.7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan oleh dinas Pertanian dan Peternakan sampai dengan tahun 2007 sebagaimana pada tabel 3.b.2.7 berikut.

Tabel 3.b.2.7
Kondisi sarana dan Prasarana

No	Jenis>Nama Barang	Merk/Tahun Pembuatan	Jumlah		Harga Satuan (Rp)	Kondisi
			Vol	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Tanah dan Bangunan		16	Persil	8.374.000.000	B
1.	Tanah Bangunan /Kantor					
2.	Bangunan Kantor Induk	1997/2004	2	Unit	616.400.000	B
3.	Bangunan kantor BIPP/BPP	2006/2007	7	unit	904.150.000	B
4.	Bangunan Laboratorium HPT	2002	1	Unit	30.100.000	B
5.	Bangunan RPH	2002	1	Unit	141.600.000	B
6.	Bangunan Pos Klinik Hewan	2007	1	Unit	93.625.000	B
7.	Bangunan Gdg Alsintan/benih	2006	2	Unit	358.200.000	B
8.	Bangunan Ktr Sentra Ayam Buras	1987	1	unit		RB
9.	Bangunan Gdg Penggilingan padi	1983	2	Unit		RB
10.	Lantai Jemur	2005	2	Unit	76.800.000	B
11.	Bangunan Tempat Parkir	2006	1	Unit		B
12.	Pagar Keliling					
13.	Bangunan Ktr Balai Benih	2006	1	Unit	133.200.000	B
14.	Bangunan Ktr Eks Bimas	1968	1	Unit	-	RB
II.	Perlengkapan Gedung Kantor					
1.	Meja Kursi kepala	1995	2	unit	2.100.000	B
2.	Meja Kasubdin	1993	7	Buah	2.100.000	RR
3.	Meja & Kursi kasi dan staf	1994	70	Buah	10.150.000	RR
4.	Meja Rapat	2004	1	Buah	500.000	B
5.	Meja Kasi & Staf	2006	25	Buah	19.500.000	B
6.	Meubelair Ruang pimpinan	2001	1	unit	1.800.000	B
7.	Meja Kursi Ruang Tamu	2001	1	Set	1.500.000	KB
8.	Kursi Lipat	2006	35	Buah	6.650.000	B
9.	Filing Kabinet	1990/2001	5	Buah	4.300.000	B & R
10.	Lemari Besi 2 pintu	2002	1	Unit	1.600.000	RR
11.	Tiang Bendera	2006	1	Buah		B
III	Peralatan Gedung Kantor					
1.	AC diruang Pimpinan		1	Unit		
2..	Kulkas	2004/2006	5	Unit	5.940.000	B
IV	Peralatan & Perlengkapan Kantor					
1.	Komputer/PC	1999/2007	9	Unit	120.000.000	B/KB
2.	Printer		9	Unit		B
3.	LCD Projektor	2007	1	Unit	15.000.000	B
4.	Wireless	1999	1	Buah	1.500.000	B
5.	Telepon	1993/2006	3	Buah	1.500.000	B
6.	Kamera/Handycam	2007	1	buah	6.000.000	B
1	2	3	4	5	6	7
V.	Kendaraan Dinas Operasional					
1.	Kendaraan Roda Empat	2002/2003	2	Unit		B
2.	Kendaraan Roda Dua	2006	5	Unit	765.000.000	B
3.	Kendaraan Roda Dua PPL	1999	39	Unit	295.500.000	KB
VI	Instalasi listrik/Penerangan					
1.	Daya Listrik yang digunakan	1997/2004	17.700	VA		
VII	Rumah Jabatan/Dinas					
1.	Luas Bangunan	1985	72	m ²	50.500.000	B
2.						

2.8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Produktivitas padi dan palawija belum optimal sehingga sampai tahun 2006 belum mampu swasembada beras
2. Di beberapa wilayah masih rawan terhadap ancaman serangan hama belalang kembara dan hama penyakit tanaman lainnya.
3. Rendahnya tingkat pendapatan petani akibat biaya produksi yang tinggi, harga jual tidak kompetitif
4. Kelas kemampuan kelompok tani masih rendah, dari 427 kelompok tani yang ada saat ini Kelas Pemula 267 kelompok, Kelas Lanjut 88 kelompok, dan Kelas Madya 5 kelompok, 67 kelompok belum dikukuhkan.
5. Populasi dan Produksi ternak khususnya sapi potong belum mampu memenuhi kebutuhan daerah.
6. Kebutuhan ternak untuk konsumsi masyarakat masih tergantung dari luar daerah terutama Kalsel dan pulau jawa . Tingkat kelahiran / produktivitas ternak masih rendah dengan skala usaha di tingkat peternak masih belum memenuhi skala ekonomis

Solusi

1. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran bidang tanaman pangan dan hortikultura, langkah-langkah strategis yang dilaksanakan adalah :

a. Peningkatan Produksi dan Produktivitas.

Mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas usahatani melalui peningkatan mutu intensifikasi, penggunaan benih/bibit unggul bermutu, pemanfaatan alsintan, pemasyarakatan paket teknologi mulai pra produksi, proses produksi, pasca panen dan pengolahan hasil.

b. Perluasan Areal Tanam.

Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 100 – 200 pada kawasan sentra persawahan, mengoptimalkan pemanfaatan sarana irigasi, melakukan gerakan aksi membuka lahan tidur dan pemanfaatan tanaman sela pada areal perkebunan melalui penyuluhan.

- c. Pengamanan Produksi.
Antisipasi gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan Pengendalian Hama Terpadu (HPT) dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pengendalian OPT melalui pembentukan regu pengendali hama ditingkat kelompok tani.
- d. Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran.
Peningkatan ketrampilan kelompok tani dalam penanganan pasca panen, pengolahan hasil melalui pelatihan dan demonstrasi. Memfasilitasi terlaksananya kemitraan antara petani selaku produsen dengan mitra usaha/swasta dalam menangani pemasaran.
- e. Pembinaan Kelembagaan.
Meningkatkan peranan BIPP, BPP, Penyuluh dan Kelompok Tani secara optimal dalam pembinaan usahatani. Optimalisasi kelembagaan terkait seperti UPJA, P3A maupun penangkar benih.

2. Bidang Peternakan

- a. Peningkatan populasi ternak dilakukan dengan peningkatan kelahiran melalui IB, peningkatan produksi dan produktivitas, pengendalian pemotongan ternak betina produktif, pengendalian reproduksi dan penyediaan bibit ternak.
- b. Substitusi jenis ternak potong melalui pengembangan jenis ternak potong lain dlm rangka penganekaragaman sumber ternak potong.
- c. Pembinaan sumberdaya pakan melalui pembinaan mutu pakan, pemanfaatan pakan lokal dan pemanfaatan teknologi pakan ternak.
- d. Melakukan penyebaran ternak dengan pola kombinasi antara penggemukan ternak jantan dengan pengembangan ternak betina.
- e. Pembinaan kelembagaan dan permodalan meliputi pemberdayaan kelembagaan kelompok tani, asosiasi peternak & penyediaan modal usaha melalui perbankan maupun lembaga permodalan lainnya.
- f. Pemasarakatan teknologi tepat guna berbasis sumberdaya lokal, spesifik lokal dan berhasil guna.
- g. Pelayanan kesehatan hewan untuk menekan tingkat kematian melalui pengobatan masal dan vaksinasi.
- h. Pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak dan hewan menular melalui pengambilan spesimen, vaksinasi anti rabies, eliminasi anjing liar dan pengawasan lalu lintas ternak.

3. Perkebunan

3.1. Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat maupun Misi Dinas Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Perkebunan, dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan.

Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan 5 (lima) program dan 15 (lima belas) kegiatan.

3.2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam Tahun 2007 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	- Pembangunan Gedung Kantor	100
		- Pengadaan Perlengkapan Kantor	100
		- Pengadaan Mebelair	100
2.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	- Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	95
		- Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	100
3.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	- Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	97
		- Pengembangan Cadangan Pangan	100
		- Pengembangan Diversifikasi Tanaman	92
		- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	100
		- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	95
4.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	- Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggul Daerah	100
5.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	- Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan	100
		- Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan	97
		- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	95

3.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi terdiri dari :

a. Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat.

Struktur organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

- a) Kepala Dinas
- b) Kepala Tata Usaha membawahi :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan
 - (2) Sub Bagian Umum
 - (3) Sub Bagian Keuangan
 - (4) Sub Bagian Kepegawaian
- c) Kepala Sub Dinas Produksi membawahi :
 - (1) Seksi Bahan Tanaman
 - (2) Seksi Tanaman Tahunan
 - (3) Seksi Pengembangan
 - (4) Seksi Alat dan Mesin

- d) Kepala Sub Dinas Usaha Tani membawahi
 - (1) Seksi Sumberdaya
 - (2) Seksi Perijinan
 - (3) Seksi Bimbingan Usaha
 - (4) Seksi Pengolahan dan Pemasaran
- e) Kepala Sub Dinas Penyuluhan membawahi :
 - (1) Seksi Tata Penyuluhan
 - (2) Seksi Kelembagaan
 - (3) Seksi Tenaga dan Sarana
- f) Kepala Sub Dinas Perlindungan Tanaman membawahi :
 - (1) Seksi Sarana Perlindungan Tanaman
 - (2) Seksi Pengamatan dan Peramalan OPT
 - (3) Seksi Pengendalian OPT
 - (4) Seksi Konsevasi Tanah dan Air

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi tugas pokok dan fungsi antara lain :

- 1) Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah menyelenggarakan Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perkebunan
- 2) Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :
 - (a) Merumuskan kebijakan teknis dan program pembinaan, pengembangan pembangunan perkebunan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (b) Pembinaan produksi primer perkebunan.
 - (c) Pembinaan perlindungan tanaman perkebunan.
 - (d) Pembinaan pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.
 - (e) Pembinaan Kelembagaan Usaha, sarana dan prasarana Penyuluhan Perkebunan.
 - (f) Pembinaan ketatausahaan Dinas Perkebunan.
 - (g) Pembinaan cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Kegiatan.

c. Visi dan Misi Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat

Pada pelaksanaan Pembangunan Perkebunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin, telah menetapkan Visi dan Misi yaitu :

1. Visi

Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa paksaan. **VISI** Pembangunan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : **“Menjadikan Kebun Sebagai Sumber Utama Pendapatan Petani Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat”**

2. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan suatu organisasi/ instansi dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang dipilih. Misi pembangunan perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2010 adalah :

- a. Meningkatkan kualitas SDM, baik untuk jajaran pegawai Perkebunan maupun petani pekebun untuk dapat menguasai IPTEK;
- b. Meningkatkan Pemberdayaan Petani dengan Pemantapan Kelembagaan dan Percepatan Peningkatan Produksi;
- c. Mendesain pengembangan kawasan perkebunan dan mewujudkan keterkaitan sistem yang mendukung pengembangan Agroindustri dan Agribisnis;
- d. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan masyarakat maupun Kabupaten Kotawaringin Barat;
- e. Menciptakan rasa aman dan nyaman (bersama-sama instansi terkait) berusaha bagi investor yang telah dan akan menanam investasinya dibidang perkebunan

d. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani ;
- 2). Meningkatkan produksi perkebunan guna pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor ;
- 3). Meningkatkan dan memperluas lapangan kerja ;
- 4). Mendorong tumbuhnya industri hilir

Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- 2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kesejahteraan Petani ;
- 5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan ;
- 6) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

3.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 3.b.3.4.1. sebagai berikut :

Tabel 3.b.3.4.1.
Pegawai Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kepegawaian (orang)			Keterangan
		PNS	Honorer	Jumlah	
1.	Sarjana S-2	3		3	
2.	Sarjana S-1	16	-	16	
3.	Sarjana Muda/D III	3	-	3	
4.	SLTA	16	2*	18	* 1 orang Sopir 1 orang petugas kebersihan
5.	SLTP	-	1**	1	** 1 orang jaga malam
6.	SD	-	-	-	
	Total	37	3	41	

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan

Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pangkat Golongan, terdapat pada tabel 3.b.3.4.2. sebagai berikut :

Tabel. 3.b.3.4.2.
Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Tk. I	IV/b	-
3.	Pembina	IV/a	3
4.	Penata Tk. I	III/d	6
5.	Penata	III/c	2
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	8
7.	Penata Muda	III/a	9
8.	Pengatur Tk. I	II/d	6
9.	Pengatur	II/c	2
10.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-
11.	Pengatur Muda	II/a	1
Total			38

c. Jumlah Pegawai, Jumlah Pegawai Struktural dan Fungsional

Pegawai yang ada pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 40 orang, yang terperinci seperti disajikan pada tabel 3.b.3.4.3.

Tabel 3.b.3.4.3.
Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Jenis Kepegawaian	Jenis Proyek	Asal	Jumlah (Orang)	
				2006	2007
I.	PNS	-	-	37	37
II.	Honorar	Proyek KIMBUN	a. Eks UPH b. ADO c. Eks KSP	- - -	- - -
		APBD II	a. Jaga malam b. Petugas Kebersihan c. Sopir	1 1 1	1 1 1
		TOTAL II		3	3
		Total I + Total II		40	40

3.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Kinerja Dinas Perkebunan kobar menunjukkan sebagai penyumbang PAD sebesar Rp. 6.323.257.858,- dengan belanja APBD II Rp.3.522.834.221,- (APBD II + APBN Rp 3.905.835.221,-) masih memberikan kontribusi positif dari sisi keuangan sebesar Rp 827.165.779,- untuk rekapitulasi dari Realisasi Pendapatan dan Belanja Lingkup Dinas Perkebunan TA. 2007 yang terperinci seperti disajikan pada tabel 3.b.3.5.1

Tabel 3.b.3.5.1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Lingkup Dinas Perkebunan TA. 2007.

No.	Proyek/Bagian Proyek	Pagu Dipp (Rp)	Fisik		Keuangan		Jumlah (Rp)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	APBD						
I	PENDAPATAN						
	Pendapatan Asli Daerah						
1	SPK	4.500.000.000	100	141,00	100	140,52	6.323.257.858
II	BELANJA						
1	Belanja Aparatur	1.425.699.000	100	99,50	100	96,31	1.373.042.089
2	Belanja Publik						
-	Ketahanan Pangan	348.819.000	100	94,96	100	78,18	272.720.500
-	Pengembangan Agribisnis	6.086.727.000	100	95,96	100	92,32	5.619.205.285
-	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perkebunan Kobar Tahun II	886.366.000	100	100,00	100	99,56	882.500.000
	Jumlah (1+2)	8.747.611.000	100	97,60	100	93,14	8.147.467.874
B	APBN						
	Pembinaan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil	40.000.000	100	100,00	100	99,38	39.750.000
	TOTAL Belanja (1+2+B)	8.787.611.000	100	98,80	100	93,17	8.187.217.874

Realisasi Fisik APBD II mencapai 97,60 % (APBD II & APBN 98,80 %) dan Keuangan APBD II 93,14 % (APBD II & APBN 93,17 %) dari Total anggaran APBD II Rp. 8.747.611.000,- (APBD II & APBN Rp. 8.787.611.000,-) yang terperinci seperti disajikan pada tabel 3.b.3.5.2

Tabel 3.b.3.5.2.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No.	Proyek/Bagian Proyek	Pagu Dipp (Rp)	Fisik		Keuangan		Jumlah (Rp)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	BELANJA						
1	Belanja Aparatur	1.425.699.000	100	99,50	100	96,31	1.373.042.089
2	Belanja Publik						
-	Ketahanan Pangan	348.819.000	100	94,96	100	78,18	272.720.500
-	Pengembangan Agribisnis	6.086.727.000	100	95,96	100	92,32	5.619.205.285
-	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perkebunan Kobar Tahun II	886.366.000	100	100,00	100	99,56	882.500.000
	Jumlah (1+2)	8.747.611.000	100	97,60	100	93,14	8.147.467.874
B	APBN						
	Pembinaan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil	40.000.000	100	100,00	100	99,38	39.750.000
	TOTAL Belanja (A+B)	8.787.611.000	100	98,80	100	93,17	8.187.217.874

3.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Adapun proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kab. Ktw. Barat pada tahun 2007 adalah sebagai berikut :

-) Musyawarah Pembangunan Desa
-) Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan
-) Forum SKPD Kabupaten
-) Musrenbang Kabupaten
-) Musrenbang Pertanian Wilayah
-) Panitia Anggaran
-) Pembahasan di DPRD
-) Penetapan DPA-SKPD

3.7. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Dinas Perkebunan Kab. Ktw. Barat sampai dengan tahun 2007 sebagaimana pada tabel 3.b.3.7.1 dan tabel 3.b.3.7.2. berikut :

Tabel 3.b.3.7
Kondisi Sarana dan Prasarana

No.	JenisTanah/Bangunan	Luas (m ²)	Kondisi
1	Tanah Kebun	6.500	-
2	Tanah Kebun	20.000	-
3	Tanah Kebun	10.000	-
4	Tanah Kebun	10.000	-
5	Tanah Kebun	12.500	-
6	Tanah Kebun	85.456	-
7	Ktr Disbun Kobar	551,67	Baik (B)
8	Ktr. UPP Kolam	1.680	Rusak Berat (RB)
9	Ktr. UPP N. Bulik	822,5	RB
10	Ktr. UPP Kumai	2.550	RB
11	Ktr. UPPT Kumai	799	RB
12	Ktr. UPP Kudangan	Pm	RB
13	Ktr. Disbun yang Baru	420	Baik (B)

Tabel 2.7.7
Inventaris kendaraan Dinas Perkebunan sampai dengan tahun 2007.

No	Kendaraan	Tahun	No. Polisi	Kondisi
1.	Kijang	2001	KH. 86 GU	B
2.	Taf GT	1990	KH. 77 GU	RR
3.	Honda Supra	2001	KH. 2365 GY	B
4.	Honda Win	1999	KH. 2247 GY	B
5.	Yamaha Vega R	2007	KH. 2311 GY	B
6.	Honda GL Pro	1996	KH. 5757 AE	B
7.	Honda GL Mega Pro	1996	KH. 3540 AY	B
8.	Honda Win	1998	KH. 5427 AI	RB
9.	Honda Win	1998	KH. 5429 AI	RB
10.	Honda Win	1998	KH. 5430 AI	RB
11.	Honda Win	1993	KH. 5205 G	RB
12.	Honda Win	1988	KH. 5104 G	RB
13.	Honda Win	1988	KH. 831 G	RB
14.	Honda Win	1979	KH. 5178 G	RB
15.	Suzuki Thunder	2007	KH. 3592 AY	B
16.	Honda GL Mega Pro	2007	KH 25 GY	B

Kondisi kendaraan operasional Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagian besar dalam keadaan Rusak Berat (RB)

3.8. Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan :

1. Belum terakomodirnya semua usulan masyarakat/kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam Pembangunan Perkebunan ;
2. Masih terbatasnya tenaga teknis perkebunan dan juga Pelatihan / magang khusus petani pekebun ;
3. Belum semua posisi jabatan struktural terisis.

B. Solusi :

1. Usulan masyarakat/kelompok masyarakat secara bertahap dapat diakomodir dan disesuaikan dengan kondisi dan kesesuaian lahan, Pagu Anggaran dan juga skala prioritas yang tertuang dalam Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat ;
2. Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat, tiap tahunnya telah mengalokasikan dana untuk Pegawai Lingkup Dinas dan Petani Pekebun untuk mengikuti Diklat maupun magang dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan

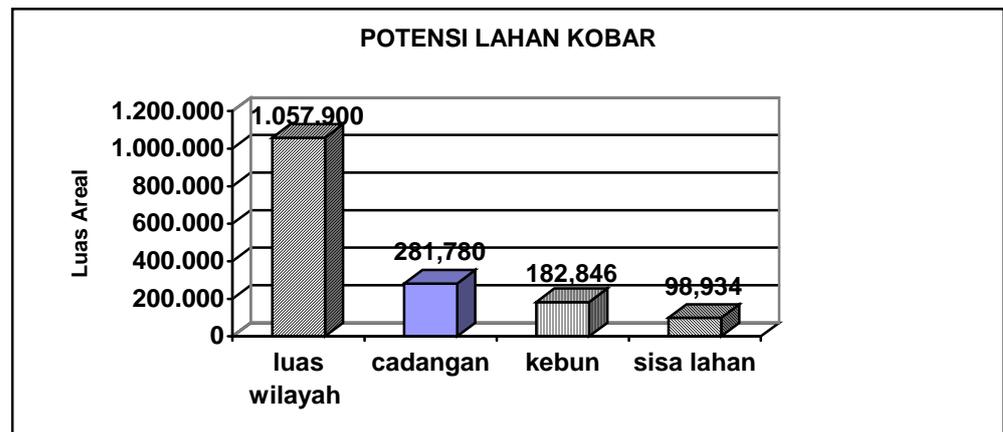
3. Dalam upaya mendukung Program Pembangunan Perkebunan, untuk posisi jabatan struktural yang masih kosong, telah ditunjuk Pelaksana Tugas (PLT) tenaga-tenaga teknis perkebunan yang pangkatnya setingkat dibawah pangkat yang dipersyaratkan untuk menempati jabatan tersebut.

3.9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

1. Potensi Lahan Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

Total potensi lahan perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 1.075.90 Ha, Cadangan Lahan Perkebunan seluas 281.780 Ha, telah dibuka untuk Perkebunan 182.846 Ha dan Sisa lahan Perkebunan seluas 98.934 Ha, dapat dilihat pada Grafik 1. berikut.

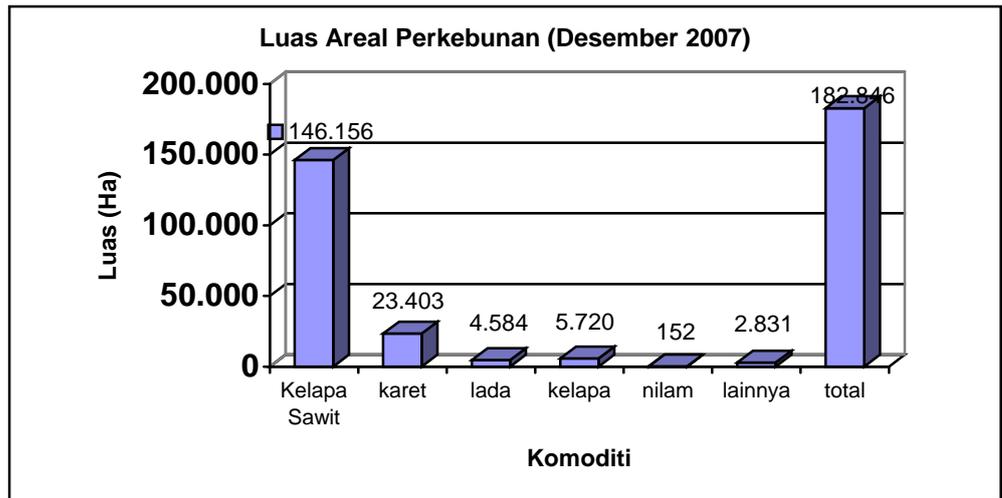
Grafik 1. Potensi Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat



2. Luas Areal Perkebunan

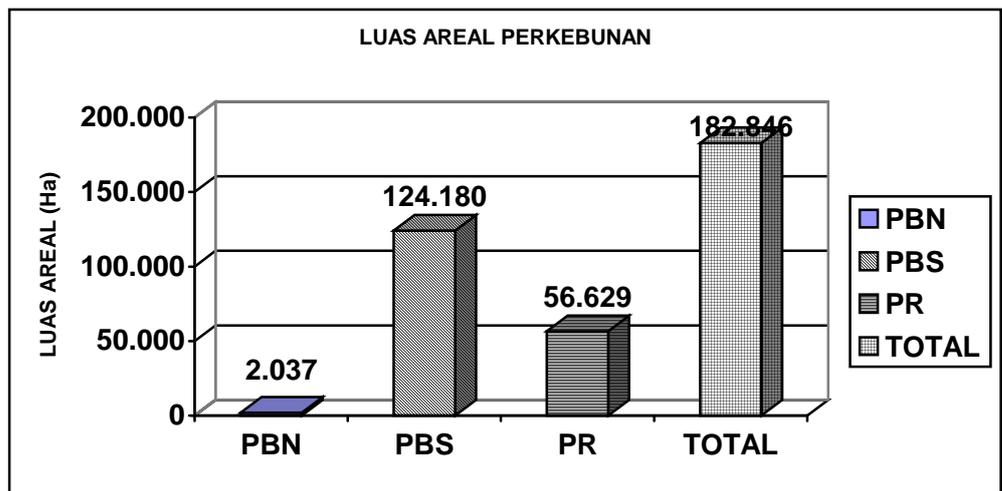
Ada 5 komoditi utama yang telah dikembangkan dan telah mengarahkan kepada kegiatan usaha Agribisnis oleh petani pekebun maupun oleh Perusahaan Perkebunan seperti : Kelapa Sawit, Karet, Lada dan lainnya. Luas perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Kabupaten Induk seluas 182.846 Ha. Komoditi yang dominan meliputi : (1) Kelapa Sawit seluas 146.156 Ha (79,93 %), (2) Karet seluas 23.403 Ha (12,80 %), (3) Lada seluas 4.584 Ha (2,51 %), (4) Kelapa 5.720 Ha (3,13%), (5) Nilam 152 Ha (0,08 %) dan Komoditi lainnya seluas 2.831 Ha (1,55 %), selanjutnya dapat dilihat pada Grafik 2 di berikut ini.

Grafik 2. Luas Areal Komoditi Perkebunan s/d Desember 2007.



Seiring dengan banyak minat investor perkebunan berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat maka luas areal kebun Perusahaan lebih besar dari luas kebun Rakyat. Luas kebun Perusahaan Besar Negara sebesar 2.037 Ha (1,11 %) dan luas kebun Perusahaan Besar Swasta sebesar 124.180 Ha (67,92 %). Sedangkan Kebun Rakyat seluas 56.477 Ha (30,97 %). Adapun luas areal perkebunan dapat dilihat pada grafik 3 sebagai berikut.

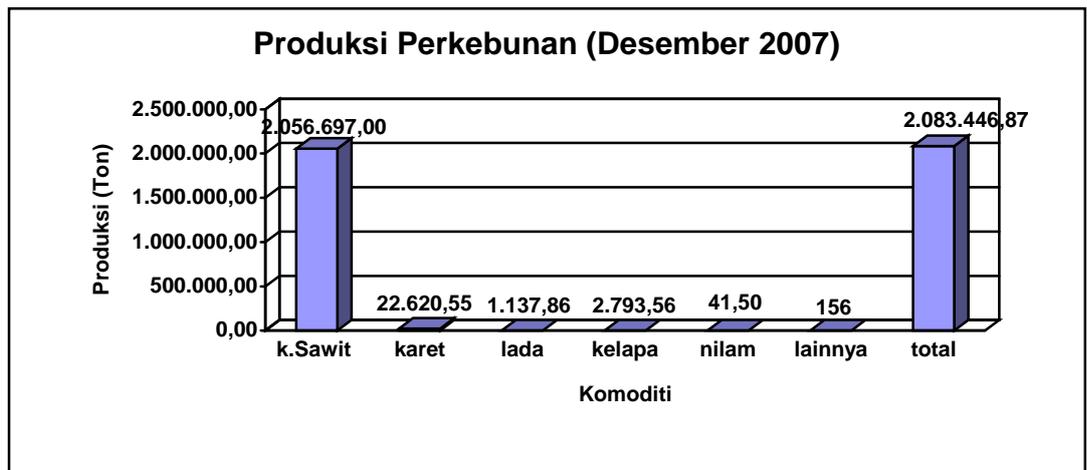
Grafik 3.
Luas Areal Perkebunan di Kab. Kotawaringin Barat s/d Desember 2007



3. Produksi Komoditi Perkebunan

Total produksi komoditi perkebunan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat (sampai Desember 2007) sebesar 2.083.447 ton. Komoditi yang dominan meliputi: (1) Kelapa Sawit (TBS) sebesar 2.056.697 ton (98,72 %), (2) Karet sebesar 22.620,55 ton (1,09 %), (3) Lada sebesar 1.137,86 ton (0,05 %), Kelapa sebesar 2.793,56 ton (0,13 %) dan Nilam 41,50 ton dan Komoditi lainnya sebesar 156 ton (0,01 %) untuk lebih jelas dapat dilihat pada Grafik 4.

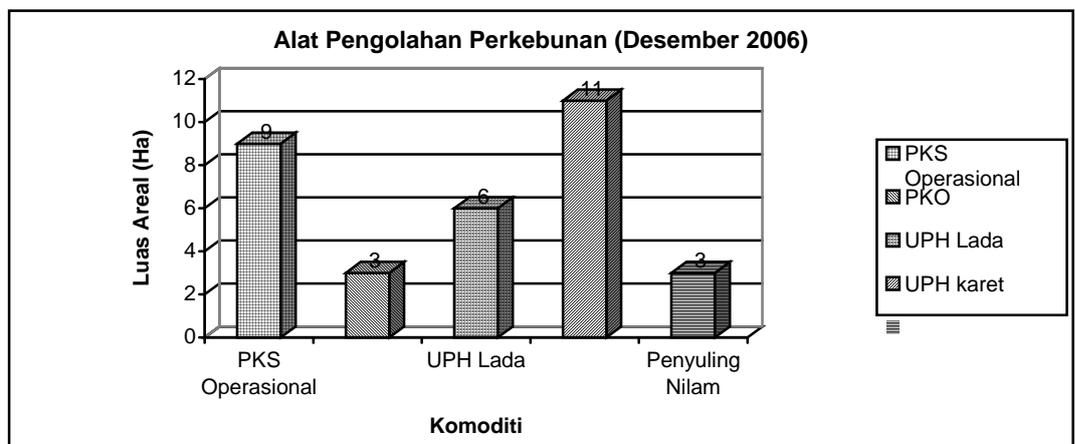
Grafik 4. Total Produksi Komoditi Perkebunan



4. Jumlah Alat Pengolahan

Alat pengolahan produksi perkebunan meliputi alat pengolahan PKS 9 buah, PKO 3 buah, UPH Lada 6 buah, UPH Karet 11 buah dan Alat Penyulingan Nilam 3 buah tersaji pada grafik 5 berikut ini.

Grafik 5. Jumlah Alat Pengolahan Produksi Perkebunan



4. Kehutanan

4.1. Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan, melalui Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2007.

Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan 8 (Delapan) program dan 30 (Tiga Puluh) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel 3.b.4.1. sebagai berikut :

Tabel 3.b.4.1
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Pembangunan Sektor Kehutanan dalam rangka menunjang ekspor komoditi non migas.	Ekonomi Kehutanan	Pelayanan Administrasi Perkantoran :	1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
2.	Peningkatan Pembangunan Sektor perdagangan dan industri yang mengolah hasil kehutanan			2. Penyediaan jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
3.	Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang dapat menjamin peningkatan pendapatan bagi masyarakat dan mengurangi disparitas pendapatan bagi masyarakat.			3. Penyediaan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
				4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
				5. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
				6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
				7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
				8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
				10. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
				11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				13. Penyediaan Makanan dan Minuman
				14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah.

1	2	3	4	5
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 3. Pengadaan Mebeleur 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5. Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
			Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan 2. Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan 3. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
			Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan 2. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan.

4.2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam Tahun 2007 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :		
1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	1. Tersedianya prasarana surat menyurat yang mendukung kelancaran surat menyurat yang efektif dan efisien.	68,77
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	2. Terlaksananya kebutuhan komunikasi, listrik, surat kabar dan pengumuman lelang.	100,00
3.	Penyediaan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	3. Terlaksananya pengurusan/ perijinan kendaraan operasional.	100,00
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Terlaksananya administrasi keuangan dalam pelaksanaan DPA-SKPD TA. 2007.	100,00
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	5. Terlaksananya kegiatan kebersihan halaman, ruang kantor dan sekitarnya serta keamanannya.	100,00
6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6. Peralatan kerja yang mengalami kerusakan diservis serta perawatan rutin peralatan yang perlu dirawat.	86,67
7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7. Tersedianya alat tulis kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas.	100,00
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Tersedianya barang cetakan dan jasa pengadaan pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat.	99,74
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9. Tersedianya bahan untuk penerangan ruang kantor dan sekitarnya.	100,00
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.	99,93
11.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11. Tersedianya alat kebersihan dan peralatan dapur.	99,97
12.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12. Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan.	34,82
13.	Penyediaan Makanan dan Minuman	13. Tersedianya makan dan minum harian pegawai dan rapat.	88,96
14.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah.	14. Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi & konsultasi baik keluar daerah maupun didalam daerah.	100,00
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana:		
1.	Pembangunan Gedung Kantor	1. Tersedianya gedung penyidik dan gudang senjata.	100,00
2.	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	2. Tersedianya kendaraan operasional	100,00
3.	Pengadaan Mebeleur	3. Tersedianya mebeleur berupa meja dan kursi pegawai	100,00

4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4. Terlaksananya pengecatan rutin gedung kantor	100,00
5.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	5. Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	100,00
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1. Tersedianya pakaian dinas harian	100,00
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1. Tersedianya SDM yang memiliki keahlian dibidang tertentu yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.	65,66
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	a. Tersedianya pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00
2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	b. Tersedianya laporan keuangan semesteran	100,00
3.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	c. Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	100,00
VI.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		
1.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	1. Tercapainya peningkatan pengawasan pengelolaan perusahaan hutan	89,37
2.	Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	2. Penatausahaan hasil hutan berjalan dengan baik serta penerimaan negara/daerah terkontrol	86,86
3.	Pengembangan, Pengujian dan Pengendalian peredaran Hasil Hutan	3. Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang lestari	60,64
VII.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)		
1.	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1. Terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	3,25
VIII.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan		
1.	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	1. Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan melalui upaya pencegahan dan pemadaman	94,14
2.	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan	2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak perusakan hutan dan untuk menjaga kelestarian hutan	100,00

4.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

a. Susunan Organisasi Dinas Kehutanan

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Kepegawaian
 - Kepala Sub Bagian Keuangan
 - Kepala Sub Bagian Umum
 - Kepala Sub Bagian Perlengkapan
3. Kepala Sub Dinas Bina Program, membawahi :
 -) Kepala Seksi Inventarisai dan Potensi
 -) Kepala Seksi Tata Guna Hutan
 -) Kepala Seksi Rencana Karya
 -) Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan

4. Kepala Sub Dinas Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, membawahi :
 -) Kepala Seksi Perhutanan Sosial
 -) Kepala Seksi Hutan Rakyat dan Hutan Tanaman
 -) Kepala Seksi Reboisasi dan Penghijauan
 -) Kepala Seksi Konservasi Air dan Tanah
5. Kepala Sub Dinas Bina Usaha Kehutanan, membawahi :
 -) Kepala Seksi Legalitas dan Iuran Kehutanan
 -) Kepala Seksi Pengukuran dan Pengujian
 -) Kepala Seksi Aneka Usaha dan Pengolahan Hasil Hutan
 -) Kepala Seksi Pemungutan Hasil Hutan
6. Kepala Sub Dinas Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, membawahi :
 -) Kepala Seksi Hukum dan Perundang-undangan
 -) Kepala Seksi Penyuluhan
 -) Kepala Seksi Konservasi Alam
 -) Kepala Seksi Perlindungan Hutan

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan

Berdasarkan Perda No. 25 Tahun 2000 Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai :

- Tugas :
Membantu Kepala Daerah menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kehutanan.
- Fungsi :
Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian, pembinaan dan perijinan kegiatan dibidang kehutanan meliputi : Perencanaan, Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan, Pengembangan Usaha Kehutanan serta Pembinaan dan Penyuluhan Kehutanan.
Pengelolaan tugas umum ketatausahaan dibidang kehutanan.
Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

➤ Kewenangan umum meliputi :

Melaksanakan sebagian urusan pemerintah dibidang kehutanan.

Pelaksanaan penanaman, pemeliharaan & pengembangan hutan rakyat dan atau hutan milik, perlebahan dan persuteraan alam.

Pelaksanaan penghijauan, konservasi tanah dan air.

Membantu peningkatan kemampuan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam upaya perbaikan dan pemeliharaan fungsi hutan, tanah dan air.

Melakukan penyiapan program, metode, sistem kerja penyuluhan dan pembinaan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani dan penghijauan.

Pelaksanaan penanaman & pemeliharaan tanaman pada lahan-lahan kritis milik rakyat dan kelompok tani di luar kawasan hutan.

Pembinaan teknis pembibitan, penanaman, perluasan penanaman pada lahan kritis dalam hutan rakyat dan hutan milik kelompok tani.

Pelaksanaan upaya mempertahankan atau memperbaiki.

Pelaksanaan penyuburan tanah dengan cara pembuatan bangunan teknis sipil.

Pelaksanaan rehabilitasi DAS dan evaluasi DAS.

Pelaksanaan pencegahan kerusakan lahan dan kemunduran daya guna dan produktivitas lahan.

Melaksanakan kegiatan-kegiatan dibidang pengawasan dan pengendalian rencana dan tata guna hutan.

Melaksanakan kegiatan dibidang pemetaan hutan, tata guna hutan, pengukuran dan pemetaan.

Mengkoordinir kegiatan-kegiatan dalam pengawasan secara preventif dan refrensif kegiatan dibidang kehutanan.

Melaksanakan pengolahan & penilaian hasil invevtarisasi hutan.

Melaksanakan tugas dibidang penyusunan Rencana Kerja Pengusahaan Hutan.

Menyiapkan/menyelesaikan rekomendasi pertimbangan teknis atas permohonan HPH, IPK, Rencana Karya Tahunan (RKT) dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan.

Melakukan penyusunan statistik dibidang kehutanan.

Melaksanakan pengawasan dan penilaian, bimbingan atau rencana-rencana dibidang pengusaha hutan.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan eksploitasi hutan.

Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pemeliharaan hutan.

Melaksanakan pengawasan perijinan pengusaha hutan dan industri.

Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan produksi hasil hutan.

- Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan industri dibidang kehutanan.
- Melaksanakan pengawasan pelaksanaan reboisasi dan permudaan hutan didalam areal pengusaha hutan.
- Melaksanakan pengawasan kegiatan aneka guna hutan.
- Melaksanakan pengawasan terhadap tenaga kerja, sarana kerja pengusaha hutan.
- Melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan tentang arti fungsi dan manfaat hutan bagi manusia dan lingkungan.
- Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan pengawasan terhadap kelancaran perdagangan hasil hutan serta legalitas hasil hutan.
- Melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penerimaan PSDH dan DR.
- Sebagai pengelola dalam administrasi pendistribusian SKSHH.
- Melaksanakan kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan.
- Melaksanakan kegiatan pengawasan dibidang peredaran hasil hutan.
- Melaksanakan pengawasan dibidang legalitas hasil hutan.
- Melaksanakan penelitian, mencatat, membukukan terhadap administrasi pemungutan *PSDH dan DR*.
- Melaksanakan pemungutan dan penagihan terhadap tunggakan PSDH dan DR yang belum dibayar tepat waktunya.
- Melaksanakan penertiban dan memberi petunjuk tentang tata usaha pungutan PSDH dan *DR*.

- Wewenang Polisi Kehutanan :
 - Melaksanakan kegiatan dibidang polisi kehutanan dilingkungan kerjanya dan mengadakan koordinasi dengan Dinas Kehutanan/Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan dan Resort Polisi Khusus dalam wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten.
 - Melaksanakan tindakan preventif dan represif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dibidang kehutanan.
 - Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam pengamanan dan tindakan terhadap pelanggaran dibidang kehutanan.
 - Melaksanakan proses untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dibidang kehutanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - Mengadakan pembinaan dan penyuluhan yang menyangkut keamanan hutan pada masyarakat disekitar hutan dan memberi peranan tentang arti, fungsi dan manfaat hutan.
 - Melaksanakan pembinaan pengawasan dan penilaian aparat lingkup tugasnya.
 - Melaksanakan pengawasan/patroli terhadap lalu lintas hasil hutan kayu dan hasil hutan lainnya.

c. Visi dan Misi Dinas Kehutanan

■ Visi

Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat 2006 s/d 2010 mempunyai visi “ ***Hutan Rakyat Meningkat dan Hutan Alam Lestari*** “

► **Misi**

Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat 2006 s/d 2010 mempunyai misi :

1. Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
2. Menyelenggarakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
3. Mendorong Industri Kehutanan dari Industri Hulu ke Industri Hilir.
4. Mengembangkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sekitar hutan.
5. Menetapkan Batas Kawasan Fungsi Hutan.

d. Kebijakan/Strategi dari Dinas Kehutanan

Untuk pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten 5 (lima) tahun kedepan Dinas Kehutanan mempunyai strategi dan kebijakan :

1. Mengupayakan terpeliharanya hutan yang produktif dan lestari yang memenuhi standar keseimbangan lingkungan hidup.
2. Peningkatan luas dan produktivitas hutan rakyat serta berkurangnya luas lahan kritis.
3. Peningkatan pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang kehutanan.
4. Peningkatan pengawasan dan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan.
5. Pemantapan batas kawasan hutan.

4.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 3.b.4.4.1. sebagai berikut :

Tabel 3.b.4.4.1

Pegawai Menurut Pendidikan

No.	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	S2		3	1	-	4
2	S1		31	2	-	33
3	D. IV		2	-	-	2
4	Sarjana Muda		10	-	-	10
5	SLTA		44	10	2	52
6	SLTP		3	-	-	3
7	SD		1	-	-	1
	Jumlah		95	3	2	105

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada tabel 3.b.4.4.2. sebagai berikut :

Tabel 3.b.4.4.2

Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No.	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Golongan I/a Golongan I/b Golongan I/c Golongan I/d					
	Jumlah Gol I					
2.	Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda Tk.I (II/b) Pengatur (II/c) Pengatur Tk.I (II/d)		4 6 19 13	10 - 2 2	- 4 - -	14 2 21 15
	Jumlah Gol II					52
3.	Penata Muda (III/a) Penata Muda Tk.I (III/b) Penata (III/c) Penata Tk.I (III/d)		18 29 1 3	- - 15 1	2 15 - 2	16 14 16 2
	Jumlah Gol III					48
4.	Pembina (IV/a) Pembina Tk.I (IV/b) Pembina Utama Muda (IV/c)		1 3 1	2 - -	- 1 1	3 2 0
	Jumlah GI IV					5

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pejabat Struktural Dinas Kehutanan menurut Jabatan Struktural dan Fungsional terdapat pada tabel 3.b.4.4.3. sebagai berikut :

Tabel 3.b.4.4.3.
Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Menurut Jabatan Struktural					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II b	1	0	1	-	1
	Eselon III a	4	4	1	1	4
	Eselon IV a	20	16	4	1	19
	Fungsional Staf	44	34	10	-	44
	Jumlah	69	54	16	2	105
2.	Menurut Jabatan Fungsional					
	Fungsional	37	39	-	2	37
	Staf	-	-	-	-	-
	Jumlah	37	39	-	2	37

d. Jumlah Pegawai Tidak Tetap

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tukang Kebun	2
2.	Jaga Malam	1
3.	Buka Tutup Kantor	1
	Total	4

4.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

a. Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh alokasi anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukan bagi Gaji Pegawai sebesar Rp. 2.803.843.350,- dan sampai akhir bulan Desember 2007 telah direalisasikan (dibelanjakan) sebesar Rp. 2.710.541.825,- dengan sisa (saldo) sebesar Rp. 93.301.525,-

b. Belanja Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 77,54 % dengan rincian pada tabel 3.b.4.5. sebagai berikut :

Tabel 3.b.4.5.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No.	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%)	Selisih Anggaran (Rp)	Capaian Indikator Kinerja
1.	Belanja Pegawai	12.253.883.156	2,11	259.504.100	2,11	11.994.379.056	
2.	Belanja Barang jasa	6.235.395.844	24,83	1.548.418.904	24,83	4.686.976.940	
3.	Belanja Modal	1.446.920.000	40,65	588.272.450	40,65	858.647550	

4.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Adapun proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007 adalah berdasarkan :

RPJM

Renstra Yang diselaraskan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2007

Rencana Kerja Anggaran

4.7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Dinas Kehutanan kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2007 sebagaimana pada tabel 3.b.4.7. berikut.

Tabel 3.b.4.7
Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis>Nama Barang	Merek/Tahun Pembuatan	Jumlah		Harga Sat (Rp.)	Kondisi
			Vol	Sat		
1	2	3	4	5	6	7
I	Tanah & Bangunan					
1.	Tanah Bangunan/Kantor		3	Unit	150.000 160.000 150.000	Baik
2.	Bangunan Kantor Induk		1	Unit	500.000	Baik
3.	Bangunan Kantor		1	Unit	1.592.523,5	Baik
4.	Bangunan Kantor					
5.	Bangunan Gedung Aula					
6.	Bangunan Gedung Penyidik	2007	1	Unit	136.130.000	Baik
7.	Bangunan Gedung					
8.	Bangunan Tempat Parkir		1			Baik
9.	Pagar Keliling		1			Baik
II	Perlengkapan Gedung Kantor					
1.	Meja dan Kursi Kepala	2007	1	Unit	1.200.000	Baik
2.	Meja & Kursi Kabid/Sekretaris	2007	4	Unit	2.800.000	Baik
3.	Meja & Kursi Kasi & Staff	2001-2007	110	Unit		
4.	Meja Rapat	2007	1	Unit	250.000	Baik
5.	Meja Cetak / Gambar	2001-2007	1	Unit	4.000.000	
6.	Floater A.O	2007	1	Unit	49.750.000	Baik
7.	Meubelair Ruang Pimpinan	2007	1	Unit		
8.	Meja, Kursi Ruang Tamu	2007	1	Unit		
9.	Kursi Lipat	2001-2007	93	Buah		
10.	Kursi Putar	2001-2007	30	Buah		19 Baik
11.	Filling Kabinet	2001-2007	23	Buah		11 Baik
12.	Lemari Besi 2 Pintu	-	4	Buah		1 Baik
13.	Rak Arsip		2	Buah		
14.	Tiang Bendera	2001-2007	1	Buah		Baik
15.	Kipas Angin	2001-2007	12	Buah		9 Baik
III	Peralatan Gedung Kantor					
1.	AC diruang Pimpinan		1	Buah		Baik
2.	AC diruang (5 Subdin)		5	Buah		Baik
3.	Kulkas		1	Buah		
4.	Mesin Pemotong Rumput Gendong	2007	1	Buah		Baik
5.	Mesin Pemotong Rumput Dorong	2001	1	Buah		Rusak
6.	Sound Sistem		2	Buah		Baik

IV	Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
1.	Komputer		15	Buah		Baik
2.	Note Book		5	Buah		Baik
3.	Printer		11	Buah		
4.	LCD Projector		2	Buah		Rusak
5.	Wireless		2	Buah		
6.	GPS		5	Buah	20.000.000	Baik
7.	Telepon		4	Buah		Baik
8.	Kamera	2007	3	Unit	6.000.000	Baik
9.	Dan lain-lain					
V	Kendaraan Dinas/Operasional					
1.	Kendaraan Roda Empat 3 buah	2001-2007	3	Buah	125.000.000	Baik
					125.000.000	Baik
					271.000.000	Baik
2.	Kendaraan Roda Dua 17 buah	2001-2007	17	Buah	11.500.000	Baik
					17.500.000	Baik
					14.000.000	Baik
					14.000.000	Baik
					19.899.000	Baik
3.	Speed Boat	2001-2007	1	Buah	25.000.000	Baik
VI	Instalasi Listrik/Penerangan					
1.	Bangunan Kantor.					
	Daya Listrik yang digunakan		3.500	Watt		Baik
			3.500	Watt		
			1.300	Watt		
VII	Rumah Jabatan/ Dinas					
1.	Luas Bangunan	120 M ²	5	Buah		
		60 M ²	2	Buah		
		396 M ²	1	Buah		

4.8. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan Tupoksi dan Kebijakan pada Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- a. Belum ditetapkannya peta paduserasi Kalimantan Tengah, sehingga kegiatan yang dananya bersumber dari Dana DAK-DR belum dapat dilaksanakan, karena sesuai aturan DAK- DR disebutkan bahwa kegiatan dilaksanakan di dalam kawasan hutan (60%) dan diluar kawasan hutan (40 %).

- b. Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dibentuk Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat, pada musim kemarau Tahun 2007 belum menunjukkan hasil yang optimal disebabkan keterbatasan dana dan tenaga yang ada.
- c. Kurangnya data-data mengenai hasil kegiatan pengukuhan kawasan hutan (sementara/definitif) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- d. Belum adanya Tim Penilai Tenaga Fungsional (POLHUT, Teknisi dan Penyuluh) di Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- e. Belum adanya tenaga bersertifikasi penguji hasil hutan non kayu di Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Solusi dari permasalahan di atas antara lain :

- a. Peta Penunjukan Kawasan dan Perairan Propinsi Kalimantan Tengah agar segera disahkan dengan berkoordinasi dengan propinsi maupun pusat.
- b. Perlu dibentuk Posko / Tim terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan dinas dan instansi yang terkait.
- c. Perlu penelusuran / pengadaan data-data mengenai kegiatan pengukuran kawasan hutan ke instansi terkait (Dinas Kehutanan Propinsi, Balai Pemantapan Kawasan Hutan serta Departemen Kehutanan).
- d. Perlu segera diadakan/dibentuk Tim Penilai Fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Perlu diikutsertakan dalam pelatihan/kursus pengawas penguji hasil hutan bukan kayu bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Propinsi, BP2HP Wilayah XII Palangka Raya serta Balai Diklat Kehutanan Samarinda.
- f. Perlu segera dibentuk UPTD Dinas Kehutanan agar memudahkan dalam pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

5. Pariwisata

5.1. Program Dan Kegiatan.

Pada tahun 2007 ini Untuk melaksanakan untuk urusan pilihan yaitu bidang pariwisata mempunyai 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel 3.b.5.1. dibawah ini :

Tabel 3.b.5.1.
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Urusan Pilihan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1.			Pengembangan Pemasaran Wisata	a.Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemasaran Pariwisata b.Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri c.Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
2.			Pengembangan Destinasi Pariwisata	a.Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan b.Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
3.			Pengembangan Kemitraan	a.Pengembangan dan penguatan, informasi dan database b.Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya c.Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya d.Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

5.2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan.

Dalam Tahun 2007 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan urusan Pilihan adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1.	Program Pengembangan Pemasaran Wisata		
	a.Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemasaran Pariwisata	- Pembuatan booklet pariwisata 1000 buah - Pembuatan leaflet peta pesona wisata 1000 buah - Pembuatan billboard dan display pariwisata 1 buah	100 100 100
	b.Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	- Mengikuti Pameran PRJ/ Jakarta Expo 1 Paket - Mengikuti pameran di Propinsi lain 2 paket - Mengikuti Rakon WTW "E" se Kalimantan di Samarinda Kalimantan Timur 1 paket - Pembuatan miniatur Kobar di Anjungan TMII Jakarta - Penataan anjungan Kobar di TMII Jakarta	- 100 100 100 100
	c.Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	Pelatihan pemandu wisata bagi guide / pramuwisata Kobar sebanyak 25 orang	100
2.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		
	a.Pengembangan objek pariwisata unggulan	- Upah petugas jaga dan kebersihan di lokasi obyek wisata 13 orang - Biaya perawatan lokasi obyek wisata (7 lokasi x 4 triwulan) 28 kali - Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan pemungutan retribusi sektor pariwisata di Bugamraya 1 paket - Rehabilitasi ringan dan pengecatan jembatan dan anjungan dermaga di Pantai Kubu 1 paket - Pengecatan pesawat dan pagar di Monumen Palagan Sambi 1 paket	2,86 100 99,90 100 100
	b.Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	- Pembuatan siring dari sungai ke parit tengah lokasi obyek wisata Pantai Kubu 153 M - Pengadaan lemari vitrin untuk menyimpan benda-benda kuno/ sejarah di Istana Al Nursari Kec. Ktw. Lama 3 buah - Pembuatan jembatan di lokasi obyek wisata Pantai Kubu 10 M2 - Pemasangan jaringan air bersih 1 paket - Pembuatan taman dan listrik di lokasi obyek wisata P. Kubu (sebelah timur) 1 paket	100 100 100 100 100

		<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan instalasi listrik di lokasi Obyek Wisata Kubu 1 paket 100 - Pembuatan pintu gerbang dan pos retribusi masuk obyek wisata Bugamraya 1 paket 100 - Pembangunan pintu gerbang motif keping masuk lokasi obyek wisata P. Kubu (sebelah barat) 1 buah 100 - Penataan lokasi obyek wisata Danau Gatal (Pembuatan 2 buah shelter, 2 wc umum dan 1 buah sumur gali) 1 paket 100 - Pembuatan pagar di lokasi obyek wisata P. Kubu (sebelah barat) tahap I 125 M 100 - Pembuatan siring di Istana Kuning 62 M 100 - Pembuatan pagar keliling rumah adat di Desa Pasir panjang tahap I 200 M 100 - Rehabilitasi Kolam Pangeran Mangkubumi P. Bun 1 paket 100 - Pemasangan plafond dan tawing layar Istana AlNursari di Kec. Ktw. Lama 80 M2 100 - Pembuatan mainan anak-anak di obyek wisata Kubu (Patung binatang dan ikan) 5 buah 100 - Biaya perencanaan dan pengawasan teknis 1 paket 100 	
3.	<p>Program Pengembangan Kemitraan</p> <p>a. Pengembangan dan penguatan informasi dan database</p> <p>b. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya</p> <p>c. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya</p> <p>d. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perjalanan dinas pendataan ke 6 Kecamatan 54 OH / 30 OK 100 - Pengolahan laporan hasil pendataan 100 - Sosialisasi/ pelatihan pelaku pariwisata, seni dan budaya di Kobar 75 orang 100 - Pembentukan Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat Kobar (FORKALA) 100 - Pelatihan peningkatan manajemen hotel di Kobar sebanyak 25 orang 100 	

5.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat adalah mempunyai dua unsur satuan kerja teknis dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

a. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat.

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Kabag Tata Usaha, membawahi :
 - ♦ Kasubag Kepegawaian.
 - ♦ Kasubag Keuangan.
 - ♦ Kasubag Umum
 - ♦ Kasubag Program dan Pelaporan.

3. Kasubdin Obyek dan Daya Tarik Wisata, membawahi :
 - ♦ Kasi Obyek Wisata
 - ♦ Kasi Atraksi Wisata
 - ♦ Kasi Rekreasi dan Hiburan Umum
4. Kasubdin Sarana Wisata, membawahi :
 - ♦ Kasi Akomodasi
 - ♦ Kasi Jasa Transportasi
5. Kasubdin Pemasaran dan Penyuluhan Wisata, membawahi :
 - ♦ Kasi Promosi dan Informasi
 - ♦ Kasi Bimbingan Wisata
6. Kasubdin Pembinaan Mitra Usaha, membawahi :
 - ♦ Kasi Perijinan
 - ♦ Kasi Bina Produksi
 - ♦ Kasi Pengawasan dan Ketertiban
7. Kasubdin Pembinaan Seni dan Budaya, membawahi :
 - ♦ Kasi Pembinaan Seni dan Budaya Daerah
 - ♦ Kasi Pelestarian Cagar Budaya dan Obyek Bersejarah

c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat

Tugas Pokok Dinas Pariwisata Seni dan Budaya adalah bertugas membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pariwisata Seni dan Budaya, sedangkan fungsinya yaitu merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan perijinan kegiatan dibidang pariwisata seni dan budaya. Mengelola tugas umum ketatausahaan di bidang pariwisata, seni dan budaya.

d. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat.

1). V i s i.

Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai visi sebagai berikut : “ **Terwujudnya Kotawaringin Barat Sebagai Pintu Gerbang Pariwisata Kalimantan Tengah Yang Berwawasan Lingkungan** “

2). M i s i.

Sebagai tindak lanjut dari visi maka disusun misi yang merupakan pernyataan penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara terukur, obyektif dan spesifik harus dipedomani sebagai landasan kerja.

Guna mencapai visi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kotawaringin Barat tersebut maka ditetapkan misi yang meliputi :

- a. Meletakkan dasar – dasar hukum kepariwisataan daerah.
- b. Meningkatkan penelitian dalam rangka pembangunan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata daerah.
- c. Meningkatkan perlindungan terhadap kesenian dan budaya daerah sebagai upaya pelestarian warisan budaya daerah.
- d. Meningkatkan pembinaan seni, budaya dan pariwisata daerah secara terpadu dalam bingkai NKRI.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait untuk mewujudkan Taman Nasional Tanjung Puting sebagai pariwisata alam yang berwawasan lingkungan.
- f. Menjadikan kesenian dan kebudayaan daerah sebagai wahana pendukung pembangunan “pariwisata alam“ daerah, dengan primadona Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).
- g. Menjadikan seni budaya daerah sebagai sarana pendidikan, persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah dan diluar sekolah.
- j. Pengembangan kualitas dan kuantitas produk pariwisata (obyek wisata alam dan atraksi) yang berwawasan lingkungan, bertumpu pada pesona alam serta seni dan budaya daerah yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi.
- k. Menjadikan seni budaya dan obyek wisata sebagai wahana pemberdayaan ekonomi rakyat untuk menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, khususnya bagi industri kecil dan menengah.
- l. Mengembangkan kualitas profesionalisme para pelaku pariwisata agar mampu bersaing dengan daerah lainnya khususnya di Kalimantan Tengah.
- m. Mewujudkan kegiatan seni budaya dan pariwisata sebagai salah satu andalan untuk mendukung pendapatan daerah.

e. Kebijakan/Strategi dari Dinas/Badan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka telah diambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk berbagai rencana, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan. Selama tahun 2007 seluruh aktivitas dan kegiatan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum dilaksanakan melalui 5 (lima) kebijakan yang terdiri dari :

1. Menyediakan fasilitas umum yang memadai dalam upaya untuk meningkatkan minat pengunjung / wisatawan ke obyek wisata yang ada.
2. Meningkatkan aktifitas sanggar seni budaya dan perkumpulan olah raga tradisional.
3. Kegiatan penelitian, survey, monitoring dan pengumpulan data obyek dan daya tarik wisata.
4. Peningkatan dan pengembangan pemasaran pariwisata, seni dan budaya daerah.
5. Kegiatan kemitraan dengan pelaku industri pariwisata.

5.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.

Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 3.b.5.4.1 sebagai berikut :

Tabel. 3.b.5.4.1
Pegawai Menurut Pendidikan.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	S2	-	-	-	-	-
2	S1	6	-	-	-	6
3	Sarjana Muda	2	-	-	-	2
4	SLTA	15	-	-	-	15
5	SLTP	1	-	-	-	1
6	SD	1	-	-	-	1
Jumlah		25	-	-	-	25

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada tabel 3.b.5.4.2 sebagai berikut :

Tabel. 3.b.5.4.2.
Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Golongan I/a	1	-	-	-	1
	Golongan I/b	1	-	-	-	1
	Golongan I/c	-	-	-	-	-
	Golongan I/d	-	-	-	-	-
	Jumlah Gol I	2	-	-	-	2
2.	Pengatur Muda (II/a)	2	-	-	-	2
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-	-	-
	Pengatur (II/c)	2	-	-	-	2
	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	-	-	-	1
	Jumlah Gol II	5	-	-	-	5
3.	Penata Muda (III/a)	1	-	-	-	1
	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	-	-	-	1
	Penata (III/c)	4	-	-	-	4
	Penata Tingkat I (III/d)	6	-	-	-	6
	Jumlah Gol III	12	-	-	-	12
4.	Pembina (IV/a)	4	-	-	-	4
	Pembina Tingkat I (IV/b)	3	-	-	-	3
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-
	Jumlah Gol IV	7	-	-	-	7

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah Pejabat Struktural Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Jabatan Struktural dan Fungsional terdapat pada tabel 3.b.5.4.3 sebagai berikut :

Tabel. 3.b.5.4.3.
Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	Menurut Jabatan Struktural					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II b	1	-	-	-	1
	Eselon III a	6	-	-	-	6
	Eselon IV a	11	-	-	-	11
	Staf	9	-	-	-	9
	Jumlah	27	-	-	-	27
2	Menurut Jabatan Fungsional					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II b	-	-	-	-	-
	Eselon III a	-	-	-	-	-
	Eselon IV a	-	-	-	-	-
	Staf	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-

d. Jumlah Pegawai Tidak Tetap.

No	Uraian	Jumlah
1.	Pegawai Kontrak SK Kepala Dinas	14
	Total	14

5.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.

a. Belanja Tidak Langsung.

Berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh alokasi anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukkan bagi Gaji Pegawai sebesar Rp. 935.140.259,- dan sampai akhir bulan Desember 2007 telah direalisasikan (dibelanjakan) sebesar Rp. 792.704.750,- dengan sisa (saldo) sebesar Rp. 142.435.509,-

b. Belanja Langsung.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 90,36 % dengan rincian pada tabel 3.b.5.5. sebagai berikut :

Tabel 3.b.5..5.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Selisih Anggaran (Rp.)	Capaian Indikator Kinerja (%)
			Fisik (%)	Keuangan		
				(Rp.) (%)		
1.	Belanja Pegawai					
	Honorarium tidak tetap	30.228.775	100	21.655.300	71,64	80
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.485.000	100	37.660.000	4,60	90
	Belanja Kursus-kursus singkat/ pelatihan	28.500.000	100	27.000.000	94,74	99
	Upah kerja	81.500.000	100	63.600.000	78,10	81
	Honor tenaga ahli/ infrastruktur/ nara sumber	34.970.000	100	33.995.000	97,21	99
2.	Belanja Barang Jasa					
	Belanja bahan pakai habis	178.044.000	100	153.195.660	86,04	90
	Belanja perjalanan dinas	99.400.000	100	98.626.000	99,22	100
	Belanja pemeliharaan konstruksi/ pembelian gedung kantor	7.800.000	100	7.800.000	100	0
	Belanja pakaian kerja lapangan	8.500.000	100	6.750.000	79,41	85
	Pendidikan dan pelatihan formal	48.000.000	100	47.226.000	98,78	96
	Belanja cetak dan penggandaan	106.800.000	100	106.400.000	99,62	100
	Belanja pemeliharaan	56.000.000	100	35.610.000	63,58	67
3.	Belanja Modal					
	Belanja modal pengadaan patung	1.800.000	100	1.800.000	100	0
	Belanja modal pengadaan maket/ miniatur/ diorama	33.000.000	100	32.900.000	99,69	100
	Belanja pemeliharaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air	30.000.000	100	29.700.000	99,01	100
	Belanja pemeliharaan konstruksi tugu peringatan	30.000.000	100	29.375.000	97,91	100
	Belanja modal pengadaan almari	19.722.000	100	19.350.000	98,14	99
	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan orang	17.500.000	100	17.200.000	98,28	100
	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	150.000.000	100	142.354.000	94,90	99
	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/ minum	7.500.000	100	7.500.000	100	0
	Belanja modal pengadaan lampu hias taman	32.000.000	100	30.650.000	95,78	97
	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	25.000.000	100	24.000.000	96	100
	Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung gudang	402.600.000	100	395.250.000	98,17	100
	Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian bangunan bersejarah	140.000.000	100	137.640.000	98,31	99
	Belanja modal pengadaan patung	65.000.000	100	62.800.000	96,61	99
	Jumlah	1.684.349.775		1.570.036.960		114.312.815

5.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Adapun proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007 adalah berdasarkan :

-) Musrebang
-) KUA
-) PPAS
-) RKA SKPD

5.8. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2007 sebagaimana pada tabel 3.b.5.7. berikut.

Tabel 3.b.5.7.
Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis>Nama Barang	Merk/Tahun Pembuatan	Jumlah		Harga Sat (Rp.)	Kondisi
			Vol	Sat		
1	2	3	4	5	6	7
I	Tanah & Bangunan					
1.	Tanah Bangunan/Kantor	2001	4,448	M2	50.000.000	Baik
2.	Bangunan Kantor Induk	2001	300	M2	100.000.000	Baik
3.	Bangunan Tempat Parkir	2004	60	M2	15.742.000	Baik
4.	Pagar Keliling	2001	300	M'	-	Baik
II	Perlengkapan Gedung Kantor					
1.	Teralis Besi Kantor	2001	-	M2	-	Baik
2.	Horden Kantor	2003	16	Lbr	8.240.000	Baik
3.	Meja Kepala Dinas	2001	1	Bh	700.000	Baik
4.	Kursi Kepala Dinas	2005	1	Bh	1.300.000	Baik
5.	Meja Kasubdin/ KTU	2001	6	Bh	4.200.000	Baik
6.	Kursi Kasubdin/ KTU	2001	6	Bh	2.700.000	Baik

1	2	3	4	5	6	7
7.	Meja Kasi dan Staff	2001	19	Bh	11.800.000	Baik
8.	Kursi Kasi dan Staff	2001	7	Bh	3.150.000	Baik
9.	Meja Rapat	2002	10	Bh	6.950.000	Baik
10.	Meja Biro	2002	2	Bh	3.000.000	Baik
11.	Kursi Putar	2005	2	Bh	3.000.000	Baik
12.	Meubelair Ruang Pimpinan	2001	2	Set	3.800.000	Baik
13.	Kursi Lipat	2001/2002	48	Bh	7.200.000	Baik
14.	Kursi Plastik	2001	2	Bh	70.000	Baik
15.	Filling Kabinet	2002	4	Bh	5.200.000	Baik
16.	Lemari Kaca/ Pajangan	2005	1	Bh	3.000.000	Baik
17.	Lemari Besi 2 pintu	2001/2002	5	Bh	7.700.000	Baik
18.	Lemari Rak Buku	2002	1	Bh	2.825.000	Baik
19.	Lemari Pajangan	2006	2	Bh	600.000	Baik
20.	Rak Arsip	2001	4	Bh	14.000.000	Baik
21.	Bufet TV	2005	1	Bh	1.500.000	Baik
22.	Tiang Bendera	2001	1	Bh	300.000	Baik
23.	Kipas Angin	2001-2005	7	Bh	2.225.000	Baik
24.	Jam Dinding	2001	1	Bh	55.000	Baik
III Peralatan Gedung Kantor						
1.	AC diruang Pimpinan	2004	1	Bh	3.750.000	Baik
2.	AC diruang Aula dan Komputer	2005	2	Bh	12.000.000	Baik
3.	Mesin Pemotong Rumput Gendong	2002/2004	4	Bh	11.000.000	Baik
IV Peralatan & Perlengkapan Kantor						
1.	Komputer / PC	2001-2005	5	Unit	82.500.000	Baik
2.	Note Book/ Laptop	2004	1	Bh	15.000.000	Baik
3.	Printer LQ 2180	2005	1	Bh	6.500.000	Baik
4.	Mesin Tik	2001-2005	6	Bh	12.900.000	Baik
5.	Wireless	2004	1	Bh	1.250.000	Baik
6.	Brankas	2004	1	Bh	7.000.000	Baik
7.	Faximile	2002	1	Bh	2.900.000	Baik
8.	Telepon	2001/2004	2	Bh	300.000	Baik
9.	Kamera	2002	1	Bh	1.500.000	Baik
10.	Handycam	2004	1	Bh	10.000.000	Baik
11.	Televisi	2004-2005	2	Bh	6.750.000	Baik
12.	VCD Player	2004	1	Bh	1.000.000	Baik
13.	Antena Parabola	2005	1	Bh	1.950.000	Baik
V Kendaraan Dinas / Operasional						
1.	Kendaraan Roda Dua	2001	5	Bh	-	Baik
VI Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.						
1.	Daya Listrik yang digunakan	2001	6600	Watt	-	Baik

5.8. Permasalahan dan Solusi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan program dan kegiatan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan dan ketrampilan personil belum merata, hampir 90 % tidak memiliki latar belakang pengetahuan tentang kepariwisataan pada umumnya dan perencanaan/ pelaporan pada khususnya.
- b. Pelaksana kegiatan pada umumnya belum memenuhi standar waktu sebagaimana diisyaratkan.
- c. Terbatasnya sumber dana/ anggaran pembangunan, sehingga berbagai rencana pembangunan yang sudah diprogramkan belum terlaksana dengan maksimal.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur baik mobilitas/ kendaraan operasional, ruangan yang kurang representatif lagi, peralatan dan perlengkapan kantor yang masih kurang.
- e. Koordinasi eksternal maupun internal yang kurang maksimal.
- f. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah, terutama dari pusat yang berubah – ubah dengan cepat.

Solusi yang diharapkan dapat untuk mengurangi dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan sumber daya apatur dengan tetap memprogramkan berbagai peningkatan pendidikan baik secara formal / non formal, diklat / kursus teknis kepariwisataa/ Perencanaan / Pelaporan, penjejangn struktural, upaya ini diharapkan dapat menghasilkan personil yang handal dan profesional.
- b. Mengikutsertakan personil untuk mengikuti kursus manajemen pengelolaan kegiatan / pengadaan barang dan jasa baik yang diadakan di daerah maupun luar daerah / pusat.
- c. Perlunya penambahan anggaran yang proporsional guna mendukung program dan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik lainnya.
- d. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur.
- e. Memantapkan koordinasi dan konsultasi baik sesama unit kerja perangkat daerah maupun dengan propinsi dan pusat.
- f. Mengupayakan revisi / perbaikan dan pembuatan perda baru terhadap perangkat peraturan yang melandasi bidang kepariwisataan maupun peraturan bidang umum lainnya yang berkaitan dengan kewenangan dinas.

6. Industri dan Perdagangan

6.1 Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat, dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2007.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel : 3.b.6.1. sebagai berikut :

Tabel 3.b.6.1.
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan pembangunan sektor industri dan perdagangan yang mengolah hasil pertanian, kehutanan dan pertambangan.	Fungsi : Ekonomi Sub Fungsi : Industri dan Perdagangan	1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1. Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen 2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen 3. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 4. Operasionalisasi dan Pengembangan Kemetrolagian Daerah
2.	Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang dapat menjamin peningkatan disparitas pendapatan bagi masyarakat ekonomi lemah dan menengah.		2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 3. Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1. Pengembangan Informasi Peluang Pasar perdagangan luar negeri 2. Pengembangan Database Informasi Potensi Unggulan 1. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan. 2. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri 3. Pengembangan Pasar dan Dsitribusi Barang Produk

1	2	3	4	5
			4. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	1. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri 2. Penguatan Kemampuan Industri berbasis Teknologi
			5. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
			6. Peningkatan kemampuan Industri kecil dan menengah	1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

6.2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam Tahun 2007 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		
1.1	Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	- Meningkatnya kesadaran hukum Pelaku Usaha dan Konsumen akan hak dan kewajibannya.	50
1.2	Fasilitasi penyelesaian permasalahan – permasalahan pengaduan konsumen	- Terpenuhinya Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	100
1.3	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	- Terpenuhinya peningkatan pengawasan barang dan jasa	98
1.4	Operasionalisasi dan Pengembangan Kemetrolagian Daerah	- Terpenuhinya Tera dan Tera Ulang Alat – alat Ukur UTTP. - Pengawasan Barang dan Jasa Beredar.	73 100
2.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.		
2.1	Pengembangan Informasi Peluang Pasar perdagangan luar negeri	- Terbukanya peluang pasar produk lokal	100
2.2	Pengembangan Database Informasi Potensi Unggulan.	- Terdatanya 100 buah perusahaan dari 500 buah perusahaan yang ditargetkan selama 5 tahun.	100

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.		
3.1 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk	- Lancarnya distribusi barang produk	0
3.2 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.	- Lancarnya sistem dan jaringan informasi perdagangan.	0
3.3 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	- Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	100
4. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi		
4.1 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	- Meningkatnya pengetahuan dan kualitas sumber daya aparatur pembina.	100
4.2 Penguatan Kemampuan Industri berbasis Teknologi	- Meningkatnya keahlian dan kemampuan perajin untuk menghasilkan produk yang berkualitas.	0
5. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		
5.1 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	- Lancarnya jalinan kemitraan dengan swasta	0
6. Peningkatan kemampuan Industri kecil dan menengah		
6.1 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	- Tersedianya Wirausaha / perajin industri Dagang kecil Menengah(IDKM) yang terlatih dan terampil.	17

6.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

a. Susunan Organisasi Dinas

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Kabag Tata Usaha, membawahi :
 - ♦ Kasubag Kepegawaian.
 - ♦ Kasubag Keuangan.
 - ♦ Kasubag Umum.
 - ♦ Kasubag Perlengkapan.
3. Kasubdin Bina Program, membawahi :
 - ♦ Kasi Perencanaan Industri
 - ♦ Kasi Perencanaan Perdagangan
 - ♦ Kasi Fasilitasi Iklim Usaha
 - ♦ Kasi Evaluasi dan Pelaporan
4. Kasubdin Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar, membawahi :
 - ♦ Kasi Perlindungan Konsumen
 - ♦ Kasi Kasi Pengawasan Barang Elektronik
 - ♦ Kasi Pengawasan Barang Makanan dan Minuman
 - ♦ Kasi Pengawasan Kemetrolagian
5. Kasubdin Industri, membawahi :
 - ♦ Kasi Sarana Industri
 - ♦ Kasi Bimbingan Usaha
 - ♦ Kasi Bimbingan Produksi
 - ♦ Kasi Pengawasan Pencemaran

6. Kasubdin Usaha Perdagangan, membawahi :
- ♦ Kasi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan
 - ♦ Kasi Ekspor dan Impor
 - ♦ Kasi Pendaftaran Perusahaan
 - ♦ Kasi Pengadaan Penyaluran dan Pemantauan Harga

6.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.

Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 3.b.6.4.1 sebagai berikut :

Tabel. 3.b.6.4.1.
Pegawai Menurut Pendidikan.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	S2	--	-	2	--	2
2	S1	--	10	--	2	8
3	Sarjana Muda	--	1	--	--	1
4	SLTA	--	20	--	--	20
5	SLTP	--	1	--	--	1
6	SD	--	--	--	--	--
	Jumlah		32	2	2	32

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 29 menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada tabel 3.b.6.4.2 sebagai berikut :

Tabel. 3.b.6.4.2.
Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
I	Menurut Golongan					
	Golongan IV	-	6	1	1	6
	Golongan III	-	21	-	1	20
	Golongan II	-	5	-	-	5
	Golongan I	-	1	-	-	1
	Jumlah	-	33	1	2	32

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Jabatan Struktural dan Fungsional terdapat pada tabel 3.b.6.4.3 sebagai berikut :

Tabel. 3.b.6.4.3.
Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Menurut Jabatan Struktural					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II b	1	1	-	-	1
	Eselon III a	5	5	-	-	5
	Eselon IV a	20	16	-	-	16
	Fungsional	-	1	-	-	1
	Staf	-	9	-	-	9
	Jumlah	26	32	-	1	32

6.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.

b. Belanja Tidak Langsung.

Berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh alokasi anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukkan bagi Gaji Pegawai sebesar Rp. 1.030.743.600,- dan sampai akhir bulan Desember 2007 telah direalisasikan (dibelanjakan) sebesar Rp. 1.069.779.460,- dengan sisa (saldo) sebesar Rp. 39.035.860,-. Realisasi Gaji Pegawai lebih besar dari plafon anggaran, hal tersebut disebabkan adanya kenaikan gaji pokok, tunjangan jabatan struktural dan kenaikan tunjangan kinerja.

c. Belanja Langsung.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 61,07% dengan rincian pada tabel 3.b.6.5. sebagai berikut :

Tabel 3.b.6.5.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Selisih Anggaran (Rp.)	Capaian Indikator Kinerja (%)	
			Fisik (%)	Keuangan (Rp.)			
				(%)			
1.	Belanja Pegawai	316.287.800	81,94	259.158.000	81,94	57.129.800	81,94
2.	Belanja Barang Jasa	954.904.400	55,99	457.013.637	55,99	497.890.763	55,99
3.	Belanja Modal	687.807.800	66,45	534.654.739	66,45	153.153.061	66,45
	Jumlah	1.959.000.000		1.250.826.376		708.173.624	

6.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007 yang dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Adapun proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan meliputi :

-) Musrenbang Kecamatan
-) Forum SKPD
-) Musrenbang Kabupaten
-) RKA SKPD
-) DPA – SKPD

6.7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2007 sebagaimana pada tabel 3.b.6.7. berikut.

Tabel 3.b.6.7.
Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis/Nama Barang	Merk/Tahun Pembuatan	Jumlah		Harga Sat (Rp.)	Kondisi
			Vol	Sat		
1	2	3	4	5	6	7
	I. Tanah dan Bangunan					
1	Tanah Ruang Kerja	1991	1575	M ²	--	Baik
2	Tanah Rumah Dinas	1978	600	M ²	--	Baik
3	Tanah Gedung Kantor	1980	1440	M ²	--	Baik
4	Tanah Gedung Kantor	1978	1230	M ²	--	Baik
5	Ruang Kerja	1971	--	M ²	--	Baik
6	Gedung Kantor	1981	--	M ²	--	Baik
7	Bangunan Gedung Gudang dan Tempat Parkir	2007	147	M ²	143.648.637	Baik
8	Pintu Pagar Depan		30	M ²	6.550.000	Baik
9	Pagar Depan	2005	2	Pasang	17.100.000	Baik
10	Pagar dan Parit (samping&belakang)	2005	160	M ²	76.000.000	Baik
11	Taman	2005	34	M ²	6.460.000	Baik
	II. Perlengkapan Gedung Kantor					
1	Lemari Besi 2 Pintu	2005	2	Buah	1.500.000	Baik
2	Filling Cabinet 4 Rak	2005	4	buah	1.500.000	Baik
3	Meja Komputer	2005	4	buah	1.600.000	Baik
4	Kursi Putar	2005	6	buah	250.000	Baik
5	AC I PK	2005	2	unit	550.000	Baik
6	Lemari Pendingin	2005	1	unit	2.000.000	Baik
7	Gordyn	2005	150	Meter	75.000	Baik
8	Kipas Angin	2005	11	buah	200.000	Baik
9	Komputer Pentium 4	2005	2	buah	15.000.000	Baik
10	Printer LQ-2180	2005	2	buah	6.000.000	Baik
11	UPS (Penyimpan Daya)	2005	5	buah	1.920.000	Baik
12	Laptop/Note Book	2005	1	buah	15.000.000	Baik
13	LCD Proyektor	2005	1	buah	15.000.000	Baik
14	TV Colour 15"	2005	1	unit	1.900.000	Baik
15	TV Colour 20"	2005	1	unit	2.200.000	Baik
16	Kamera (Tustel)	2005	1	buah	2.100.000	Baik
17	Overhead Projector	2005	1	buah	9.000.000	Baik
18	Wireless	2005	1	buah	2.500.000	Baik
19	Lemari Arsip (Kayu)	2006	2	unit	2.000.000	Baik
20	Lemari Arsip (Besi)	2006	2	unit	2.000.000	Baik
21	Lemari Arsip (Bufet)	2006	1	unit	1.950.000	Baik
22	Filling Kabinet 4 laci	2006	2	unit	1.693.750	Baik
23	Kursi Putar Tanpa Tangan	2006	2	unit	300.000	Baik
24	Mesin Tik 24 Inchi	2006	1	unit	4.500.000	Baik
25	Mesin Faximile	2006	1	unit	1.500.000	Baik
26	Mesin Potong Rumput	2006	2	unit	3.750.000	Baik
27	Meja kerja Biro Besar (Eselon II)	2006	1	unit	1.250.000	Baik
28	Meja Kerja Biro Kecil	2006	20	unit	872.525	Baik
29	Meja Staf	2006	15	unit	739.125	Baik
30	Meja Ketik	2006	5	unit	335.000	Baik
31	Meja Komputer	2006	3	unit	450.000	Baik
32	Meja Telepon	2006	2	unit	381.125	Baik
33	Kursi Kerja(Eselon II)	2006	1	unit	1.300.000	Baik
34	Kursi Kerja (Eselon IV)	2006	20	unit	290.000	Baik
35	Kursi Kerja (Eselon III)	2006	2	unit	900.000	Baik
36	Kursi Kerja Staf	2006	15	unit	285.000	Baik
37	Kursi Lipat	2006	74	unit	200.000	Baik
38	Rotary Light Player	2006	2	buah	4.950.000	Baik

39	Komputer Pentium 4	2006	1	buah	15.000.000	Baik
40	Printer Multi Purpose	2006	1	buah	6.250.000	Baik
41	Design Website Lengkap (1 Paket)	2006	1	Paket	29.600.000	Baik
42	Papan Pengumuman	2006	2	buah	1.100.000	Baik
43	Calculator Cetak	2006	2	buah	450.000	Baik
44	Papan Nama	2006	1	Paket	0	Baik
45	Meja Biro Kecil ukuran 150 x 70 x 75	2006	2	unit	2.000.000	Baik
46	Kursi Putar menggunakan sandaran tangan	2006	2	unit	650.000	Baik
47	Kursi Lipat sandaran dilapis busa sintetis	2006	5	unit	250.000	Baik
48	Handy Camp	2006	1	unit	7.500.000	Baik
49	Wireless Meeting Amplifier Model WA-622 DRC dilengkapi 2 Mic dan Baterai Kering	2006	1	unit	8.400.000	Baik
50	Mega Pon	2006	1	unit	600.000	Baik
51	Meteran	2006	1	Rol	80.000	Baik
52	Takaran Kering	2006	1	Set	200.000	Baik
53	Takaran Basah	2006	1	Set	350.000	Baik
54	Pernier Caliper	2006	1	unit	300.000	Baik
55	Timbangan Centesimal	2006	1	unit	6.750.000	Baik
56	Timbangan Meja	2006	1	unit	750.000	Baik
57	Timbangan Dacin Logam	2006	1	unit	750.000	Baik
58	Timbangan Neraca	2006	1	unit	2.900.000	Baik
59	AC Mobil Roda 4 No. Compressor 07F0542HFC-134a	2006	1	unit	6.400.000	Baik
60	Tape Mobil	2006	1	unit	2.000.000	Baik
61	Ban Mobil	2006	4	buah	1.400.000	Baik
62	Sepeda Motor 110 cc	2007	5	unit	74.500.000	Baik
63	Gedung Gudang (110M2) dan Garasi (37 M2)	2007	1	Paket	143.648.637	Baik
65	Mesin Tik Manual 18 Inchi	2007	1	unit	5.400.000	Baik
66	Mesin Hitung / Kalkulator	2007	2	unit	700.000	Baik
67	Lemari 2 Pintu Kiri-Kanan Bahan Besi/Metal	2007	2	unit	3.800.000	Baik
68	Filling Cabinet 4 Laci Bahan Besi/Metal	2007	1	unit	1.700.000	Baik
69	White Board	2007	1	unit	450.000	Baik
70	Bahan Tripleks (mengkilat) Ukuran P: 244 Cm, L: 122 Cm, T: 190 Cm	2007				Baik
71	Jam Dinding	2007	1	unit	250.000	Baik
72	Laptop/Note Book	2007	1	unit	15.000.000	Baik
73	Wireless	2007	2	unit	14.000.000	Baik
	III. Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
1	Sepeda Motor	1993	1	Unit	*--*	Baik
2	Sepeda Motor	1994	1	Unit	*--*	Baik
3	Sepeda Motor	2001	1	Unit	*--*	Baik
4	Kendaraan Roda 4	2001	1	Unit	*--*	Baik
5	Kendaraan Roda 4	1996	1	Unit	*--*	*
6	Meja Kayu		2	Buah	*--*	*
7	Meja 1/2 Biro		2	Buah	*--*	*
8	Meja Kayu		27	Buah	*--*	*
9	Meja Kerja Kayu		10	Buah	*--*	*
10	Meja Kerja Kayu		1	Buah	*--*	*
11	Kursi Besi Roda		3	Buah	*--*	*
12	Kursi Besi Roda		2	Buah	*--*	*
13	Lemari Besi		4	Buah	*--*	*
14	Lemari Kayu		3	Buah	*--*	*
15	Kursi Tamu		2	Buah	*--*	*
16	Kursi Tamu		1	Buah	*--*	*

17	Kursi Kayu		43	Buah	*--*	*
18	Filling Cabinet		7	Buah	*--*	*
19	Filling Cabinet		5	Buah	*--*	*
20	Kipas Angin		1	Buah	*--*	*
21	Jam Dinding		3	Buah	*--*	*
22	Gambar Peta		2	Buah	*--*	*
23	Lemari Plywood		2	Buah	*--*	*
24	Komputer		1	Set	*--*	*
25	Mesin Ketik		5	Buah	*--*	*
26	Kursi Lipat		18	Buah	*--*	*
27	Meja Telephone		1	Buah	*--*	*
28	Kaca Hias		1	Buah	*--*	*
29	Pisau Potong Rumput		1	Buah	*--*	*
30	Timbangan Duduk 300 Kg		1	Buah	*--*	*
31	Meja Metrologi		2	Buah	*--*	*
32	Bandul Timbangan 25 Kg		9	Buah	*--*	*
33	Timbangan Besi Sg.Tig. Ter		1	Buah	*--*	*
34	Batu Timbangan 10 Kg		2	Buah	*--*	*
35	Kendaraan Dinas (Roda 2)		2	Buah	*--*	*
36	Kalkulator	2002	1	Buah	*--*	*
37	Kalkulator	2002	1	Buah	*--*	*
38	Kursi Kerja Eselon III		1	Buah	*--*	*
39	Rak Pojok		1	Buah	*--*	*
40	Kalkulator		1	Buah	*--*	*
41	Kursi Lipat Elephant		2	Buah	*--*	*
42	Komputer		1	Unit	*--*	*
43	Faximile		1	Unit	*--*	*
44	Filling Cabinet		2	Unit	*--*	*
45	Kipas Angin Besar		1	Unit	*--*	*
46	Kursi Lipat		12	Buah	*--*	*
47	Kursi Putar		4	Buah	*--*	*
48	Lemari Arsip Besi		1	Unit	*--*	*
49	Meja Komputer		1	Unit	*--*	*
50	Meja Kerja 1/2 Biro		3	Unit	*--*	*
51	Meja Meeting		2	Buah	*--*	*
52	Sound System		1	Unit	*--*	*
53	Video CD		1	Unit	*--*	*
54	Handycam		1	Unit	*--*	*
55	Kamera		1	Unit	*--*	*
56	Lemari Etalase (2x1x0,55m)		3	Unit	*--*	*
57	Lemari Etalase (1,5x1,75x0,55)		3	Unit	*--*	*
58	AC Split 1 PK		1	Unit	*--*	*
59	TV Colour 24 Inch		1	Unit	*--*	*
60	Komputer Perangkat Internet		1	Unit	*--*	*
61	Printer		1	Unit	*--*	*
62	UPS		1	Unit	*--*	*
63	Kalkulator		1	Buah	*--*	*
64	Kalkulator		2	Buah	*--*	*
65	Kalkulator		3	Buah	*--*	*
66	Brankas	2002	1	Buah	*--*	*
67	Meja Biro Sedang		5	Buah	*--*	*
68	Kursi Putar	2002	1	Buah	*--*	*
69	Kursi Putar	2002	1	Buah	*--*	*
70	Lambang Garuda	2003	2	Buah	*--*	*
71	Lambang Presiden dan Wakil Presiden	2003	2	Set	*--*	*
72	Kalkulator	2004	1	Buah	*--*	*

	IV. Kendaraan Dinas Operasional					
	Kendaraan Roda Empat					
1	- Toyota Kijang Kapsul KF50R	2002	1	Buah		Baik

2	- Daihatsu Zebra					Baik
	Kendaraan Roda Dua :					Baik
3	- Honda Astrea 800	1993	1	Buah		Baik
4	- Honda WIN	1994	2	Buah		Baik
5	- Yamaha Jupiter-Z	2007	5	Buah	14.900.000	Baik
6	- Yamaha Vega - R	2005	1	Buah		Baik
V.Instalasi Listrik /						
Penerangan Bangunan Kantor						
1	Daya Listrik yang digunakan		5500	Watt		Baik
	Rumah Jabatan/Dinas	1978	600	M ²	--	
1	Luas Bangunan	--	--	--	--	
	Rumah yang ditempati Sdr. Drs. Didie A. Runuk					
	Fasilitas yang ada didalamnya.	--	--	--	--	
2	Rumah yang ditempati Sdr. Bahrudin, SE	--	--	--	--	
	Fasilitas yang ada didalamnya.	--	--	--	--	
3	Rumah yang ditempati Sdr. H.M. Dirwani Kadir	--	--	--	--	
	Fasilitas yang ada didalamnya.	--	--	--	--	

6.8. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2007 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kebijakan yang telah ditetapkan antara lain :

- a. Terbatasnya sarana kerja penunjang pelaksanaan tugas sehari – hari seperti Komputer, laptop, Kendaraan operasional khususnya roda 2 dan lain – lain.
- b. Kurangnya tenaga terampil dibidang keahlian khusus terhadap kinerja Bidang Indag misalnya ahli program komputer, ahli dalam pengolahan data base, dan lain – lain.
- c. Kurangnya tenaga Instruktur yang mempunyai keterampilan khusus untuk pembinaan Pengusaha / Perajin disektor Indag.
- d. Keterampilan perajin masih terbatas, pengetahuan dalam mengelola usahanya masih dirasa kurang sehingga perlu peningkatan.
- e. Terbatasnya sarana, prasarana dan dana, dalam rangka Penertiban Usaha Perdagangan terutama dalam rangka Pengawasan Barang dan Jasa Beredar.
- f. Terbatasnya dana untuk membina industri terutama industri kecil dan menengah (IKM) agar lebih mampu bersaing dengan daerah lain.

Upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi guna mencapai kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya maka langkah yang telah dan akan diambil antara lain :

- a. Menambah / mengadakan sarana pendukung yang masih dirasa perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
- b. Mengirimkan / mengikutsertakan Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Pendidikan dan pelatihan teknis.
- c. Mengirimkan dan mengikutsertakan Pengusaha / perajin dalam kegiatan bimbingan penyuluhan, diklat – diklat keterampilan dan magang teknis.
- d. Lebih meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha baik dalam bidang perijinan maupun informasi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- e. Penyediaan dana yang memadai, berkesinambungan dan konsisten sehingga pembinaan kepada dunia usaha dapat dijalankan terus menerus secara menyeluruh dan bukan bersifat parsial.

7. Ketrasmigrasian

7.1. Program Dan Kegiatan.

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan program dan kegiatan dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel 3.b.7.1 sebagai berikut :

Tabel 3.b.7.1
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1.	Pelayanan bidang Ketrasmigrasian		Pengembangan wilayah transmigrasi	- Study penelitian dan perencanaan tata ruang transmigrasi

7.2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam Tahun 2007 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1.	Pengembangan wilayah transmigrasi - Study penelitian dan perencanaan tata ruang transmigrasi	- Pembuatan peta dan tata ruang transmigrasi di Desa Tanjung Putri. 550 KK.	100

7.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menangani **bidang Ketransmigrasian** mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program – program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

a. Susunan Organisasi Dinas

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari

1. Kepala Dinas
2. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - Kasubag Kepegawaian
 - Kasubag Keuangan
 - Kasubag Umum
 - Kasubag Program dan Pelaporan
3. Kasubdin Permukiman , Penempatan dan PP
 - Kasi Penyiapan Areal Permukiman dan PP
 - Kasi Penataan Lingkungan
 - Kasi Permasalahan Tahan, Lahan dan Prasarana
 - Kasi Penempatan dan Penataan Penduduk

4. Kasubdin Pembinaan
 - Kasi Produksi dan Pengolahan Hasil Produksi
 - Kasi Kelembagaan Ekonomi Pemasaran dan Kerjasama Swasta
 - Kasi Kesehatan dan Keluarga Berencana
 - Kasi Penyerahan Pemerintahan Desa dan Penyerahan UPT
5. Kasubdin Penempatan Tenaga Kerja
 - Kasi Penempatan Tenaga Kerja
 - Kasi Perluasan Kerja
6. Kasubdin Pelatihan dan Produktivitas Tenaga kerja
 - Kasi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Kasi Perijinan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan
7. Kasubdin Hubin Syaker dan Pengawasan
 - Kasi Hubungan Industrial
 - Kasi Persyaratan dan Norma Kerja
 - Kasi Keselamatan Kesehatan Kerja

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas pokok Pemerintah Daerah dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

- Fungsi

Pembinaan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaras dengan kebutuhan yang sesuai dengan peluang potensi serta kebutuhan daerah yang sinergis dengan rencana pembangunan daerah.

c. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat**- Visi**

Terwujudnya tenagakerja dan masyarakat transmigrasi yang produktif, kompetitif dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

- Misi

1. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja
2. Mendorong perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan penempatan tenaga kerja.
3. Meningkatkan kualitas hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta adanya ketenagaan berusaha bagi pengusaha dan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja.
4. Mewujudkan jaminan kepastian hukum.
5. Mengembangkan potensi sumber daya kawasan dan memfasilitasi perpindahan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pengembangan desa potensial yang berwawasan lingkungan.

d. Kebijakan / Strategi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat**- Kebijakan**

1. Pembinaan dan Pelatihan tenaga kerja terampil untuk mengembangkan kegiatan usaha industri kecil dan menengah.
2. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
3. Meningkatkan pelayanan umum dibidang ketenagkerjaan.
4. Mengembangkan agrobisnis.

- Strategi

Merumuskan standar dan prosedur untuk mengembangkan sumber daya manusia di Kabupaten Kotawaringin Barat.

7.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

a. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 3.b.7.4.1 sebagai berikut :

Tabel 3.b.7.4.1.
Pegawai Menurut Pendidikan

No.	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	S 2	-	-	-	-	-
2.	S 1	1	20	-	-	21
3.	Sarjana Muda	-	3	-	-	3
4.	SLTA	2	30	-	-	32
5.	SLTP	1	2	-	-	3
6.	SD	1	3	-	-	4
	Jumlah	5	58	-	-	63

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat menurut pangkat dan golongan, terdapat pada tabel 3.b.7.4.2 sebagai berikut :

Tabel . 3.b.7.4.2.
Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No.	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Golongan I/a	1	-	-	-	1
	Golongan I/b	1	-	-	-	1
	Golongan I/c	-	-	-	-	-
	Golongan I/d	-	-	-	-	-
	Jumlah Gol I	2	-	-	-	2
2.	Golongan II/a	2	5	-	-	7
	Golongan II/b	-	-	-	-	-
	Golongan II/c	-	2	-	-	2
	Golongan II/d	-	2	-	-	2
	Jumlah Gol II	2	9	-	-	11
3.	Golongan III/a	1	11	-	-	12
	Golongan III/b	-	16	-	-	16
	Golongan III/c	-	10	-	-	10
	Golongan III/d	-	6	-	-	6
	Jumlah Gol III	1	43	-	-	44

4.	Golongan IV/a	-	2	-	-	2
	Golongan IV/b	-	3	-	-	3
	Golongan IV/c	-	1	-	-	1
	Golongan IV/d	-	-	-	-	-
	Jumlah Gol IV	-	6	-	-	6

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah Pejabat Struktural Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Jabatan Struktural dan Fungsional terdapat pada tabel 3.b.7.4.3 sebagai berikut :

Tabel. 3.b.7.4.3.
Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Menurut Jabatan Struktural					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II b	-	1	-	-	1
	Eselon III a	-	6	-	-	6
	Eselon IV a	-	19	-	-	19
	Staf	-	2	-	-	32
	Jumlah	-	58	-	-	58
2.	Menurut Jabatan Fungsional					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II b	-	-	-	-	-
	Eselon III a	-	-	-	-	-
	Eselon IV a	-	-	-	-	-
	Fungsional Staf	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-

d. Jumlah Pegawai Tidak Tetap

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tukang Kebun	2
2.	Sopir	1
3.	Jaga Malam	1
	Jumlah	4

7.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

a. Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh alokasi anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukkan bagi Gaji Pegawai sebesar Rp. 1.824.864.300,- dan sampai akhir bulan Desember 2007 telah direalisasikan (dibelanjakan) sebesar Rp. 1.768.962.421,- dengan sisa (saldo) sebesar Rp. 55.901.879,-

b. Belanja Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 98,76 % dengan rincian pada tabel 3.b.7.5. sebagai berikut :

Tabel 3.b.7.5
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Selisih Anggaran (Rp.)	Capaian Indikator Kinerja (%)
			Fisik	Keuangan		
			(%)	(Rp.)		
I.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi					98,76
1	Study Penelitian dan Perencanaan Tata Ruang Transmigrasi					
	- Belanja Pegawai	9.100.000	100	7.300.000	80,22	1.800.000
	- Belanja Barang Jasa	8.530.500	100	8.530.500	100,00	-
	- Biaya Study dan Perencanaan	240.000.000	100	238.600.000	99,42	1.400.000
	Jumlah	257.630.500	100	254.430.500	98,76	3.200.000

7.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Adapun proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2007 adalah berdasarkan :

- Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan
- Hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten
- RPJP, RPJM dan Renstra Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I
- Rantek Bidang Ketransmigrasian.

7.7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2007 sebagaimana pada table 3.b.7.7. berikut :

Tabel 3.b.7.7.
Kondisi Sarana dan Prasarana

No.	Jenis / Nama Barang	Merk / Tahun Pembuatan	Jumlah		Harga Sat (Rp.)	Kondisi
			Vol	Sat		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Tanah & Bangunan					
1.	Bangunan Gedung Work Shop		96	m2	1.418.229	Baik
2.	Bangunan Gedung / Paving Stone		740.400	m2	67	Baik
II.	Perlengkapan Gedung Kantor					
1.	Teralis Besi Kantor		140	m2	146.500	Baik
2.	Horden Kantor		140	m2	97.500	Baik
3.	Dispenser		3	Buah	865.000	
4.	Meja & Kursi Kasubdin		3	Set	1.845.000	Baik
5.	Jam Dinding Pagol		1	Buah	145.000	
6.	Jam Dinding Maspion		6	Buah	140.000	
7.	Lemari Besi 2 Pintu		2	Buah	1.350.000	Baik
8.	Lemari Arsip Kayu		7	Buah	710.000	Baik
9.	Mesin Tik		4	Buah	2.225.000	

III.	Peralatan Gedung Kantor					
1.	Mesin Pemotong Rumput Gendong		1	Buah	3.750.000	Baik
IV.	Peralatan & Perlengkapan Kantor					
1.	Komputer / PC		3	Unit	14.500.000	Baik Baik
2.	Note Book		2	Unit	14.150.000	
3.	Printer		3	Unit	1.475.000	
4.	LCD Projector		1	Unit	14.775.000	
5.	Kamera Digital		2	Unit	3.250.000	
6.	Faximile		1	Buah	1.285.000	
7.	Handycam		1	Buah	5.000.000	
V.	Kendaraan Dinas / Operasional					
1.	Kendaraan Roda Empat		2	Unit		
2.	Kendaraan Roda Dua		19	Unit		
VI.	Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.					
1.	Daya Listrik yang digunakan		17.400	Watt		
VII.	Rumah Jabatan / Dinas					
1.	Luas Bangunan		128	m		

8. Ekonomi Pembangunan

8.4 Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas / Badan yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat, dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2007.

Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel : 3.b.8.1 sebagai berikut :

Tabel 3.b.8.1.
Prioritas Pembangunan , Program dan Kegiatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	1. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan pertambangan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pertambangan	Fungsi : Ekonomi Sub Fungsi : Pertambangan	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan
2	Peningkatan Pelayanan Fasilitas Umum Penerangan Jalan	Fungsi : Perumahan & Fasilitas Umum Sub Fungsi : Penerangan Jalan	Program Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur

8.5 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam Tahun 2007 Tingkat Pencapaian Program Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian
1.	Program : Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Kegiatan : Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	1. Kelurahan Pangkut Kec. Arut Utara 2. Koordinasi Ke Dinas Pertambangan dan Energi Prop. Kalteng	40 %
2.	Program : Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Terpasangnya penerangan jalan	98, 25 %

8.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menangani program – program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun Susunan Organisasi , Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

a. Susunan Organisasi Dinas/Badan

Struktur Organisasi pada Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Tata Praja
3. Asisten Administrasi Pembangunan
4. Asisten Administrasi
5. Kepala Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan membawahi :
 - a. Kasubag Bina Usaha Pertanian Kehutanan
 - b. Kasubag Bina Usaha Industri Dagang dan Tambang Mineral
 - c. Kasubag Bina Usaha PKM DAN Koperasi
 - d. Kasubag Bina Pembangunan Perhubungan & Pengembangan Wilayah

8.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan

Jumlah Pegawai pada Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 3.b.8.4.1 sebagai berikut :

Tabel. 3.b.8.4.1
Pegawai Menurut Pendidikan

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	S2					1
2	S1					6
3	Sarjana Muda					1
4	SLTA					3
5	SLTP					-
6	SD					-

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai pada Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada tabel 3.b.8.4.2 sebagai berikut :

Tabel. 3.b.8.4.2
Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Golongan I/a Golongan I/b Golongan I/c Golongan I/d					
	Jumlah Gol. I					
2.	Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda Tk.I (II/b) Pengatur (II/c) Pengatur Tingkat I (II/d)					3 - - -
	Jumlah Gol. II					3
3	Penata Muda (III/a) PenataMuda Tk. I (III/b) Penata (III/c) Penata Tingkat I (III/d)					3 - 3 1
	Jumlah Gol. III					7
4	Pembina (IV/a) Pembina Tingkat I (IV/b) Pembina Utama Muda (IV/c)					- 1 -
	Jumlah Gol. IV					1

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pejabat Struktural pada Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat menurut Jabatan Struktural dan Fungsional terdapat pada tabel 3.b.8.4.3 sebagai berikut :

Tabel. 3.b.8.4.3
Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Menurut Jabatan Struktural Eselon I Eselon II b Eselon III a Eselon IV a Staf					1 4 6
	Jumlah					11
2.	Menurut Jabatan Fungsional					

8.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

a. Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukkan bagi Gaji Pegawai masuk didalam anggaran belanja tidak langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Belanja Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 97,13 % rincian pada tabel 3.b.8.5 sebagai berikut :

Tabel. 3.b.8.5
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih Anggaran (Rp)	Capaian Indikator Kinerja (%)
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
I. Kegiatan : Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan						
1	Belanja Pegawai	1.080.000	100	1.080.000	-	100
2	Belanja Barang Jasa	28.520.000	44,14	13.160.300	15.359.700	46,14
	Jumlah I	29.600.000		14.240.300	15.359.700	48,11
II. Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur						
1	Belanja Pegawai	34.500.000	100	33.950.000	550.000	98,41
2	Belanja Barang Jasa	9.890.500	100	2.215.500	7.675.000	22,37
3	Belanja Modal	1.290.360.000	100	1.274.791.300	15.568.700	98,22
	Jumlah II	1.334.750.500	98,22	1.310.953.800	23.793.700	98,22
	Jumlah	1.364.350.500	97,13	1.325.194.100	39.156.400	97,13

8.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

8.7. Permasalahan Dan Solusi

1. Permasalahan

1. Terbatasnya jumlah personil pengawasan dan pembinaan di lapangan terhadap pengusaha dan masyarakat penambang.
2. Terbatasnya sumber daya aparatur teknis di bidang pertambangan.
3. Belum tersedianya alat penunjang (peta, data, alat) kegiatan pertambangan.

2. Solusi

1. Melakukan Koordinasi dengan Instansi/Badan/Dinas (Dinas KKM, Kepolisian, Bapedalda, BPN, Kehutanan) untuk melakukan pengawasan.
2. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk pembinaan teknis di bidang pertambangan.

9. P a s a r

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23 seri D) dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Nomor 807/013/Dis.Sar/A/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Uraian Tugas Dinas Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Urusan Pilihan sesuai dengan tupoksi sebagai berikut :

9.1. Program Dan Kegiatan.

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas / Badan yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat, dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2007.

Dinas Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan 7(tujuh) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel : 3.b.9.1. sebagai berikut :

Tabel 3.b.9.1.
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
	Peningkatan dan Pengembangan Sarana & Prasarana Pasar Daerah.	-Ekonomi Perdagangan. -Pengembangan Usaha Koperasi & UKM.	1. Pelayanan administrasi perkantoran.	1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik. 3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah. 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional. 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan. 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 7. Penyediaan alat tulis Kantor. 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 9. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.

				<ul style="list-style-type: none"> 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 11. Penyediaan peralatan rumah tangga. 12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 13. Penyediaan makanan & minuman. 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
		-	2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan gedung kantor. 2. Pengadaan kendaraan dinas / operasional. 3. Pengadaan mebeleur. 4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung cantor. 5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.
		-	3. Peningkatan disiplin aparatur.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan pakaian dinas deserta perlengkapannya.
		-	4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
		-	5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD. 2. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
		-	6. Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rehab Total Pasar Cempaka Kumai. 2. Rehab Total Bangunan Kantor UPT Pasar Indra Sari. 3. Rehab Atap Bangunan Pasar Indra Sari Blok D. 4. Rehab Bangunan Kios Pasar Kotawaringin Lama. 5. Peningkatan & Pembuatan Jalan Lorong / Parit Pasar Indra Sari. 6. Rehab Total Kios Blok F Pasar Indra Sari. 7. Pembuatan WC Umum Blok F Pasar Indra Sari. 8. Pembangunan Los Pasar Sayur Mayur & Ikan Kumai. 9. Rehab lanjutan bangunan Pos Retribuís Pasar Indra Sari.

		-	7. Pembinaan pedagang kaki lima dan apongan.	1. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan apongan. 2. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima & apongan.
--	--	---	--	--

9.2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam Tahun 2007 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran: 1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik. 3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah. 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional. 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan. 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 7. Penyediaan alat tulis kantor. 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 9. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor. 11. Penyediaan peralatan rumah tangga. 12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 13. Penyediaan makanan dan minuman. 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.		80 % 75 % 100 % - 90 % 100 % 100 % 95 % 98 % 100 % 100 % - 95 % 95 %
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur : 1. Pembangunan gedung kantor. 2. Pengadaan kendaraan dinas / operasional. 3. Pengadaan mebeleur. 4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor. 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.		100 % 100 % 90 % 100 % 90 %
3.	Program peningkatan disiplin aparatur : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.		100 %
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur : 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.		90 %
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan : 1. Penyusunan laboran capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD. 2. Penyusunan laboran keuangan akhir tahun.		97 % 97 %

6.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri : 1. Rehab Total Pasar Cempaka Kumai. 2. Rehab Total Bangunan Kantor UPT Pasar Indra Sari. 3. Rehab Atap Bangunan Pasar Indra Sari Blok D. 4. Rehab Bangunan Kios Pasar Kotawaringin Lama. 5. Peningkatan & Pembuatan Jalan Lorong / Parit Pasar Indra Sari. 6. Rehab Total Kios Blok F Pasar Indra Sari. 7. Pembuatan WC Umum Blok F Pasar Indra Sari. 8. Pembangunan Los Pasar Sayur Mayur & Ikan Kumai. 9. Rehab lanjutan bangunan Pos Retribuis Pasar Indra Sari.	Kec. Kumai Kec. Arsel Kec. Arsel Kec. Ktw. Lama Kec. Arsel Kec. Arsel Kec. Arsel Kec. Kumai Kec. Arsel	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
7.	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan : 1. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan. 2. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima & asongan.	Kec. Arsel, Kumai, P. Banteng,	75 % 70 %

9.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pasar adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pasar adalah :

a. Susunan Organisasi Dinas.

Struktur Organisasi Dinas Pasar terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Kabag Tata Usaha, membawahi :
 - ◆ Kasubag Peralatan & Perbekalan
 - ◆ Kasubag Keuangan.
 - ◆ Kasubag Umum
3. Kasubdin Perencanaan & Pengembangan, membawahi :
 - ◆ Kasi Perencanaan
 - ◆ Kasi Penelitian & Pengembangan
4. Kasubdin Pembinaan & Pengelolaan, membawahi :
 - ◆ Kasi Perawatan
 - ◆ Kasi Pembinaan Bangunan & Pedagang
5. Kasubdin Ketertiban & Kebersihan, membawahi :
 - ◆ Kasi Ketertiban
 - ◆ Kasi Kebersihan
6. Kasubdin Retribusi Pendapatan, membawahi :
 - ◆ Kasi Perijinan
 - ◆ Kasi Penagihan
 - ◆ Kasi Pembukuan

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar Kab. Kotawaringin Barat.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pasar dalam Perda Nomor 25 Tahun 2000 dan Nomor 29 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

Dinas Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah menyelenggarakan kewenangan Pemerintah daerah di bidang pengelolaan pasar meliputi fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian, pembinaan dan perijinan kegiatan dibidang pasar yang dipilih ke dalam kelompok :
 - a. Pembinaan dan pengelolaan.
 - b. Perencanaan dan Pengembangan.
 - c. Ketertiban dan kebersihan.
 - d. Retribusi Pendapatan.
2. Pengelolaan tugas umum ketatausahaan dibidang pasar.
3. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
4. Pelaksanaan pelayanan umum.

c. Visi dan Misi Dinas Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat.**1. Visi**

Visi Dinas Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

”Terwujudnya Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pasar Daerah Sebagai Pusat Perdagangan Dan Penggerak Ekonomi Kerakyatan, Pengusaha Kecil Dan Menengah Yang Asri Dan Berwawasan Lingkungan ”

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi diatas Dinas Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai misi yang merupakan tujuan utama dari arah perencanaan yang ingin dicapai, misi tersebut adalah :

- a. Pengembangan sarana dan prasarana Pasar Daerah, baik pasar Kabupaten, Kecamatan dan Pasar Desa.
- b. Peningkatan pemeliharaan ketertiban, keamanan dan kebersihan Pasar Pemerintah Kabupaten.
- c. Peningkatan pengawasan, pemantauan, pemeliharaan dan perawatan bangunan pasar daerah di lingkungannya.
- d. Peningkatan wawasan, pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha / pedagang.
- e. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Pasar dalam Peningkatan PAD.
- f. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- g. Peningkatan pelayanan prima.
- h. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

d. Kebijakan / Strategi dari Dinas Pasar Kab. Kotawaringin Barat.

Guna mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat menyusun suatu rencana arah kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Kebijakan tersebut adalah :

1. Meningkatkan penyediaan kios, los dan bak serta sarana dan prasarana penunjang pasar untuk memenuhi kebutuhan pedagang.
2. Melaksanakan pemeliharaan peremajaan pasar milik pemerintah daerah.
3. Meningkatkan pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar milik pemerintah daerah.
4. Akurasi dan pengembangan data pedagang pasar.
5. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pelayanan pasar.
6. Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan SDM aparatur melalui diklat, kursus-kursus dan study banding.
7. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran distribusi barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.
8. Peningkatan wawasan, pengetahuan dan kesadaran pedagang melalui penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi.
9. Pengadaan sarana dan prasarana kantor.

9.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.

Jumlah Pegawai Dinas Pasar menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 3.b.9.4.1 sebagai berikut :

Tabel. 3.b.9.4.1.
Pegawai Menurut Pendidikan.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	S2	-	-	-	-	-
2	S1	18	8	-	11	7
3	Sarjana Muda	6	3	-	3	3
4	SLTA	19	11	8	-	19
5	SLTP	3	-	1	-	1
6	SD	4	-	4	-	4
	Jumlah	50	22	13	16	34

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

Jumlah Pegawai Dinas Pasar menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada tabel 3.b.9.4.2 sebagai berikut :

Tabel. 3.b.9.4.2.
Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Golongan I/a	4	-	4	-	4
	Golongan I/b	-	-	-	-	-
	Golongan I/c	1	-	1	-	1
	Golongan I/d	-	-	-	-	-
	Jumlah Gol I	5				5
2.	Pengatur Muda (II/a)	12	1	8	3	9
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	6	-	-	6	-
	Pengatur (II/c)	1	1	-	-	1
	Pengatur Tingkat I (II/d)	2	2	-	-	2
	Jumlah Gol II	21	4	8	9	12
3.	Penata Muda (III/a)	7	1	-	6	1
	Penata Muda Tkt. I (III/b)	-	-	-	-	-
	Penata (III/c)	6	6	-	-	6
	Penata Tingkat I (III/d)	5	5	-	-	5
	Jumlah Gol III	18	12	-	6	12
4.	Pembina (IV/a)	3	3	-	-	3
	Pembina Tingkat I (IV/b)	3	3	-	1	2
	Pembina Utama Muda (IV/c)					
	Jumlah Gol IV	6	6	-	1	5

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah Pejabat Struktural Dinas Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Jabatan Struktural dan Fungsional terdapat pada tabel 3.b.9.4.3 sebagai berikut :

Tabel. 3.b.9.4.3.
Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	Menurut Jabatan Struktural					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II b	1	1	-	-	1
	Eselon III a	5	5	-	1	4
	Eselon IV a	12	10	-	2	10
	Fungsional	-	-	-	-	-
	Staf	32	6	13	13	19
	Jumlah	50	22	13	16	34
2	Menurut Jabatan Fungsional					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II b	-	-	-	-	-
	Eselon III a	-	-	-	-	-
	Eselon IV a	-	-	-	-	-
	Fungsional	-	-	-	-	-
	Staf	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-

d. Jumlah Pegawai Tidak Tetap.

No	Uraian	Jumlah
1	PHL tetap / SK berlaku terus menerus	12
2	PHL kontrak / SK diperpanjang tiap tahun	57
	Total	69

9.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.

a. Belanja Tidak Langsung.

Berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 Dinas Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh alokasi anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukkan bagi Gaji Pegawai sebesar Rp. 940.685.340,- dan sampai akhir bulan Desember 2007 telah direalisasikan (dibelanjakan) sebesar Rp. 852.223.758,- dengan sisa (saldo) sebesar Rp. 88.461.582,-

b. Belanja Langsung.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 88,35 % dengan rincian pada tabel 3.b.9.5. sebagai berikut :

Tabel 3.b.9.5.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Selisih Anggaran (Rp.)	Capaian Indikator Kinerja (%)
			Fisik (%)	Keuangan (Rp.) (%)		
1.	Belanja Pegawai					
	- Belanja langsung	653.710.500	-	521.375.700 79,75		
2.	Belanja Barang Jasa	616.353.000	-	485.669.535 78,79		
3.	Belanja Modal	1.900.936.500	-	1.793.639.000 93,30		
	Jumlah	4.111.685.340	-	3.632.907.993 88,35		

9.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Adapun proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar pada tahun 2007 adalah berdasarkan :

-) Hasil Musrenbang
-) Tingkat Desa / Kelurahan
-) Tingkat Kecamatan &
-) Tingkat Kabupaten

9.7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Dinas Pasar sampai dengan tahun 2007 sebagaimana pada tabel 2.2.7. berikut.

Tabel 2.2.7.
Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis>Nama Barang	Merk/Tahun Pembuatan	Jumlah		Harga Sat (Rp.)	Kondisi
			Vol	Sat		
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah & Bangunan					
1.	Tanah Bangunan/Kantor	-	1.311,5	M2	-	
2.	Tanah Lokasi Pasar	-	14	bdng	-	Baik
3.	Bangunan Kantor Induk	-	1	Bh	-	Baik
4.	Bangunan Kantor UPT Pasar I. Kencana	-	1	Bh	-	Baik
5.	Bangunan Kantor UPT Pasar Indra Sari	-	1	Bh	-	Baik
6.	Bangunan Gedung Aula					
7.	Bangunan / Gedung					
	- Kantor		1	Bh		
	- Gedung UPT Pasar		1	Bh	-	
	- Kios Pasar Indra Kencana		238	Bh	-	
	- Kios / Bak Pasar Indra Sari		1337	Bh	-	

1	2	3	4	5	6	7
	- Toko / Kios Ex Terminal Sei Rangit		41	Bh		
	- Bak Pelanggan Sambi		203	Bh		
	- Kios Pasar Mini		20	Bh		
	- Kios Pasar Cempaka Kumai		171	Bh	-	
	- Kios Pasar Kolam		32	Bh		
	- Kios Pasar Burung		33	Bh	-	
	- Kios Pasar Sidomulyo (P. Banteng)		1	Unt		
	- Pasar Karangmulya (P. Banteng)		2	Unt		
	- Pasar Bumiharjo		1	Unt		
	- Kios /Bak Pasar Saik		205	Bh		
	- Ruang Satpam		3	Unt		
	- Ruang Genset / Pemadam Kbkaran		1	Unt		
8.	Bangunan Tempat Parkir	2006	1	Bh		
9.	Pagar Keliling		154,5	M2		
II	Perlengkapan Gedung Kantor					
1.	Teralis Besi Kantor	2006	75	M2		Baik
2.	Teralis Besi UPTD Psr. Indra Sari					
3.	Horden Kantor	2007	80	M2		Baik
4.	Meja dan Kursi Kepala	2007	1	bh		Baik
5.	Meja & Kursi Kabid/Sekretaris	2003	7	bh		Baik
6.	Meja & Kursi Kasi dan Staff	2002	20	bh		Baik
7.	Meja Rapat	2006	1	bh		Baik
8.	Meja, Kursi Ruang Tamu	-	2	set		Baik
9.	Kursi Lipat	-	75	bh		Baik
10.	Kursi Kayu / Kursi tunggu	2007	12	bh		Baik
11.	Kursi putar besar	-	6	bh		Baik
12.	Kursi putar kecil	-	25	bh		Baik
13.	Filling Kabinet besar	-	6	bh		Baik
14.	Filling kabinet sedang	-	3	bh		Baik
15.	Filling kabinet kecil	-	5	bh		Baik
16.	Lemari Besi 2 pintu	-	4	bh		Baik
17.	Rak Arsip	-	1	bh		Baik
18.	Tiang Bendera	-	1	Bh		Baik

19.	Kipas Angin	-	6	Bh		Baik
20.	Lemari 2 pintu	-	2	Bh		Baik
21.	Lemari 1 pintu	-	3	Bh		Baik
22.	Lemari arsip kepegawaian	-	1	Bh		Baik
III	Peralatan Gedung Kantor					
1.	AC diruang Pimpinan	2007	1	Bh		Baik
2.	AC diruang Komputer	2007	1	Bh		Baik
3.	Kulkas	-	1	Bh		Baik
4.	Televisi	-	2	Bh		Baik
5.	Digital	-	1	Unit		Baik
IV	Peralatan & Perlengkapan Kantor					Baik
1.	Komputer / PC	-	5	Unit		Baik
2.	Laptop	-	1	Unit		Baik
3.	Printer	-	6	Bh		Baik
4.	LCD Projector	-	1	Unit		Baik
5.	Monitor flat	-	2	Bh		Baik
6.	Wireless	-	1	Bh		Baik
7.	Telepon	-	1	Bh		Baik
8.	Faximile	-	1	Bh		Baik
9.	Brangkas	-	1	Bh		Baik
10.	Mesin hitung / Kalkulator	-	7	Bh		Baik
11.	Mesin ketik manual	-	5	Bh		Baik
12.	Whitbord	-	1	Bh		Baik
V	Kendaraan Dinas / Operasional					
1.	Kendaraan Roda Empat Kijang Inova	2007	1	Bh	182.500.000	Baik
2.	Kendaraan Roda Dua					
3.	- Sepeda Motor Honda Win	-	7	Unit	-	Baik
	- Yamaha Vega R	-	1	Unit	-	Baik
	- Honda Supra X 125	-	2	Unit	-	Baik
	- Mesin Generator Pemadam Kbakaran	-	1	Unit	-	Baik
VI	Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. Daya Listrik yang digunakan	-	-	-	-	

9.8. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahannya :

- Belum adanya Master Plan Pasar.
- Masih terbatasnya jumlah pejabat & tenaga / personil yang ada pada Kantor Dinas Pasar maupun di lapangan terutama tenaga penagihan retribusi pasar, tenaga ketertiban pasar (satpam), tenaga kebersihan pasar (cleaning service).
- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung tugas pokok / fungsi antara lain : Alat transportasi / kendaraan operasional, komputer dan perlengkapan lainnya.
- Terbatasnya dana / anggaran untuk biaya pembangunan sarana dan prasarana pasar daerah & pendukungnya.
- Masih adanya sarana dan prasarana pasar daerah berupa kios, bak yang belum di fungsikan pedagang sesuai peruntukannya (tutup).
- Masih adanya sarana dan prasarana pasar daerah berupa kios belum terpasarkan (kosong murni).
- Rendahnya kesadaran pedagang pasar akan hak & kewajibannya.

Solusi

- Adanya organisasi yang jelas meliputi tugas pokok / fungsi berdasarkan perda.
- Setiap unsur satuan kerja Dinas Pasar mengikuti kedudukan tugas pokok fungsi masing-masing serta wewenang dan tanggung jawab.
- Tersedianya SDM yang berkualitas melalui diklat, kursus dan pelatihan.
- Agar tersedia Master Plan Pasar Daerah.
- Tersedianya tenaga / personil yang pada kantor dinas maupun tenaga lapangan (tenaga penagih retribusi pasar, satpam, kebersihan pasar).
- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung tugas pokok / fungsi antara lain, alat transportasi, komputer dan perlengkapan lainnya.
- Tersedianya anggaran untuk membiayai pembangunan sarana / prasarana pasar daerah & pendukungnya.
- Memberikan pembinaan / penyuluhan melalui surat edaran, pendekatan, himbauan, peringatan kepada para pedagang yang masih belum mentaati ketentuan yang berlaku.

9.9. Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pasar yang cukup banyak dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum guna memperlancar arus barang dagangan dan penataan ketertiban serta kebersihan Pasar yang lebih baik yang memerlukan SDM yang cukup memadai, maka Dinas Pasar memprogramkan antara lain :

- a. Membangun Pasar Desa / Kecamatan atas dasar usulan dan Kebutuhan.
- b. Merawat / merehabilitasi sarana dan prasarana Pasar Daerah sesuai dengan tingkat kerusakan.
- c. Menjaga dan memelihara dan sekaligus peningkatan kebersihan dan ketertiban pasar.
- d. Pembinaan / penyuluhan / konsultasi kepada pedagang.
- e. Peningkatan PAD.
- f. Peningkatan SDM Aparatur.
- g. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur.

Hal tersebut tidak bisa terlaksana sepenuhnya mengingat dana yang ada masih belum mencukupi, diharapkan untuk tahun-tahun mendatang agar dana yang memadai mendapat dukungan dari pihak Pemerintah Daerah.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Tugas-tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Provinsi di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun anggaran 2007 yang terdiri dari 7 (tujuh) Bidang, 18 (delapan belas) Program dan 20 (dua puluh) Kegiatan dengan dana secara keseluruhan berjumlah Rp. 14.101.980.000,-. Gambaran secara lengkap tugas pembantuan yang diterima baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi adalah sebagai berikut ini :

1. Bidang Kesehatan.

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Provinsi di Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun Anggaran 2007 kepada Badan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan alokasi dana sebesar Rp 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah).

1.1. Dasar Hukum.

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1556.0/024-04.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.
- b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2007, Nomor : KU.01.04.1.3.3016 Tanggal 29 Mei 2007

1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.

Adapun Instansi yang memberikan alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk Badan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Ditjen. Pelayanan Medis Departemen Kesehatan R.I.

1.3. Program dan Kegiatan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sesuai dengan alokasi dana pada Tugas Pembantuan yang diterima baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi adalah sebagaimana pada tabel. 4.1.1 berikut ini :

Tabel 4.1.1
Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan

No	Program	Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4
1	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan	Badan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

1.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas/Badan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 97,91% dengan rincian pada tabel 4.1.2 sebagai berikut :

Tabel 4.1.2
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	Program Upaya Kesehatan Perorangan/ Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan) Administrasi Kegiatan) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB	95,83 99,98
Jumlah Tingkat Capaian			97,91

1.5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan.

Dana yang diterima bersumber dari DIPA 1556.0/024-04.1/-/2007 Tahun Anggaran 2007 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah), dimana Realisasi Anggaran sebesar Rp. 2.951.726.960 (Dua Milyar Sembilan Ratus lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah), dan Sisa Anggaran sebesar Rp 48.445.447 (Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Rupiah), dengan Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan terdapat pada tabel. 4.1.3 sebagai berikut :

Tabel 4.1.3
Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan

No.	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Selisih Anggaran	
			Fisik	Keuangan		
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
1.	Belanja Pegawai	30.350.000	99,35	28.730.000	94,66	1.620.000
2.	Belanja Barang Jasa	8.500.000	95,83	7.824.553	92,05	675.447
3.	Belanja Modal	2.961.150.000	100,00	2.915.000.000	98,44	46.150.000
	Jumlah	3.000.000.000	93,36	2.951.554.553	95,05	48.445.447

1.6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan dari Departemen Kesehatan adalah Badan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dimana Personil Pelaksana Dana Tugas Pembantuan (TP) terdapat pada tabel 4.1.4 sebagai berikut :

Tabel. 4.1.4
Susunan Personil Pelaksana Dana Tugas Pembantuan (TP)

No	Nama	Jabatan dalam Kegiatan TP	Jabatan dalam SKPD
1	Dr. Suyuti S, MPPM	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Ka. Bid. Yan. Medis
2	Rakhmad .S, SKM, M.Kes	Pejabat Pelaksana Tanggungjawab Kegiatan	Ka Sub Bid Rawat Jalan
3	Windarti Aji, S.Psi	Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM.	Staf Kepegawaian
4	Rohani, SKM	Bendahara Pengeluaran.	Pelaksana Perencanaan
5	Srf. Normalawati, SKM	Staf Administrasi Umum	Kepala Sub Bagian Umum

1.7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Jumlah Pegawai yang terlibat dalam Pelaksanaan Kegiatan pada Tugas Pembantuan Dinas/Badan sebanyak 12 (Dua Belas) orang dengan rincian pegawai pada tabel 4.1.5 sebagai berikut :

Tabel. 4.1.5
Nama Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No	Nama	Pendidikan	Pangkat dan Golongan
1	Dr. Suyuti S, MPPM	S2	Penata TK.I (III/d)
2	Rakhmad S, SKM, M.Kes	S2	Penata muda TK.I III.b
3	Rohani,SKM	S1	Penata Muda III/a
4	Windarti Aji, S.Psi.	S1	Penata Muda. III/a
5	Srf. Normalawati, SKM.	S1	Penata,III/c
6	Basri, SH	S1	Penata,III/c
7	Syahuri, SKM	S1	Penata muda TK.I III.b
8	Syarifnol Hidayat	D1	Pengatur Tk.I, II/d
9	Supriadi	SLTA	Pengatur Muda, II/a
10	Mardiasi	S1	Penata Muda, III/a
11	Novian Susilo A.Md.TRR	D-3	Pengatur, II/c
12	Didik Suryadi,A.Md.AK	D-3	Pengatur, II/c

1.8. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan Tugas Pembantuan cukup baik antara lain berupa komputer, gudang penyimpanan barang/alat.

1.9. Permasalahan dan Solusi.**Permasalahan**

Revisi POK dari Dirjen Pelayanan Medis baru diterima Bulan Juni 2007 serta adanya perubahan personil pengelola kegiatan yang terjadi pada Bulan Juli 2007 (Pejabat Pembuat Komitmen) sehingga pelaksanaan kegiatan khususnya pelelangan pengadaan barang/jasa menjadi terlambat.

Solusi

Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, KPPN Pangkalan Bun serta Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Bidang Pertanian dan Peternakan

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Provinsi di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2007 kepada Dinas Pertanian dan Peternakan berjumlah 3 (tiga) Program dengan dana secara keseluruhan berjumlah Rp. 3.781.515.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

2.1. Dasar Hukum

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Tanaman Pangan Nomor 0278.0/018-3/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat (07);
- b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2007, tanggal 31 Desember 2006
- c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Hortikultura Nomor 02777.0/018-04.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat (08);
- d. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2007, tanggal 10 Januari 2007
- e. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Peternakan Nomor 1602.0/018-06.1/-/2007 tanggal 2 Januari 2007 Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat (03).
- f. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2007, tanggal 31 Desember 2006
- g. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Ketahanan Pangan Nomor 3417.0/018-11.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2007 Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat (06).
- h. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2007, tanggal 31 Desember 2006

2.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Adapun Instansi yang memberikan alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Departemen Pertanian.

2.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan sesuai dengan alokasi dana pada Tugas Pembantuan yang diterima baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi adalah sebagaimana pada Tabel 4.2.1. berikut ini :

Tabel 4.2.1.
Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan

No.	Program	Kegiatan	Lokasi
1.	Peningkatan Ketahanan Pangan	- Peningkatan Ketahanan Pangan	Arsel, Kumai
2.	Peningkatan Kesejahteraan Petani	- Pengembangan Desa Mandiri	Arsel, Kumai
3.	Pengembangan Agribisnis	- Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan (Hortikultura) - Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan (Peternakan)	Arsel Kolam, Pangkalan Lada, Arsel

2.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 76,8% dengan rincian pada Tabel 4.2.2. sebagai berikut :

Tabel 4.2.2
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Sasaran	Tingkat Capaian %
1.	<i>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI</i> - Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Pengadaan laptop	100
		Pengadaan Handycam	100
		Penguatan modal usaha kelompok	100
		Penanganan daerah rawan pangan	100
2.	<i>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</i> - Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pembuatan jalan usahatani 1 km	-
		Rehab jaringan tingkat usahatani 480 ha	36,5
		Pengembangan TAM 700 ha	-
		Pengelolaan irigasi partisipatif	100
		Pengadaan Mesin Pembuat kompos	100
		Pelatihan teknologi pengendalian OPT	100
		Pengadaan benih padi	100
		Pengadaan benih jagung	100
		Pengadaan benih kedelai	100
		Penyusunan Road MAP	100
3.	<i>PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS</i> - Kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan (Hortikultura) - Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan (Peternakan)	Optimalisasi Lahan Kawasan Horti 35 ha	100
		Pembuatan embung	-
		Pembuatan irigasi bertekanan	-
		Pembuatan jalan produksi kawasan peternakan	100
		Pembuatan kebun HMT LM3 perbibitan sapi	100 100
Jumlah Tingkat Capaian			76,8

2.5 Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan

Dana yang diterima bersumber dari Tugas Pembantuan (APBN) Tahun Anggaran 2007 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.781.515.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.066.469.000,- (Dua Milyar Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.715.046.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), dengan rincian penggunaan anggaran Dana Alokasi Khusus terdapat pada Tabel 4.2.3 sebagai berikut :

Tabel 4.2.3
Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan

No	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi		Sisa (Rp.)	
			Fisik (%)	Keuangan (Rp.)		(%)
I	Belanja Pegawai	803.750.000	51	301.400.000	37	502.350.000
1.	Belanja Honorarium	803.750.000	51	301.400.000	37	502.350.000
II	Belanja Barang dan Jasa	622.520.000	75	306.344.500	49	316.175.500
1.	Belanja Perjalanan	208.000.000	40	59.525.000	29	148.475.000
2.	Belanja Barag Operasional	201.040.000	60	106.297.000	53	94.743.000
3.	Belanja Barang Non Operasional	38.400.000	70	23.322.500	61	15.077.500
4.	Belanja Jasa	175.080.000	80	117.200.000	67	57.880.000
III	Belanja Modal	410.000.000	80	259.250.000	63	150.750.000
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000	100	60.000.000	100	-
2.	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	350.000.000	60	199.250.000	57	150.750.000
IV.	Belanja Bantuan Sosial	1.945.245.000	80	1.199.474.500	62	745.770.500
1.	Belanja Lembaga Sosial lainnya	1.945.245.000	80	1.199.474.500	62	745.770.500
JUMLAH		3.781.515.000	72	2.066.469.000	55	1.715.046.000

2.6 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Dana Alokasi Khusus

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Kegiatan Dana Alokasi Khusus dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat dimana personil pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) terdapat pada Tabel 4.2.4 sebagai berikut :

Tabel 4.2.4
Susunan Personil Pelaksana Tugas Pembantuan

No.	Nama	Jabatan dalam Kegiatan	Jabatan dalam SKPD
1.	Ir. Chairil Anwar	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Dinas
2.	Ir. Kamaludin	PPK Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Kasubdin Produksi
3.	Ir. Bahtiar	PPK Kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan (Peternakan)	Kasubdin Kesehatan Hewan
4.	Ir. Abet Nego, MSi	PPK Kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan (Hortikultura)	Kasubdin Usahatani
5.	Ir. H. Akhmad Yadi	PPK Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Kasubdin Ketahanan Pangan
6.	M. Natsir	Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM	Kasubbag Keuangan
7.	Mahrita, SP	Bendahara Pengeluaran	Kasi Penganekaragaman Pangan dan Gizi
8.	Dede Marsus, AMd	Bendahara Pengeluaran	Pelaksana
9.	Pata, SP	Staf Bendahara Pengeluaran	Kasi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
10.	Mulyadi	Staf Bendahara Pengeluaran	Pelaksana
11.	Rolim H. Pasaribu	Petugas SAI	Pelaksana
12.	Denok Mulat S.	Pelaksana Administrasi Barang Inventaris Milik Negara	Kaubbag Pelengkapan

2.7 Jumlah Pegawai, Kualifikasi, Pangkat dan Golongan.

Jumlah pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pada Dana Alokasi Khusus Dinas Pertanian dan Peternakan sebanyak 12 orang dengan rincian pegawai pada Tabel 4.2.5 sebagai berikut :

Tabel 4.2.5
Nama Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No.	Nama	Pendidikan	Pangkat / Golongan
1.	Ir. H. Chairil Anwar	Sarjana S-1	Pembina Utama Muda (IV/c)
2.	Ir. Kamaludin	Sarjana S-1	Pembina Tk. I (IV/b)
3.	Ir. Bahtiar	Sarjana S-1	Pembina Tk. I (IV/b)
4.	Ir. Abet Nego, MSi	Sarjana S-2	Pembina Tk. I (IV/b)
5.	Ir. H. Akhmad Yadi	Sarjana S-1	Pembina Tk. I (IV/b)
6.	M. Natsir	SLTA	Penata Tk. I (III/d)
7.	Mahrita, SP	Sarjana S-1	Penata (III/c)
8.	Dede Marsus, AMd	Diploma 3	Penata Muda (III/a)
9.	Pata, SP	Sarjana S-1	Penata (III/c)
10.	Mulyadi	SLTA	Pengatur Tk. I (II/d)
11.	Rolim H. Pasaribu, SP	Sarjana S-1	Penata Muda (III/a)
12.	Denok Mulat S.	Diploma 3	Penata (III/c)

2.8 Permasalahan dan Solusi

Tidak adanya dana sharing dari Kabupaten untuk mendukung kegiatan di lapangan sehingga sulit untuk memonitoring kegiatan di lapangan. Solusinya kedepan untuk pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan harus ada operasional dari dana APBD.

3. Bidang Perikanan dan Kelautan

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat di Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun Anggaran 2007 kepada Dinas Perikanan dan Kelautan berjumlah 2 (dua) program dengan dana keseluruhan berjumlah Rp. 1.319.000.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah*) dengan rincian kegiatan MCRMP sebesar 469.000.000,- (*Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah*) dan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir sebesar Rp. 850.000.000,- (*Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

3.1. Dasar Hukum

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor. 0463.0/032-07/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 untuk kegiatan MCRMP.
- b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2007 Nomor. SK.21/MCRMP/KP3K/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 untuk kegiatan MCRMP.
- c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor. 0685.0/032-07/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 untuk kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir.
- d. Surat Petunjuk Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 untuk kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir.

3.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Adapun instansi yang memberikan alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, sesuai dengan alokasi dana pada Tugas Pembantuan yang diterima baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi adalah sebagaimana pada tabel 4.3.1 dibawah ini :

Tabel 4.3.1
Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan

No	Program	Kegiatan	Lokasi
1.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	Pengembangan dan Pengelolaan Terpadu Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terdepan Berbasis Kemitraan & Masyarakat (MCRMP)	P. Bun, Kec.Arsel, Desa Kubu, Sungai Bakau, Teluk Bogam dan Sebuai, Kec. Kumai
2.	Pengembangan Sumber Daya Perikanan	Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir	Kumai Hilir, Kubu, Teluk Bogam, Sei Bakau, Keraya

3.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tugas pembantuan Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target secara akumulatif dicapai sebesar 100 % (seratus persen) dengan rincian pada tabel 4.3.2 sebagai berikut :

Tabel 4.3.2
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan - Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Terpadu Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terdepan Berbasis Kemitraan dan Masyarakat 	1. Sumberdaya manusia yang terlatih 2 kali lokakarya sebyk 100 orang	100
		2. Terbinanya kelembagaan daerah pesisir di wilayah Program MCRM, 22 kelompok	100
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembanagn Sumber-Daya Perikanan - Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir 	1. Pendampingan program PEMP	100
		2. Pemberdayaan Perempuan Pesisir	100
		3. Penggalangan Kelembagaan Agama/adat/sosial	100
		4. Pelayanan masyarakat pesisir	100
		5. Monitoring dan evaluasi Program PEMP	100
		6. Penyaluran dana ekonomi produktif	100
		7. Sosialisasi dan lokakarya PEMP	100
		8. Adibakti Mina Bahari	100
		9. Publikasi PEMP	100
JUMLAH TINGKAT CAPAIAN			100

3.5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

Dana yang diterima bersumber dari DIPA Satker Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kotawaringin Barat (140514) tahun anggaran 2007 dengan jumlah anggaran sebesar dengan dana keseluruhan berjumlah Rp. 1.319.000.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah*) dimana realisasi anggaran sebesar Rp. 1.302.165.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Dua Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) dan sisa anggaran sebesar Rp. 16.835.000 (*Enam Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan rincian penggunaan anggaran Tugas Pembantuan terdapat pada table 4.3.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3.3
Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan

No.	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Selisih Anggaran (Rp)
			Fisik (%)	Keuangan		
				(Rp)	(%)	
1.	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Terpadu Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terdepan berbasis kemitraan dan Masyarakat Belanja Barang dan Jasa					
	a. Lokakarya Sosialisasi dan Pameran Hasil MCRMP	92.000.000	100	92.000.000	100	Nihil
	b. Lokakarya Penyelarasan Dokumen Perencanaan Hierarki PWP	92.000.000	100	92.000.000	100	Nihil
	c. Pengelolaan Sumberdaya Alam Skala Kecil	285.000.000	100	285.000.000	100	Nihil
	JUMLAH	469.000.000	100	469.000.000	100	Nihil
2.	Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya Pelaku Usaha Perikanan Dan Masyarakat Pesisir					
	1. Belanja Pegawai	62.580.000	100	62.580.000	100	Nihil
	2. Belanja Barang Jasa					
	- Barang Operasional	22.000.000	100	19.200.000	87,27	2.800.000
	- Bahan	39.000.000	100	37.265.000	95,55	1.735.000
	- Perjalanan	37.750.000	100	26.150.000	69,27	11.600.000
	- Jasa	210.500.000	100	209.800.000	99,67	700.000
	- Barang Non Operasional	16.550.000	100	16.550.000	100	Nihil
	3. Bantuan Sosial	461.620.000	100	461.620.000	100	Nihil
	JUMLAH	850.000.000	100	833.165.000	98,02	16.835.000

3.6 Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat daerah yang melaksanakan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan dari Departemen Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan dimana Personil Pelaksana Dana Tugas Pembantuan (TP) terdapat pada tabel 4.3.4 sebagai berikut :

Tabel 4.3.4
Susunan Personil Pelaksana Tugas Pembantuan

No.	Nama	Jabatan Dalam Kegiatan TP	Jabatan di SKPD
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Terpadu Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terdepan berbasis kemitraan dan Masyarakat		
1.	Ir. Hepy	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Perlindungan SD Ikan
2.	Hermanto, S.Pi	Pejabat Pembuat Komitmen	Kasi Konservasi dan Pengawasan Perairan
3.	Ganepodinus, SH	Pejabat Penandatanganan SPM	Kabag. Tata Usaha
4.	Zahratu wardiyah, S.Pi	Bendahara Pengeluaran	Kasubag. Perencanaan
5.	Libertus	Pelaksana Administrasi Barang	Staf Perencanaan
6.	Deby Shylena	Operator Pusat Data	Staf
	Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya Pelaku Usaha Perikanan Dan Masyarakat Pesisir		
1.	Rudolf Dita, SP	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Sub Dinas Sumberdaya Kelautan
2.	Ir. H. Chairil Anwar	Pejabat Pelaksana Tanggung Jawab Kegiatan	Plt. Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan
3.	Nunuk Indrayani, S.Pi	Pejabat Penguji SPP dan Pejabat Penandatanganan SPM	Kasi Pengendalian Hama Dan Penyakit Ikan
4.	Harliana, A.Md	Bendahara Pengeluaran	Staf Subbag Keuangan
5.	Hj. Darhanianti Alba, S.Pi	Pejabat Pembuat Komitmen	Kasi Pembinaan Pengembangan Wilayah Pesisir
6.	Teguh Widiatmoko, S.Pi	Pelaksana Administrasi Barang Inventarisasi Milik Negara	Staf Pelaksana Seksi Budidaya Ikan
7.	Deby Setiawati, S.Pi	Pembantu Pelaksana Bidang Umum	Staf Pelaksana Sub Dinas Sumberdaya Kelautan
8.	Libertus	Pembantu Pelaksana Administrasi dan Pelaporan	Staf Kasubag Perencanaan

3.7 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Perikanan dan Kelautan sebanyak 6 (enam) orang untuk kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Terpadu Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terdepan Berbasis Kemitraan dan Masyarakat dan 8 (delapan) orang untuk kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir dengan rincian pegawai pada tabel 4.3.5 sebagai berikut :

Tabel 4.3.5
Nama Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No.	Nama	Pendidikan	Pangkat dan Golongan
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Terpadu Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terdepan berbasis kemitraan dan Masyarakat		
1.	Ir. Hepy	Sarjana Perikanan	Pembina (IV/a)
2.	Hermanto, S.Pi	Sarjana Perikanan	Penata (III/c)
3.	Ganepodinus, SH	Sarjana Hukum	Pembina (IV/a)
4.	Zahratu wardiyah, S.Pi	Sarjana Perikanan	Penata (III/c)
5.	Libertus	SLTA	Pengatur (II/a)
6.	Deby Shylena	D1 Komputer	Honorer
	Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya Pelaku Usaha Perikanan Dan Masyarakat Pesisir		
1.	Ir. H. Chairil Anwar	Sarjana	Pembina Utama Muda (IV/c)
2.	Rudolf Dita, SP	Sarjana	Pembina (IV/a)
3.	Nunuk Indrayani, S.Pi	Sarjana Perikanan	Penata (III/c)
4.	Harliana, A.Md	D-III	Pengatur Tk I (II/d)
5.	Hj. Darhiananti Alba, S.Pi	Sarjana Perikanan	Penata (III/c)
6.	Teguh Widiatmoko, S.Pi	Sarjana Perikanan	Penata Muda (III/a)
7.	Deby Setiawati, S.Pi	Sarjana Perikanan	Piñata Muda (III/a)
8.	Libertus	SMU	Pengatur Muda (II/a)

3.8 Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

- a. Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Terpadu Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terdepan Berbasis Kemitraan dan Masyarakat kondisi sarana dan prasarana penunjang untuk pekerjaan administrasi kantor cukup dan dalam keadaan baik, baik ruangan, meja, kursi dan komputer, prasarana untuk pembinaan masih belum ada seperti alat peragaan dan mobilisasi petugas ke lapangan.
- b. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir kondisi sarana dan prasarana yang digunakan adalah terbentuknya Koperasi LEPP-M3 Swakarsa Kumai yang terletak di Kelurahan Kumai Hilir (PPI Kumai).

3.9 Permasalahan dan Solusi

- a. Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Terpadu Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terdepan Berbasis Kemitraan dan Masyarakat adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat akan tujuan program sehingga perlu sosialisasi langsung ke masyarakat sehingga peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut menjadi suatu kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang.
- b. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir, permasalahan yang dihadapi adalah biaya perjalanan terealisasi sebesar 69,27 % sisa tidak bisa dicairkan berdasarkan SE Menteri Keuangan, sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi, lokakarya, adibakti mina bahari, dan pembinaan pendampingan desa kurang maksimal.

Dana bantuan sosial belum dapat disalurkan ke masyarakat pesisir dan masih mengedap di rekening aktif BRI Cabang Pangkalan Bun, berhubung ada surat edaran Departemen Kelautan dan Perikanan yang ditujukan BRI Pusat Jakarta tentang blokir sementara dana bantuan sosial, solusi yang dilakukan adalah konsultasi dengan Departemen Kelautan dan Perikanan tata cara penyaluran dana bantuan sosial.

3.10 Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Berkenaan dengan target program dapat kami laporkan untuk kegiatan Pengembangan Pengelolaan Terpadu Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terdepan Berbasis Kemitraan dan Masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.3.6 dibawah ini :

Tabel 4.3.6
Target Program dan Realisasi

No.	Komponen	Target	Realisasi	Status
1.	Perencanaan dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut	Dokumen Rencana Strategis, Zonasi, Pengelolaan dan aksi	Telah tersusun dokumen rencana Strategis, zonasi, pengelolaan dan aksi dan sudah diselaraskan Dengan RPJMD, Renstrada dan PERMENDAGRI 13 Tahun 2006	Belum ditetapkan dengan PERDA dan PERBUP
2.	Pengelolaan Data dan Informasi Spasial	Pusat Data dan Informasi Spasial Kabupaten	Telah terbangun pusat data dan Informasi spasial kabupaten Lengkap dengan peralatan, personil terlatih & data terinstall	Kelembagaan Belum ditetapkan dengan peraturan bupati
3.	Peninjauan Legislatif dan penegakan hukum	PERDA pengelolaan pesisir dan laut	Telah tersusun RANPERDA pengelolaan pesisir dan laut dan telah di sosialisasikan dan di konsultasikan dengan masy.	Telah diajukan Ke DPRD Kab.
4.	Pengelolaan Sumberdaya Alam Skala Kecil	Uji coba rencana yang dibuat bersama masyarakat	Telah dilakukan uji coba rencana pengembangan rumput laut, air bersih, daerah perlindungan laut 3 desa, penangkapan ikan, pengelolaan ikan dan budidaya teripang	Dilakukan terhadap rencana Pengelolaan Desa Kubu, Sungai Bakau, Teluk Bogam dan Sebuai

4. Bidang Perkebunan

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Provinsi di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun anggaran 2007 kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 1 (satu) Program dengan dana secara keseluruhan berjumlah Rp.1.926.602.000,-

4.1. Dasar Hukum

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) T.A. 2007 Nomor : 1168.0/018-05.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006
- b. Surat Petunjuk Operasioanl Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2007 Nomor : Tanggal 30 April 2007

4.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Adapun instansi yang memberikan alokasi dana Tugas Pembantuan untuk Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Departemen Pertanian

4.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan alokasi dana pada Tugas Pembantuan yang diterima baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi adalah sebagaimana pada tabel 4.5.1. berikut ini

Tabel 4.5.1.
Program dan Kegiatan APBN TA. 2007

No.	Program	Kegiatan	Lokasi Kegiatan
I	Pengembangan Agribisnis	1. Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur dan Pedesaan	Desa Purbasari, Lada Mandala Jaya, Pandu Sanjaya, Mulyajadi
		2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan	Desa Natai Raya, Lada Mandala Jaya, Natai Kerbau, Mulyajadi, Suka Makmur

4.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) tersaji pada tabel 4.4.2. berikut

Tabel 4.4.2.
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
I	Pengembangan Agribisnis		
	1. Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur dan Pedesaan	- Rehab/Pembangunan jalan kebun - Perluasan areal Lada	100 100
	2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan	- Penyusunan roadmap komoditi - Pengembangan kebun entres karet - Revitalisasi - Fasilitasi pemantauan kebakaran lahan/kebun	0 100 38 50

4.5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan

Dana yang diterima bersumber dari DIPA Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2007 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.926.602.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah) dimana Realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.498.562. 500,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp. 426.039.750 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), dengan rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan terdapat pada tabel 4.4.3. sebagai berikut :

Tabel 4.4.3.
Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih Anggaran (Rp)
			Fisik (%)	Keuangan (Rp) (%)	
1	Belanja Pegawai	60.000.000	100	60.000.000 100	
2	Belanja Barang Jasa	536.602.000	100	139.312.500 25,96	397.289.500
3	Belanja Modal	225.000.000	100	194.250.000 86,33	30.750.000
4	Belanja Bantuan Sosial	1.105.000.000	100	1.105.000.000 100	0
	JUMLAH	1.926.602.000		1.498.562.500	428.039.500

4.6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Kegiatan Dana Tuga Pemantuan dari Departemen Pertanian adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat dimana personil Pelaksana Dana Tugas Pemantuan (TP) terdapat pada tabel 4.4.4. berikut :

Tabel 4.4.4.
Susunan Personil Pelaksana Dana Tugas Pembantuan (TP)

No.	Nama	Jabatan dalam Kegiatan TP	Jabatan dlm SKPD
1	Ir. KALPIN W, PIETER, M.Si	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kepala Dinas
2	HARYO PRABOWO, SP. MM	Pejabat Pelaksana Tanggungjawab Kegiatan	Kasubag Perencanaan
3	MULYADI, SP	Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM	Pelaksana
4	EPEK	Bendahara Pengeluaran	Pelaksana

4.7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Golongan

Jumlah Pegawai yang terlibat dalam Pelaksanaan Kegiatan pada Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan kab. Ktw. Barat sebanyak 5 (lima) orang dengan rincian pegawai pada tabel 4.4.5. sebagai berikut :

Tabel 4.4.5.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Golongan

No.	Nama	Pendidikan	Pangkat dan Golongan
1	Ir. KALPIN W, PIETER, M.Si	S-2	Pembina Tk. I (IV/b)
2	HARYO PRABOWO, SP. MM	S-2	Penata Tk. I (III/d)
3	MULYADI, SP	S-1	Penata Muda (III/a)
4	EPEK	SMA	Pengatur Muda Tk. I(II/b)
5	SABAR	SMA	Penata Muda (III/a)

5. Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat di Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun Anggaran 2007 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 5 (lima) Program dengan Dana secara keseluruhan berjumlah Rp. 1.937.231.000,-

5.1 Dasar Hukum

Kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi bidang Ketenagakerjaan dan bidang Ketransmigrasian antara lain :

a. Bidang Tenaga Kerja

1. Program Kegiatan Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK)

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 |Nomor : 1229.0/026-04.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.
- Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Program Perluasan dan |dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) Kabupaten |Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1229.0/026-04.1 /-/2007 tanggal 31 Desember 2006.

2. Program Kegiatan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK) Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 Nomor : 1296.0/026-05.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.
- Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK) Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1296.0/026-05.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006

3. Program Kegiatan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK) Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan (PPK)

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 Nomor : 4248.0/026-08.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.
- Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK) Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 Nomor : 4248.0/026-08.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006

4. Program Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK)

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 Nomor : 1059.0/026-13.1/XVII/2007 tanggal 31 Desember 2006.
- Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1059.0/026-13.1/XVII/ 2007 tanggal 31 Desember 2006.

b. Bidang Transmigrasi

1. Program Kegiatan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT)

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 Nomor : 4132.0/026-07.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.
- Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT) Kab. Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 Nomor : 4132.0/026-07.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2007.

5.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Adapun Instansi yang memberikan alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

5.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan alokasi dana pada Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat adalah sebagaimana pada tabel 4.5.1. berikut ini :

Tabel 4.5.1.
Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN
1.	PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA (PPKK)	1. Administrasi Kegiatan 2. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi 3. Pengadaan Alat Pengolah Data 4. Pengembangan Kewirausahaan 5. Padat Karya Produktif/Infrastruktur	Pangkalan Bun Pangkalan Bun Pangkalan Bun Tanjung Terantang - Rungun - Kumpai Batu Atas
2.	PERLINDUNGAN & PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA (PPLTK) DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI)	1. Pengadaan Alat Pengolah Data 2. Administrasi Kegiatan 3. Pengembangan Kelembagaan 4. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi 5. Penanganan Kasus	Pangkalan Bun Pangkalan Bun Pangkalan Banteng Pangkalan Bun - Pangkalan Bun - Pangkalan Lada - Pangkalan Banteng

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN
3.	PERLINDUNGAN & PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA (PPLTK) DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGA KERJAAN (PPK)	1. Administrasi Kegiatan	Pangkalan Bun
		2. Pengembangan Kelembagaan	Pangkalan Bun
		3. Pemetaan Status Kerawanan	- Pangkalan Bun - Pangkalan Lada - Pangkalan Banteng
4.	PENINGKATAN KUALITAS & PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (PKPTK)	1. Rapat-rapat Koordinasi/Kerja / Dinas/ Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi	Pangkalan Bun
		2. Administrasi Kegiatan	Pangkalan Bun
		3. Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor)	Pangkalan Bun
		4. Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja	- Kumpai Batu Atas - Tanjung Terantang - Natai Raya - Pangkalan Durin
5.	PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH (PWSCT)	1. Administrasi Kegiatan	Pangkalan Bun
		2. Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program	Pangkalan Bun
		3. Evaluasi / Laporan Kegiatan	Pangkalan Bun
		4. Pengawasan / Supervisi Konstruksi	Sumber Mukti
		5. Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum Transmigrasi	Kumai Kondang III E
		6. Pembangunan Jalan dan Jembatan	Sumber Mukti

5.4 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 100 % dengan rincian pada tabel 4.5.2. sebagai berikut

Tabel 4.5.2.
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Target Capaian %
1	Perluasan & Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan data dan informasi pencari kerja 250 orang. - Padat Karya produktif di Desa Kumpai Batu Atas melalui pembuatan jalan sepanjang 4 Km melibatkan 87 orang tenaga kerja. - Padat Karya Produktif di Desa melalui perعتakan Sawah seluas 20 Ha melibatkan 87 orang tenaga kerja. - Penerapan Teknologi Tepat Guna 1 Paket di Desa Tanjung Terantang sebanyak 15 orang. 	100
2	Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK) Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Ketenagakerjaan untuk Pembentukan LKS Bipartit 32 Unit. - Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan Hubungan Industrial 10 Kasus 29 orang (PHK) dan 3 Kasus 208 (PHI). 	100
3	Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK) Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan (PPK)	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jamsostek 26.125 orang. - Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 27 	100
4	Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan keterampilan bagi penganggur/pencari kerja 4 paket 64 orang. - Pengadaan Pelaratan Kantor (Inventaris Kantor) 	100
5	Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh (PWSCT)	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi Jalan Penghubung/Poros sepanjang 4 Km dan Rehabilitasi Jembatan Kayu Ulin 16 M' - Padat Karya Rehabilitasi Fasilitas Umum, Balai Desa, Kantor UPT. 	100

5.5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

5.5.1. Perluasan & Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK)

Dana yang diterima bersumber dari DIPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat T.A 2007 dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 440.000.000 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dimana Realisasi Anggaran sebesar Rp. 402.599.900 (Empat Ratus Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan Sisa Anggaran sebesar Rp. 37.400.100 (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Seratus Rupiah) dengan rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan terdapat pada tabel 4.5.3. sebagai berikut :

Tabel 4.5.3.
Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan PPKK

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		SELISIH ANGGARAN (Rp.)	
			FISIK	KEUANGAN		
				(Rp.)		(%)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENGEMBANGAN PASAR KERJA DALAM NEGERI ADMINISTRASI KEGIATAN					
1.	<u>Belanja Uang Honor Tidak Tetap</u> (KPPN 102-Pangkalan Bun/14.05-Kab.Kotawaringin Barat)					
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran (1 Org x 12 Bln)	3.600.000	100,00	-	0,00	3.600.000
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen (1 Org x 12 Bln)	3.360.000	100,00	3.360.000	100,00	-
	- Honor Bendahara Pengeluaran (1 Org x 12 Bln)	2.400.000	100,00	2.400.000	100,00	-
	- Honor Bendahara Penerima (1 Org x 12 Bln)	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	-
	- Honor Penguji (1 Org x 12 Bln)	2.400.000	100,00	2.400.000	100,00	-
	- Honor Staf administrasi (4 Org x 12 Bln)	4.800.000	100,00	4.800.000	100,00	-

1	2	3	4	5	6	7
2.	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN 102-Pangkalan Bun/14.05-Kab.Kotawaringin Barat)					
	- Rapat-rapat, Persiapan dan Dokumentasi	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	-
	- Penggandaan, Foto Copy, Pengiriman	1.500.000	100,00	1.499.900	99,99	100
	- Penyusunan Laporan dan Evaluasi	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	-
3.	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN 102-Pangkalan Bun/14.05-Kab.Kotawaringin Barat)					
	- A T K dan Bahan Komputer	2.500.000	100,00	2.499.900	100,00	100
4.	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN 102-Pangkalan Bun/14.05-Kab.Kotawaringin Barat)					
	- Perjalanan Konsultasi ke Pusat	30.000.000	100,00	22.440.000	74,80	7.560.000
	- Transport dalam rangka Koordinasi dengan Instansi terkait (2 Org x 3 Trip)	1.500.000	100,00	0	0,00	1.500.000
II.	PENYULUHAN DAN PENYEBARAN INFORMASI					
	Pelayanan Antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas IPK dan Bursa Kerja On Line					
1.	<u>Belanja Uang Honor Tidak Tetap</u> (KPPN 102-Pangkalan Bun/14.05-Kab.Kotawaringin Barat)					
	- Honor Penanggung Jawab (1 Org x 12 Bln)	1.200.000	100,00	1200000	100,00	-
	- Honor Pengantar Kerja (5 Org x 12 Bln)	4.500.000	100,00	4500000	100,00	-
	- Honor Pengelola Data Ak.I s/d Ak.V, IPK & BK (3 org x 4 Mg x 12 Kl)	7.200.000	100,00	7200000	100,00	-
	- Honor Penyusunan Laporan Bulanan Ak.I s/d AK. V IPK & Bursa Kerja (3 Org x 12 Kl)	2.700.000	100,00	2700000	100,00	-
	- Honor Penyusunan Laporan AKAD, AKAL, TKA Peny. Cacat Triwulan (3 Org x 4 Kl)	900.000	100,00	900000	100,00	-
2.	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN 102-Pangkalan Bun/14.05-Kab.Kotawaringin Barat)					
	- Pengiriman Laporan ke Pusat	5.400.000	100,00	5.399.900	100,00	100
	- Administrasi , Foto Copy, Surat Menyurat, Rapat, dll	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	-
	- Orientasi dan Penyuluhan Penempatan Tenaga Kerja	4.550.000	100,00	4.550.000	100,00	-
3.	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN 102-Pangkalan Bun/14.05-Kab.Kotawaringin Barat)					
	- A T K dan Komputer Suplies	1.750.000	100,00	1.750.000	100,00	-
	- Percetakan / Pengadaan Ak. I s/d Ak. V	7.500.000	100,00	7.500.000	100,00	-
4.	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN 102-Pangkalan Bun/14.05-Kab.Kotawaringin Barat)					
	- Transport Pengumpulan Data Lowongan ke Perusahaan (Job Canvasing) (8 Org x 2 Persh x 8 Trip)	9.600.000	100,00	2.830.000	29,48	6.770.000
	- Monitoring Evaluasi Penempatan (8 Org x 4 Prhs x 4 Trip)	9.600.000	100,00	2.615.000	27,24	6.985.000

1	2	3	4	5	6	7
III.	PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA					
	Pengadaan Peralatan Penunjang Bursa Kerja On Line					
1.	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN 102-Pangkalan Bun/14.05-Kab.Kotawaringin Barat)					
	- Pengadaan Komputer	9.600.000	100,00	9550000	99,48	50.000
	- Pengadaan Printer	1.270.000	100,00	1250000	98,43	20.000
	- Pengadaan Pesawat Fax / Telpon	1.500.000	100,00	1500000	100,00	-
IV.	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DALAM NEGERI					
	Pengembangan Kewirausahaan					
	Penciptaan Wira Usaha Baru Melalui Terapan dan Pendampingan					
1.	<u>Belanja Uang Honor Tidak Tetap</u> (KPPN 102-Pangkalan Bun/14.05-Kab.Kotawaringin Barat)					
	- Honor Penanggung Jawab (1 Org x 4 Bln)	600.000	100,00	600000	100,00	-
	- Honor Pasiitator/LSM/Ordes (2 Org x 4 Bln)	1.200.000	100,00	1200000	100,00	-
	- Honor Pelaksana (2 Org x 3 Bln)	900.000	100,00	900000	100,00	-
	- Honor Pengajar (10 JPL x 12 Hr)	6.000.000	100,00	6000000	100,00	-
	- Uang Saku Peserta (15 Org x 12 Hr)	1.800.000	100,00	1800000	100,00	-
2.	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN 102-Pangkalan Bun/14.05-Kab.Kotawaringin Barat)					
	- Dok,Surat Menyurat,Laporan,Sertifikasi,Foto Copy & Adm	1.000.000	100,00	1000000	100,00	-
	- Bantuan Sarana Usaha untuk Peserta Program	15.000.000	100,00	15000000	100,00	-
	- Identifikasi Potensi dan Jenis TTG	1.000.000	100,00	1000000	100,00	-
	- Sewa Ruang Pelatihan TTG	2.400.000	100,00	2400000	100,00	-
	- Rekrutmen dan Seleksi	1.000.000	100,00	1000000	100,00	-
	- Konsumsi Pelatihan (15 Org x 12 Hr)	4.500.000	100,00	4500000	100,00	-
3.	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN 102-Pangkalan Bun/14.05-Kab.Kotawaringin Barat)					
	- ATK dan Bahan Komputer	2.500.000	100,00	2500000	100,00	-
	- ATK Peserta	1.000.000	100,00	1000000	100,00	-
	- Pengadaan Makalah	500.000	100,00	500000	100,00	-
	- Bahan Pelatihan TTG	3.000.000	100,00	3000000	100,00	-
4.	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN 102-Pangkalan Bun/14.05-Kab.Kotawaringin Barat)					
	- Transport Peserta (15 Org x 12 Hr)	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00	-
	- Transport Pembinaan dan Panduan (2 Org x 16 Trp x 2 Lks)	3.200.000	100,00	0	0,00	3.200.000
	- Transport Pengajar / Penyelenggara (2 Org x 12 Hr)	1.800.000	100,00	0	0,00	1.800.000
	- Monitoring dan Evaluasi (2 Org x 4 Trp)	600.000	100,00	0	0,00	600.000

1	2	3	4	5	6	7
V.	PENYELENGGARAAN PADAT KARYA PRODUKTIF					
	Padat Karya Produktif / Infrastruktur					
A.	Penyelenggaraan Padat Karya Produktif I					
1.	<u>Belanja Uang Honor Tidak Tetap</u> (KPPN 102-Pangkalan Bun/14.05-Kab.Kotawaringin Barat)					
	- Honor Penanggung Jawab Kegiatan (1 Org x 6 Bln)	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	-
	- Honor Pelaksana Petugas Lapangan (3 Org x 6 Bln)	2.700.000	100,00	2.700.000	100,00	-
	- Honor Pengawas Tehnis (1 Org x 3 Bln)	450.000	100,00	450.000	100,00	-
	- Honor Pengawas Lapangan (2 Org x 3 Bln)	600.000	100,00	600.000	100,00	-
	- Honor Juru Bayar (1 Org x 3 Bln)	300.000	100,00	300.000	100,00	-
	- Upah Tenaga Kerja Pekerja (80 Org x 75 Hr)	90.000.000	100,00	90.000.000	100,00	-
	- Upah Tenaga Kerja Kepala Kelompok (4 Org x 75 Hr)	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	-
	- Upah Tenaga Kerja Tukang (3 Org x 75 Hr)	5.625.000	100,00	5.625.000	100,00	-
2.	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN 102-Pangkalan Bun/14.05-Kab.Kotawaringin Barat)					
	- Identifikasi Potensi dan Jenis Kegiatan	1.495.000	100,00	1495000	100,00	-
	- Surat Menyurat, Laporan dan Administrasi,	1.000.000	100,00	1000000	100,00	-
	- Pembuatan Gambar Desain	1.000.000	100,00	1000000	100,00	-
	- Sosialisasi dan Penyuluhan	750.000	100,00	750000	100,00	-
	- Papan Nama, Prasasti dan Dokumentasi	750.000	100,00	750000	100,00	-
3.	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN 102-Pangkalan Bun/14.05-Kab.Kotawaringin Barat)					
	- Bahan Bangunan Fisik	26.000.000	100,00	25.776.950	99,14	223.050
	- Pengadaan Formulir Proyek	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	-
	- Peralatan Kerja	3.205.000	100,00	3.186.000	99,41	19.000
	- ATK dan Komputer Suplies	750.000	100,00	750.000	100,00	-
4.	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN 102-Pangkalan Bun/14.05-Kab.Kotawaringin Barat)					
	- Perencanaan dan Persiapan (3 Org x 3 Kl)	675.000	100,00	675.000	100,00	-
	- Peninjauan dan Penyuluhan (3 Org x 5 Kl x 3 Bln)	3.375.000	100,00	2.240.000	66,37	1.135.000
	- Monitoring dan Evaluasi (4 Org x 2 Trip)	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	-
B	Penyelenggaraan Padat Karya Produktif II					
1.	<u>Belanja Uang Honor Tidak Tetap</u> (KPPN 102-Pangkalan Bun/14.05-Kab.Kotawaringin Barat)					
	- Honor Penanggung Jawab Kegiatan (1 Org x 6 Bln)	1.200.000	100,00	1200000	100,00	-
	- Honor Pelaksana Petugas Lapangan (3 Org x 6 Bln)	2.700.000	100,00	2700000	100,00	-
	- Honor Pengawas Tehnis (1 Org x 3 Bln)	450.000	100,00	450000	100,00	-
	- Honor Pengawas Lapangan (2 Org x 3 Bln)	600.000	100,00	600000	100,00	-
	- Honor Juru Bayar (1 Org x 3 Bln)	300.000	100,00	300000	100,00	-
	- Upah Tenaga Kerja Pekerja (80 Org x 50 Hr)	60.000.000	100,00	60000000	100,00	-
	- Upah Tenaga Kerja Kepala Kelompok (4 Org x 50 Hr)	4.000.000	100,00	4000000	100,00	-

1	2	3	4	5	6	7
2.	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN 102-Pangkalan Bun/14.05-Kab.Kotawaringin Barat)					
	- Identifikasi Potensi dan Jenis Kegiatan	1.495.000	100,00	1495000	100,00	-
	- Surat Menyurat, Laporan dan Administrasi,	1.000.000	100,00	1000000	100,00	-
	- Pembuatan Gambar Desain	1.000.000	100,00	1000000	100,00	-
	- Sosialisasi dan Penyuluhan	750.000	100,00	750000	100,00	-
	- Papan Nama, Prasasti dan Dokumentasi	750.000	100,00	750000	100,00	-
3.	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN 102-Pangkalan Bun/14.05-Kab.Kotawaringin Barat)					
	- Bahan Bangunan Fisik	25.000.000	100,00	24.930.750	99,72	69.250
	- Pengadaan Formulir Proyek	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	-
	- Peralatan Kerja	4.000.000	100,00	3.844.000	96,10	156.000
	- ATK dan Komputer Suplies	750.000	100,00	750.000	100,00	-
4.	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN 102-Pangkalan Bun/14.05-Kab.Kotawaringin Barat)					
	- Perencanaan dan Persiapan (3 Org x 3 Kl)	675.000	100,00	625.000	92,59	50.000
	- Peninjauan dan Penyuluhan (3 Org x 5 Kl x 3 Bln)	3.375.000	100,00	912.500	27,04	2.462.500
	- Monitoring dan Evaluasi (4 Org x 2 Trip)	2.000.000	100,00	800.000	40,00	1.200.000
	JUMLAH	440.000.000	100,00	402.599.900	91,50	37.400.100

5.5.2. Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK) Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI)

Dana yang diterima bersumber dari DIPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat T.A 2007 dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dimana Realisasi Anggaran sebesar Rp. 129.710.000 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan Sisa Anggaran sebesar Rp. 290.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan terdapat pada tabel 4.5.4. sebagai berikut

Tabel 4.5.4.
Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan PPLTK Ditjen PHI

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		SELISIH ANGGARAN (Rp.)	
			FISIK %	KEUANGAN		
				(Rp.)		%
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga</u>					
	<u>Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Saran dan Prasarana</u> Lokasi/Prop : (14) KALIMANTAN TENGAH					
I.	<u>PENGADAAN ALAT DAN PENGOLAH DATA</u>					
1.	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat) - Pengadaan Komputer PC	15.000.000	100,00	14.990.000	99,93	10.000
	<u>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan</u> Lokasi/Prop : (14) KALIMANTAN TENGAH					
II.	<u>ADMINISTRASI KEGIATAN</u>					
1.	<u>Belanja Uang Honor Tidak Tetap</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat) - Honor Pejabat Pembuat Komitmen (1 Org x 12 Bln) - Honor Bendaharawan (1 Org x 12 Bln) - Honor Staf Sekretariat (5 Org x 12 Bln)	3.570.000 2.940.000 10.500.000	100,00 100,00 100,00	3.570.000 2.940.000 10.500.000	100,00 100,00 100,00	- - -
2.	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat) - ATK dan Komputer - Konsumsi Rapat Pembahasan Rencana Kerja - Foto Copy dan Dokumentasi	1.000.000 1.450.000 1.000.000	100,00 100,00 100,00	1.000.000 1.450.000 1.000.000	100,00 100,00 100,00	- - -
3.	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat) - Perjalanan Konsultasi ke Pusat (1 Org x 2 Kl x 4 Hr) - Perjalanan Konreg ke Kalimantan Selatan (2 Orgx1 Klx4 Hr)	12.000.000 5.300.000	100,00 100,00	12.000.000 5.040.000	100,00 95,09	- 260.000
	<u>Pemberian Dorongan dan Penyemp. Pelaksanaan Negoisasi Bipartit Antara Pekerja dan Pemberi Kerja</u> Lokasi/Prop : (14) KALIMANTAN TENGAH					
III.	<u>PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN</u>					
1.	<u>Belanja Uang Honor Tidak Tetap</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat) - Honor Penyuluh (7 Jpl x 2 Hr) - Honor Moderator (2 Org x 2 Hr) - Honor Penyelenggara (3 Org x 2 Hr) - Honor Penyusun Bahan (2 Org x 2 Hr) - Honor Penyusun Laporan (2 Org x 2 Hr)	1.400.000 700.000 900.000 600.000 600.000	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	1.400.000 700.000 900.000 600.000 600.000	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	- - - - -

1	2	3	4	5	6	7
	<p>Pemberian Dorongan dan Penyemp. Pelaksanaan Negoisasi Bipartit Antara Pekerja dan Pemberi Kerja Lokasi/Prop : (14) KALIMANTAN TENGAH</p>					
III.	<u>PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN</u>					
1.	<p>Belanja Uang Honor Tidak Tetap (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat)</p>					
	- Honor Penyuluh (7 Jpl x 2 Hr)	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00	-
	- Honor Moderator (2 Org x 2 Hr)	700.000	100,00	700.000	100,00	-
	- Honor Penyelenggara (3 Org x 2 Hr)	900.000	100,00	900.000	100,00	-
	- Honor Penyusun Bahan (2 Org x 2 Hr)	600.000	100,00	600.000	100,00	-
	- Honor Penyusun Laporan (2 Org x 2 Hr)	600.000	100,00	600.000	100,00	-
	- Uang Saku Peserta (40 Org x 2 Hr)	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	-
2.	<p><u>Belanja Bahan</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat)</p>					
	- Sewa Ruang Sidang	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	-
	- ATK dan Komputer	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	-
	- Pengadaan Buku Acuan (40 Org x 3 Expl)	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	-
	- Perlengkapan Peserta (1 Pkt x 40 Org)	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	-
	- Foto Copy dan Dokumentasi	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	-
	- Scack (47 Org x 2 Hr)	940.000	100,00	940.000	100,00	-
	- Makan (47 Org x 2 Hr)	1.880.000	100,00	1.880.000	100,00	-
3.	<p><u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat)</p>					
	- Transport Penyuluh (4 Org x 2 Hr)	400.000	100,00	400.000	100,00	-
	- Transport Penyelenggara (3 Org x 2 Hr)	300.000	100,00	300.000	100,00	-
	- Transport Moderator (2 Org x 2 Hr)	200.000	100,00	200.000	100,00	-
	- Transport Peserta (30 Org x 2 Hr)	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	-
	<p><u>Pembinaan Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial</u> Lokasi/Prop : (14) KALIMANTAN TENGAH</p>					
IV.	<u>PENYULUHAN DAN PENYEBARAN INFORMASI</u>					
A)	Penyuluhan dan Pengembangan Kepersertaan Jamsostek					
1.	<p>Belanja Uang Honor Tidak Tetap (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat)</p>					
	- Honor Penyuluh (7 Jpl x 2 Hr)	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00	-
	- Honor Moderator (2 Org x 2 Hr)	700.000	100,00	700.000	100,00	-
	- Honor Penyelenggara (3 Org x 2 Hr)	900.000	100,00	900.000	100,00	-
	- Honor Penyusun Bahan (2 Org x 2 Hr)	600.000	100,00	600.000	100,00	-
	- Honor Penyusun Laporan (2 Org x 2 Hr)	600.000	100,00	600.000	100,00	-
	- Uang Saku Peserta (40 Org x 2 Hr)	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	-

1	2	3	4	5	6	7
2.	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat)					
	- ATK dan Komputer	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	-
	- Sewa Ruang Sidang	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	-
	- Pengadaan Buku Acuan (40 Org x 3 Expl)	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	-
	- Perlengkapan Peserta (1 Pkt x 40 Org)	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	-
	- Foto Copy dan Dokumentasi	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	-
	- Scack (47 Org x 2 Hr)	940.000	100,00	940.000	100,00	-
	- Makan (47 Org x 2 Hr)	1.880.000	100,00	1.880.000	100,00	-
3.	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat)					
	- Transport Penyuluh (4 Org x 2 Hr)	400.000	100,00	400.000	100,00	-
	- Transport Penyelenggara (3 Org x 2 Hr)	300.000	100,00	300.000	100,00	-
	- Transport Moderator (2 Org x 2 Hr)	200.000	100,00	200.000	100,00	-
	- Transport Peserta (30 Org x 2 Hr)	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	-
B)	Sosialisasi Undang-Undang No.2 Tahun 2004					
1.	<u>Belanja Uang Honor Tidak Tetap</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat)					
	- Honor Penyuluh (7 Jpl x 2 Hr)	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00	-
	- Honor Moderator (2 Org x 2 Hr)	700.000	100,00	700.000	100,00	-
	- Honor Penyelenggara (3 Org x 2 Hr)	900.000	100,00	900.000	100,00	-
	- Honor Penyusun Bahan (2 Org x 2 Hr)	600.000	100,00	600.000	100,00	-
	- Honor Penyusun Laporan (2 Org x 2 Hr)	600.000	100,00	600.000	100,00	-
	- Uang Saku Peserta (30 Org x 2 Hr)	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	-
2.	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat)					
	- ATK dan Komputer	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	-
	- Pengadaan Buku Acuan (30 Org x 3 Expl)	900.000	100,00	900.000	100,00	-
	- Perlengkapan Peserta (1 Pkt x 30 Org)	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	-
	- Foto Copy dan Dokumentasi	1.280.000	100,00	1.280.000	100,00	-
	- Sewa Ruang Sidang	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	-
	- Scack (37 Org x 2 Hr)	740.000	100,00	740.000	100,00	-
	- Makan (37 Org x 2 Hr)	1.480.000	100,00	1.480.000	100,00	-
3.	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat)					
	- Sewa Ruang Sidang (1 Kl x 2 Hr)	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	-
4.	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat)					
	- Transport Penyuluh (4 Org x 2 Hr)	400.000	100,00	400.000	100,00	-
	- Transport Penyelenggara (3 Org x 2 Hr)	300.000	100,00	300.000	100,00	-
	- Transport Moderator (2 Org x 2 Hr)	200.000	100,00	200.000	100,00	-
	- Transport Peserta (40 Org x 2 Hr)	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Lokasi/Prop : (14) KALIMANTAN TENGAH					
V.	<u>PENANGANAN KASUS</u>					
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial					
1.	<u>Belanja Uang Honor Tidak Tetap</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat) - Honor Tim Teknis (1 Org x 25 Ks)	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00	-
2.	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat) - ATK dan Komputer	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	-
3.	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat) - Transport Tim Teknis (3 Org x 25 KI)	7.500.000	100,00	7.480.000	99,73	20.000
	JUMLAH	130.000.000	100,00	129.710.000	99,78	290.000

**5.5.3. Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK)
Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan (PPK)**

Dana yang diterima bersumber dari DIPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 dengan Jumlah Anggaran Rp. 119.425.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dimana Realisasi Anggaran sebesar Rp. 60.730.000 (Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan Sisa Anggaran sebesar Rp. 56.181.000 (Lima Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan terdapat pada tabel 4.5.5. sebagai berikut :

Tabel 4.5.5.
Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		SELISIH ANGGARAN (Rp.)	
			FISIK %	KEUANGAN		
				(Rp.)		%
1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja					
	Lokasi/Prop : (14) KALIMANTAN TENGAH					
	<u>I. Administrasi Kegiatan</u>					
	<u>1. Belanja Uang Honor Tidak Tetap</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat)					
	- Honor Pembantu Bendahara (1 Org x 12 Bln)	2.514.000	100,00	2.514.000	100,00	-
	- Honor Sekretariat (7 Org x 12 Bln)	15.540.000	100,00	15.540.000	100,00	-
	<u>2. Belanja Bahan</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat)					
	- ATK dan Komputer	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	-
	- Pembuatan dan Pengiriman Laporan	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	-
	<u>3. Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat)					
	- Perjalanan Konsultasi (1 Org x 2 Kl x 4 Hr)	11.400.000	100,00	9.680.000	84,91	1.720.000
	<u>II. Pengembangan Kelembagaan</u>					
	<u>1. Belanja Uang Honor Tidak Tetap</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat)					
	- Honor Sekretariat (5 Org x 6 Bln)	3.000.000	100,00	-	0,00	3.000.000
	- Honor Panitia Lokakarya (5 Org x 3 Hr)	2.250.000	100,00	-	0,00	2.250.000
	- Honor Nara Sumber Pusat dan Daerah (20 JPL)	3.000.000	100,00	-	0,00	3.000.000
	- Uang Saku Peserta (3 Hr x 20 Org)	4.500.000	100,00	-	0,00	4.500.000
	<u>2. Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat)					
	- Konsumsi Panitia (10 Org x 3 Kl)	750.000	100,00	-	0,00	750.000
	- Konsumsi Rapat Koordinasi (20 Org x 5 Kl)	2.500.000	100,00	-	0,00	2.500.000
	- Akomodasi dan Konsumsi Lokakarya (30 Org x 3 Kl)	13.500.000	100,00	-	0,00	13.500.000
	<u>3. Belanja Bahan</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat)					
	- ATK	1.500.000	100,00	400.000	26,67	1.100.000
	- Bahan Peserta Lokakarya	750.000	100,00	-	0,00	750.000
	- Dokumentasi dan Pelaporan	1.000.000	100,00	-	0,00	1.000.000
	- Foto Copy	1.071.000	100,00	300.000	28,01	771.000
	- Sewa Ruang Sidang	500.000	100,00	-	0,00	500.000

1	2	3	4	5	6	7
4.	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat)					
	- Transport Lokal Peserta Rapat (10 Org x 3 Kl)	1.500.000	100,00	-	0,00	1.500.000
	- Transport Lokal Peserta Rapat Koordinasi (20 Org x 3 Kl)	3.000.000	100,00	-	0,00	3.000.000
	- Transport Lokal Peserta, Panitia dan Nara Sumber Daerah Lokakarya (27 Org x 1 Kl)	2.700.000	100,00	-	0,00	2.700.000
	- Perjalanan Nara Sumber Pusat (1 Org x 1 Kl)	2.500.000	100,00	-	0,00	2.500.000
	- Uang Harian (1 Org x 4 Hr)	1.200.000	100,00	-	0,00	1.200.000
	- Tarip Hotel (1 Org x 4 Hr)	1.400.000	100,00	-	0,00	1.400.000
	- Perjalanan Nara Sumber Daerah	200.000	100,00	-	0,00	200.000
	- Uang Harian (2 Org x 4 Hr)	2.400.000	100,00	-	0,00	2.400.000
	- Tarip Hotel (2 Org x 4 Hr)	2.800.000	100,00	-	0,00	2.800.000
III.	<u>Pemetaan</u>					
	Pemetaan Status Kerawan					
1.	<u>Belanja Uang Honor Tidak Tetap</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat)					
	- Honor Pemeriksa (1 Org x 150 Persh)	7.500.000	100,00	7.500.000	100,00	-
	- Honor Pengolah Data (3 Org x 6 Bln)	1.350.000	100,00	1.350.000	100,00	-
	- Honor Penanggung Jawab (1 Org x 6 Bln)	600.000	100,00	600.000	100,00	-
2.	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat)					
	- Foto Copy	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	-
	- ATK	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	-
	- Dokumen dan Pelaporan	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	-
3.	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05 Kab. Kotawaringin Barat)					
	- Transport Pemeriksa (1 Org x 150 Persh)	7.500.000	100,00	4.360.000	58,13	3.140.000
	JUMLAH	119.425.000	100,00	60.730.000	50,85	56.181.000

5.5.4. Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK)

Dana yang diterima dari DIPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat T.A. 2007 dengan Jumlah Anggaran Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dimana Realisasi Anggaran sebesar Rp. 134.677.900 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan Sisa Anggaran Rp. 15.322.100 (Lima Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) dengan rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan terdapat pada tabel 4.5.6. sebagai berikut :

Tabel 4.5.6.
Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		SELISIH ANGGARAN (Rp.)	
			FISIK %	KEUANGAN		
				(Rp.)		%
1	2	3	4	5	6	7
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					
	Pembinaan / Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran Lokasi/Prop : (14) KALIMANTAN TENGAH					
I.	Rapat - Rapat Koordinasi / Kerja / Dinas / Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi					
1.	Belanja Perjalanan Tetap [(KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.03 - Kab. Kotawaringin Barat Req.00000000) Rapat Koordinasi Bidang Lattas (Rapat Regional) - Transport Rapat Regional ke Bali (1 Orq x 1 Trip) - Uang Harian (1 Orq x 3 Hari) - Akomodasi/Uang Hotel (1 Orq x 2 Hari)	2.400.000 1.200.000 1.100.000	100,00 100,00 100,00	2.400.000 900.000 600.000	100,00 75,00 54,55	- 300.000 500.000
	Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi Lokasi/Prop : (14) KALIMANTAN TENGAH					
II.	Administrasi Kegiatan					
1.	Belanja Uang Honor Tetap [(KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.03 - Kab. Kotawaringin Barat Req.00000000) - Honor Pejabat Pembuat Komitmen (1 Orq x 12 Bln) - Honor Penyusun Laporan (2 Orq x 12 Bln) - Honor Sekretariat (5 Orq x 12 Bln)	3.600.000 3.000.000 9.000.000	100,00 100,00 100,00	3.600.000 3.000.000 9.000.000	100,00 100,00 100,00	- - -
2.	Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI [(KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.03 - Kab. Kotawaringin Barat Req.00000000) - Pengiriman Surat dan Dokumentasi - Pengiriman Dok, Ren, Lap. Administrasi - Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan - A T K - Biaya Foto Copy, Administrasi, Surat Menyurat	3.600.000 6.000.000 525.000 3.600.000 6.000.000	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	3.599.900 6.000.000 525.000 3.600.000 6.000.000	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	100 - - - -
3.	Belanja Perjalanan Biasa [(KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.03 - Kab. Kotawaringin Barat Req.00000000) - Transport Operasional	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	-

1	2	3	4	5	6	7
III.	<u>Monitoring dan Evaluasi</u>					
1.	<u>Belanja Uang Honor Tetap</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.03 - Kab. Kotawaringin Barat Req.00000000) - Honor Penyusunan Pelaporan (2 Orq x 12 Bln)	3.600.000	100,00	3.600.000	100,00	-
2.	<u>Belanja Perjalanan Biasa</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.03 - Kab. Kotawaringin Barat Req.00000000) - Transport Operasional (2 Orq x 5 Trip)	500.000	100,00	500.000	100,00	-
IV.	<u>Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor)</u>					
1.	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.03 - Kab. Kotawaringin Barat Req.00000000) - Pengadaan Mesin Jahit - Pengadaan Peralatan Tata Rias - Pengadaan Peralatan Sepeda Motor - Pengadaan Peralatan Processing	9.200.000 6.500.000 2.000.000 2.300.000	100,00 100,00 100,00 100,00	9.166.000 6.500.000 2.000.000 2.122.000	99,63 100,00 100,00 92,26	34.000 - - 178.000
	<u>Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat</u>					
	<u>Lokasi/Prop : (14) KALIMANTAN TENGAH</u>					
V.	<u>Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja</u>					
1.	<u>Belanja Uang Honor Tetap</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.03 - Kab. Kotawaringin Barat Req.00000000) - Honor Instruktur Pelatihan Menjahit (1 Orq x 180 Jp) - Honor Instruktur Motir Sepeda Motor (1 Orq x 180 Jp) - Honor Instruktur Pelatihan Tata Rias (1 Orq x 167 Jp) - Honor Instruktur Pelatihan Processing (1 Orq x 60 Jp) - Honor Tim Teknis (4 Orq x 6 Bln) - Uang Saku Peserta (64 Orq x 85 Hari) - Honor Petugas Rekrutmen (2 Orq x 2 Bln) - Honor Tim Administrasi (4 Orq x 6 Bln)	6.300.000 6.300.000 5.845.000 2.100.000 6.000.000 19.040.000 1.505.000 6.000.000	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	6.300.000 6.300.000 5.845.000 2.100.000 6.000.000 4.760.000 1.505.000 6.000.000	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 25,00 100,00 100,00	- - - - - 14.280.000 - -
2.	<u>Belanja Inventaris Kantor</u> (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.03 - Kab. Kotawaringin Barat Req.00000000) - Bahan Pelatihan - Bahan Pelatihan Processing - Bahan Pelatihan Tata Rias & Spa - Bahan Pelatihan Menjahit	2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000	100,00 100,00 100,00 100,00	2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000	100,00 100,00 100,00 100,00	- - - -

1	2	3	4	5	6	7
3.	Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI ((KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.03 - Kab. Kotawaringin Barat Req.00000000) - Persiapan,Pembahasan,Pengolahan Data Kebutuhan Lat. - Dokumentasi Pelaksanaan Pelatihan - Pembukaan dan Penutupan - Modul Peserta (64 Org) - Perlengkapan Peserta / Kaos (64 Org)	1.000.000 1.505.000 4.000.000 2.240.000 4.160.000	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	1.000.000 1.505.000 4.000.000 2.240.000 4.160.000	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	- - - - -
4.	Belanja Perjalanan Biasa ((KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.03 - Kab. Kotawaringin Barat Req.00000000) Dalam rangka Koordinasi/Konsultasi ke Pusat - Transport (2 Org x 2 Trip) - Uang Harian (2 Org x 4 Hari) - Akomodasi/Uang Hotel (2 Org x 2 Hari) Dalam rangka Penjajagan, Persiapan ke Lokasi - Transport (2 Org x 2 Trip x 4 Paket) Dalam rangka Pembukaan dan Penutupan ke Lokasi - Transport (2 Org x 2 Trip x 4 Paket) - Pengangkutan Bahan Pelatihan ke Lokasi	3.260.000 3.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 2.220.000	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	3.260.000 3.600.000 1.570.000 1.600.000 1.600.000 2.220.000	100,00 100,00 98,13 100,00 100,00 100,00	- - 30.000 - - -
	JUMLAH	150.000.000	100,00	134.677.900	89,79	15.322.100

5.5.5. Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh (PWSCT)

Dana yang diterima dari DIPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat T.A 2007 dengan Jumlah Anggaran Rp. 1.097.806.000 (Satu Milyard Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah) dimana Realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.055.929.900 (Satu Milyard Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan Sisa Anggaran Rp. 41.876.100 (Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) dengan rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan terdapat pada tabel 4.5.7. sebagai berikut :

Tabel 4.5.7.
Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		SELISIH ANGGARAN (Rp.)	
			FISIK %	KEUANGAN		
				(Rp.)		%
1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					
	Lokasi/Prop : (14) KALIMANTAN TENGAH					
I.	Administrasi Kegiatan					
1.	Belanja Uang Honor Tidak Tetap (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat					
	- Insentif Pejabat Pembuat Komitmen (1 Orq x 12 Bln)	5.100.000	100,00	5.100.000	100,00	-
	- Insentif Kuasa Pengguna Anggaran (1 Orq x 12 Bln)	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	-
	- Insentif Pejabat Pengeti Tagihan dan Penanda Tangan SPM (1 Orq x 12 Bln)	4.500.000	100,00	4.500.000	100,00	-
	- Insentif Staf Pengelola (3 Orq x 12 Bln)	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00	-
	- Insentif Bendahara (3 Orq x 12 Bln)	4.200.000	100,00	4.200.000	100,00	-
	- Insentif Panitia Lelang (3 Orq x 4 Bln)	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00	-
2.	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat					
	- A T K	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	-
	- Komputer Suplies	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	-
	- Foto Copy, Cetak Mencetak	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	-
	- Rapat Panitia Lelang	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	-
	- Rapat Pengendalian	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	-
	- Biaya Pelelangan	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	-
	- Biaya Pelaporan	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	-
3.	Belanja Perjalanan Lainnya (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat					
	- Dalam rangka Koordinasi di Tingkat Pusat	10.000.000	100,00	9.600.000	96,00	400.000
II.	Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis /Program					
1.	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat					
	- A T K	500.000	100,00	500.000	100,00	-
	- Komputer Suplies	500.000	100,00	500.000	100,00	-
	- Foto Copy, Penggandaan	250.000	100,00	250.000	100,00	-
	- Pendistribusian	200.000	100,00	200.000	100,00	-
	- Rapat-rapat	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	-
	- Penyusunan Program Kerja	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	-
2.	Belanja Perjalanan Lainnya (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat					
	- Dalam rangka Penyusunan Program ke Pusat	10.000.000	100,00	9.740.000	97,40	260.000
	- Dalam rangka Koordinasi ke Propinsi	6.400.000	100,00	6.400.000	100,00	-
	- Dalam rangka Koordinasi ke Lokasi	4.200.000	100,00	4.200.000	100,00	-

1	2	3	4	5	6	7
III.	Evaluasi / Laporan Kegiatan					
1.	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat					
	- A T K	500.000	100,00	500.000	100,00	-
	- Komputer Suplies	500.000	100,00	500.000	100,00	-
	- Foto Copy, Pengqandaan	500.000	100,00	500.000	100,00	-
	- Pendistribusian	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	-
	- Rapat-rapat	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	-
	- Rapat Pengendalian	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	-
	- Penyusunan Laporan Bulanan	3.000.000	100,00	2.990.900	99,70	9.100
	- Penyusunan LAKIP	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	-
2.	Belanja Perjalanan Lainnya (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat					
	- Dalam rangka Pemantauan ke Lokasi	4.200.000	100,00	-	0,00	4.200.000
	- Dalam rangka Rapat Pengendalian ke Propinsi	3.200.000	100,00	-	0,00	3.200.000
IV.	Pengawasan/Supervisi Konstruksi					
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat					
	- Supervisi Jaringan Jalan / Jembatan (6 %)	50.348.000	100,00	49.450.000	98,22	898.000
V.	Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum Transmigrasi					
	Rehabilitasi Fasilitas Umum Secara Padat Karya					
1.	Belanja Uang Honor Tidak Tetap (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat					
	Rehab Kantor UPT Secara Padat Karya Lokasi Kumai Kondang III E					
	- Upah Kerja	12.300.000	100,00	12.300.000	100,00	-
	Rehab Balai Desa Secara Padat Karya Lokasi Kumai Kondang III E					
	- Upah Kerja	17.740.000	100,00	17.700.000	99,77	40.000
2.	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat					
	Rehab Kantor UPT Secara Padat Karya Lokasi Kumai Kondang III E					
	- Material	27.370.000	100,00	26.861.000	98,14	509.000
	Rehab Balai Desa Secara Padat Karya Lokasi Kumai Kondang III E					
	- Material	39.494.000	100,00	38.601.000	97,74	893.000
3.	Belanja Perjalanan Lainnya (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat					
	Rehab Kantor UPT Secara Padat Karya Lokasi Kumai Kondang III E					
	- Transport Lokal	450.000	100,00	-	0,00	450.000
	- Uang Harian	900.000	100,00	-	0,00	900.000
	- Pendamping/Supervisi	3.649.000	100,00	-	0,00	3.649.000
	- Lain-lain	950.000	100,00	-	0,00	950.000

1	2	3	4	5	6	7
	Rehab Balai Desa Secara Padat Karya Lokasi Kumai Kondang III E					
	- Transport Lokal	450.000	100,00	-	0,00	450.000
	- Uang Harian	900.000	100,00	-	0,00	900.000
	- Pendamping/Supervisi	5.211.000	100,00	-	0,00	5.211.000
	- Lain-lain	1.350.000	100,00	-	0,00	1.350.000
VI.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal					
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat)					
	Rehabilitasi Jalan & Jembatan, Lokasi Exs UPT Kumai Kondang III E					
	- Rehab Jalan Penghubung / Poros	749.000.000	100,00	733.560.000	97,94	15.440.000
	- Rehab Jembatan Kayu	82.144.000	100,00	79.977.000	97,36	2.167.000
	JUMLAH	1.097.806.000	100,00	1.055.929.900	96,19	41.876.100

5.6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.

Personil Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :

1. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK)

No.	N a m a	Jabatan dalam Kegiatan TP	Jabatan dalam SKPD
1	Drs. K a m u s n i	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kepala Dinas
2	Ir. Rusliansyah	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Kasubdin Pentakerja
3	Drs. Siswanto	Pejabat Penguji SPP & Penandatanganan SPM	Kasubdin Pembinaan
4	M a r y o n o	Bendahara Penerima	Pelaksana
5	Silaturrahmansyah	Bendahara Pengeluaran	Pelaksana
6	S u w a r d i	Pelaksanaan Administrasi Barang Inventaris Milik Negara	Pelaksana

2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK) Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek

No.	N a m a	Jabatan dalam Kegiatan TP	Jabatan dalam SKPD
1	Drs. K a m u s n i	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kepala Dinas
2	Yusbartiningsih, SH	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Kasubdin Hubinsyaker
3	Drs. Siswanto	Pejabat Penguji SPP & Penandatanganan SPM	Kasubdin Pembinaan
4	M a r y o n o	Bendahara Penerima	Pelaksana
5	Silaturrahmansyah	Bendahara Pengeluaran	Pelaksana
6	S u w a r d i	Pelaksanaan Administrasi Barang Inventaris Milik Negara	Pelaksana

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK) Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

No.	N a m a	Jabatan dalam Kegiatan TP	Jabatan dalam SKPD
1	Drs. K a m u s n i	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kepala Dinas
2	Yusbartiningsih, SH	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Kasubdin Hubinsyaker
3	Drs. Siswanto	Pejabat Penguji SPP & Penandatanganan SPM	Kasubdin Pembinaan
4	M a r y o n o	Bendahara Penerima	Pelaksana
5	Silaturrehmansyah	Bendahara Pengeluaran	Pelaksana
6	S u w a r d i	Pelaksanaan Administrasi Barang Inventaris Milik Negara	Pelaksana

4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK)

No.	N a m a	Jabatan dalam Kegiatan TP	Jabatan dalam SKPD
1	Drs. K a m u s n i	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kepala Dinas
2	I Nengah Parsa, S.IP	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Kasubdin Latas
3	Drs. Siswanto	Pejabat Penguji SPP & Penandatanganan SPM	Kasubdin Pembinaan
4	M a r y o n o	Bendahara Penerima	Pelaksana
5	Silaturrehmansyah	Bendahara Pengeluaran	Pelaksana
6	S u w a r d i	Pelaksanaan Administrasi Barang Inventaris Milik Negara	Pelaksana

5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT)

No.	N a m a	Jabatan dalam Kegiatan TP	Jabatan dalam SKPD
1	Drs. K a m u s n i	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kepala Dinas
2	Bambang Purwanto	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Kasubdin Permukiman dan Penempatan.
3	Drs. Siswanto	Pejabat Penguji SPP & Penandatanganan SPM	Kasubdin Pembinaan
4	M a r y o n o	Bendahara Penerima	Pelaksana
5	Silaturrehmansyah	Bendahara Pengeluaran	Pelaksana
6	S u w a r d i	Pelaksanaan Administrasi Barang Inventaris Milik Negara	Pelaksana

5.7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Jumlah Pegawai yang terlibat dalam Pelaksanaan Kegiatan pada Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat untuk masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK)

No.	N a m a	Pendidikan	Pangkat dan Golongan
1	Ir. Rusliansyah	S1	Pembina (IV/a)
2	M a r y o n o	SLTA	Penata Muda Tk. I (III/b)
3	Sri Sumarni	SLTA	Penata (III/c)
4	Siti Mariam, SH	S1	Penata Muda Tk. I (III/b)
5	Sri Handayani	SLTA	Penata Muda (III/a)
6	M. Eko Setyawati	SLTA	Pengatur Tk. I (II/d)
7	G i y o t o	SLTA	Penata Tk. I (III/d)
8	Yaumar Sitohang	SLTA	Penata Tk. I (III/d)
9	M a n n e n, SE	S1	Penata Muda Tk. I (III/b)
10	Parjiyano	SLTA	Penata Muda (III/a)
11	Sagu Gultom	SLTP	Pengatur II/c)
12	S u t i d j o	SD	Pengatur Muda (II/a)
13	Saut Butar Butar, SE	S1	Penata (III/c)
14	Indrikson, SE	S1	Penata Muda (III/a)
15	N o o r d i n	SD	Pengatur Muda (II/a)
16	K a l t o n, SmHk	Sarmud	Penata Tk. I (III/d)
17	Kaspul Anwar (A)	SLTA	Penata Tk. I (III/d)
18	Suyono, Bsw	Sarmud	Penata (III/c)
19	Syafruddin Tanjung	SLTA	Penata Tk. I (III/d)
20	Kamberani, SE	S1	Penata Muda Tk. I (III/b)
21	Gogot Ponco Sumarno	SLTA	Penata Muda Tk. I (III/b)
22	M u k i j o	SLTA	Penata Tk. I (III/d)
23	Theo Dorres EK	SLTA	Pengatur Muda (II/a)
24	K a d e r i	SLTA	Penata Muda (III/a)
25	Y e t n i e	SLTA	Penata Muda Tk. I (III/b)
26	Kaspul Anwar (B)	SLTA	Penata Muda (III/a)
27	Eduard Simamora	SLTA	Penata Muda Tk. I (III/b)
28	Sayub Ata	SLTA	Pengatur Muda (II/a)
29	Supriyanto	SLTA	Penata Muda (III/a)
30	Noor Auliani	SLTA	Penata Muda Tk. I (III/b)

2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK) Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek

No.	N a m a	Pendidikan	Pangkat dan Golongan
1	Yusbartiningsih, SH	S1	Pembina (IV/a)
2	Bungaran, SE	S1	Penata (III/c)
3	Morlen Manik, S.IP	S1	Penata Muda Tk. I (III/b)
4	Theresia Yatnaning W.	SLTA	Penata Muda Tk. I (III/b)
5	Abdul Munir	SLTA	Pengatur Tk. I (II/d)
6	Irwansyah	SLTP	Pengatur II/c)

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK) Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

No.	N a m a	Pendidikan	Pangkat dan Golongan
1	Kamiran, SE	S1	Penata Muda Tk. I (III/b)
2	Joko Dwi Kuranto	Sarmud	Penata (III/c)
3	Drs. Nelson	S1	Pembina (IV/a)

4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK)

No.	N a m a	Pendidikan	Pangkat dan Golongan
1	I Nengah Parsa, S.IP	S1	Pembina Tk. I (IV/b)
2	Nunik Supartini, SE	S1	Penata Muda (III/a)
3	S u w a r d i	SLTA	Penata Muda Tk. I (III/b)
4	Jan Sumardi Purba	SLTA	Penata Tk. I (III/d)
5	Bachtiar Rachman	SLTA	Penata Muda Tk. I (III/b)
6	Abdul Wahab	SLTA	Penata Muda Tk. I (III/b)
7	Hadi Siswoyo Raharjo	SLTA	Penata Tk. I (III/d)
8	S u w a r t o	SD	Pengatur Muda (II/a)
9	Y u s i u s	SLTA	Penata Muda Tk. I (III/b)
10	Mardiyono	SLTA	Penata Muda Tk. I (III/b)
11	Ir. Nining Agustina	S1	Penata Tk. I (III/d)
12	Rita Rufaida	SLTA	Penata Muda (III/a)

5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT)

No.	N a m a	Pendidikan	Pangkat dan Golongan
1	Drs. Kamusni	S1	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	Bambang Purwanto	D4	Pembina (IV/a)
3	Drs. Siswanto	S1	Penata Tk. I (III/d)
4	Silaturrahmansyah	SLTA	Penata Muda (III/a)
5	Sumardiyana	SLTA	Penata Muda Tk. I (III/b)
6	Teranto	SLTA	Penata Muda Tk. I (III/b)
7	Ir. Agung Kristiyanto	S1	Penata Muda (III/a)

5.8. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan.

Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan Program Kegiatan Dana Tugas Pembantuan tidak ada kendala, semua Sarana dan Prasarana mencukupi.

6. KPUD

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Provinsi di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun anggaran 2007 kepada Komisi Pemilihan Umum berjumlah 7 (tujuh) Program dengan dana secara keseluruhan berjumlah Rp. 1.237.632.000.-

6.1. Dasar Hukum.

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) T.A. 2007 Nomor : 0247.0/076-01.0/XVII/2007, tanggal 31 Desember 2006.
- b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2007, Tanggal 24 Januari 2007.

6.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.

Adapun Instansi yang memberikan alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Komisi Pemilihan Umum Pusat.

6.3. Program Dan Kegiatan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan alokasi dana pada Tugas Pembantuan yang diterima baik dari pemerintah pusat adalah sebagaimana pada tabel. 4.6.1 berikut ini :

Tabel 4.6.1
Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan

No	Program	Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4
1.	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi.	- PAW Anggota DPR, DPD dan DPD dan DPRD serta KPU.	Kabupaten Kotawaringin Barat

1	2	3	4
2.	Program Perbaikan Proses Politik	- Pemuktahiran dan Daftar Pemilih Pemilu & Pilkada - Verifikasi Calon Peserta Pemilu.	
3.	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.	- Pembinaan/koordinasi/pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.	
4.	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.	- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara.	
5.	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan.	- Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan. - Penyelenggaraan operasional perkantoran. - Pengadaan Alat Pengolah Data (Komputer dan Infokus / LCD) - Perawatan gedung kantor/ khusus. - Perawatan sarana dan prasarana kantor. - Penyelenggaraan tata usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi. - Pembinaan/koordinasi/ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. - Pembinaan/penyusunan program, rencana kerja dan anggaran. - Penyelenggaraan/peningkatan akuntansi pemerintah dan kekayaan milik Negara - Kerjasama antar instansi pemerintah / swasta / lembaga. - Ketertiban dan keamanan. - Pembinaan hukum.	
6.	Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum.	- Penyusunan/ penyempurnaan/ pengkajian peraturan perundang-undangan. - Pelayanan dan bantuan hukum.	
7.	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	- Peningkatan Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.	

6.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 68,92 % dengan rincian pada tabel 4.6.2 sebagai berikut :

Tabel 4.6.2
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1.	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi. Sasaran : - PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD dan DPRD serta KPU.	- Terlaksananya PAW anggota DPRD dan KPU serta pelantikan / pengambilan sumpah janji.	48.97
2.	Program Perbaikan Proses Politik Sasaran : - Pemuktahiran dan Daftar Pemilih Pemilu dan Pilkada. - Verifikasi Calon Peserta Pemilu.	- Terlaksananya pemuktahiran dan daftar pemilih dan pilkada - Terlaksananya verifikasi calon peserta pemilu.	82.16 69.15
3.	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara. Sasaran : - Pembinaan/koordinasi/pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.	- Terlaksananya pembinaan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.	39.96
4.	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur. Sasaran : - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara.	- Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara.	54.32

<p>5.</p>	<p>Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan. Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan. - Penyelenggaraan operasional perkantoran. - Perawatan gedung kantor/khusus. - Perawatan sarana dan prasarana kantor. - Penyelenggaraan tata usaha perkantoran, kearsipan, perpus-takaan dan dokumentasi. - Pembinaan/koordinasi/pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. - Pembinaan/penyusunan program, rencana kerja dan anggaran. - Penyelenggaraan/peningkatan akuntansi pemerintah dan kekayaan milik Negara. - Kerjasama antar instansi pemerintah/ swasta/ lembaga. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi. - Terlaksananya pengadaan makanan, minuman penambah daya tahan tubuh & Terlaksananya pengadaan alat pengolah data - Terlaksananya pembayaran belanja perawatan gedung kantor. - Terlaksananya pembayaran belanja pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2. - Terlaksananya penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan/dokumentasi. - Terlaksananya pembinaan/ koordinasi/ perencanaan/ supervisi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran. - Terlaksananya penyusunan program dan RKA-KL. - Terlaksananya akuntansi keuangan negara dan penghapusan milik negara serta tuntutan ganti rugi. - Terlaksananya rapat-rapat dengan pusat dengan lembaga terkait. 	<p>55.97</p> <p>72.63</p> <p>74.31</p> <p>75.28</p> <p>67.48</p> <p>89.15</p> <p>65.65</p> <p>45.98</p> <p>44.06</p>
<p>6.</p>	<p>Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum. Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan/ penyempurnaan/ pengkajian peraturan perundang-undangan. - Pelayanan dan bantuan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan pleno KPU tentang pemilu 2009. - Terlaksananya kegiatan Advokasi. 	<p>58.86</p> <p>0</p>

7.	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sasaran : - Peningkatan Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.	- Terlaksananya pengolahan dan informasi serta supervisi aplikasi teknologi pengolahan data.	94.72
Jumlah Tingkat Capaian			68.92

6.5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan.

Dana yang diterima bersumber dari DIPA Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2007 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.237.632.000,- (// Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah.//), dimana Realisasi Anggaran sebesar Rp. 852.954.175.- (// Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah//), dan Sisa Anggaran sebesar Rp. 384.677.825.- (// Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah.//), dengan Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan terdapat pada tabel. 4.6.3 sebagai berikut :

Tabel 4.6.3
Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Selisih Anggaran (Rp.)	
			Fisik (%)	Keuangan (Rp.)		
			(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	PAW Anggota DPR,DPD dan DPRD serta KPU. -Pelantikan/pengambilan sumpah janji.	15.000.000	100	7.346.000	48.97	7.654.000
2.	Pemuktahiran dan Daftar Pemilih Pemilu dan Pilkada. -Pemuktahiran Data	35.000.000	100	28.755.500	82.16	6.244.500
	Verifikasi Calon Peserta Pemilu. -Pendaftaran dan seleksi	13.583.000	100	9.392.000	69.15	4.191.000

1	2	3	4	5	6	7
3.	Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. -Pengembangan penerapan pemeriksaan berbasis kinerja	15.000.000	100	5.993.500	39.96	9.006.500
4.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Negara. -Penyelenggaraan pendidikan/pelatihan.	25.000.000	100	13.580.000	54.32	11.420.000
5.	Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan. - Pembayaran gaji, lembur, honorarium dan Vakasi. Penyelenggaraan operasional perkantoran. - Pengadaan makanan/ minuman/ penambah daya tahan tubuh/ uang makan PNS - Pengadaan pakaian dinas pegawai. - Pengadaan toga/ pakaian kerja sopir/ pesuruh/ perawat/ dokter/ satpam/ tenaga teknis lainnya. - Pengadaan Alat Pengolah Data.(Komputer dan Infokus/LCD) - Kegiatan anggaran rutin Uang Kehormatan - Ketua KPU - Anggota KPU - Sekretaris KPU - Kasubag - Bendaharawan - Pelaksana Honor untuk Tenaga Honor - Tenaga honor Honor Petugas Kebersihan - Petugas kebersihan Honor Pengelola Keuangan - Kuasa pengguna - Pejabat pembuat komitmen - Penanda tangan SPM - Bendaharawan pengeluaran. - Staf pengelola. - Pengadaan perlengkapan Kantor (ATK, Barang cetak, Alat, RT, Langganan Majalah. - Sewa gedung kantor/ Peralatan/ Kendaraan. - Langganan daya dan jasa - Jasa keamanan/ kebersihan -	102.230.000	100	57.217.600	55.97	45.012.400
		6.600.000	100	6.599.950	100	50
		8.100.000	100	900.000	11.11	7.200.000
		3.900.000	100	2.675.000	68.59	1.225.000
		30.000.000	100	29.250.000	97.50	750.000
		48.000.000	100	48.000.000	100	-
		144.000.000	100	144.000.000	100	-
		3.600.000	100	3.600.000	100	-
		9.600.000	100	6.600.000	68.75	3.000.000
		3.600.000	100	3.600.000	100	-
		14.400.000	100	900.000	6.25	13.500.000
		45.000.000	100	45.000.000	100	-
		9.600.000	100	9.600.000	100	-
		6.000.000	100	6.000.000	100	-
		5.100.000	100			5.100.000
		4.500.000	100	4.500.000	100	-
		4.200.000	100	4.200.000	100	-
		6.000.000	100	-	100	6.000.000
		27.250.000	100	27.038.700	99.22	211.300
		32.400.000	100	-	-	32.400.000
		96.000.000	100	23.307.125	24.28	72.692.875
		28.800.000	100	24.000.000	83.33	4.800.000

1	2	3	4	5	6	7
	Perawatan gedung kantor/ khusus - Perawatan gedung kantor.	36.550.000	100	27.161.000	74.31	9.389.000
	Perawatan sarana dan prasarana kantor. - Perawatan kendaraan bermotor roda 4 / 6/ 10. - Perawatan kendaraan bermotor roda 2. - Perawatan sarana gedung	26.000.000 5.600.000 53.319.000	100 100 100	12.960.000 3.433.000 47.530.000	49.85 61.30 89.14	13.040.000 2.167.000 5.789.000
	Penyelenggaraan tata usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi. - Penyelenggaraan perpustakaan/ kearsipan/ dokumentasi. - Pencetakan/ penerbitan/ penggandaan/ laminasi.	32.000.000 31.200.000	100 100	25.067.700 17.582.200	78.34 56.35	6.932.300 13.617.800
	Pembinaan/ koordinasi/ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. - Perencanaan umum	109.500.000	100	97.624.000	89.15	11.876.000
	Pembinaan/penyusunan program, rencana kerja dan anggaran. - Penyusunan program dan rencana kerja (RKA – KL) A. Penyusunan RKAKL tahun 2008. B. Penyusunan pelaporan anggaran tahun 2007. Penyelenggaraan/ peningkatan akuntansi pemerintahan dan kekayaan milik Negara. - Akuntansi keuangan Negara dan inventaris kekayaan Negara. A. Pengelolaan system akuntansi keuangan (SAK-SAI). B. Penghapusan barang milik Negara dan tuntutan ganti rugi.	28.500.000 28.500.000 32.000.000 10.000.000	100 100 100 100	21.424.000 15.995.700 19.313.000 -	75.17 56.13 60.35 -	7.076.000 12.504.300 12.687.000 10.000.000
	Kerjasama antar instansi pemerintah/swasta/ lembaga. - Rapat- rapat koordinasi/ kerja/ dinas/pimpinan kelompok kerja/ konsultasi. - Kerjasama antar instransi pemerintah/ swasta/ lembaga terkait.	30.000.000 12.000.000	100 100	10.522.201 7.985.000	35.07 66.54	19.477.799 4.015.000
6.	Penyusunan perundang- undangan. - Menyempurnakan perangkat peraturan.	10.000.000	100	5.886.000	58.86	4.114.000

1	2	3	4	5	6	7
7.	Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. - Penyusunan /pengumpulan/ pengolahan/ updating/ analisa data dan statistik.	30.000.000	100	28.415.000	94.72	1.585.000
	Jumlah	1.237.632.000		852.954.175	68.92	384.677.825

6.6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan dari Komisi Pemilihan Umum Pusat adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dimana Personil Pelaksana Dana Tugas Pembantuan (TP) terdapat pada tabel 4.6.4 sebagai berikut :

Tabel. 4.6.4
Susunan Personil Pelaksana Dana Tugas Pembantuan (TP)

No	Nama	Jabatan dalam Kegiatan TP.	Jabatan dalam SKPD
1	AGUS SUPARJI, SH	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Sekretaris
2	AGUS SUPARJI, SH	Pejabat Pelaksana Tanggungjawab Kegiatan	Sekretaris
3	MURTINAH	Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM.	Subag Umum
4	MINARSIH	Bendahara Penerima	Pelaksana
5	MINARSIH	Bendahara Pengeluaran.	Pelaksana
6	VENY SETIAWATI	Pelaksana Administrasi Barang Inventaris Milik Negara.	Pelaksana
	Jumlah		

6.7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Jumlah Pegawai yang terlibat dalam Pelaksanaan Kegiatan pada Tugas Pembantuan KPUD sebanyak 4 (empat) orang dengan rincian pegawai pada tabel 4.6.5 sebagai berikut :

Tabel. 4.6.5
Nama Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No	Nama	Pendidikan	Pangkat dan Golongan
1	AGUS SUPARJI, SH	S.1	PEMBINA TK.I IV/b
2	KLIWON	SLTA	PENATA TK.I III/d
3	MURTINAH	SLTA	PENATA TK.I III/d
4	ANIK KADARSIH	SLTA	PENGATUR II/c
5	MINARSIH	SLTA	PENGATUR MUDA TK.I II/b

6.8. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan.

- Mobil/Kendaraan (Baik)
- Gudang (Baik)
- Gedung (pinjam)
- Telepon/Listrik/Air (Baik)

6.9. Permasalahan dan Solusi.

No	Kegiatan	Kendala	Tindak lanjut yang diperlukan.
1.	PAW Anggota DPR, DPRD	Tidak terjadi PAW	
2.	Pemuktahiran dan Daftar Pemilih Pemilu dan Pilkada.	Data yang terkumpul belum 100 %.	Terus melakukan koordinasi instansi terkait pengadaan data.
3.	Verifikasi Calon Peserta Pemilu.	-	-

4.	Pembinaan/koordinasi/pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.	Pemotongan dana perjalanan dinas tidak mengikat per 31 Juli 2007 sebesar 70 % dari sisa yang ada.	Telah meminta penjelasan tentang alasan pemotongan dana dimaksud.
5.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara.	-	-
6.	Pengelolaan gaji, lembur, honorarium dan tunjangan.	Tenaga struktural yang dimutasi keluar KPU belum mendapatkan penggantian.	Perlu penambah tenaga PNS (pelaksana dan struktural)
7.	Penyelenggaraan operasional perkantoran.	-	-
8.	Perawatan gedung kantor khusus	-	-
9.	Perawatan sarana dan prasarana kantor.	Gedung kantor masih dalam status pinjam pakai yang sebentar lagi dibongkar untuk perluasan RSUD Sultan Imanuddin.	Perlu disediakan gedung pengganti menjelang pemilu 2009.
10.	Penyelenggaraan tata usaha perkantoran kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.	-	-
11.	Pembinaan/ koordinasi/ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.	Tidak adanya badan pelaksana di TK. Kecamatan yang khusus mengelola daftar pemilih dan data pemilu.	Inspeksi lapangan.
12.	Pembinaan/ penyusunan program, rencana kerja dan anggaran.	-	-
13.	Penyelenggaraan/ peningkatan akuntansi pemerintah dan kekayaan milik Negara.	Logistik surat suara yang sudah di coblos pada pilkada tahun 2005 menumpuk di gudang KPU.	Perlu dilakukan penghapusan surat suara yang sudah dicoblos.

14.	Kerjasama antar instansi pemerintah/ swasta/ lembaga.	-	-
15.	Penyusunan/ penyempurnaan/ pengkajian peraturan perundang-undangan.	-	-
16.	Pelayanan dan bantuan hukum.	Tidak ada terjadi kasus hukum	-
17.	Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi.	-	-

6.10 Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

1. Masih adanya kekurangan dalam jabatan Struktural. Jabatan struktural yang ada 4 (empat) Subag, sedangkan yang masih kurang, belum terisi ada 2 Subag. Dikarenakan mutasi dan kena musibah kapal senopati yang tenggelam pada tahun lalu. Dimohonkan agar segera ada pengisian kekosongan jabatan struktural pada Sekretariat KPU Kab. Ktw. Barat sehubungan dengan mendesaknya jadwal Pemilu 2009.
2. Masih kurangnya sarana pendukung untuk kelancaran tugas, yaitu mobil dan sepeda motor. Kendaraan yang ada, 1 buah mobil dan 1 buah sepeda motor. Untuk itu perlu adanya penambahan sarana transportasi tersebut untuk kelancaran tugas operasional KPU.
3. Gedung Kantor KPU selama ini masih pinjam pemda kobar, sehingga perlu adanya penunangan dana baik dari pemda APBD ataupun APBN untuk pembangunan gedung Kantor KPU.
4. Dalam menunjang suksesnya pemilu ataupun pilkada di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini, maka perlu adanya penunangan dana dari pemda Kabupaten Kotawaringin Barat ataupun sarana lainnya.

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Desa

1. Bidang Tata Pemerintahan.

Tugas pembantuan yang diberikan kepada desa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2006 bersifat pemberian tugas kepada desa untuk melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan rencana dan kebutuhan desa masing-masing. Sesuai dengan amanat pasal 212 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasall 68 Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Desa.

Sejak tahun anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyediakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kabupaten untuk membiaya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa sekaligus sebagai pendanaan bagi desa dalam melaksanakan tugas-tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya Alokasi Dana Desa tersebut, maka bantuan pembangunan sebelumnya dalam bentuk Bantuan Pembangunan Desa (Bangdes) ditiadakan dan diakomodir langsung dalam Alokasi Dana Desa tersebut, sedangkan alokasi bantuan keuangan kepada Desa/Kelurahan dalam bentuk dana penyisihan PBB masih tetap diberikan..

Melalui Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 140/319/Pem tanggal 23 Juli 2007 ditetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 20.376.419.557 (dua puluh milyar, tiga ratus tujuh puluh enam juta, empat ratus sembilan belas ribu, lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) untuk 72 desa dengan perincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH DANA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
I.	ARUT SELATAN	1. Pasir Panjang	330.740.315	
		2. Kumpai Batu Atas	289.559.958	
		3. Kumpai Batu Bawah	263.039.943	
		4. Natai Raya	229.494.459	
		5. Rangda	225.555.240	
		6. Sulung Kenambui	318.605.092	
		7. Umpang	365.909.175	
		8. Tanjung Putri	234.065.806	
		9. Runtu	341.744.173	
		10. Medang Sari	259.989.997	
		11. Natai Baru	226.599.832	
		12. Tanjung Terantang	257.456.934	
	JUMLAH		3.342.760.923	

1	2	3	4	5
II.	KUMAI	1. Sungai Tendang 2. Sungai Kapitan 3. Batu Belaman 4. Kubu 5. Sungai Bakau 6. Teluk Bogam 7. Keraya 8. Sebuai 9. Teluk Pulai 10. Sungai Cabang 11. Sungai Sekonyer 12. Sungai Bedaun 13. Bumi Harjo 14. Pangkalan Satu	272.202.488 230.096.126 327.191.491 323.769.318 269.748.866 250.163.388 234.584.409 244.125.949 336.125.899 331.781.318 377.559.712 317.647.681 310.422.391 257.095.896	
	JUMLAH		4.082.514.882	
III	PANGKALAN LADA	1. Pandu Senjaya 2. Makarti Jaya 3. Sungai Rangit Jaya 4. Lada Mandala Jaya 5. Sumber Agung 6. Purbasari 7. Pangkalan Tiga 8. Kadipi Atas 9. Pangkalan Dewa 10. Pangkalan Durin 11. Sungai Melawen	307.582.673 255.227.883 259.640.379 267.729.442 286.064.401 302.442.714 272.631.820 247.086.441 270.959.946 261.929.135 270.854.495	
	JUMLAH		3.002.149.329	
IV	P.BANTENG	1. Pangkalan Banteng 2. Mulya Jadi 3. Marga Mulya 4. Karang Mulya 5. Amin Jaya 6. Kebun Agung 7. Sido Mulyo 8. Arga Mulya 9. Natai Kerbau 10. Simpang Berambai 11. Sungai Hijau	467.290.735 290.580.182 261.988.955 289.069.247 366.616.326 256.848.175 320.921.045 283.367.446 290.720.384 266.446.622 268.091.113	
	JUMLAH		3.361.940.229	

1	2	3	4	5
V	KTW. LAMA	1. Lalang 2. Rungun 3. Kondang 4. Riam Durian 5. Dawak 6. Suka Jaya 7. Kinjil 8.. Suka Bulin 9. Tempayang 10. Babual Baboti 11. Suka Makmur 12. Sumber Mukti 13. Palih Baru 14. Ipuh Bangun Jaya 15. Sagu Sukamulya	226.000.437 262.151.591 239.085.294 256.282.431 232.318.692 237.824.388 235.938.297 240.715.421 247.480.448 265.574.858 285.739.551 272.910.429 284.947.801 276.735.177 249.436.600	
	JUMLAH		3.818.141.366	
VI.	ARUT UTARA	1. Nanga Mua 2. Sukarami 3. Gandis 4. Kerabu 5. Penyombaan 6. Sambu 7. Pandau 8. Riam 9. Penahan	310.089.973 263.558.894 298.182.336 298.463.395 321.226.226 299.791.093 328.604.086 282.253.126 367.743.719	
	JUMLAH		2.773.912.848	
	TOTAL		20.376.419.577	

Disamping itu berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 973/521/Pem tanggal 19 Desember 2007 kepada Desa dan kelurahan juga diberikan alokasi dana penyisihan penerimaan PBB bagian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat serta Penyisihan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2006 kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Penetapan alokasi dana penyisihan penerimaan PBB tahun 2007 untuk 85 Desa /Kelurahan sebesar Rp. 2,787,985,812 , dengan perincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN/DESA KELURAHAN	PEMBAGIAN UNTUK DESA / KELURAHAN					
		POTENSI	BOBOT	RATA-RATA	POTENSI	BONUS	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8
I. ARUT SELATAN							
1	Raja	95,796,246	10.26	28,750,000	30,850,368	500,000	60,100,368
2	Mendawai	273,316,485	29.28	28,750,000	88,019,255	500,000	117,269,255
3	Baru	131,506,062	14.09	28,750,000	42,350,411	500,000	71,600,411
4	Sidorejo	101,078,751	10.83	28,750,000	32,551,554	500,000	61,801,554
5	Madurejo	81,248,145	8.70	28,750,000	26,165,276	500,000	55,415,276
6	Raja Seberang	4,437,992	0.48	28,750,000	1,429,218		30,179,218
7	Mendawai Seberang	1,850,239	0.20	28,750,000	595,854		29,345,854
8	Pasir Panjang	20,199,341	2.16	28,750,000	6,505,026	500,000	35,755,026
9	Kumpai Batu Bawah	6,945,607	0.74	28,750,000	2,236,774	500,000	31,486,774
10	Kumpai Batu Atas	6,934,367	0.74	28,750,000	2,233,154	500,000	31,483,154
11	Tanjung Putri	870,681	0.09	28,750,000	280,395		29,030,395
12	Sulung Kenambui	812,190	0.09	28,750,000	261,559		29,011,559
13	Rangda	135,318	0.01	28,750,000	43,578	-	28,793,578
14	Umpang	91,600	0.01	28,750,000	29,499	-	28,779,499
15	Runtu	373,886	0.04	28,750,000	120,407	-	28,870,407
16	Natai Raya	6,864,813	0.74	28,750,000	2,210,755	500,000	31,460,755
17	Medang Sari	1,202,750	0.13	28,750,000	387,335		29,137,335
18	Natai Baru			28,750,000		-	28,750,000
19	Tanjung Terantang			28,750,000			28,750,000
	Jumlah	733,664,473	78.60	546,250,000	236,270,418	4,500,000	787,020,418
II. ARUT UTARA							
1	Pangkut	593,370	0.06	28,750,000	191,090		28,941,090
2	Panahan	335,850	0.04	28,750,000	108,158	-	28,858,158
3	Sambi	663,770	0.07	28,750,000	213,761		28,963,761
4	Kerabu	387,500	0.04	28,750,000	124,791	-	28,874,791
5	Penyombaan	109,618	0.01	28,750,000	35,302	-	28,785,302
6	Gandis	115,000	0.01	28,750,000	37,035	-	28,787,035
7	Pandau	156,039	0.02	28,750,000	50,251	-	28,800,251
8	Sukarami	60,000	0.01	28,750,000	19,322	-	28,769,322
9	Riam	380,000	0.04	28,750,000	122,376	-	28,872,376
10	Nanga Mua	137,970	0.01	28,750,000	44,432	-	28,794,432
	Jumlah	2,939,117	0.31	287,500,000	946,518	-	288,446,518

1	2	3	4	5	6	7	8
	III. KUMAI						
1	Kumai Hulu	30,557,530	3.27	28,750,000	9,840,793	500,000	39,090,793
2	Kumai Hilir	22,055,972	2.36	28,750,000	7,102,939	500,000	36,352,939
3	Candi	8,184,972	0.88	28,750,000	2,635,901	500,000	31,885,901
4	Sungai Kapitan	,082,848	1.29	28,750,000	3,891,179	500,000	33,141,179
5	Sungai Tendang	7,136,603	0.76	28,750,000	2,298,282	500,000	31,548,282
6	Batu Belaman	3,807,671	0.41	28,750,000	1,226,228		29,976,228
7	Kubu	1,536,382	0.16	28,750,000	494,779	-	29,244,779
8	Sungai Bedaun	792,679	0.08	28,750,000	255,276	-	29,005,276
9	Sungai Sekonyer	1,992,207	0.21	28,750,000	641,573		29,391,573
10	Teluk Pulai	203,632	0.02	28,750,000	65,578	-	28,815,578
11	Sei. Cabang Timur	308,218	0.03	28,750,000	99,259	-	28,849,259
12	Sungai Bakau	1,149,084	0.12	28,750,000	370,053		29,120,053
13	Teluk Bogam	455,950	0.05	28,750,000	146,835	-	28,896,835
14	Keraya	1,992,820	0.21	28,750,000	641,771		29,391,771
15	Sebuai	277,902	0.03	28,750,000	89,496	-	28,839,496
16	Bumi Harjo	15,301,672	1.52	28,750,000	4,569,185	500,000	33,819,185
17	Pangkalan Satu	7,360,294	0.79	28,750,000	2,370,320	500,000	31,620,320
	Jumlah	29,834,458	3.08	488,750,000	9,249,346	3,500,000	528,989,446
	IV. KTW. LAMA						
1	Kotawaringin Hulu	1,659,477	0.18	28,750,000	534,420		29,284,420
2	Kotawaringin Hilir	2,047,420	0.22	28,750,000	659,354		29,409,354
3	Babual Babot	167,990	0.02	28,750,000	54,100	-	28,804,100
4	Tempayung	307,157	0.03	28,750,000	98,917	-	28,848,917
5	Sakabulin	211,715	0.02	28,750,000	68,181	-	28,818,181
6	Kinjil	338,002	0.04	28,750,000	108,851	-	28,858,851
7	Dawak	174,822	0.02	28,750,000	56,300	-	28,806,300
8	Lalang	66,200	0.01	28,750,000	21,319	-	28,771,319
9	Riam Durian	103,275	0.01	28,750,000	33,259	-	28,783,259
10	Rungun	922,916	0.10	28,750,000	297,217		29,047,217
11	Kondang	302,907	0.03	28,750,000	97,549	-	28,847,549
12	Palih Baru	4,200,000	0.45	28,750,000	1,352,574	500,000	30,602,574
13	Sumber Mukti	4,238,500	0.45	28,750,000	1,364,973	500,000	30,614,973
14	Suka Makmur	2,084,400	0.22	28,750,000	671,263		29,421,263
15	Sukajaya	1,203,825	0.13	28,750,000	387,682		29,137,682
16	Ipuh Bangun Jaya			28,750,000		-	28,750,000
17	Sagu Suka Mulya			28,750,000		-	28,750,000
	Jumlah	18,028,606	1.93	488,750,000	5,805,960	1,000,000	495,555,960

V. PANGKALAN LADA							
1	Makarti Jaya	9,708,728	1.04	28,750,000	3,126,613	500,000	32,376,613
2	Pandu Sanjaya	12,305,299	1.32	28,750,000	3,962,817	500,000	33,212,817
3	Sungai Rangit Jaya	13,353,233	1.43	28,750,000	4,300,295	500,000	33,550,295
4	Purbasari	14,980,924	1.60	28,750,000	4,824,479	500,000	34,074,479
5	Pangkalan Tiga	12,482,821	1.34	28,750,000	4,019,987	500,000	33,269,987
6	Sumber Agung	13,371,836	1.43	28,750,000	4,306,286	500,000	33,556,286
7	Lada Mandala Jaya	8,122,006	0.87	28,750,000	2,615,623	500,000	31,865,623
8	Pangkalan Dewa			28,750,000		-	28,750,000
9	Kadipi Atas			28,750,000		-	28,750,000
10	Pangkalan Durin			28,750,000			28,750,000
11	Sungai Melawen			28,750,000			28,750,000
	Jumlah	84,324,847	9.03	316,250,000	27,156,101	3,500,000	346,906,101
VI. PKLN. BANTENG							
1	Karang Mulya	13,277,646	1.42	28,750,000	4,275,953	500,000	33,525,953
2	Mulya Jadi	5,975,460	0.64	28,750,000	1,924,346	500,000	31,174,346
3	Pangkalan Banteng	2,130,469	0.23	28,750,000	686,099	-	29,436,099
4	Marga Mulya	9,978,672	1.07	28,750,000	3,213,547	500,000	32,463,547
5	Sido Mulya	7,348,134	0.79	28,750,000	2,366,404	500,000	31,616,404
6	Kebon Agung	7,287,453	0.78	28,750,000	2,346,862	500,000	31,596,862
7	Amin Jaya	6,966,239	0.75	28,750,000	2,243,418	500,000	31,493,418
8	Natai Kerbau	6,395,536	0.69	28,750,000	2,059,628	500,000	31,309,628
9	Arga Mulya	5,282,272	0.57	28,750,000	1,701,111	500,000	30,951,111
10	Simpang Berambai			28,750,000			28,750,000
11	Sungai Hijau			28,750,000			28,750,000
	Jumlah	64,641,881	6.93	316,250,000	20,817,369	4,000,000	341,067,369
	Jumlah Keseluruhan	933,433,382		2,443,750,000		16,500,000	2,787,985,812

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1 Dasar Hukum

- a. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2007 Nomor : 27351.1 / 010-05.1/-/2007. bersumber dari APBN TA. 2007.
- b. Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Nomor NPH : 414.2/04.20/NPH/PMD, bersumber dari APBD TA. 2007.

2.2 Urusan Pemerintahan yang di tugas pembantuankan kepada Desa untuk Kabupaten / Kota

Usuran Pemerintahan yang ditugas pembantuankan kepada Desa untuk Kabupaten merupakan Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan melalui Program Pengembangan Kecamatan.

Bentuk Keegiatannya merupakan Peningkatan / Pembangunan sarana-prasarana fisik sosial dasar, pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta pemberian dana modal bergulir dengan sasaran utama adalah Desa/Kelurahan dengan kelompok masyarakat miskin dan Perempuan dengan pendekatan pola partisipatif dalam arti partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Sumber dana merupakan *cost-sharing* dalam bentuk Dana Hibah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) antara Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD) dengan komposisi 30% Pusat dan 70% Daerah

2.3 Sumber dan Jumlah Anggaran

Alokasi Dana Pembangunan yang diberikan kepada Desa / Kelurahan bersumber dari :

1. Dana APBN (DIPA Departemen Dalam Negeri, Unit Organisasi Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Satker Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 2735.1/010-05.1/-/2007) sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah), sumber Dana Pinjaman Luar Negeri.

2. Dana APBD Kabupaten Kotawaringin Barat (DPA SKPD 910/ 66 /KEU/2007) sebesar Rp. 2.100.000.000,- (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah).
3. Total Dana sebagaimana poin 1 dan 2 di atas merupakan *cost-sharring* yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah RI melalui Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dengan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 414.2/04.20/NPH/PMD tanggal 6 Juni 2007 ditetapkan untuk pemberian Dana Pembangunan Desa / Kelurahan kepada 41 Desa / Kelurahan di 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Arut Utara dan Kotawaringin Lama sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dengan perincian masing-masing Desa / Kelurahan sebagai berikut.

NO.	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	JUMLAH DANA				KETERANGAN	
			(Rp)				JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN
			Kegiatan	2% UPK	3% TPK	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Arut Selatan							
1		Natai Baru	108107000	2275925	3413900	113796825	Sarana/Prasarana Pendidikan	Pembangunan Gedung TK
			8.350.000	175.775	263.675	8.789.450		Meublair
			6.000.000	126.350	189.525	6.315.875		Honor Guru TK
			33507100	705450	1058100	35270650	Sarana/Prasarana	Jembatan Cor Beton
2		Raja Seberang	61.191.000	1.288.150	1.932.200	64.411.350	Sarana/Prasarana	Pembangunan Dermaga
			20.000.000	421.050	631.575	21.052.625	Simpan Pinjam Perempuan	Klp. Sholawatan Siti Aminah
			20.000.000	421.050	631.575	21.052.625		Klp. Sholawatan M-Jannah
			20.000.000	421.050	631.575	21.052.625		Klp. Sholawatan PKK
3		Medang Sari	28.713.000	604.475	906.725	30.224.200	Sarana/Prasarana Kesehatan	Pembangunan Gedung Posyandu
			1.550.000	32.600	48.925	1.631.525		Meublair
			4.100.000	86.375	129.550	4.315.925		Pelatihan Kader Posyandu
			53.791.000	1.132.450	1.698.700	56.622.150	Sarana/Prasarana Kesehatan	Pembuatan Sumur Pompa Tangan
			20.000.000	421.050	631.575	21.052.625	Simpan Pinjam Perempuan	Klp. PKK
4		Mendawai Seberang	75.242.500	1.584.050	2.376.075	79.202.625	Sarana/Prasarana Pendidikan	Pemb. Gedung TK
			3.725.000	78.425	117.675	3.921.100		Meublair
			20.000.000	421.050	631.575	21.052.625	Simpan Pinjam Perempuan	Klp. PKK
			20.000.000	421.050	631.575	21.052.625		Klp. Sholawatan Wahdatul Adhar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Tanjung Terantang	75.192.500	1.583.050	2.374.500	79.150.050	Sarana/Prasarana Pendidikan	Pembangunan Gedung TK	
		10.000.000	210.525	315.775	10.526.300	Simpan Pinjam Perempuan	Klp. PKK	
6	Tanjung Putri	62175000	1308950	1963450	65447400	Sarana/Prasarana Kesehatan	Pembuatan Tower Air	
7	Sidorejo	45.650.325	961.050	1.441.600	48.052.975	Sarana/Prasarana Kesehatan	Pembangunan Gedung Posyandu	
		43.288.875	911.350	1.367.000	45.567.225	Sarana/Prasarana Kesehatan	Pembangunan MCK	
8	Kumpai Batu Bawah	51.390.000	1.081.900	1.622.900	54.094.800	Sarana/Prasarana	Penimbunan Jalan Gang	
9	Kumpai Batu Atas	47.007.075	989.600	1.484.425	49.481.100	Sarana/Prasarana	Pembangunan Gorong - gorong	
		7.019.625	147.800	221.675	7.389.100		Pembangunan Jembatan Cor Beton	
10	Rangda	24.000.000	505.250	757.875	25.263.125	Simpan Pinjam Perempuan	Kelompok PKK	
11	Raja	20.000.000	421.050	631.575	21.052.625	Simpan Pinjam Perempuan	Klp. Sholawatan Nurul Iman	
		20.000.000	421.050	631.575	21.052.625		Klp. PKK	
		20.000.000	421.050	631.575	21.052.625		Klp. Katering	
		20.000.000	421.050	631.575	21.052.625		Klp. Muslimat	
	TOTAL A :	950.000.000	20.000.000	30.000.000	1.000.000.000			
B.	KUMAI							
1	Teluk Pulai	43.386.000	913.375	1.370.075	45.669.450	Sarana/Prasarana	Pembuatan Bak Tampung Air Besih	
2	Amin Jaya	33.284.000	700.725	1.051.100	35.035.825	Sarana/Prasarana Kesehatan	Pembangunan Gedung Posyandu	
		4.550.000	95.775	143.675	4.789.450		Meublair + Perlengkapan Posyandu	
3	Purbasari	103.909.000	2.187.550	3.281.350	109.377.900	Sarana/Prasarana Pendidikan	Pembangunan Gedung TK / TPA	
		33.750.000	710.525	1.065.775	35.526.300		Meublair	
4	Pangkalan Dewa	71.751.000	1.510.525	2.265.825	75.527.350	Sarana/Prasarana Kesehatan	Pembangunan Gedung Posyandu	
		80.000.000	1.684.200	2.526.300	84.210.500	Simpan Pinjam Perempuan	Kelompok PKK	
5	Makarti Jaya	35.827.000	754.250	1.131.400	37.712.650	Sarana/Prasarana Pendidikan	Rehab/Peningkatan Gedung TK	
		15.400.000	324.200	486.300	16.210.500		Meublair + Perlengkapan TK	
6	Sungai Bakau	101.520.500	2.137.275	3.205.900	106.863.675	Sarana/Prasarana Pendidikan	Pembangunan Gedung TK	
		14.150.000	297.900	446.850	14.894.750		Meublair + Perlengkapan TK	
7	Sungai Rangit Jaya	89.282.500	1.879.650	2.819.450	93.981.600	Sarana/Prasarana Pendidikan	Pembangunan Gedung TK	
		13.450.000	283.175	424.750	14.157.925		Meublair + Perlengkapan TK	
		12.000.000	252.650	378.950	12.631.600		Honor Guru TK	
8	Sebuai	25.874.000	544.725	817.075	27.235.800	Sarana/Prasarana Kesehatan	Pembangunan Gedung Posyandu	
		1.700.000	35.800	53.700	1.789.500		Meublair	
		12.000.000	252.625	378.925	12.631.550	Simpan Pinjam Perempuan	Kelompok "BAHAUM"	
		17.500.000	368.400	552.625	18.421.025		Kelompok "BORAS SEGA"	
9	Marga Mulya	74.043.000	1.558.825	2.338.225	77.940.050	Sarana/Prasarana Pendidikan	Pembangunan Gedung TK	
		11.200.000	235.800	353.700	11.789.500		Meublair + Perlengkapan TK	
		3.000.000	63.175	94.750	3.157.925		Honor Guru TK	
		32.423.000	682.575	1.023.875	34.129.450		Sarana/Prasarana Kesehatan	Pembangunan Gedung Posyandu
10	Teluk Bogam	30.000.000	631.575	947.350	31.578.925	Simpan Pinjam Perempuan	Kelompok "NURUL HASANAH"	
11	Sungai Tendang	30.000.000	631.575	947.350	31.578.925	Simpan Pinjam Perempuan	Kelompok Arisan Yasinan	
12	Sungai Melawen	20.000.000	421.050	631.575	21.052.625	Simpan Pinjam Perempuan	Kelompok RT VI	
13	Sidomulyo	40.000.000	842.100	1.263.150	42.105.250	Simpan Pinjam Perempuan	Kelompok "MAWAR"	
	TOTAL B :	950.000.000	20.000.000	30.000.000	1.000.000.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	ARUT UTARA							
1	RIAM		23.872.250	502.550	753.850	25.128.650	Sarana / Prasarana Kesehatan	Pembangunan Gedung Posyandu
			28.080.000	591.150	886.750	29.557.900	Sarana / Prasarana Kesehatan	- Sumur Gali
			39.820.000	838.325	1.257.450	41.915.775		- MCK
2	Nanga Mua		71.291.000	1.500.850	2.251.300	75.043.150	Sarana / Prasarana	Pembuatan Siring Jalan
3	Kerabu		44.501.250	936.875	1.405.325	46.843.450	Sarana / Prasarana Kesehatan	Pembangunan Gedung Posyandu
4	Pangkut		45.077.250	948.975	1.423.525	47.449.750	Sarana / Prasarana Kesehatan	Pembangunan Gedung Posyandu
5	Panahan		54.250.500	1.142.100	1.713.150	57.105.750	Sarana / Prasarana	Pembangunan & Pengadaan Listrik Desa 20 KVA
			29.918.500	629.875	944.800	31.493.175	Sarana / Prasarana Kesehatan	Pembangunan Gedung Posyandu
6	Sukarami		20.865.000	439.275	658.875	21.963.150	Sarana / Prasarana Kesehatan	- Sumur Gali
			32.596.500	686.250	1.029.350	34.312.100		- MCK
			35.408.500	745.475	1.118.175	37.272.150	Sarana / Prasarana	Pembangunan Gedung Posyandu
7	Penyombaan		26.247.750	552.575	828.875	27.629.200	Sarana / Prasarana	Pembangunan & Pengadaan Listrik Desa 20 KVA
			23.071.500	485.725	728.575	24.285.800	Sarana / Prasarana Kesehatan	MCK
TOTAL C :			475.000.000	10.000.000	15.000.000	500.000.000		
D.	Kotawaringin Lama							
1	Palih Baru		56.734.850	1.194.417	1.791.628	59.720.895	Pendidikan	- Penambahan Ruang Kelas MTS
2	Suka Jaya		30.172.750	635.216	952.824	31.760.790	Kesehatan	- Pembangunan Gedung Posyandu
			1.600.000	33.684	50.526	1.684.210		- Peralatan Posyandu
			37.844.000	796.715	1.195.074	39.835.789	Sarana / Prasarana	Gorong - Gorong Beton
3	Rungun		56.651.000	1.192.653	1.788.979	59.632.632	Sarana / Prasarana	Rehab Total Jembatan
			20.000.000	421.053	631.579	21.052.632	Simpan Pinjam Perempuan	Pembangunan Gedung Posyandu
4	Sagu Suka Mulya		62.688.600	1.319.761	1.979.640	65.988.001	Pendidikan	- Pembangunan Gedung TK
			7.250.000	152.632	228.947	7.631.579		- Perlengkapan TK
			10.000.000	210.526	315.789	10.526.315	Simpan Pinjam Perempuan	- Klp Miftahul Ulum
			11.000.000	231.579	347.368	11.578.947		- Klp Nurul Huda
5	Kotawaringin Hulu		33.273.300	700.491	1.050.736	35.024.527	Kesehatan	- Pembangunan Gedung Posyandu
			10.000.000	210.526	315.789	10.526.315	Simpan Pinjam Perempuan	- Klp Nurhayana
6	Babual Baboti		10.513.000	221.326	331.989	11.066.315	Sarana / Prasarana	- Pembangunan Jembatan Kayu
			4.695.000	98.842	148.264	4.942.106		- Tempat Cuci Umum
			14.000.000	294.737	442.105	14.736.842	Simpan Pinjam Perempuan	- Klp Kenangan
			16.000.000	336.842	505.263	16.842.105		- Klp Cempaka
7	Kondang		28.696.500	604.137	906.205	30.206.842	Sarana / Prasarana	- Sumur Gali
8	Kotawaringin Hilir		33.881.000	713.284	1.069.927	35.664.211	Kesehatan	- Pembangunan Gedung Posyandu
9	Riam Durian		20.000.000	421.053	631.579	21.052.632	Simpan Pinjam Perempuan	- Klp Al Hidayah
10	Tempayang		10.000.000	210.526	315.789	10.526.315	Simpan Pinjam Perempuan	- Klp Dawis
TOTAL D :			475.000.000	10.000.000	15.000.000	500.000.000		
TOTAL A + B + C + D			2.850.000.000	60.000.000	90.000.000	3.000.000.000		

BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antara yang dijalin oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan daerah lain selama tahun 2007 belum ada.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Kerjasama yang dijalin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pihak ketiga s/d tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. PT. Astra Agro Lestari Tbk (perkebunan kelapa sawit), melalui Nota Kesepakatan Bersama No. 188.45/26/Huk dan No. 049/HGC-CD/EXT/VIII/2006, dengan bidang kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat dengan pola kemitraan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan dana sebesar Rp. 42.401.200.000,-
2. PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya (PT. CAR), melalui MOU No. 170.174/153/500/2005 dan No. Dir/SPK/012/IX/2005 tanggal 30 September 2005. Bidang kerjasama adalah jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat beserta keluarganya. Jangka waktu kerjasama adalah selama 1 (satu) tahun dengan jumlah dana Rp. 250.000.000,-
3. PT. Meta Epsi Agro, PT. Bumitama Gunajaya Abadi dan PT. Sumber Rangit Jaya dengan kegiatan Pembangunan Pengelolaan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit dengan dasar Surat Keputusan Direksi Bank Internasional Indonesia No. 29/66/Kep/DIB tanggal 26 Juli 2006. Sumber dana adalah BII sebesar Rp. 81.000.000.000 dengan jangka waktu kerjasama mulai tahun 1996 s/d 2011.
4. PT. ASKES dalam bidang pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga kurang mampu dengan pendanaan yang langsung dikelola oleh PT. ASKES melalui sistem klaim.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

a. BIDANG KEAMANAN.

1. Forum Koordinasi yang dilakukan Pemerintah Daerah (Dinas KKM Kabupaten Kotawaringin Barat) dengan instansi vertikal di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah berkaitan dengan Bidang Intelegen (KOMINDA) dan kerjasama Bidang Keamanan.
2. Materi koordinasi meliputi :
 - ❖ Masalah yang berhubungan dengan isu yang berkembang / bergejolak dimasyarakat bernuansa konflik SARA, anarkhisme, separatisme dll.
 - ❖ Masalah-masalah yang berkaitan dengan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - ❖ Masalah yang berkaitan dengan gangguan pelaksanaan fungsi sosial masyarakat akibat terjadinya bencana dan pemberlakuan kebijakan Kepala Daerah.
 - ❖ Masalah-masalah yang berkaitan dengan penyakit masyarakat seperti (Minuman Keras, Penyalahgunaan Narkoba, Prostitusi, Gepeng dlsb).
3. Kebijakan dan kegiatan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan maksud agar ada pembagian peran, tugas dan tanggung-jawab serta untuk memudahkan didalam pengendalian, terutama menyangkut stabilitas keamanan wilayah kab. Ktw. Barat.
4. Instansi Vertikal yang dilibatkan / diajak koordinasi oleh Pemerintah daerah Kab. Ktw. Barat meliputi :
 - ❖ Kepolisian Resort Kotawaringin Barat.
 - ❖ Komando Distrik Militer 1014 PBn.
 - ❖ Pangkalan Udara Iskandar P. Bun.
 - ❖ Sub Detasemen Polisi Militer VI / 3-2.
 - ❖ Kompi B 631 / Antang.
 - ❖ Pos Daerah BIN Ktw. Barat.
 - ❖ Komimda.

5. Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan Koordinasi tersebut bersumber dari dana APBD Kabupaten Ktw. Barat tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 682.652.400,- (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).
6. SKPD sebagai penyelenggara Koordinasi adalah Dinas Kesatuan dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Pegawai Dinas KKM Kab. Ktw. Barat yang melaksanakan/menangani kegiatan Kerjasama koordinasi tersebut berjumlah 7 orang dengan Kualifikasi sbb :
 - 1 orang dengan Pangkat IV/b berpendidikan S.1.
 - 2 orang dengan Pangkat IV/a berpendidikan S.1.dan SLTA.
 - 2 orang dengan Pangkat III/c berpendidikan SLTA.
 - 1 orang dengan Pangkat III/a berpendidikan SLTA.
 - 1 orang dengan Pangkat II/c berpendidikan SLTA.
8. Kegiatan koordinasi dilaksanakan lebih kurang 12 kali dengan kegiatan sebagaimana angka (2) diatas.
9. Hasil Koordinasi adalah untuk mengetahui sedini mungkin terhadap perkembangan situasi dan kondisi daerah Kab. Ktw. Barat dari berbagai Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar daerah / Asing.
Sedangkan Manfaatnya adalah untuk mengambil langkah-langkah antisipasi guna merumuskan dan membuat keputusan bersama, agar ATHG tsb tidak membesar dan sesegera mungkin dapat ditangkal / ditiadakan .
10. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi :
 - o Adanya upaya mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban akibat terjadinya bencana banjir yang meluas dan meresahkan kehidupan masyarakat Kab. Ktw Barat yang tinggal di pinggiran DAS Arut dan Lamandau yang telah ditindak lanjuti dengan Penanganan oleh Pemerintah Daerah (lintas sektor).

- Adanya upaya tindak lanjut terhadap isu SARA yang sengaja dihembuskan oleh oknum / pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab, namun setelah ditelusuri ternyata hanya masalah kriminal biasa.
 - Adanya upaya tindak lanjut terhadap gangguan pengrusakan ekosistem lingkungan akibat beroperasinya Penambangan liar pasir zirkon (puya) dan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) oleh masyarakat di areal Kawasan Konservasi dan Daerah Aliran Sungai Arut dalam bentuk Razia / Penertiban oleh Tim / aparat Keamanan.
11. Hal-hal lain yang akhir-akhir ini cukup meresahkan adalah muncul dan berkembangnya kasus-kasus klaim / sengketa tanah warga berkaitan dengan Pengembangan lahan perkebunan untuk kepentingan perusahaan.

b. PERTANAHAN.

1. Forum Koordinasi

Forum Koordinasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah berkaitan dengan Bidang Pertanian.

2. Materi koordinasi meliputi :

- ◆ Melaksanakan Survei pengukuran pendataan bidang tanah, penggunaan, penguasaan dan tanah
- ◆ Melaksanakan Penyuluhan hukum pertanahan kepada masyarakat.
- ◆ Menyelesaikan tunggakan dan masalah perkara sengketa dan konflik pertanahan.
- ◆ Melaksanakan pemetaan Desa/ Kelurahan secara lengkap.
- ◆ Mengusulkan pengisian jabatan struktural (eselon IV&V) yang kosong

3. Instansi Vertikal yang terlibat

Instansi Vertikal yang dilibatkan dalam penanganan masalah pertanahan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai unsur teknis Vertikal yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta Agenda Kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan 11 (sebelas) agenda prioritas demi terwujudnya catur tertib pertanahan .

4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan.

a. Belanja Tidak Langsung.

Berdasarkan penetapan DIPA Tahun Anggaran 2007 Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh alokasi anggaran belanja tidak langsung yang hanya diperuntukkan bagi Gaji Pegawai sebesar Rp. 1.044.600.000 dan sampai akhir bulan Desember 2007 telah direalisasikan (dibelanjakan) sebesar Rp. 1.167.883.600. dengan sisa (saldo) sebesar : - Rp.123.661.600 ,-

b. Belanja Langsung.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 99 % dengan rincian pada tabel 5.b.4.1. sebagai berikut :

Tabel 5.b.4.1.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran X Rp 1000	Realisasi		Selisih Anggaran X Rp 1000	
			Fisik	Keuangan		
			(%)	(X Rp 1000.) (%)		
1.	Belanja Pegawai	1.044.252.	13 Bl	1.167.883,6	110	123.631,6
	- Gaji Pokok Pegawai		13 bl	812.926.4		
	- Tunjangan Pegawai & Pembulatan		13 bl	354.957.2		
2.	Belanja Barang Jasa & Modal	116.214.	12 Bl	116.200.	99	14.000
	- Belanja Operasional Kantor	76.214.	12 Bl	76.214	100	0
	- Belanja Modal	40.500.	12 bl	40.500	100	0
3.	Perawatan Sarana & Prasarana	40.769.	12 bl	40.769	100	0
	- Sarana dan Prasarana	33.569.	12 Bl	33.569	100	0
	- Gedung dan Kantor	7.200.	12 Bl	7.200	100	0
4.	Penyelenggaraan Operasional	44.660.	12 bl	44.660	100	0
	- Ketatausahaan	11.000.	12 Bl	11.000	100	0
	- Pelaksanaan Tupoksi	43.660.	12 Bl	43.660.	100	0

5. Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat

Susunan dan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seperti pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2006 Pasal 32 sampai dengan Pasal 55, seperti berikut ini :

Struktur Organisasi Kantor Pertanahan terdiri dari :

1. Kepala Kantor .
2. Sub Bagian Tata Usaha membawahi ;
 - Urusan Perencanaan dan Keuangan.
 - Urusan Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan membawahi;
 - Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
 - Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah.

4. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membawahi;
 - Sub Seksi Penetapan Hak.
 - Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah.
 - Sub Seksi Pendaftaran Tanah.
 - Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak & Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan membawahi;
 - Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu.
 - Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah.
6. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan membawahi;
 - Sub Seksi Pengendalian Pertanahan.
 - Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
7. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara membawahi;
 - Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan.
 - Ka.Sub.Seksi Perkara Pertanahan.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

a. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.

Jumlah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 5.b.6.1 sebagai berikut :

Tabel. 5.b.6.1.
Pegawai Menurut Pendidikan.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1	S2	1	1	-	-	1
2	S1	17	17	-	-	17
3	Sarjana Muda/Diploma	7	7	-	1	6
4	SLTA	17	17	-	-	17
5	SLTP	2	2	-	-	2
6	SD	-	-	-	-	-
	Jumlah	44	44	-	1	43

b. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

Jumlah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada tabel 5.b.2 sebagai berikut :

Tabel. 5.b.2.
Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Pengatur Muda (II/a)	4	4	-	-	4
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	5	5	-	-	5
	Pengatur (II/c)	2	2	-	-	2
	Pengatur Tingkat I (II/d)	2	2	-	-	2
	Jumlah Gol II	13	13			13
2.	Penata Muda (III/a)	3	3	-	-	3
	Penata Muda Tkt. I (III/b)	14	14	-	-	14
	Penata (III/c)	7	7	-	-	7
	Penata Tingkat I (III/d)	6	6	-	1	5
	Jumlah Gol III	30	30		1	29
4.	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	-
	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	1	-	-	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-
	Jumlah Gol IV	1	1	-	-	1

7. Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan

Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan program/kegiatan dan sasaran kegiatan, dengan penjelasan rincian sebagai berikut :

Program / Kegiatan.

- ◆ Melaksanakan Survei pengukuran pendataan bidang tanah, penggunaan, penguasaan dan tanah
- ◆ Melaksanakan Penyuluhan hukum pertanahan kepada masyarakat.
- ◆ Menyelesaikan tunggakan dan masalah perkara sengketa dan konflik pertanahan.
- ◆ Melaksanakan pemetaan Desa/ Kelurahan secara lengkap.
- ◆ Mengusulkan pengisian jabatan struktural (eselon IV&V) yang kosong

Sasaran Kegiatan.

1. Sertifikasi Massal
 Prona = 650 Bid, PHDT = 937 Bid, SMS = 200 Bid, Tanah Pemerintah = 32
2. Pelayanan Rutin
 - ~ Pemeriksaan 370
 - ~ Pengukuran 642
 - ~ Pendaftaran 370
 - ~ Pemeliharaan data = 2.687
 - ~ Informasi Pertanahan = 1.458
3. Penyuluhan Hukum di 6 Kecamatan
4. Tunggakan P 4 T = 700 Bid.
5. Penyelesaian Perkara = 2 Kasus dan Konflik = 2 Kasus

8. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

- ≈ Peningkatan Penretahuan dan Ketrampilan Pegawai melalui pedidikan Formal atau Pendidikan dan Latihan Lainnya
- ≈ Peningkatan dan Penambahan sumber daya manusia serta peralatan Tehnis dan prasarana lainnya untuk menunjang Sistim Informasi Geografis
- ≈ Penigkatan pelayanan dibidang pertanahan secara transparan dan terbuka baik pebiayaan, waktu dan porsedur.
- ≈ Peningkatan penanganan masalah konflik pertanahan yang berkembang di tengah- tengah masyarakat.
- ≈ Peningkatan pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dibidang pertanahan baik langsung maupun tidak langsung
- ≈ Pengembangan dan penigkatan pelayanan pertanahan khususnya dalam rangka pendaftaran tanah secara sistimatis sehingga akan mempercepat proses sertifikasi tanah.

c. STATISTIK.**1. Forum Koordinasi**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kerjasama statistik dengan instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Pembangunan statistik merupakan salah satu usaha untuk mencapai sasaran pembangunan nasional jangka panjang dalam kebijaksanaan pembangunan statistik diarahkan guna pemenuhan data statistik bagi kepentingan pemerintah, swasta sebagai kajian dan penelaahan hasil pembangunan yang telah dicapai yang selanjutnya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pembangunan dimasa depan sehingga sasarannya lebih tepat dan akurat.

Forum Koordinasi yang dilaksanakan adalah untuk melakukan penyusunan data statistik dalam berbagai bidang antara lain : ekonomi, sosial, kependudukan, pendidikan, pemerintahan dan lain sebagainya.

2. Materi koordinasi meliputi :

Materi Koordinasi yang dilaksanakan berupa Penyusunan dan penerbitan buku Publikasi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam tahun anggaran 2007 terdiri dari :

1. Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2006
2. Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006
4. Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006
5. Potensi Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006

3. Instansi Vertikal yang terlibat

Instansi Vertikal yang dilibatkan / diajak koordinasi oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Kotawaringin Barat dalam penanganan kegiatan tersebut

4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan.

Sumber dana / pembiayaan penyusunan Publikasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terdapat pada Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 68.100.000,- (Enampuluh delapan Juta Seratus Ribu Rupiah).

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah kerjasama antara Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Pegawai yang menangani kegiatan tersebut adalah Pegawai Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Susunan Organisasi kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinator Kegiatan : Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Penanggung Jawab Lapangan : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten

Kotawaringin Barat

3. Pelaksana Lapangan : Badan Pusat Statistik Kab. Kotawaringin Barat

3.1 Petugas Lapangan (pengumpul data)

- a. Kab. Kobar Dalam Angka 2006 : BPS Kobar 15 (lima belas) orang
- b. Penduduk Kab. Ktw. Barat Th 2006: BPS Kobar 10 (sepuluh) orang
- c. Produk Domestik Regional Bruto : BPS Kobar 10 (sepuluh) orang
(PDRB) Kab. Ktw. Barat Th 2006
- d. Distribusi Pendapatan Penduduk : BPS Kobar 10 (sepuluh) orang
Kotawaringin Barat tahun 2006
- e. Potensi Desa Ktw. Barat Th 2006 : BPS Kobar 10 (sepuluh) orang

3.2 Petugas Pengolah Data, yaitu Pemeriksa/editing, *Entry* data & tabulasi

- a. Kab. Kobar Dalam Angka 2006 : BPS Kobar 10 (sepuluh) orang
- b. Penduduk Kab. Ktw. Barat Th 2006: BPS Kobar 10 (sepuluh) orang
- c. Produk Domestik Regional Bruto : BPS Kobar 10 (sepuluh) orang
(PDRB) Kab. Ktw. Barat Th 2006
- d. Distribusi Pendapatan Penduduk : BPS Kobar 10 (sepuluh) orang
Kotawaringin Barat tahun 2006
- e. Potensi Desa Ktw. Barat Th 2006 : BPS Kobar 10 (sepuluh) orang

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan.

Kegiatan yang dilaksanakan berjumlah 5 (lima) kegiatan dengan Jenis kegiatan penyusunan Publikasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

- a. Penyusunan draft awal kuesioner dan rencana tabulasi, naskah publikasi.
- b. Pengumpulan data di lapangan / survey.
- c. Pengolahan hasil data / survei yaitu : pemeriksaan daftar isian, editing, entri data, tabulasi dan naskah publikasi.

- d. Pencetakan buku publikasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2007 yang terdiri dari:
- 1). Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka tahun 2006
 - 2). Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2006
 - 3). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Ktw. Barat tahun 2006
 - 4). Distribusi Pendapatan Penduduk Kab. Kotawaringin Barat tahun 2006
 - 5). Potensi Desa Kab. Kotawaringin Barat tahun 2006

8. Hasil Dan Manfaat Koordinasi

Hasil dan Manfaat dari Koordinasi / Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang berada Kabupaten Kotawaringin Barat adalah dapat membantu menyelesaikan kegiatan terutama dalam penyediaan data statistik Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap bidang : ekonomi, sosial, kependudukan, pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pemerintahan dan lain sebagainya.

9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Tindak lanjut dari hasil Kerjasama antara Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam peyiapan data statistik Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2006, dapat dipakai dan dipergunakan oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi terhadap pembangunan daerah khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat dan umumnya Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Buku Publikasi Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2006 dengan tujuan dan sasaran untuk dapat memberikan gambaran / informasi dari hasil yang telah dicapai dalam tahun 2006 dari berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Buku Publikasi Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 hasil survey penduduk yang dikumpulkan oleh petugas statistik dengan sasaran 6 kecamatan 83 desa, dengan tujuan dan sasaran :
 - a. Sebagai data / informasi Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan data akhir Desember 2006 merupakan data *up to date*, benar dan terpercaya merupakan suatu input menuju tercapainya suatu sistim perencanaan yang terarah dan sistimatis dalam penyebaran penduduk, ekonomi, pendidikan, pemerintahan dan lainnya pada masyarakat kota dan pedesaan.
 - b. Memudahkan bagi semua pihak, baik aparat pemerintah, swasta untuk memberikan bimbingan baik terhadap pemerintah / masyarakat perkotaan maupun pedesaan, untuk secara bersama-sama mengarahkan kehidupan yang dinamis dan seimbang antara kehidupan di kota maupun di pedesaan, dengan demikian pemerataan pembangunan cepat terwujud.
 - c. Mengembangkan sistim perstatistikan yang lebih lengkap guna memudahkan pelayanan kepada pemerintah, masyarakat khususnya data kependudukan, merupakan modal dasar pembangunan dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 yang kita cita-citakan.
3. Buku Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006.

Tujuan dan sasarannya adalah untuk menggali, mengumpulkan data statistik Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2006 yang disusun dalam bentuk buku publikasi yang merupakan hasil Survei Khusus Pendapatan Regional Kotawaringin Barat Tahun 2006 anggaran tahun 2007 yang akhirnya dapat dipakai dan dipergunakan oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi terhadap pembangunan bidang ekonomi antara lain :

- a. Pertumbuhan Ekonomi
- b. Pendapatan Perkapita
- c. Perkembangan PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita
- d. Perkembangan PDRB menurut lapangan usaha / sektor ekonomi.

4. Buku Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2006, merupakan hasil pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik secara sampel pada rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mendapatkan data / informasi tentang besarnya pendapatan penduduk dan tingkat pemerataannya, baik dibedakan menurut golongan pendapatannya, daerah perkotaan dan daerah pedesaan maupun menurut jenis kelamin dan pendidikan pada tahun 2006 dng tujuan dan sasaran sebagai berikut :
 - a. Apakah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat yang selama ini cukup tinggi, dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Beberapa pengamat ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali dibarengi kenaikan atau membesarnya tingkat ketimpangan pendapatan (semakin tidak merata). Sedangkan para pakar pembangunan juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat bukan saja membawa ketimpangan pendapatan yang tinggi akan juga menimbulkan kemiskinan penduduk tingkat bawah.
 - b. Untuk mengukur distribusi pendapatan penduduk serta tingkat ketimpangan pendapatan penduduk dengan ukuran/kriteria Bank Dunia. Proses pembangunan sering diikuti oleh distribusi pendapatan yang tidak merata dan meningkatnya jumlah pengangguran. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan, lebih besar bagi suatu wilayah yang pembangunannya dari tingkat keterbelakangan yang rendah. Semakin rendah tingkat keterbelakangan ini semakin besar kemungkinan bahwa proses pembangunan akan menimbulkan ketimpangan pembagian pendapatan yang lebih besar.

5. Publikasi Potensi Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 yang berisi berbagai data yang dirinci sampai ke tingkat desa, dengan tujuan sasaran yaitu :
 - a. Untuk dapat digunakan sebagai informasi tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum menurut desa.
 - b. Untuk mendapatkan gambaran adanya desa tertinggal.
 - c. Untuk menentukan desa kota / pedesaan bagi perencanaan lokasi dan jenis investasi usaha tingkat desa.

D. Pembinaan Batas Wilayah

Sejalan dengan penyebaran penduduk, pemekaran wilayah desa dan kecamatan serta pertumbuhan investasi di bidang perkebunan yang sangat besar di Kabupaten Kotawaringin Barat, membawa konsekuensi terhadap munculnya konplik yang menyangkut masalah perbatasan, baik antar desa/kelurahan, kecamatan dan antar Kabupaten.

Penanganan sengketa batas wilayah antar desa dan kelurahan terakhir mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Antar Desa, sedangkan penanganan masalah perbatasan antar daerah terakhir mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai kondisi geografisnya berbatasan dengan 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Seruyan. Hasil kesepakatan batas sementara yang telah dicapai dengan ketiga kabupaten tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Tata Batas Wilayah Dengan	Jenis Kesepakatan	Yang Menetapkan	No. Surat Penetapan / Lampiran
1	Kab. Seruyan	BA.Kesepakatan Bersama	Tim Tata Batas Kobar – Seruyan	- No.- tgl 9 Okt 2004 - No.- tgl 10 Sept 2006
		Peta Acuan Batas Kobar – Seruyan	Tim Tata Batas Provinsi	-
		Nota Kesepakatan	Bupati Kobar, Seruyan, Lamandau dan Sukamara	Tanpa No. tanggal 5 Juli 2007 di Palangka raya
		Penegasan Gubernur	Gubernur Kalteng	130/1838/Tapra, tgl 1 Desember 2007
2.	Kab. Lamandau	Penetapan Peta Batas Sementara	Bupati Lamandau, Sukamara dan Ktw. Barat	BA Tgl 18 Pebruari 2006 dan Nota Kesepahaman tgl 28 Sept 2006
3.	Kab. Sukamara	Penetapan Peta Batas Sementara	Bupati Lamandau, Sukamara dan Ktw. Barat	BA Tgl 18 Pebruari 2006 dan Nota Kesepahaman tgl 28 Sept 2006

Selanjutnya kesepatan yang telah dicapai tersebut masih perlu ditindaklanjuti dalam beberapa tahapan hingga pada dituangkan kedalam peta batas definitiv dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini difasilitasi oleh Gubernur Kalteng.

Satuan kerja perangkat daerah yang penyelenggara pembinaan batas wilayah di Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini masih melekat di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Secara khusus kendala yang dihadapi untuk penyelesaian masalah tata batas terletak pada sumber daya manusia yang terbatas menyangkut bidang-bidang teknis dalam hal penetapan dan penegasan batas wilayah baik antar desa, kecamatan maupun antar kabupaten.

E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana yang terjadi di Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2007 berupa bencana Kebakaran Hutan dan lahan (awal tahun 2007) dan Bencana Banjir (mulai Bulan April s/ d November 2007).

Langkah-langkah pencegahan / penanggulangan yang telah dilakukan yaitu :

- o Untuk Kebakaran Hutan / Lahan telah disepakati Pengaturan / larangan Pembukaan lahan dengan cara membakar sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Palangka Raya th. 2006.

Pengerahan Tim Serbu api oleh Pemerintah daerah yang melibatkan berbagai lintas instansi Terkait dan masyarakat.

- o Untuk Penanganan masalah banjir telah dilaksanakan Pendataan Korban dan pemberian bantuan bahan makanan (berupa beras dan jmie instan) kepada para Kepala Keluarga yang rumahnya jadi korban terendam air /bermukim dipinggir sungai (Kec. Arsel dan Kotawaringin Lama).

2. Status Bencana yang terjadi di kabupaten Kotawaringin Barat termasuk Klasifikasikan Bencana Lokal.
3. Sumber dan jumlah anggaran SKPD yang dialokasikan sebesar Rp. 50.496.000,-

4. Antisipasi Daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana th 2007 dalam bentuk Pemantauan dan penyebarluasan informasi tentang Bencana kepada Masyarakat melalui Penyuluhan Kewaspadaan Terhadap Gangguan Bencana yang pelaksanaannya tersebar pada wilayah Desa di (enam) Kecamatan se Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. SKPD yang menangani masalah Bencana berdasarkan Perda No. 25 tahun 2000 tentang kelembagaan, sturktur Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Ktw. Barat adalah Dinas Kesatuan dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan yang membidangi urusan Bencana pada Dinas KKM Kab. Ktw. Barat berjumlah 5 (Lima) orang yaitu
 - 1 orang berpendidikan S.1 dengan pangkat Pembina (IV/a).
 - 1 orang berpendidikan SLTA dengan pangkat Penata Tk. I (III/d).
 - 1 orang berpendidikan SLTA dengan pangkat Penata Muda Tk.I (III/b).
 - 1 orang berpendidikan S.1 dengan pangkat Penata Muda (III/a).
 - 1 orang berpendidikan SLTA dengan pangkat Pengatur (II/c).
7. Kelembagaan Khusus yang dibentuk untuk menangani Bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) dan utk pelaksana harian dilaksanakan oleh Dinas Kesatuan dan ketentraman Masyarakat melalui Sub Dinas Penanggulangan Bencana Dinas KKM Kab. Ktw. Barat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 25 tahun 2000.

F. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang terjadi :
 - Selama tahun 2007 tidak ada gangguan / konflik bernuansa SARA, Anarkhisme, separatisme di wilayah Kabupaten Kotawarignin Barat, yang

ada hanyalah isu yang sengaja dihembuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (isu Pemengggalan Kepala / Kayau) yang informasinya berawal dari kasus di Daerah Barito dan ternyata telah terungkap sebagai kasus kriminal murni.

- Adanya Unjuk Rasa / demo oleh sebagian warga masyarakat Kec. Kumai dan Pangkalan Banteng terkait masalah Penguasaan lahan perkebunan oleh PT. Wana Sawil Subur Iestrari (WSSL) di wialyah Sekonyer dan sebagian areal Taman Nasional Tanjung puting(TNTP) yang dipergunakan warga untuk usaha Penambangan Pasir zirkon (Puya) dengan tuntutan pembebasan Pekerja tambang yang ditahan oleh Polres Kobar.

2. SKPD yang menangani kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Dinas KKM Kab. Ktw. Barat dan Satpol PP.
3. Pegawai Dinas KKM Kab. Ktw. Barat yang dilibatkan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebanyak 6 (enam) orang dengan kualifikasi sbb :

No.	Nama	Pendidikan	Pangkat/Gol.Ruang
1.	Latip, SH.	S.1 (Hukum)	Pembina Tk. I (IV/b)
2.	Ganepodinur, SH.	S.1 (Hukum)	Pembina (IV/a)
3.	H. Syamsul E, S.Ip.	S.1 (Sospol).	Penata (III/d).
4.	Damanhuri	SLTA	Penata (III/c).
5.	Gusti Madin	SLTA	Penata (III/a).
6.	Sugriwo	SLTA	Penata (III/a).

4. Penanggulangan / penanganan dalam rangka kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah dibentuknya berbagai Tim yang ditetapkan dengan SK. Bupati Kotawaringin Barat yaitu sbb :

- a. Tim Operasi dan pemeliharaan Kantramtibmas dan pengawasan PEKAT.
- b. Tim Operasi / Pendatan PKL dan IMB.
- c. Tim Penertiban Gepeng, Petasan/Mercon dan prostitusi.
- d. Tim Operasi Pemberantasan Prostitusi dalam rangka Penutupan Lokalisasi / Kompleks Kalimati.

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan :

- Kekurangan personil yang duduk dalam jabatan struktural pada Dinas KKM Kab. Kobar.
 - Masalah Mekanisme administrasi keuangan sejak diberlakukannya Permendagri No. 13 Th 2006.
5. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban umum, yaitu dengan dilibatkannya unsur-unsur :
 - Polres Kobar.
 - Kodim 1014 PBn.
 - Lanud Iskandar
 - Sub Denpom Vi / 3-2.
 - Kompi B / 631 Antang.
 6. Anggaran yang digunakan adalah melalui Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak kriminal yang bersumber dari APBD kab. Ktw. Barat pada SKPD Dinas KKM Kab. Ktw. Barat sebesar Rp. 682.652.400,-00 (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) yang merupakan bentuk Peningkatan Kerjasama Keamanan dengan Instansi Vertikal di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB VI P E N U T U P

Demikian laporan ini dibuat dan disampaikan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Selain berfungsi sebagai pertanggungjawaban administrative, laporan ini juga diharapkan menjadi Tolok Ukur Penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pemberi mandat.